

# INDIKATOR PENDIDIKAN INKLUSIF

**Penulis:**

**Dr. IMAM YUWONO, M.Pd**

**Kata pengantar:**

**Prof.Dr.H.Wahyu, Ms**



# INDIKATOR PENDIDIKAN INKLUSIF

**Penulis :** Dr. Imam Yuwono, M.Pd

**Kata pengantar :** Prof.Dr.H.Wahyu, Ms

Diterbitkan Oleh:



Jl. Taman Pondok Jati J3, Taman Sidoarjo

Telp/fax : 031-7871090

Email:zifatama@gmail.com

Diterbitkan Pertama kali oleh Zifatama Publisher,

Anggota IKPI NO. 149/JTI/2014

Ukuran buku 15,5 cm x 23 cm, halaman 311

Layout : Wisnu Anggara

Desainer Cover : Wisnu Anggara

ISBN:

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindah sebagian atau seluruh isi buku dalam bentuk apapun, secara elektronik maupun mekanis, termasuk fotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya, tanpa izin tertulis dari penerbit. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Hak Cipta, Bab XII Ketentuan Pidana, Pasal 72, Ayat (1),(2), dan (6)

## KATA PENGANTAR

Perspektif pendidikan inklusif yang ditandai dengan perubahan sistem dimana “anak agar menyesuaikan dengan sistem sekolah” menjadi “sekolah menyesuaikan dengan kondisi anak.” Atau dengan kata lain “ *adapting the system, not the children*”. Tanpa ada perubahan ini pendidikan inklusif tidak akan tercapai, karena ada penghalang akses anak ke pendidikan.

Menurut pernyataan Salamanca bahwa: (1) Setiap anak memiliki hak dasar atas pendidikan, dan harus diberi kesempatan untuk mencapai dan mempertahankan tingkat yang dapat diterima pembelajaran (2) Setiap anak memiliki karakteristik yang unik, minat, kemampuan, dan kebutuhan pembelajaran (3) Sistem pendidikan harus dirancang dan program pendidikan dilaksanakan dengan memperhatikan keanekaragaman karakteristik dan kebutuhan tersebut. (4) Mereka yang memiliki kebutuhan pendidikan khusus harus memiliki akses ke sekolah reguler, yang seharusnya mengakomodasi mereka dalam rangka pedagogi yang berpusat pada anak mampu memenuhi kebutuhan tersebut. (5) Sekolah reguler dengan orientasi inklusif ini merupakan cara yang paling efektif untuk memerangi sikap diskriminasi, menciptakan masyarakat yang ramah, membangun masyarakat yang inklusif dan mencapai pendidikan untuk semua;

Implementasi pendidikan inklusif menuntut terpenuhinya berbagai persyaratan, antara lain segi regulasi, sarana

prasarana, sumber daya manusia, kurikulum, manajemen pembelajaran, system penilaian yang fleksibel dan sebagainya. Maka dari itu tepat buku ini disusun, untuk memperluas referensi para pemerhati pendidikan inklusif khususnya dan pengembangan dunia pendidikan pada umumnya. Semoga buku ini bisa bermanfaat bagi banyak pihak.Amiiiiin.

Banjarmasin, Juli 2017

**Prof. Dr. H. Wahyu, MS.**

# DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>iii</b>
<b>Daftar isi.....</b>	<b>v</b>
<b>Bagian 1 Konsep Pendidikan Inklusif .....</b>	<b>1</b>
1. Definisi Pendidikan Inklusif.....	1
2. sejarah singkat pendidikan inklusif di indonesia.....	5
3. tujuan pendidikan inklusif.....	7
4. pengelolaan kelas dalam setting menuju pendidikan inklusif.....	11
5. pusat sumber sebagai sistem pendukung (support System) .....	18
<b>Bagian 2 Unsur Konteks Pendidikan Inklusif .....</b>	<b>21</b>
1. tujuan pendidikan inklusif.....	21
2. analisis kebutuhan.....	30
3. Studi Kelayakan pada Sekolah Dasar Penyelenggara Pendidikan Inklusif di Banjarmasin .....	35
<b>Bagian 3 Model Evaluasi Yang Dipilih.....</b>	<b>47</b>
<b>Bagian 4 Masukan (Input) Pendidikan Inklusif.....</b>	<b>51</b>
1. Rekrutmen siswa berkebutuhan khusus .....	51
2. Kondisi Sosial Ekonomi Orangtua Siswa berkebutuhan khusus di sekolah reguler.....	66
3. Persyaratan Administratif Guru Inklusif.....	74
4. Kurikulum Pendidikan Inklusif .....	85
5. Sarana dan Prasarana Belajar Program Inklusif .....	105

6. Pembiayaan Program.....	112
----------------------------	-----

## **Bagian 5 Proses (Process) Pendidikan**

### **Inklusif..... 119**

1. Kompetensi Guru Inklusif ..... 119
2. Minat Guru mengajar di kelas Inklusif..... 128
3. Proses Pembelajaran di kelas Inklusif ..... 137

## **Bagian 6 Produk (Product) Pendidikan Inklusif ..... 151**

1. Hasil Ujian Nasional..... 151
2. Sikap Sosial ..... 156

## **Bagian 7 Luaran (Outcome) Pendidikan Inklusif..... 179**

## **Bagian 8 Evaluasi Program Pendidikan Inklusif ..... 185**

1. Pengertian Evaluasi Program ..... 185
2. Model-Model Evaluasi Program ..... 188

## **Bagian 9 Analisis Hasil Penelitian Evaluasi**

### **Program Pendidikan Inklusif Di Sd Banua Anyar 8.. 219**

## **Bagian 10 Analisis Hasil Penelitian Evaluasi**

### **Program Pendidikan Inklusif Di Sd Gadang 2..... 227**

## **Bagian 11 Analisis Hasil Penelitian Evaluasi**

### **Program Pendidikan Inklusif Di Sd Banua Anyar 4.. 235**

## **Bagian 12 Analisis Hasil Penelitian Evaluasi**

### **Program Pendidikan Inklusif Di Sd Kuin Selatan 3 .. 241**

<b>Bagian 13 Analisis Data Hasil Evaluasi Program Pendidikan Inklusif Di Empat Sekolah (Gabungan) Sebagai Upaya Triangulasi .....</b>	<b>247</b>
1. Masukan (input) .....	274
2. Proses .....	283
3. Produk.....	290
4. Luaran (Outcome).....	293
<b>Bagian 14 Pemetaan Hasil Evaluasi Program Pendidikan Inklusif .....</b>	<b>295</b>
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>299</b>





# BAGIAN 1

## KONSEP PENDIDIKAN INKLUSIF

### 1. Definisi Pendidikan Inklusif

Definisi pendidikan inklusif seperti yang diadopsi oleh 92 pemerintah dan 25 organisasi internasional pada Konferensi Dunia tentang Pendidikan Kebutuhan Khusus: Akses dan Kualitas, yang diselenggarakan di Salamanca, Spanyol, pada tahun 1994: Pendidikan inklusif didasarkan pada hak semua peserta didik untuk pendidikan berkualitas yang memenuhi kebutuhan dasar pembelajaran dan memperkaya kehidupan. Fokus terutama pada kelompok rentan dan terpinggirkan, berusaha untuk mengembangkan potensi penuh dari setiap individu. Tujuan utama dari pendidikan inklusif adalah untuk mengakhiri semua bentuk diskriminasi dan mendorong kohesi sosial. Pernyataan Salamanca melampaui pandangan yang masih umum, yang menghubungkan inklusi hanya untuk partisipasi dan belajar anak-anak penyandang cacat, dengan menegaskan kembali hak mendasar untuk pendidikan bagi setiap anak, dan menekankan karakteristik unik, minat, kemampuan, dan kebutuhan belajar mereka (Booth & Dyssegaard 2008). Hal ini sejalan dengan strategi membangun masyarakat inklusif yang semua individu dapat berpartisipasi dan berkontribusi untuk, dengan perbedaan individu dan keragaman yang dinilai.

Pendidikan inklusif merupakan idiologi atau cita-cita yang ingin kita raih. sebagai konsekuensi dari pandangan bahwa pendidikan inklusif itu sebagai idiologi dan cita-cita, dan bukan sebagai model, maka akan terjadi keragaman dalam implementasinya, antara negara yang satu dengan yang lainnya, antara daerah yang satu dengan yang lainnya atau bahkan antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lainnya.

Menurut Skjorten pendidikan inklusif adalah konsep pendidikan yang merangkul semua anak tanpa kecuali, Inklusi berasumsi bahwa hidup dan belajar bersama adalah suatu cara yang lebih baik, yang dapat memberikan keuntungan bagi setiap orang, bukan hanya anak-anak yang diberi label sebagai yang memiliki suatu perbedaan.<sup>1</sup> Pendidikan inklusif melibatkan perubahan dan modifikasi isi, pendekatan, struktur dan strategi, dengan suatu visi bersama yang meliputi semua anak yang berada pada rentangan usia yang sama dan suatu keyakinan bahwa inklusi adalah tanggung jawab sistem regular yang mendidik semua. Pendidikan inklusif berkenaan dengan aktivitas memberikan respon yang sesuai kepada spektrum yang luas dari kebutuhan belajar baik dalam setting pendidikan formal maupun nonformal. Pendidikan inklusif merupakan pendekatan yang memperhatikan bagaimana mentransformasikan sistem pendidikan sehingga mampu merespon keragaman siswa. Pendidikan inklusif bertujuan dapat memungkinkan guru dan siswa untuk merasa nyaman

---

1 Skjorten, *Menuju Inklusi Pendidikan Kebutuhan Khusus Sebuah Pengantar* (Bandung: Program Pascasarjana UPI, 2003), h. 117.

dengan keragaman dan melihatnya sebagai suatu tantangan dan pengayaan dalam lingkungan belajar, dari pada suatu problem. Befring, Edward, dalam Mudjito menjelaskan nilai penting yang melandasi suatu sekolah inklusif adalah penerimaan, pemilikan, dan asumsi lain yang mendasari sekolah inklusif adalah, bahwa mengajar yang baik adalah mengajar yang penuh gairah, yang mendorong agar setiap anak dapat belajar, memberikan lingkungan yang sesuai, dorongan, dan aktivitas yang bermakna.<sup>2</sup> Sekolah inklusif mendasarkan kurikulum dan aktivitas belajar harian pada sesuatu yang dikenal dengan mengajar dan belajar yang baik. Akhirnya dapat dirumuskan bahwa pendidikan inklusif adalah proses pendidikan yang memungkinkan semua anak berkesempatan untuk berpartisipasi secara penuh dalam kegiatan kelas reguler, tanpa memandang kelainan, ras, atau karakteristik lainnya. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya (Permendiknas No 70 tahun 2011 tentang pendidikan inklusif, Pasal 1).

Menurut beberapa ahli, pendidikan inklusif dimaknai sebagai sistem layanan pendidikan yang mensyaratkan anak berkebutuhan khusus belajar di sekolah-sekolah terdekat di

---

2 Befring, Edward "Special educational Approach to an Inclusive School" dalam Mudjito, *Masyarakat Inklusif* (Jakarta: Direktorat PKLK, 2010), h. 76.

kelas biasa bersama teman-teman seusianya (Sapon-Shevin dalam O'Neil, 1994) Sekolah inklusif adalah sekolah yang menampung semua murid di kelas yang sama. Sekolah ini menyediakan program pendidikan yang layak, menantang, tetapi disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan setiap murid maupun bantuan dan dukungan yang dapat diberikan oleh para guru, agar anak-anak berhasil (Stainback,1980).

Berdasarkan batasan tersebut pendidikan inklusif dimaksudkan sebagai sistem layanan pendidikan yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak sebayanya di sekolah reguler yang terdekat dengan tempat tinggalnya, dan sekolah tersebut menyediakan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan khusus masing-masing anak. Semangat penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah memberikan kesempatan atau akses yang seluas-luasnya kepada semua anak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan kebutuhan individu peserta didik tanpa diskriminasi. Penyelenggaraan pendidikan inklusif menuntut pihak sekolah melakukan penyesuaian baik dari segi kurikulum, sarana parasarana pendidikan, maupun sistem pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu peserta didik, agar potensi semua peserta didik dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, dengan melibatkan secara aktif berbagai lembaga terkait dan tenaga profesional.

## 2. Sejarah Singkat Pendidikan Inklusif Di Indonesia

Proses menuju pendidikan inklusif bagi anak luar biasa di Indonesia hakekatnya sudah berlangsung lama, yaitu sejak tahun 1960-an yang ditandai dengan berhasil diterimanya beberapa lulusan SLB Tunanetra di Bandung masuk ke sekolah umum, meskipun ada upaya penolakan dari pihak sekolah. Lambat-laun terjadi perubahan sikap masyarakat terhadap kecacatan dan beberapa sekolah umum bersedia menerima siswa tunanetra.

Selanjutnya, pada akhir tahun 1970-an pemerintah mulai menaruh perhatian terhadap pentingnya pendidikan integrasi, dan mengundang Helen Keller International, Inc. untuk membantu mengembangkan sekolah integrasi. Keberhasilan proyek ini telah menyebabkan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Pendidikan nomor 002/U/1986 tentang Pendidikan Terpadu bagi Anak Cacat. Sayangnya, ketika proyek pendidikan integrasi itu berakhir, implementasi pendidikan integrasi semakin kurang dipraktekkan, terutama di jenjang SD. Pada akhir tahun 1990-an upaya baru dilakukan lagi untuk mengembangkan pendidikan inklusif melalui proyek kerjasama antara Depdiknas dan pemerintah Norwegia di bawah manajemen Braillo Norway dan Direktorat PLB (Tarsidi, 2007).

Sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mengimplmentasikan pendidikan inklusif bagi penyandang cacar, pada tahun 2002 pemerintah secara resmi mulai melakukan proyek ujicoba di di berbagai 9 propinsi yang

memiliki pusat sumber dan sejak saat itu lebih dari 1500 siswa berkelainan telah bersekolah di sekolah reguler, dan pada tahun 2005 meningkat menjadi 6.000 siswa atau 5,11% dari seluruh jumlah anak berkebutuhan khusus. Sedangkan pada tahun 2007 meningkat menjadi 7,5% atau 15.181 siswa yang tersebar pada 796 sekolah inklusif yang terdiri dari 17 TK, 648 SD, 75 SLTP, dan 56 SLTA.

Selanjutnya untuk mendorong implementasi pendidikan inklusi secara lebih luas, pada tahun 2004 di Bandung diadakan lokakarya nasional yang menghasilkan Deklarasi Bandung, yang di antara isinya menghimbau kepada pemerintah, institusi pendidikan, institusi terkait, dunia usaha dan industri serta masyarakat untuk dapat menjamin setiap anak berkelainan dan anak berkebutuhan khusus lainnya mendapatkan kesamaan akses dalam segala aspek kehidupan, serta mendapatkan perlakuan yang manusiawi.

Guna terus mengembangkan pendidikan inklusi pemerintah juga telah mengambil berbagai strategi, baik melalui diseminasi ideologi pendidikan inklusif, mengubah peranan SLB yang ada agar menjadi pusat sumber, penataran/pelatihan bagi guru-guru SLB maupun guru-guru sekolah reguler, reorientasi pendidikan guru LPTK, desentralisasi dalam implementasi pendidikan inklusif, pembentukan kelompok kerja pendidikan inklusi, samapai pada pembukaan program magister dalam bidang inklusi dan pendidikan kebutuhan khusus. Hasilnya pada kisaran tahun 2004-2007 muncul apresiasi dan antusiasme kuat di kalangan masyarakat untuk mengimplementasikannya.

Misal, pada tahun 2005 cukup banyak sekolah reguler yang mengajukan untuk menjadi sekolah inklusi, yakni 1200 sekolah, tetapi yang disetujui oleh pemerintah untuk dilaksanakan baru 504 sekolah, karena konsekuensinya pemerintah harus memberikan subsidi dan fasilitas lain penunjang proses pembelajaran (Sukadari, 2006). Meningkatnya implementasi pendidikan inklusi waktu itu, menjadikan Indonesia (menurut UNESCO) berada pada ranking ke 58 dari 130 negara dalam implementasi pendidikan inklusi. Sayang ranking tersebut kemudian terus merosot dalam tahun-tahun berikutnya.

Lahirnya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa, yang didalamnya menegaskan bahwa setiap Pemerintah kabupaten/kota untuk menunjuk paling sedikit 1 (satu) SD dan 1 (satu) SMP pada setiap kecamatan dan 1 (satu) satuan pendidikan menengah untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif, maka diyakini jumlah anak berkelainan dan jumlah sekolah penyelenggara inklusif di Indonesia akan semakin meningkat.

### **3. Tujuan Pendidikan Inklusif**

Pendidikan inklusif memberikan berbagai kegiatan dan pengalaman, sehingga semua siswa dapat berpartisipasi dan berhasil dalam kelas reguler yang ada di sekolah tetangga atau sekolah terdekat. Dengan demikian kehadiran

pendidikan inklusif berpotensi mampu memberikan kontribusi yang berarti bagi setiap anak dengan segala keragamannya, terutama anak berkebutuhan khusus. hubungan dan mempersiapkan kehidupan yang layak dalam kehidupan masyarakat yang beragam.

Menurut Skjorten tujuan pendidikan inklusi adalah mengurangi kekhawatiran dan membangun, menumbuhkan loyalitas dalam persahabatan serta membangun sikap memahami dan menghargai.<sup>3</sup> Sasaran pendidikan inklusif tidak hanya anak-anak yang luar biasa/ berkelainan saja namun juga termasuk sejumlah besar anak yang terdaftar di sekolah.

Hasil Deklarasi Lisbon (2007) tujuan pendidikan inklusif adalah untuk mencapai kualitas pendidikan yang bermanfaat bagi semua dalam lingkungan utama, perlu menunjukkan bahwa hanya jika semua kondisi pendidikan inklusif yang berkualitas dapat menguntungkan terjadi di kelas mainstream. Pada the European Hearing of Young People's 'Young Voices: Pertemuan Keanekaragaman dalam Pendidikan yang diselenggarakan di Lisbon pada bulan September 2007, anak-anak muda dengan kebutuhan pendidikan khusus dari 29 negara menyatakan hak-hak mereka, kebutuhan, dan tantangan, dan membuat rekomendasi untuk mencapai pendidikan inklusif, adalah (1) Hal ini sangat penting untuk memberikan setiap orang kebebasan untuk memilih di mana mereka ingin dididik.

---

3 Skjorten, *op. cit.*, h. 136.



(2) Pendidikan inklusif yang terbaik jika kondisi yang tepat bagi kita. Ini berarti dukungan yang diperlukan, sumber daya dan guru yang terlatih harus tersedia. Guru perlu dimotivasi, untuk mendapat informasi dan memahami kebutuhan kita. Mereka perlu dilatih dengan baik, meminta kami apa yang kita butuhkan dan dengan baik terkoordinasi di antara mereka sendiri selama bertahun-tahun sekolah.

(3) Kita melihat banyak manfaat dalam pendidikan inklusif: kita memperoleh keterampilan sosial yang lebih; kita hidup pengalaman yang lebih luas, kita belajar tentang bagaimana mengelola di dunia nyata; kita perlu memiliki dan berinteraksi dengan teman-teman dengan dan tanpa kebutuhan khusus.

(4) Pendidikan inklusif dengan individualisasi, dukungan khusus adalah persiapan terbaik untuk pendidikan tinggi. Pusat khusus akan sangat membantu untuk mendukung kami dan untuk menginformasikan universitas dengan benar tentang bantuan yang kami butuhkan.

(5) Pendidikan inklusif adalah saling menguntungkan bagi kita dan bagi semua orang. Menurut pernyataan Salamanca bahwa: (1) Setiap anak memiliki hak dasar atas pendidikan, dan harus diberi kesempatan untuk mencapai dan mempertahankan tingkat yang dapat diterima pembelajaran (2) Setiap anak memiliki karakteristik yang unik, minat, kemampuan, dan kebutuhan pembelajaran (3) Sistem pendidikan harus dirancang dan program pendidikan dilaksanakan dengan memperhatikan keanekaragaman karakteristik dan kebutuhan tersebut. (4) Mereka yang memiliki kebutuhan pendidikan khusus harus memiliki akses ke sekolah reguler, yang seharusnya mengakomodasi mereka dalam rangka

pedagogi yang berpusat pada anak mampu memenuhi kebutuhan tersebut. (5) Sekolah reguler dengan orientasi inklusif ini merupakan cara yang paling efektif untuk memerangi sikap diskriminasi, menciptakan masyarakat yang ramah, membangun masyarakat yang inklusif dan mencapai pendidikan untuk semua; Selain itu mereka memberikan pendidikan yang efektif kepada mayoritas anak dan meningkatkan efisiensi dan pada akhirnya efektivitas biaya seluruh sistem pendidikan.

Tujuan pendidikan inklusif ini berarti *pertama*, menciptakan dan membangun pendidikan yang berkualitas menciptakan dan menjaga komunitas kelas yang hangat, menerima keanekaragaman, dan menghargai perbedaan, menciptakan suasana kelas yang menampung semua anak secara penuh dengan menekankan suasana sosial kelas yang menghargai perbedaan yang menyangkut kemampuan, kondisi fisik, sosial ekonomi, suku, agama, dan sebagainya. dan mengakomodasi semua anak tanpa memandang kondisi fisik, sosial, intelektual, bahasa dan kondisi lainnya. *Kedua*, memberikan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang sama dan terbaik bagi semua anak dan orang dewasa yang memerlukan pendidikan, memiliki kecerdasan tinggi, yang secara fisik dan psikologis memperoleh hambatan dan kesulitan baik yang permanen maupun sementara, dan mereka yang terpisahkan dan termarjinalkan.

#### 4. Pengelolaan Kelas Dalam Setting Menuju Pendidikan Inklusif

Menurut Johnsen, prinsip pendidikan yang disesuaikan dalam sekolah inklusif menyebabkan adanya tuntutan yang besar terhadap guru reguler maupun pendidik khusus. Hal ini maksudnya menuntut adanya pergeseran dalam paradigma proses belajar mengajar. Pergeseran besar lainnya adalah mengubah tradisi dari mengajarkan materi yang sama kepada semua siswa tanpa mempertimbangkan perbedaan individual menjadi mengajar setiap anak sesuai kebutuhan individualnya tetapi dalam setting kelas yang sama, dari berpusat pada kurikulum menjadi berpusat pada anak dan perubahan-perubahan lainnya.<sup>4</sup>

Beberapa hal berkaitan dengan implementasi pendidikan inklusif dalam setting sekolah, Skjorten mengemukakan tentang perlunya adaptasi kurikulum, perubahan pendidikan yang potensial kerjasama lintas sektoral dan adaptasi lingkungan.<sup>5</sup> Sedangkan Stainback dalam Sunardi menggambarkan sekolah yang inklusif adalah sekolah yang menampung semua murid di kelas yang sama, sekolah ini menyediakan program yang layak, menantang, tetapi sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan setiap murid maupun bantuan dan dukungan yang diberikan oleh para guru. <sup>6</sup>Agar anak berhasil, selain itu sekolah

---

4 Johnsen BH, *Kurikulum Untuk Pluraritas Kebutuhan Belajar Individu* (Bandung: Pascasarjana UPI, 2003), h. 67.

5 Skjorten, *op. cit.*, h. 63.

6 Sunardi, *op. cit.*, h. 44.

merupakan tempat setiap anak diterima, menjadi bagian dari kelas tersebut, dan saling membantu dengan guru dan teman sebayanya, maupun anggota masyarakat lain agar kebutuhan individualnya terpenuhi.

Pendapat diatas menegaskan dalam setting pendidikan inklusif di tataran kelas bahwa pendidikan inklusif menuntut adanya pendidikan/pembelajaran yang berpusat pada anak, pendidikan inklusif berarti menciptakan dan menjaga komunitas kelas yang hangat, menerima keragaman dan menghargai perbedaan. Pendidikan inklusif juga menuntut penerapan kurikulum yang fleksibel. Pendidikan inklusif juga berarti mendorong guru sebagai fasilitator dan melakukan proses pembelajaran dan pengajaran yang komunikatif dan interaktif, mendorong adanya kerjasama tim guru (team work). Pendidikan inklusif memungkinkan penyesuaian-penyesuaian bahan pelajaran, evaluasi, alat, dan penataan lingkungan belajar anak. Pendidikan inklusif berarti mendorong orang tua untuk terlibat secara proaktif dan bermakna dalam proses perencanaan pendidikan, pengajaran dan pembelajaran bagi anak. Dengan pengertian bahwa kelas inklusif akan dapat memenuhi kebutuhan individu setiap anak di dalamnya, salah satu contoh anak berkebutuhan khusus misalnya anak berbakat.

Anak berbakat sebenarnya juga dapat terlayani dengan baik di kelas-kelas inklusif. Menurut Smith dalam Sunardi (2010) mempertanyakan sikap para pakar anak berbakat yang tidak begitu positif terhadap pendidikan inklusif bagi anak berbakat. Mereka khawatir bahwa model inklusif akan menurunkan kualitas, mengakibatkan penghentian program

percepatan secara individual, pembatasan kurikulum, dan penolakan atas perbedaan individu.<sup>7</sup>

Salah satu strategi pembelajaran yang paling banyak dipakai dalam inklusi, yaitu pembelajaran kooperatif. Penggunaan model pembelajaran ini mereka anggap kurang memberikan tantangan yang sesuai bagi anak berbakat dan hanya menempatkan anak berbakat dalam posisi sebagai tutor teman-teman sebayanya. Kekhawatiran ini sebenarnya tidak perlu terjadi. Salah satu karakteristik terpenting dari sekolah inklusif adalah satu komunitas yang kohesif, menerima dan responsif terhadap kebutuhan individual setiap murid.

Menurut Sapon-Shevin profil pembelajaran di sekolah inklusif. Pendidikan inklusif berarti menciptakan dan menjaga komunitas kelas yang hangat, menerima keanekaragaman, dan menghargai perbedaan. Guru mempunyai tanggung jawab menciptakan suasana kelas yang menampung semua anak secara penuh dengan menekankan suasana sosial kelas yang menghargai perbedaan yang menyangkut kemampuan kondisi fisik, sosial ekonomi, suku, agama, dan sebagainya.<sup>8</sup>

Dengan demikian pengelolaan kelas dalam pembelajaram kelas yang memang heterogen dan penuh dengan perbedaan-perbedaan individual memerlukan

---

7 Sunardi, "Pendidikan Inklusif Prakondisi dan Implikasi Managerialnya." *Makalah Pada Pertemuan Ilmiah Pendidikan Luar Biasa Tingkat Nasional*, 2010, h. 67.

8 Shopan Shepin, *Managing Special Education* (Boston: Open University Pers, 2005), h. 45.

perubahan kurikulum secara mendasar. Guru di kelas inklusif secara konsisten akan bergeser dari pembelajaran yang kaku, berdasarkan buku teks, atau materi basal ke pembelajaran yang banyak melibatkan belajar kooperatif, tematik, dan berfikir kritis, pemecahan masalah, dan asesmen secara autentik. *Kedua*, pendidikan inklusif berarti menuntut penerapan kurikulum yang multilevel dan multimodalitas. Kelas yang inklusif berarti pembelajaran tidak lagi berpusat pada kurikulum melainkan berpusat pada anak, dengan konsekuensi berarti adanya fleksibilitas kurikulum dan penerapan layanan program individual atau pendekatan proses kelompok dalam implementasi kurikulum yang multilevel dan multimodalitas tersebut. *Ketiga*, pendidikan inklusif berarti menyiapkan dan mendorong guru untuk mengajar secara interaktif.<sup>9</sup>

Perubahan dalam kurikulum berkaitan erat dengan perubahan metode pembelajaran. Model kelas tradisional di mana seorang guru secara sendirian berjuang untuk dapat memenuhi kebutuhan semua anak di kelas harus diganti dengan model murid-murid bekerja sama, saling mengajar, dan secara aktif berpartisipasi dalam pendidikannya sendiri dan pendidikan teman-temannya. Kaitan antara pembelajaran kooperatif dan kelas inklusif sekarang jelas, semua anak berada di satu kelas bukan untuk berkompetisi, tetapi untuk bekerja sama dan saling belajar dari yang lain.

Konsep multiple intelligence (intelegensi terdiri dari berbagai dimensi) sangat tepat dalam implikasinya di kelas

---

9 Shopan Shepin, *op. cit.*, h. 47.

yang inklusif. Seseorang yang kuat di satu dimensi mungkin lemah pada dimensi lain. Dengan demikian, seorang anak tidak akan selamanya menjadi tutor atau pembimbing teman-temannya, suatu saat dia akan berbalik menjadi anak yang membutuhkan orang lain. *Keempat*, Pendidikan inklusif berarti penyediaan dorongan bagi guru dan kelasnya secara terus menerus dan penghapusan hambatan yang berkaitan dengan isolasi profesi. Memaknai prinsip ini berarti aspek terpenting dari pendidikan inklusif meliputi proses pembelajaran dengan kolaborasinya berbagai profesi atau dalam sebuah tim, baik guru kelas, guru pembimbing khusus, dan ahli-ahli lainnya baik dalam kolaborasi perencanaan, pelaksanaan maupun penanganannya. *Kelima*, Pendidikan inklusif berarti melibatkan orangtua secara bermakna dalam proses perencanaan. Pendidikan inklusif sangat bergantung kepada masukan orang tua pada pendidikan anaknya, misalnya keterlibatan mereka dalam penyusunan program pengajaran individual.

Pembelajaran menuju pendidikan inklusif berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa menuju pendidikan inklusif adalah terbuka untuk menerima perbedaan anak yang heterogen ditangani oleh tenaga dari berbagai profesi sebagai satu tim, sehingga kebutuhan individual setiap anak dapat terpenuhi, hal ini tentu saja menuntut banyak perubahan pada sistem pembelajaran konvensional seperti yang dipakai di Indonesia sekarang. Guru biasa perlu dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan dasar dalam menangani kelas yang heterogen, perlu dikembangkan iklim kerjasama tim dari berbagai tenaga profesional, dan sekolah

perlu dilengkapi dengan fasilitas yang memungkinkan semua anak luar biasa belajar di sekolah tersebut.

Prinsip pendidikan yang disesuaikan dalam sekolah inklusif menyebabkan adanya tuntutan yang besar terhadap guru reguler maupun pendidik khusus. Hal ini maksudnya menuntut adanya pergeseran dalam paradigma proses belajar mengajar. Pergeseran besar lainnya adalah mengubah tradisi dari mengajarkan materi yang sama kepada semua siswa tanpa mempertimbangkan perbedaan individual menjadi mengajar setiap anak sesuai kebutuhan individualnya tetapi dalam setting kelas yang sama, dari berpusat pada kurikulum menjadi berpusat pada anak dan perubahan-perubahan lainnya. Menurut Johnsen, sesungguhnya kondisi saat ini sedang belajar tentang pendidikan inklusif secara komprehensif dan mendalam.<sup>10</sup>

Namun demikian sesungguhnya bahwa hal tersebut belum sepenuhnya dipahami dengan benar. Oleh sebab itu harus ada perubahan strategi dalam mengkampanyekan pendidikan inklusif dengan tidak langsung menyampaikan konsep pendidikan inklusif, akan tetapi dimulai dengan memperkenalkan konsep sekolah yang ramah dan guru yang ramah. Ada banyak cara untuk mendekati teori kurikulum dan praktek, misalnya melihat kurikulum sebagai tubuh pengetahuan / produk, sebagai proses, sebagai praktek, atau dalam konteks. Dalam kerangka pendidikan inklusif, kurikulum menempatkan banyak penekanan pada peserta didik sebagai subjek yang unik sebagai pengganti dari

---

10 Johnsen, *op. cit.*, h. 34.



'objek yang akan ditindaklanjuti', menciptakan pergeseran dari mengajar untuk belajar. Pergeseran itu menyebabkan perencanaan kurikulum yang berpusat pada siswa berdasarkan penilaian dari kekuatan dan kelemahan peserta didik, dengan diferensiasi dalam pemilihan strategi konten dan pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individu (Smith 2000). Untuk mewujudkannya, sistem pendidikan harus fleksibel dan 'responsif terhadap kebutuhan yang beragam dan seringkali kompleks pada individu peserta didik (Badan Eropa 2003). Oleh karena itu, menyediakan lingkungan belajar yang dapat mengoptimalkan akses dan partisipasi sukses dalam pendidikan semua siswa membutuhkan kurikulum yang lebih fleksibel, dimulai dengan 'pergeseran dari fokus pada apa yang salah pada pelajar ... untuk penerimaan perbedaan antara siswa sebagai aspek biasa pada perkembangan manusia '(Florian 2008).

As mentioned above, one key factor in attaining quality inclusive education is to provide curricula; a curricula, whose design and content, teaching and learning environment and practices, and assessment methods are adaptable enough to address each learner's uniqueness. Research shows that the techniques, practices, procedures, and in many cases the content which have been found to be effective for students with disabilities and gifted students are generally effective for all students because of the fundamental recognition and acceptance of the uniqueness of each learner (Cook & Schirmer 2003).

Seperti disebutkan di atas, salah satu faktor kunci dalam mencapai pendidikan inklusif yang berkualitas adalah untuk

memberikan kurikulum; sebuah kurikulum, yang desain dan konten, pengajaran dan pembelajaran lingkungan dan praktek, dan penilaian metode yang cukup beradaptasi untuk mengatasi keunikan masing-masing pelajar. Penelitian menunjukkan bahwa teknik, praktek, prosedur, dan dalam banyak kasus konten yang telah ditemukan efektif bagi siswa penyandang cacat dan siswa berbakat umumnya efektif bagi semua siswa karena pengakuan fundamental dan penerimaan keunikan setiap peserta didik ( Cook & Schirmer 2003).

Berbagai strategi desain kurikuler dan instruksional, seperti Desain Universal untuk Pembelajaran (UDL) dan Instruksi yang Dibedakan (DI), telah disusun secara universal dalam arti bahwa mereka menciptakan kerangka kerja untuk mendukung kedua pengajaran dan pembelajaran praktik inklusif, yang pada akhirnya menguntungkan semua siswa. UDL menyediakan lebih dari kerangka kerja bagi perencanaan kurikulum yang diakses bila DI menawarkan strategi perencanaan dan pembelajaran yang sedang berlangsung (Barnum & Kaca 2009).

## **5. Pusat Sumber sebagai sistem pendukung (Support System)**

Apabila sekolah yang ramah (*welcoming school*) dan guru yang ramah (*welcoming teacher*) dapat diwujudkan, maka langkah menuju pendidikan inklusif akan semakin mulus. Sekolah yang ramah dan guru yang ramah merupakan kondisi yang harus dipersiapkan sebelum pendidikan

inklusif diimplementasikan.

Secara teknis pendidikan inklusif memerlukan sistem pendukung yang berfungsi sebagai lembaga yang memberikan bantuan teknis kepada sekolah yang di dalamnya terdapat anak berkebutuhan khusus. Dalam terminologi pendidikan inklusif, sistem pendukung itu disebut pusat sumber (*resource center*).

Salah satu fungsi dan tugas pokok pusat sumber adalah menyediakan guru pendidikan kebutuhan khusus yang profesional yang disebut guru kunjung (*itinerant teachers*). Guru kunjung akan membantu guru sekolah reguler dalam memberikan layanan pendidikan kepada anak berkebutuhan khusus. Di samping itu, pusat sumber juga mempunyai tugas dalam menyediakan alat/media belajar yang diperlukan anak berkebutuhan khusus, seperti penyediaan buku-buku teks braile bagi tunanetra, dan memberikan pelatihan tertentu bagi guru sekolah reguler, orang tua maupun berkebutuhan khusus sendiri. Pusat sumber merupakan tempat berkumpulnya para profesional.

Pusat sumber juga merupakan institusi pendukung dalam pelayanan guru pembimbing khusus, sehubungan dengan itu, sekurang-kurangnya diperlukan satu atau dua pusat sumber untuk setiap kabupaten/kota, yang akan memberikan dukungan kepada sekolah reguler dalam implementasi pendidikan inklusif. Dapat dibayangkan berapa banyak pusat sumber dan berapa banyak tenaga guru kunjung yang dibutuhkan dalam implementasi pendidikan inklusi di Indonesia. Pusat sumber, juga merupakan sebagai

pusat layanan pendidikan inklusif dalam hal asesmen dan berbagai hal menyangkut persiapan baik anak maupun tenaga guru untuk mendukung implementasi pendidikan inklusif.

## BAGIAN 2

### UNSUR KONTEKS PENDIDIKAN INKLUSIF

Efektivitas konteks (*context*) mencakup analisis masalah yang berkaitan dengan landasan formal, kebutuhan masyarakat, kelayakan sekolah dan letak geografis akan dianalisis keterkaitannya. Berisi tentang analisis kekuatan dan kelemahan obyek tertentu. Evaluasi konteks sebagai fokus kelembagaan untuk mengidentifikasi peluang dan menilai kebutuhan. Suatu kebutuhan dirumuskan sebagai suatu kesenjangan kondisi nyata dengan kondisi yang diharapkan.

Efektivitas konteks dalam kaitannya dengan program pendidikan inklusif tingkat sekolah dasar di Kota Banjarmasin, menghasilkan data-data kualitatif sehingga dianalisis secara kualitatif. Fokus perhatian penelitian ini pada tiga aspek atau fokus penting yaitu: (a) tujuan, landasan, dan pembinaan program, (b) analisis kebutuhan, dan (c) studi kelayakan pada sekolah penyelenggara program inklusif.

#### **1. Tujuan Pendidikan Inklusif**

Pemahaman mengenai tujuan program pendidikan inklusif secara nasional tentu merujuk pada konstitusi yaitu pada peraturan menteri pendidikan Nasional nomor 70 tahun 2009, tentang pelaksanaan pendidikan inklusif bagi peserta didik yang mangalami kelainan maupun yang memiliki potensi, dan atau bakat istimewa. Pada

pasal 2 tujuan pendidikan inklusif untuk (1) memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya, (2) mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik.

Diundangkannya UU No.20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional pengganti UU no.2 tahun 1989, maka payung hukum hak dan kewajiban warga negara dalam memperoleh pendidikan semakin signifikan. Landasan tersebut dikaji melalui UU No. 20 tahun 2003 pada Bab IV bagian kesatu pasal 5 ayat 4 mengamanatkan bahwa “warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus”Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapat layanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.

Penjabaran operasional UU Sisdiknas terutama yang mengatur tentang pendidikan inklusif diatur dalam peraturan menteri pendidikan nasional nomor 70 tahun 2009. Dalam pasal 3 yaitu, Setiap peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berhak mengikuti pendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Operasional permendiknas nomor 70 tahun 2009 ini diindik-

lanjuti oleh Direktorat pendidikan khusus dan layanan khusus (PKLK) buku Pedoman Penyelenggaraan Program Pendidikan Inklusif. Hadirnya buku pedoman tersebut memberikan petunjuk pelaksanaan bagaimana praktik penyelenggaraan program inklusif di sekolah dilaksanakan dengan benar sesuai prosedur yang baku. Payung hukum penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kalimantan secara khusus diatur dalam peraturan Gubernur nomor. 065 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, pendidikan inklusif, pendidikan anak cerdas istimewa dan/atau bakat istimewa lembaga pendukung pendidikan.

Tujuan penyelenggaraan pendidikan inklusif di wilayah Kota Banjarmasin, seperti yang di kemukakan oleh Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan adalah:

Tujuan pendidikan inklusif, dilihat dari proses belajar adalah untuk memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Supaya tidak terjadi diskriminasi pada pembelajaran dan menggali potensi anak. Inklusi diberikan pada semua anak berkebutuhan khusus. Pendidikan Inklusi akan memenuhi layanan belajar untuk seluruh anak diberikan kesempatan belajar yang sama. Tujuannya agar seluruh anak tidak hanya diberikan layanan secara rasional tetapi juga sesuai hak asasi manusia.

Hasil wawancara dengan komisi 4 DPRD propinsi Kalimantan Selatan, tujuan pendidikan inklusif adalah:

Banjarmasin sebagai kota besar banyak peserta didik yang mempunyai keunggulan dalam prestasi dan tidak sedikit pula yang mengalami kebutuhan khusus. Di Banjarmasin dengan masyarakatnya yang heterogen pendidikan inklusif menjadi kebutuhan untuk anak. Tujuan pendidikan inklusif untuk memberikan layanan kepada anak berkebutuhan khusus digabungkan dengan anak normal, agar tidak ada lagi jarak antara anak berkebutuhan khusus dengan anak normal.

Berikut ini dipaparkan rekaman hasil wawancara dengan guru, tentang tujuan pendidikan inklusif yang sebetulnya diinginkan oleh guru sebagai pelaksana pendidikan di sekolah:

Pendapat Rizkan Noor Ihsan, S.Pd, Banua Anyar 8 "Tujuan pendidikan inklusif untuk mengembangkan siswa dalam hal kognitif, Sosial, fisik, emosi dan spiritua, sebab semuanya sangat penting dimiliki oleh siswa. Karena pada dasarnya semua berhubungan dengan kehidupan sehari-hari serta untuk ke depannya kelak. Contohnya saja seperti mengenai Sosial, anak tentu perlu diajarkan bagaimana bermasyarakat dan menempatkan diri dengan baik dilingkungannya.



Supianor, bertindak sebagai wakil kepala sekolah di SD Banua Anyar 4, mengungkapkan tujuan pendidikan inklusif adalah sebagai berikut:

Menyelaraskan atau menyeimbangkan pemahaman orangtua anak pada umumnya dengan orang tua anak berkebutuhan khusus dan memberikan peluang kepada anak berkebutuhan khusus dalam bersekolah di SD pada umumnya. Selain itu tujuan lainnya pun untuk menyatukan anak berkebutuhan khusus dengan anak pada umumnya dan melatih mereka untuk bersosialisasi dengan lingkungan. Menciptakan pembelajaran yang ramah untuk anak berkebutuhan khusus dan dapat membantu anak dalam penyesuaian hal pembelajaran di sekolah.

Muhammad Aini, dari SD Banua Hanyar 4, komentar tentang tujuan pendidikan inklusif adalah:

“Pembelajaran mengikuti siswa atau yang disebut dengan berpusat pada siswa, ada berbagai macam tingkatan hambatan anak jadi kita sebagai guru tidak bisa mengambil tindakan yang keras kepada anak berkebutuhan khusus, kita harus melihat kemauan anak seperti apa, kehendak anak itu kita salurkan tapi dengan arahan yang tepat,”

Pendapat Maulidah yang berperan sebagai guru di SD Banua Hanyar 4 tujuan pendidikan inklusif adalah

Mengajak anak membaurkan anak berkebutuhan khusus dengan anak yang normal butuh proses agar tidak ada diskriminasi terhadap anak berkebutuhan khusus, guru mengajarkan pembelajaran matematika anak berkebutuhan khusus tidak bisa mengikuti kurikulum anak yang normal, jadi harus ada modifikasi kurikulum untuk anak abk, dibalik kekurangan anak abk ada kelebihan yang mereka miliki jadi perlu kesabaran, perhatian, dan kasih sayang kita”.

Pendapat Ida Ariyani, SDN Banua Anyar 8 dengan adanya pendidikan inklusif memiliki tujuan:

“Agar sekolah tidak hanya mementingkan moto kognitif saja namun aspek-aspek lain juga dilihat, tetapi ada kendala dalam menilai secara keseluruhan aspek-aspek tersebut. Dalam saat penerimaan murid baru setiap anak pasti akan dilihat dari segi kognitif nya (kepintaran), pertama kali anak masuk sekolah guru tidak dapat melihat secara jelas bagaimana sikap dan perilaku anak yang muncul. Saya sendiri sebagai seorang gpk, apabila didalam pembelajaran berlangsung ada anak autis yang mengganggu KBM (seperti berdiri di atas meja), pada saat itu juga kami akan memisahkan dia, agar anak-anak yang lain tidak merasa terganggu”.

Pendapat Umi Rasia SDN Kuin selatan 3, tujuan pendidikan inklusif adalah sebagai berikut:

Sebenarnya tidak hanya sekedar memasukkan anak berkebutuhan khusus di sekolah reguler, tetapi menyesuaikan kondisi siswa. Dengan demikian peserta didik tidak hanya berkembang pada aspek di kognitif saja, namun baik juga di sosial, fisik, emosi dan spiritual.”

Komentar Lisa Umami, S.Pd, sebagai guru SDN Kuin Selatan 3, tujuan pendidikan inklusif adalah:

“Menciptakan pembelajaran yang ramah yang ditandai dengan sekolah bertumpu pada semua aspek perkembangan anak yaitu kognitif, fisik, emosi, spirtual sudah terlaksana dengan baik.”

Pendapat Barsiah, selaku Kepala sekolah di SD Banua Hanyar 8, tujuan pendidikan inklusif untuk:

“Menyamakan antara sekolah Reguler dan Berkebutuhan biar sama walaupun pelajarannya banyak di modifikasi,tujuannya agar anak dapat menerima pembelajaran. Bukan hanya dalam proses pembelajaran saja melainkan mengajarkan untuk bersikap saling tolong menolong, menghargai perbedaan agar tidak ada lagi yang namanya diskriminasi”.

Tujuan pendidikan inklusif yang tertera dalam permendiknas nomor 70 tahun 2009, yang dijadikan pedoman penyelenggaraan pendidikan inklusif nampaknya harus direvisi. Tujuan pendidikan inklusif tidak sekedar memasukkan anak berkebutuhan khusus pada sekolah reguler, untuk belajar bersama-sama dengan anak pada umumnya. Sekolah inklusif bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang ramah. Dengan bergabungnya anak berkebutuhan khusus dengan siswa umum, maka akan terjadi sebuah kewajaran dimana ada anak yang sulit belajar dan ada juga anak yang dengan mudah mengikuti pelajaran. Bagaimana memadukan keduanya, memerlukan tehnik yang menantang bagi guru, untuk melakukan pembelajaran yang fleksibel, ramah dan mengembangkan seluruh aspek perkembangan anak.

SD Banua Hanyar 8, SD Banua Hanyar 4, SD Gadang 2, SD Kuin Selatan sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di wilayah Banjarmasin, telah mendapatkan pengesahan dari Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin. Dengan demikian secara aspek legalitas, penyelenggaraan program Inklusif di SD tersebut telah memperoleh landasan hukum yang kuat.

Keempat SD penyelenggara program pendidikan inklusif di Kota Banjarmasin, menyelenggarakan program berdasarkan petunjuk langsung oleh Direktorat PKLK Dikdas. yang ditembuskan kepada Dinas Propinsi Kalimantan Selatan, Mekanisme pembinaan di tingkat pusat oleh Direktorat PKLK Dikdas, tingkat propinsi oleh Kepala Dinas Pendidikan Propinsi. Kepala bidang bina SD,

pada tingkat Kota/kabupaten ditangani oleh Subdin Dikdas Kota/Kabupaten seksi SD, dan pada tingkat sekolah dibina langsung oleh kepala sekolah yang dibantu oleh wakil kurikulum dan koordinator inklusif.

Secara struktural kelembagaan memang telah jelas mekanisme atau alur pembinaan program pembinaan pendidikan inklusif dari tingkat pusat, daerah hingga unit sekolah. Berdasarkan hasil temuan di lapangan terdapat indikasi adanya pembinaan yang longgar terutama pada aspek-aspek monitoring, supervisi, dan evaluasi terhadap sekolah penyelenggara program pendidikan inklusif. secara berkala dan terprogram sekurangnya setahun sekali. Direktorat PKLK Dikdas, Dinas pendidikan Propinsi dan sub dinas pendidikan tingkat Kota/Kabupaten hanya menerima laporan tertulis yang dibuat oleh sekolah mengenai praktik penyelenggaraan program. Laporan yang dibuat dapat terjadi pembiasaan pada beberapa aspek seperti prosedur rekrutmen siswa dan guru. Adanya beberapa hal yang menyimpang secara prosedural ini. Hal ini diakui oleh informan dari Dinas Pendidikan propinsi Kalimantan Selatan, terutama pada proses identifikasi dan asesmen.

Realitas lemahnya pembinaan oleh instansi vertikal, dibenarkan oleh beberapa informan ketika diwawancarai mengenai monitoring, supervisi dan evaluasi. Alasan yang dikemukakan adalah ketidak tersediaan anggaran untuk melakukan supervisi langsung ke lapangan. Dengan demikian laporan tahunan dari sekolah penyelenggara dianggap memadai oleh instansi vertikal.

## 2. Analisis Kebutuhan

Pada bagian analisis kebutuhan ini, sudut pandang dibagi dalam dua klasifikasi yaitu pandangan para pakar pendidikan dan kebutuhan masyarakat (*stakeholder*). Pertama, pandangan pakar pendidikan dapat dikaji pada seminar, simposium dan kesepakatan bersama yang banyak membicarakan tentang pendidikan inklusif. Kedua, analisis kebutuhan pendidikan inklusif yang dilakukan melalui analisis SWOT terhadap empat sekolah dasar penyelenggara pendidikan inklusif di Banjarmasin.

Pandangan para pakar yang dikaji melalui seminar, simposium maupun kesepakatan, antara lain sebagai berikut:

Konferensi Internasional yang dilaksanakan di Thailand tahun 1990 yang mempersoalkan tentang pendidikan dasar bagi semua anak. Puncak dari konferensi ini adalah lahirnya deklarasi tentang pendidikan untuk semua (*Education for All*). Konferensi ini menyimpulkan, antara lain di banyak negara (1) kesempatan untuk memperoleh pendidikan masih terbatas atau masih banyak orang yang belum mendapat akses pendidikan dan (2) kelompok tertentu yang terpinggirkan seperti penyandang disabilitas, etnic minoritas, suku terasing dan sebagainya masih terdiskriminasi dari pendidikan bersama.

Konferensi internasional di Spanyol, yang diselenggarakan pada tahun 1994, menghasilkan pernyataan Salamanca, misalnya pada butir kedua, yaitu

(1) Setiap anak mempunyai hak dasar untuk memperoleh pendidikan, dan harus diberi kesempatan untuk mencapai serta mempertahankan tingkat pengetahuan yang wajar, (2) Setiap anak mempunyai karakteristik, minat, kemampuan dan kebutuhan belajar yang berbeda-beda, (3) Sistem pendidikan seharusnya dirancang dan program pendidikan dilaksanakan dengan memperhatikan keanekaragaman karakteristik dan kebutuhan tersebut, (4) Mereka yang memiliki kebutuhan khusus harus memperoleh akses ke sekolah reguler yang mengakomodasi mereka dalam rangka pendidikan yang berpusat pada anak dan yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, (5) Sekolah reguler dengan orientasi tersebut merupakan alat yang paling efektif untuk memerangi sikap diskriminasi, menciptakan masyarakat yang ramah, membangun masyarakat yang inklusif dan mencapai pendidikan bagi semua. (6) Pendidikan inklusif harus memberikan pendidikan yang akan mencegah anak-anak mengembangkan harga diri yang buruk, serta konsekuensi yang dapat ditimbulkannya. Lebih jauh sekolah semacam ini akan memberikan pendidikan yang efektif kepada mayoritas anak dan meningkatkan efisiensi dan pada akhirnya akan menurunkan biaya seluruh sistem pendidikan.

Seminar tentang pendidikan inklusif yang diselenggarakan di Agra India pada tahun 1998, yang disetujui oleh 55 partisipan dari 23 negara. Dari hasil seminar itu pendidikan inklusif didefinisikan sebagai berikut: (1) Lebih luas dari pada pendidikan formal, tetapi mencakup rumah, masyarakat, non-formal dan sistem informal (2) Menghargai

bahwa semua anak dapat belajar (3) Memungkinkan struktur, sistem dan metodologi memenuhi kebutuhan-kebutuhan semua anak (4) Mengakui dan menghargai bahwa setiap anak memiliki perbedaan-perbedaan dalam usia, jenis kelamin, etnik, bahasa, kecacatan, status sosial ekonomi, potensi dan kemampuan (5) Merupakan proses dinamis yang secara evolusi terus berkembang sejalan dengan konteks budaya (6) Merupakan strategi untuk memajukan dan mewujudkan masyarakat inklusif. (*Seminar on Inclusive Education Agra India, 1998*).

Pendidikan inklusif yang dipaparkan di atas menggambarkan sebuah model pendidikan inklusif yang mendasarkan konsep-konsep tentang: anak, sistem pendidikan, keragaman dan diskriminasi, proses memajukan inklusi, Secara terperinci dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) Konsep tentang Anak: Hak semua anak untuk memperoleh pendidikan di dalam masyarakatnya sendiri, semua anak dapat belajar dan siapapun dapat mengalami kesulitan dalam belajar, semua anak membutuhkan dukungan dalam belajar, pembelajaran berpusat pada anak menguntungkan semua anak, keberagaman dan terima dan dihargai (2) Konsep tentang Sistem Pendidikan dan Sekolah (pendidikan lebih luas dari pada pendidikan formal di sekolah (*formal schooling*), fleksibel dan sistem pendidikan bersifat responsif, lingkungan pendidikan ramah terhadap anak, sistem mengakomodasi setiap anak yang beragam bukan anak menyesuaikan dengan sistem, kolaboratif antar mitra dan bukan kompetitif (3) Konsep tentang Keberagaman dan Diskriminasi Menghilangkan diskriminasi dan pengucilan



(*exclusion*), memandang keragaman sebagai sumber daya, bukan sebagai masalah, pendidikan inklusif menyiapkan siswa menjadi toleran dan menghargai perbedaan-perbedaan.

Lokakarya Nasional tentang Pendidikan Inklusif yang diselenggarakan di Bandung, Indonesia, tanggal 8-14 Agustus 2004, dengan pertimbangan bahwasanya keberadaan anak berkelainan dan anak berkebutuhan khusus lainnya di Indonesia untuk mendapatkan kesamaan hak dalam berbicara, berpendapat, memperoleh pendidikan, kesejahteraan dan kesehatan, sebagaimana yang dijamin oleh UUD 1945, mendapatkan hak dan kewajiban secara penuh sebagai warga negara, sebagaimana tertuang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948), diperjelas oleh Konvensi Hak Anak (1989), Deklarasi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua (1990), Peraturan Standar PBB tentang Persamaan Kesempatan bagi Para Penyandang Cacat (1993), Pernyataan Salamanca dan Kerangka Aksi UNESCO (1994), Undang-undang Penyandang Cacat (1997), Kerangka Aksi Dakar (2000), Undang-undang RI Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional (2003), dan Deklarasi Kongres Anak Internasional (2004). Seluruh dokumen tersebut memberikan jaminan sepenuhnya kepada anak berkelainan dan anak berkebutuhan khusus lainnya dalam memperoleh pendidikan yang bermutu dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat. Menyadari kondisi obyektif masyarakat Indonesia yang beragam, maka kami sepakat menuju Pendidikan Inklusif dan menghimbau kepada pemerintah, institusi pendidikan, institusi terkait,

dunia usaha dan industri serta masyarakat untuk dapat: (1) Menjamin setiap anak berkelainan dan anak berkebutuhan khusus lainnya mendapatkan kesamaan akses dalam segala aspek kehidupan, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial, kesejahteraan, keamanan, maupun bidang lainnya, sehingga menjadi generasi penerus yang handal. (2) Menjamin setiap anak berkelainan dan anak berkebutuhan khusus lainnya, sebagai individu yang bermartabat, untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi, pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan potensi dan tuntutan masyarakat, tanpa perlakuan deskriminatif yang merugikan eksistensi kehidupannya baik secara fisik, psikologis, ekonomis, sosiologis, hukum, politis maupun kultural. (3) Menyelenggarakan dan mengembangkan pengelolaan pendidikan inklusif yang ditunjang kerja sama yang sinergis dan produktif di antara para *stakeholders*, terutama pemerintah, institusi pendidikan, institusi terkait, dunia usaha dan industri, orang tua serta masyarakat. (4) Menciptakan lingkungan yang mendukung bagi pemenuhan kebutuhan anak berkelainan dan anak berkebutuhan khusus lainnya, sehingga memungkinkan mereka dapat mengembangkan keunikan potensinya secara optimal. (5) Menjamin kebebasan anak berkelainan dan anak berkebutuhan khusus lainnya untuk berinteraksi baik secara reaktif maupun proaktif dengan siapapun, kapanpun dan di lingkungan manapun, dengan meminimalkan hambatan. (6) Mempromosikan dan mensosialisasikan layanan pendidikan inklusif melalui media masa, forum ilmiah, pendidikan dan pelatihan, dan lainnya secara berkesinambungan. (7) Menyusun Rencana

Aksi (*Action Plan*) dan pendanaannya untuk pemenuhan aksesibilitas fisik dan non-fisik, layanan pendidikan yang berkualitas, kesehatan, rekreasi, kesejahteraan bagi semua anak berkelainan dan anak berkebutuhan khusus lainnya.

Simposium internasional yang diselenggarakan di Bukit tinggi Indonesia pada tahun 2005, menghasilkan rekomendasi Bukit tinggi yang isinya antara lain menekankan perlunya terus dikembangkan program pendidikan inklusif sebagai salah satu cara menjamin bahwa semua anak benar-benar memperoleh pendidikan dan pemeliharaan yang berkualitas dan layak.

### **3. Studi Kelayakan pada Sekolah Dasar Penyelenggara Pendidikan Inklusif di Banjarmasin**

Pengkajian akan studi kelayakan sekolah penyelenggara proram pendidikan inklusif berdasarkan hasil observasi langsung yang dilaksanakan di empat SD, yaitu SD Banua Hanyar 8, SD Banua Hanyar 4, SD Gadang 2 dan SD Kuin Selatan Banjarmasin, dengan menggunakan analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunities, end Threat*) dan wawancara yang dilakukan dengan masyarakat orang tua pemerhati pendidikan inklusif. Adapun hasil analisis SWOT diperoleh gambaran keadaan sekolah sebagai berikut:

#### **1) SD Banua Hanyar 8 Banjarmasin**

##### **Kekuatan (Strength)**

- a) Memiliki tim layanan sekolah, yaitu program inklusi yang kuat

- b) Sekolah yang diminati masyarakat sebagai penyelenggara inklusi, baik dari kalangan masyarakat di bawah sampai keatas.
- c) Memiliki berbagai sumber dana yang jelas lewat komite sekolah
- d) Sebagai sekolah piloting pertama sebagai sekolah rujukan dari sekolah lainnya yang bekerjasama untuk mengembangkan pendidikan inklusi.
- e) Menjadi sekolah yang dibanggakan dan diharapkan terutama bagi orang tua anak berkebutuhan khusus dan masyarakat, karena pendidikan sekarang tidak mendiskriminasi, sehingga kebutuhan anak dapat diberikan sesuai dengan karakteristiknya masing-masing.
- f) Memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai untuk digunakan pada proses pembelajaran.

### **Kelemahan (*Weakness*)**

- a) Lokasi di pusat keramaian kota memungkinkan terjadinya tindakan-tindakan kriminal baik dari dalam maupun dari luar
- b) Lokasi dekat dengan aliran sungai, sehingga beberapa guru kurang disiplin dengan waktu karena memanfaatkan sebagian waktu memancing dan kegiatan lain yang berada dibantaran sungai.
- c) Lingkungan kurang mendukung, karena di daerah pasang surut, sehingga kadang proses belajar mengajar terganggu dengan aroma sampah tersebut.

- d) Layanan belum optimal, sehingga masih banyak anak yang belum terlayani pembelajarannya sesuai dengan kebutuhannya.
- e) Kurangnya tenaga pendidik yang berlatarbelakang PLB sehingga masih kurang pengetahuan mereka untuk menangani anak berkebutuhan khusus.
- f) Kurangnya diadakan worksop bagi tenaga pendidik yang ada di SDN banua hanyar 8 Banjarmasin tentang penanganan anak berkebutuhan khusus.
- g) Masih terbatasnya dana yang diberikan oleh komite sekolah untuk menunjang pelayanan anak berkebutuhan khusus.

### **Peluang (*Opportunities*)**

- a) Strata masyarakat yang menyekolahkan anaknya berasal dari status sosial ekonomi menengah ke bawah hingga ke atas, akan menjadi sangat besar tuntutan masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu dan dapat mengakomodir semua anak dalam layanan pendidikan.
- b) Sebagai sekolah inklusi dari beberapa penyelenggara pendidikan inklusi di Banjarmasin, maka SDN Banua Hanyar 8 Banjarmasin menjadi salah satu sasaran pilihan masyarakat Banjarmasin dan sekitarnya.

### **Ancaman (*Treath*)**

Sebagai sekolah negeri, sumber-sumber ancaman yang akan mengganggu kelancaran program, relatif tidak ada.

## 2) SD Banua Hanyar 4 Banjarmasin

### **Kekuatan (*Strength*)**

- a) Citra sekolah sebagai SDN penyelenggara inklusi lebih dari 5 tahun di Banjarmasin khususnya di Kota Banjarmasin.
- b) Memiliki beberapa model layanan sekolah, yaitu kelas reguler dan kelas khusus guna menyesuaikan kondisi anak.
- c) Penerimaan Siswa Baru tahun pembelajaran 2015/2016, Siswa reguler sebanya 30 dan siswa ABK sebanyak 14 orang.

### **Kelemahan (*Weakness*)**

- a) Lokasi di dalam sebuah gang kecil, membuat warga sekolah sedikit sulit dalam akses untuk ke sekolah.
- b) Kekurangannya tenaga kerja pendidik khusus untuk siswa inklusif.
- c) Kurangnya prasarana untuk menunjang kebutuhan siswa.
- d) Belum tersedianya ruangan asesmen atau evaluasi belajar siswa inklusif.

### **Peluang (*Opportunities*)**

- a) Strata masyarakat yang menyekolahkan anaknya berasal dari status sosial ekonomi menengah sampai kebawah tidak membuat layanan perbedaan pada siswa, sehingga orangtua tidak perlu khawatir anaknya tidak terlayani dengan maksimal.

- b) Sebagai sekolah penyelenggara inklusi, SDN Benua Anyar 4 menjadi sasaran pilihan masyarakat sekitar khususnya yang memiliki anak dengan kebutuhan khusus sangat senang ada sekolah yang melayani semua anak.

### **Ancaman (*Treath*)**

Sebagai sekolah negeri, sumber-sumber ancaman yang akan mengganggu kelancaran program, relatif tidak ada. Kecuali hal-hal yang bersifat kejadian luar biasa (*force majeure*).

### **3) SD Gadang 2 Banjarmasin**

#### **Kekuatan (*Strength*)**

- a) Memiliki layanan sekolah, yaitu program inklusi.
- b) Sekolah yang diminati masyarakat sebagai penyelenggara inklusi, baik dari kalangan masyarakat di bawah sampai keatas.
- c) Memiliki sumber dana mandiri yang jelas lewat komite sekolah
- d) Sebagai sekolah rujukan dari sekolah lainnya yang bekerjasama untuk mengembangkan pendidikan inklusi.
- e) Menjadi sekolah yang dibanggakan dan diharapkan terutama bagi orang tua anak berkebutuhan khusus dan masyarakat, karena pendidikan sekarang tidak mendiskriminasi, sehingga kebutuhan anak dapat diberikan sesuai dengan karakteristiknya masing-

masing.

- f) Memiliki sarana dan prasarana yang cukup untuk digunakan pada proses pembelajaran.

### **Kelemahan (*Weakness*)**

- a) Lokasi di pusat keramaian memungkinkan terjadinya tindakan-tindakan kriminal baik dari dalam maupun dari luar
- b) Lokasi dekat dengan pasar, sehingga beberapa guru kurang disiplin dengan waktu karena memanfaatkan sebagian waktu untuk kepasar.
- c) Lingkungan kurang mendukung, karena dekat dengan tempat pembuangan sampah, sehingga kadang proses belajar mengajar terganggu dengan aroma sampah tersebut.
- d) Layanan belum optimal, sehingga masih banyak anak yang belum terlayani pembelajarannya sesuai dengan kebutuhannya.
- e) Kurangnya tenaga pendidik yang berlatarbelakang PLB sehingga masih kurang pengetahuan mereka untuk menangani anak berkebutuhan khusus.
- f) Kurangnya diadakan worksop bagi tenaga pendidik yang ada di SDN Gadang 2 Banjarmasin tentang penanganan anak berkebutuhan khusus.
- g) Masih terbatasnya dana yang diberikan oleh komite sekolah untuk menunjang pelayanan anak berkebutuhan khusus.



### **Peluang (*Opportunities*)**

- a) Strata masyarakat yang menyekolahkan anaknya berasal dari status sosial ekonomi menengah ke bawah hingga ke atas, akan menjadi sangat besar tuntutan masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu dan dapat mengakomodir semua anak dalam layanan pendidikan.
- b) Sebagai sekolah inklusi dari beberapa penyelenggara pendidikan inklusi di Banjarmasin, maka SDN Gadang 2 Banjarmasin menjadi salah satu sasaran pilihan masyarakat Banjarmasin dan sekitarnya.

### **Ancaman (*Treath*)**

Sebagai sekolah negeri, sumber-sumber ancaman yang akan mengganggu kelancaran program, relatif tidak ada. Kecuali hal-hal yang bersifat kejadian luar biasa (*force majeure*).

## **4) SD Kuin Selatan**

### **Kekuatan (*Strength*)**

- a) Sekolah ini sudah cukup lama menyelenggarakan pendidikan inklusif Selama 7 tahun
- b) Memberikan kesempatan dan peluang sepenuhnya kepada anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan haknya sebagai warga negara.
- c) Penerimaan yang baik terhadap adanya penyelenggaraan pendidikan inklusif di lingkungan masyarakat

### **Kelemahan (*Weakness*)**

- a) Lokasi sekolah bertempat dipermukiman warga, dengan wilayah yang sempit dan sulit dijangkau untuk akses masuk mobil
- b) Layanan tidak optimal karena sumber daya tenaga pengajar yang memiliki keahlian khusus dalam bidang PLB
- c) Kurangnya koordinasi dari semua pihak yang terkait
- d) Kurangnya perhatian dari pemerintah akan kompetensi pelatihan yang jarang dilakukan oleh guru
- e) Tidak tersedianya ruang khusus disekolah menyulitkan guru saat memberikan perlakuan untuk siswa ABK
- f) Fasilitas yang kurang layak digunakan seperti ruang Perpustakaan dan Musholla
- g) Sterata beberapa masyarakat yang menyekolahkan anaknya di sekolah ini berasal dari status ekonomi menengah kebawah
- h) Sumber daya manusa yang belum memadai disamping pemberdayaan guru umum, juga keterbatasan guru pembimbing khusus (GPK)
- i) Keterbatasan aksesibilitas bagi anak berkebutuhan khusus dan dilingkungan sekolah

### **Peluang (*Opportunities*)**

- a) Strata orang tua anak berkebutuhan khusus yang menyekolahkan anaknya sebagian berasal dari status sosial ekonomi menengah ke atas, sehingga sangat

besar tuntutan masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu

- b) Sebagai sekolah pertama yang menyelenggarakan pendidikan inklusif di tingkat kecamatan. satuan pendidikan dasar
- c) Potensi yang dimiliki guru yang mengajar sudah cukup baik dalam memahami karakter siswa dan dapat menggunakan metode yang digunakan.

### **Ancaman (*Treath*)**

Sebagai sekolah negeri, sumber-sumber ancaman yang akan mengganggu kelancaran program, relatif masih sangat banyak hambatan. Berdasarkan hasil observasi kelayakan sekolah dengan teknik analisis SWOT dapat ditarik kesimpulan bahwa SDN KUIN SELATAN 3 Banjarmasin memiliki kualitas yang baik dalam menyelenggarakan pendidikan inklusi dan sudah cukup lama melaksanakan program inklusif dan juga masyarakat sudah percaya menyekolahkan anaknya yang berkebutuhan khusus.

Hasil wawancara dengan masyarakat pemerhati pendidikan inklusif tentang kebutuhan masyarakat terkait program pendidikan inklusif, sebagai berikut:

Pendapat Barsiah seorang kepala sekolah di SD Banua Hanyar 8 Banjarmasin:

Keberadaan pendidikan inklusif, sangat bagus membantu pada anak berkebutuhan khusus, sebab banyak orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus tidak mau anak mereka bersekolah di SLB. Jadi

sekolah membantu untuk mensosialisasikan tentang pendidikan inklusif, banyak di masyarakat menganggap anak berkebutuhan khusus adalah penyakit yang menular padahal sebenarnya tidak seperti itu. Cuma perilaku yang menyimpang.

Informan kedua, seorang kepala sekolah di SD Banua hanyar 4 Banjarmasin mengungkapkan harapan pendidikan inklusif adalah:

“Harapan saya melalui pendidikan inklusif, guru-guru disekolah tersebut harus semaksimal mungkin melayani pendidikan anak saya atau untuk anak-anak berkebutuhan khusus lainnya, disana guru kurang maksimal dalam memberikan pembelajaran pada anak berkebutuhan khusus, bahkan semenjak salah satu guru yang memiliki latar pendidikan luarbiasa meninggal yang dimana guru tersebut menurut saya sangat benar-benar mengajarkan anak saya bagaimana cara berkomunikasi membaca gerak bibir, dan anak saya memang memiliki kemajuan diajarkan oleh guru tersebut”

Pendapat masyarakat di SD Banua hanyar 8, harapan saya terhadap pendidikan untuk Anak Berkebutuhan Khusus yang diselenggarakan secara inklusif adalah:

“Melalui pendidikan inklusif harapannya anak bisa mandiri terhadap aktivitas sehari-hari. Untuk

kognitifnyahnya mengharapkan anak bisa membaca, menulis, berhitung, dan tidak dibodohi orang. Serta pusat terapi dari pihak sekolah yang berkualitas agar perkembangan anak tercapai.”

Pendapat Samsudin, seorang orang tua dari SD Gadang 2 Banjarmasin, harapan penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah:

Harapan saya sebagai orang tua semua sekolah reguler menjadi inklusif, dengan demikian pendidikan lebih mudah dijangkau anak berkebutuhan khusus. Dengan memperoleh pendidikan yang baik setidaknya dapat menjamin bagaimana hidup kedepannya untuk anak kami sehingga bisa menjadi anak yang mandiri meskipun mandiriya tidak terlalu optimal yah paling tidak bisa. Semoga lebih baik saja pendidikan yang diberikan pemerintah untuk anak-anak berkebutuhan khusus



## BAGIAN 3

### MODEL EVALUASI YANG DIPILIH

Studi evaluasi implementasi program pendidikan inklusif di Kodya Banjarmasin harus memilih model evaluasi yang tepat sesuai dengan tujuan evaluasi. Menurut Stufflebeam memilih model evaluasi mana yang tepat hendaknya mempertimbangkan hal seperti: pertanyaan evaluasi, masalah yang harus diatasi dan ketersediaan sumber daya.<sup>1</sup> Beberapa model yang diuraikan diatas bahwa tidak ada satupun model yang terbaik. Penerapan sebuah model perlu disesuaikan dengan tujuan evaluasi dan aspek program yang akan dievaluasi. Berdasarkan beberapa pendekatan diatas, program pendidikan inklusif yang dilaksanakan di Kodya Banjarmasin mengandung komponen konteks, input, proses dan produk, dan outcome, maka model yang cocok untuk digunakan dalam penelitian ini adalah model CIPP dengan memperhatikan outcome dari program, sehingga menjadi model CIPPO. Berbagai pertimbangan dipilihnya model evaluasi CIPP yang dikembangkan oleh Stufflebeam di Ohio state university adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi terhadap implementasi program pendidikan inklusif di sekolah reguler bertujuan untuk membantu pengambil keputusan dalam hal perencanaan sebuah program yang tepat sesuai kebutuhan di lapangan.

---

1 Stufflebeam, *Evaluation Models. New Directions For Evaluation* (Sanfrancisco: Jossey-Bass, 2001), h. 205.

Untuk kepentingan ini perlu melakukan evaluasi konteks (*context evaluation*) yang merupakan cara untuk menggali informasi untuk menentukan tujuan dan sasaran, merinci lingkungan yang relevan dan mengidentifikasi kebutuhan yang belum terpenuhi.

Melalui evaluasi konteks ini pengambil kebijakan pendidikan khususnya di wilayah Kalimantan Selatan akan memperoleh masukan tentang tujuan, landasan yang tepat tentang penyelenggaraan program pendidikan inklusif dimasa mendatang berdasarkan kebutuhan masyarakat dan kelayakan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.

2. Evaluasi terhadap implementasi program pendidikan inklusif bertujuan untuk membantu pengambil kebijakan dalam hal strukturisasi, dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, strategi alternatif yang akan digunakan dan rencana apa yang tersedia untuk mencapai tujuan serta dapat membantu pengembangan program.

Guna mendapatkan informasi tersebut perlu melakukan evaluasi masukan (*input evaluation*) terhadap pelaksanaan pendidikan inklusif yang telah dilakukan oleh beberapa sekolah reguler di Banjarmasin. Evaluasi input yang dilakukan dalam penelitian ini mencakup keberadaan siswa berkebutuhan khusus yang mengikuti pembelajaran di sekolah reguler, persyaratan administrasi guru pembimbing khusus yang ada di sekolah reguler, kurikulum yang disesuaikan dengan



kebutuhan siswa, sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah untuk mendukung pelayanan pendidikan, sumber pembiayaan dan kalender akademik.

3. Evaluasi dalam penelitian ini bertujuan untuk membantu pelaksana program pendidikan inklusif, dalam hal ini lembaga sekolah reguler pada tingkat SD, SMP, dan SMA/SMK penyelenggara pendidikan inklusif di Kodya Banjarmasin dalam hal memahami hambatan dan kendala apa yang ditemui selama menyelenggarakan pendidikan inklusif, kemudian revisi apa yang diperlukan, sehingga prosedur lebih lanjut dapat dimonitor, dikontrol dan diminimalisir.

Guna mendapatkan informasi ini perlu dilakukan evaluasi terhadap proses (*process evaluation*) diantaranya akan digali data informasi tentang bagaimana kompetensi, minat dan profil guru yang mengajar di kelas inklusif, bagaimana proses belajar mengajar yang dilakukan apa kendala yang ditemui ketika anak berkebutuhan khusus belajar di kelas yang sama dengan anak reguler, bagaimana pelaksanaan ekstra kurikuler, kendala apa yang ditemui ketika melakukan identifikasi dan asesmen terhadap anak berkebutuhan khusus, kendala apa yang ditemui dalam pembuatan dan pelaksanaan program pembelajaran individual, bagaimana struktur sosial dan sosialisasi anak berkebutuhan khusus dengan anak reguler pada umumnya.

4. Evaluasi dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat

hasil yang diperoleh, dan apa yang perlu dilakukan lebih lanjut berkaitan dengan implementasi program pendidikan inklusif yang telah dilakukan! Hasil apa yang dipetik oleh siswa dengan adanya pendidikan inklusif disekolah reguler.

Guna menjawab pertanyaan tersebut perlu dilakukan evaluasi produk (*product evaluation*). Pada penelitian ini akan diungkap bagaimana perkembangan kognitif dan emosi siswa baik yang reguler maupun siswa berkebutuhan khusus, bagaiman life skill dan vocational skill siswa, sikap sosial dan sikap spiritual siswa setelah mengikuti program pendidikan inklusif.

5. Evaluasi dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan akibat program pendidikan inklusif. Evaluasi ini bertujuan membantu daur ulang dalam mengambil sebuah keputusan. Evaluasi terhadap dampak (*outcome evaluation*) merupakan tahap akhir dari rangkaian evaluasi. Dalam penelitian ini dampak pelaksanaan program pendidikan inklusif terhadap anak berkebutuhan khusus dilihat pada dua hal yaitu: (a) bagaimana kelanjutan studi ke jenjang pendidikan berikutnya (b) bagaimana anak berkebutuhan khusus dapat diterima di dunia kerja.

## BAGIAN 4

### MASUKAN (INPUT) PENDIDIKAN INKLUSIF

Efektivitas masukan (*input*) mencakup analisis persoalan yang berhubungan dengan bagaimana penggunaan sumber-sumber yang tersedia, dan alternatif-alternatif strategi yang harus dipertimbangkan untuk mencapai suatu program. Efektivitas *input* membantu menyusun keputusan, menemukan sumber-sumber dan strategi untuk mencapai kebutuhan.

Efektivitas masukan (*input*) merupakan sesuatu yang dipersyaratkan. Orientasi utama evaluasi masukan ialah mengemukakan suatu program yang dapat dicapai dan apa yang diinginkan. Sub-sub komponen yang menjadi indikator dalam mengevaluasi masukan pada program pendidikan inklusif pada tingkat sekolah dasar di Banjarmasin, terdiri atas: Rekrutmen siswa, sosial ekonomi orang tua siswa, rekrutmen guru, kurikulum, sarana dan prasarana, pembiayaan dan kalender akademik.

#### **1. Rekrutmen siswa berkebutuhan khusus**

Data rekrutmen siswa berkebutuhan khusus di SDN Banua Anyar 8 diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala Sekolah. Wawancara difokuskan pada indikator yang berkaitan dengan rekrutmen siswa berkebutuhan khusus, yaitu cara sekolah melakukan penerimaan siswa

baru, sosialisasi kepada masyarakat sekitar, apakah sekolah membentuk Tim penerimaan siswa baru, pelibatan para ahli seperti dokter atau psikolog, bagaimana respon masyarakat sekitar sekolah dengan penyelenggaraan pendidikan inklusif, kendala dalam identifikasi awal terhadap anak berkebutuhan khusus yang mendaftar sebagai siswa baru, dan kendala secara umum yang dialami panitia penerimaan siswa baru.

Secara praktis identifikasi calon siswa inklusif di SDN Banua Anyar 8 terbagi dua komponen yaitu: pertama, informasi data objektif yaitu berupa nilai laporan hasil belajar untuk mengetahui siswa yang mengalami kesulitan belajar (*learning disability*) maupun siswa yang tergolong lamban belajar (*slow learner*). Kedua, melakukan identifikasi dan asesmen terhadap calon siswa yang mengalami kebutuhan khusus melalui penerimaan siswa baru. Seperti petikan wawancara dengan responden sebagai berikut:

Yang dilakukan sekolah saya dalam penerimaan siswa baru, dan rekrutmen anak berkebutuhan khusus, ada dua cara, yaitu yang pertama sekolah menemukan anak berkebutuhan khusus, dari nilai raport dan informasi dari guru kelas terhadap mereka yang dicurigai mengalami keterlambatan dalam belajar. Yang kedua sekolah melakukan pendaftaran mahasiswa baru, dari masyarakat, kemudian sekolah melakukan identifikasi, apakah anak mengalami berkebutuhan khusus, atau tidak? Kalau dicurigai mereka sebagai anak berkebutuhan khusus, kemudian kami adakan identifikasi.

Sosialisasi ke masyarakat juga telah dilakukan dengan baik, memang SDN Banua Anyar 8 ini sebagai salah satu SD yang pertama menyelenggarakan pendidikan inklusif, maka sosialisasi ke masyarakat harus sering dilakukan oleh sekolah untuk mendapatkan dukungan penyelenggaraan pendidikan inklusif. Seperti petikan wawancara sebagai berikut:

Kan ...sekolah saya ini terletak di Bantaran sungai barito pak...rentan sekali melahirkan anak berkebutuhan khusus.

Kemudian tahun berikutnya, kami hanya sosialisasi ketika penerimaan raport, satu semester satu kali sosialisasi... ternyata hanya dari mulut ke mulut masyarakat sudah mendengar bahwa SDN Banua Anyar 8 menerima anak berkebutuhan khusus.

SDN Banua Anyar 8 juga membentuk panitia rekrutmen siswa anak berkebutuhan khusus, yang terdiri dari Pimpinan sekolah, unsur guru dan juga melibatkan ahli seperti dokter dan psikolog yang merupakan tenaga sewaan sekolah yang sifatnya sementara. Masyarakat di sekitar SDN Banua Anyar 8 sangat antusias menyambut di bukanya pendidikan inklusi di sekolah ini. Bahkan hampir semua masyarakat di Banjarmasin mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif di SD ini. Hasil wawancara dengan kepala sekolah berikut ini:

Kalau respon masyarakat sekitar SDN Banua hanyar 8 ini sangat mendukung penyelenggaraan pendidikan

inklusif, malah mereka berterima kasih anaknya yang berkebutuhan khusus bisa masuk sekolah. Bahkan tidak hanya dari masyarakat disekitar Banua anyar 8 saja pak...hampir seluruh masyarakat di Banjarmasin, yang memiliki anak berkebutuhan khusus diantar ke sekolah saya ini. Makanya pak...banyak betul ABK di sekolah saya ini, saya sampai kuwalahan lo pak....bayangkan hampir seperti SLB lo pak di sini...bahkan ada juga yang pindahan dari SLB, katanya orang tuanya bangga kalau anaknya bisa sekolah di reguler.

Kendala yang dialami sekolah dalam rekrutmen anak berkebutuhan khusus tidak terlalu banyak, bahkan hampir tidak ada. Ketika sekolah melakukan sosialisasi dengan baik kepada masyarakat, maka sekolah akan tidak banyak menemui kendala dalam rekrutmen anak berkebutuhan khusus, kesadaran masyarakat yang semakin tinggi akan memberikan dukungan kelancaran rekrutmen siswa. Seperti dituturkan oleh kepala sekolah sebagai berikut:

Sebenarnya tidak banyak sih..kendalanya, memang ada seperti misalnya anak yang dicurigai tergolong lambat belajar atau *slowlearner*, ini banyak orang tua yang memprotesnya, karena katanya tidak ahli mengidentifikasi anaknya tergolong lamban belajar. Kendala yang kedua banyak orang tua yang protes kalau anaknya dikatakan sebagai anak berkebutuhan khusus, panitia penerimaan siswa baru belum memiliki tenaga ahli dalam melakukan identifikasi anak berkebutuhan

khusus, ini menjadi kendala di tahun-tahun awal kami menyelenggarakan pendidikan inklusif.

Berdasarkan beberapa informasi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa rekrutmen anak berkebutuhan khusus di SDN Banua Anyar 8, berjalan dengan "sangat baik", hal ini ditandai dengan banyaknya anak berkebutuhan khusus masuk di sekolah ini. Sekolah tidak banyak menemukan kendala, ini diakibatkan karena sekolah sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya anak berkebutuhan khusus masuk sekolah di sekolah reguler.

Data rekrutmen siswa berkebutuhan khusus di SDN Banua Anyar 4 di peroleh dari hasil wawancara dengan Kepala Sekolah. Wawancara di fokuskan pada indikator yang berkaitan dengan rekrutmen siswa berkebutuhan khusus, yaitu cara sekolah melakukan penerimaan siswa baru, sosialisasi kepada masyarakat sekitar, apakah sekolah membentuk Tim penerimaan siswa baru, pelibatan para ahli seperti dokter atau psikolog, bagaimana respon masyarakat sekitar sekolah dengan penyelenggaraan pendidikan inklusif, kendala dalam identifikasi awal terhadap anak berkebutuhan khusus yang mendaftar sebagai siswa baru, dan kendala secara umum yang dialami panitia penerimaan siswa baru.

Cara yang dilakukan sekolah dalam rekrutmen anak berkebutuhan khusus adalah melakukan identifikasi dan asesmen terhadap calon siswa yang mengalami kebutuhan khusus melalui penerimaan siswa baru. Seperti petikan

wawancara dengan responden sebagai berikut:

Di sekolah saya hanya ada satu cara pak rekrutmen ABK yaitu sekolah melakukan pendaftaran mahasiswa baru, terhadap masyarakat yang mempunyai anak berkebutuhan khusus, karena di sekolah kami ini tidak ada yang *slowlearner*.

Sekolah kurang melakukan sosialisasi terhadap masyarakat sekitar, sehingga banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa SDN Banua Anyar 4 adalah penyelenggara pendidikan inklusif, dukungan masyarakat masih sangat rendah, ini terbukti anak berkebutuhan khusus yang masuk ke sekolah ini hanya sedikit, tidak sebanding dengan di SDN Banua Anyar 8, padahal letak kedua sekolah ini tidak jauh berbeda. Seperti kutipan wawancara berikut:

Sekolah melakukan sosialisasi ketika penerimaan rapor saja, karena dirasa masyarakat sudah tahu dari SDN Banua Anyar 8, masalahnya tidak ada biaya untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara khusus.

Sekolah juga tidak membentuk panitia khusus dalam rekrutmen siswa baru berkebutuhan khusus, hanya seperti tahun-tahun sebelum menjadi inklusif, panitia di koordinir oleh Kepala Sekolah yang dibantu oleh guru-guru. Dengan pertimbangan minimnya pembiayaan sekolah juga tidak melibatkan tim ahli seperti dokter maupun psikolog. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak tertarik memasukkan



anaknya ke sekolah ini. Terangkup dalam petikan wawancara sebagai berikut:

Ada pak sekolah membentuk panitia penerimaan siswa baru, tetapi tidak secara khusus. Dokter, atau psikolog Di SDN Banua anyar 4 ini yang menjadi ahli ya guru honor saja lulusan PLB Unlam Banjarmasin, Kalau Dokter atau psikolog kami tidak punya, terlalu mahal biayanya.

Berdasarkan informasi Kepala sekolah respon masyarakat sekitar sekolah sebenarnya sangat positif, banyak orang tua/masyarakat sekitar yang berharap sekolah ini menyelenggarakan pendidikan inklusif, mereka sangat menunggu anaknya yang berkebutuhan khusus bisa sekolah di dekat lingkungan rumah. Petikan wawancara sebagai berikut:

Respon masyarakat sekitar SDN Banua hanyar 4 ini sangat mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif, banyak masyarakat yang memiliki anak berkebutuhan khusus, menghendaki anaknya sekolah di dekat dengan rumah, agar bisa mengawasi anak dengan baik, lagian Ibunya supaya ngga terlalu repot.

Kendala yang dialami sekolah dalam identifikasi awal terhadap anak berkebutuhan khusus maupun kendala secara keseluruhan dalam rangkaian rekrutmen siswa berkebutuhan khusus adalah seperti petikan wawancara sebagai berikut:

Kendala yang ditemui SDN Banua Anyar 4 dalam penerimaan murid baru, terutama kepada anak berkebutuhan khusus, seperti kami kurang tenaga PLB sehingga banyak guru yang tidak mengerti karakteristik ABK, kendala lain terkadang ada orang tua ABK yang masih malu menyekolahkan anaknya di SD reguler.

Panitia penerimaan siswa baru belum memiliki tenaga ahli dalam melakukan identifikasi anak berkebutuhan khusus, ini menjadi kendala di tahun-tahun awal kami menyelenggarakan pendidikan inklusif.

Berdasarkan informasi di atas dapat ditarik kesimpulan cara rekrutmen anak berkebutuhan khusus di SDN Banua Anyar 4 masih "rendah". hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi masyarakat yang dilakukan oleh sekolah, kerja tim yang belum maksimal dan kurangnya kemampuan sekolah dalam mengidentifikasi anak berkebutuhan khusus yang masuk.

Data rekrutmen siswa berkebutuhan khusus di SDN Gadang 2 di peroleh dari hasil wawancara dengan Kepala Sekolah. Wawancara di fokuskan pada indikator yang berkaitan dengan rekrutmen siswa berkebutuhan khusus, yaitu cara sekolah melakukan penerimaan siswa baru, sosialisasi kepada masyarakat sekitar, apakah sekolah membentuk Tim penerimaan siswa baru, pelibatan para ahli seperti dokter atau psikolog, bagaimana respon masyarakat sekitar sekolah dengan penyelenggaraan pendidikan inklusif, kendala dalam identifikasi awal terhadap anak

berkebutuhan khusus yang mendaftar sebagai siswa baru, dan kendala secara umum yang dialami panitia penerimaan siswa baru.

Secara praktis identifikasi calon siswa inklusif di SDN Gadang 2 terbagi dua komponen yaitu: pertama, informasi data objektif yaitu berupa nilai laporan hasil belajar untuk mengetahui siswa yang mengalami kesulitan belajar (*learning disability*) maupun siswa yang tergolong lamban belajar (*slow learner*). Kedua, melakukan identifikasi dan asesmen terhadap calon siswa yang mengalami kebutuhan khusus. Seperti petikan wawancara sebagai berikut:

ada dua cara, yaitu yang pertama sekolah menemukan anak berkebutuhan khusus, dari nilai raport dan informasi dari guru kelas terhadap mereka yang dicurigai mengalami keterlambatan dalam belajar. Yang kedua sekolah melakukan pendaftaran mahasiswa baru, dari masyarakat.

Sosialisasi sekolah terhadap masyarakat di sekitar SDN Gadang 2 tentang pentingnya pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, membawa dampak kepada banyaknya anak berkebutuhan khusus masuk di sekolah ini, ya walaupun tidak sebanyak di SDN Banua Anyar 8, selain itu, sekolah juga melakukan sosialisasi terhadap pentingnya sekolah penyelenggaraan pendidikan inklusif, yaitu dilakukan pada saat penerimaan raport. Dengan cara yang santun terhadap kondisi masyarakat dari berbagai suku, sekolah mampu menarik perhatian masyarakat untuk

menyekolahkan anaknya. Seperti rekaman wawancara berikut:

Sekolah mengundang warga masyarakat sekitar untuk dimintai pendapat apakah masyarakat menyetujui sekolah ini menyelenggarakan pendidikan inklusif, memasukkan anak berkebutuhan khusus belajar bersama-sama anak normal? Ternyata banyak masyarakat yang mendukung, karena memang masyarakat di sekitar sekolah ini banyak mempunyai anak berkebutuhan khusus. " Masyarakat di sekitar SDN Gadang 2 merupakan gabungan dari berbagai suku, ada Jawa, Madura, Banjar dan Sunda. Mereka banyak yang memiliki anak berkebutuhan khusus".

Tim penerimaan siswa baru yang memang dibentuk secara khusus dan di ketuai oleh guru koordinator penyelenggara inklusif, yang dibantu oleh beberapa ahli seperti dokter, psikolog yang di honor secara insidental mampu bekerja dengan baik dalam rekrutmen anak berkebutuhan khusus. Berikut rekaman wawancara dengan responden di SD Gadang 2:

Ya...ada tim pastinya pak...sebagai ketua tim adalah coordinator penyelenggara pendidikan inklusif, dan dibantu oleh para dewan guru.

Apakah sekolah dalam rekrutmen siswa berkebutuhan khusus melibatkan para ahli seperti Dokter, atau psikolog?

Di sekolah saya ini yang menjadi tenaga ahli dalam membantu mengidentifikasi anak berkebutuhan khusus adalah psikolog, dan juga atas rekomendasi Dokter. Dan mulai tahun 2013 sudah banyak teman-teman mahasiswa dari PLB unlam yang masuk menjadi guru pembimbing khusus di sekolah ini.

Respon masyarakat sekitar SDN Gadang 2 terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif, cukup tinggi, hal ini dapat terlihat dari banyaknya anak berkebutuhan khusus yang masuk pada sekolah ini. Ada juga orang tua yang anaknya sekolah di SLB dipindahkan ke SDN Gadang 2, artinya masyarakat mulai menyadari keuntungan anak berkebutuhan khusus sekolah di reguler. Berikut petikan wawancara:

Kalau respon masyarakat sekitar SDN Gadang 2 ini sangat mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif, malah mereka berterima kasih anaknya yang berkebutuhan khusus bisa masuk sekolah. Bahkan tidak hanya dari masyarakat disekitar SDN Gadang 2 saja. Bisa dari SLB Dharmawanita juga pindah ke Gadang 2. Rupanya masyarakat senag menyekolahkan anaknya ABK ke sekolah reguler daripada ke SLB.

Kendala yang dialami sekolah dalam rekrutmen anak berkebutuhan khusus, pada dasarnya hampir sama dengan sekolah penyelenggara inklusif yang lain seperti: protes orang tua yang anaknya di golongan sebagai

anak berkebutuhan khusus, kurangnya kemampuan guru mengidentifikasi anak berkebutuhan khusus. Berikut petikan wawancara: Ya pak banyak kendalanya, seperti misalnya anak yang dicurigai tergolong lambat belajar atau slowlearner, ini banyak orang tua yang memprotesnya, karena katanya tidak ahli mengidentifikasi anaknya tergolong lamban belajar, sebagian besar guru kami tidak memiliki banyak pengetahuan untuk identifikasi anak lamban belajar, untuk itu kami meminta bantuan dari PLB unlam untuk melakukan identifikasi ini. Kendala yang kedua banyak orang tua yang protes kalau anaknya dikatakan sebagai anak berkebutuhan khusus, mereka menuntut dilakukan sama seperti anak yang lain. Tetapi dengan banyak sosialisasi kepada mereka akhirnya memahami juga.

Panitia penerimaan siswa baru masih sulit melakukan identifikasi anak berkebutuhan khusus, ini menjadi kendala di tahun-tahun awal kami menyelenggarakan pendidikan inklusif. Banyak orang tua yang tidak menerima bila anaknya dikatakan anak berkebutuhan khusus.

Berdasarkan data-data di atas dapat disimpulkan bahwa rekrutmen anak berkebutuhan khusus di SDN Gadang 2 berhasil "sangat baik" Berkat usaha sekolah yang rajin dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat, keseriusan sekolah dalam membentuk tim, dan pastinya di dukung oleh kerjasama yang baik dari Tim.

Data rekrutmen siswa berkebutuhan khusus di SDN Kuin Selatan 3 di peroleh dari hasil wawancara dengan Kepala Sekolah. Wawancara di fokuskan pada indikator yang berkaitan dengan rekrutmen siswa berkebutuhan khusus, yaitu cara sekolah melakukan penerimaan siswa baru, sosialisasi kepada masyarakat sekitar, apakah sekolah membentuk Tim penerimaan siswa baru, pelibatan para ahli seperti dokter atau psikolog, bagaimana respon masyarakat sekitar sekolah dengan penyelenggaraan pendidikan inklusif, kendala dalam identifikasi awal terhadap anak berkebutuhan khusus yang mendaftar sebagai siswa baru, dan kendala secara umum yang dialami panitia penerimaan siswa baru.

Cara yang dilakukan sekolah dalam rekrutmen anak berkebutuhan khusus adalah melakukan identifikasi dan asesmen terhadap calon siswa yang mengalami kebutuhan khusus melalui penerimaan siswa baru. Seperti petikan wawancara dengan responden sebagai berikut:

Di SDN Kuin Selatan 3 hanya ada satu cara rekrutmen ABK yaitu sekolah melakukan pendaftaran mahasiswa baru, terhadap masyarakat yang mempunyai anak berkebutuhan khusus, kalau ada anak berkebutuhan khusus di sekitar sekloh ini, atau yang mendaftar langsung kami terima.

Sekolah kurang melakukan sosialisasi terhadap masyarakat sekitar, sehingga banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa SDN Banua Anyar 4 adalah

penyelenggara pendidikan inklusif, dukungan masyarakat masih sangat rendah, ini terbukti anak berkebutuhan khusus yang masuk ke sekolah ini hanya sedikit. Seperti kutipan wawancara bahwa, sekolah melakukan sosialisasi ketika penerimaan rapor, karena sulit, masyarakat di sini untuk pertemuan, kebanyakan orang tua repot bekerja mencari nafkah.

Sekolah juga tidak membentuk panitia khusus dalam rekrutmen siswa baru berkebutuhan khusus, hanya seperti tahun-tahun sebelum menjadi inklusif, panitia di koordinir oleh Kepala Sekolah yang dibantu oleh guru-guru. Dengan pertimbangan minimnya pembiayaan sekolah juga tidak melibatkan tim ahli seperti dokter maupun psikolog. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak tertarik memasukkan anaknya ke sekolah ini. Terangkup dalam petikan wawancara sebagai berikut:

Tidak ada tim khusus yang menjadi panitia penerimaan murid baru, ya kami atas ide Kepala sekolah menjadi ketua tim panitia.

Sekolah saya tidak memiliki tenaga ahli pak...baik psikolog maupun Dokter, kami mereka-reka sendiri saja untuk mengetahui apakah anak berkebutuhan khusus atau lain, kami sekolah tidak memiliki dana untuk membiayai Dokter atau psikolog.

Berdasarkan informasi Kepala sekolah respon masyarakat sekitar sekolah sebenarnya sangat positif, banyak orang tua/masyarakat sekitar yang berharap



sekolah ini menyelenggarakan pendidikan inklusif, mereka sangat menunggu anaknya yang berkebutuhan khusus bisa sekolah di dekat lingkungan rumah. Kendala yang dialami sekolah dalam identifikasi awal terhadap anak berkebutuhan khusus maupun kendala secara keseluruhan dalam rangkaian rekrutmen siswa berkebutuhan khusus adalah seperti petikan wawancara sebagai berikut:

Kendala yang ditemui SDN Kuin selatan 3 dalam penerimaan murid baru, terutama kepada anak berkebutuhan khusus, seperti kami kurang tenaga PLB sehingga banyak guru yang tidak mengerti karakteristik ABk, kendala lain terkadang ada orang tua ABK yang masih malu menyekolahkan anaknya di SD reguler.

Panitia penerimaan siswa baru belum memiliki tenaga ahli dalam melakukan identifikasi anak berkebutuhan khusus, kendala lain adalah timbul dari orang tua yang masih banyak belum paham atas pentingnya anak masuk sekolah, mereka tidak menyadari bahwa pendidikan itu penting bagi anak. Sekolah juga masih perlu sosialisasi lagi yang luas kepada masyarakat.

Berdasarkan temuan di atas maka dapat disimpulkan bahwa cara rekrutmen anak berkebutuhan khusus di SDN Kuin Selatan 3 “masih rendah”. Penyebabnya adalah kurangnya sosialisasi masyarakat yang dilakukan oleh sekolah, kerja tim yang belum maksimal dan kurangnya kemampuan sekolah dalam mengidentifikasi anak berkebutuhan khusus yang masuk.

## **2. Kondisi Sosial Ekonomi Orangtua Siswa berkebutuhan khusus di sekolah reguler**

Indikator kondisi sosial ekonomi orangtua siswa berkebutuhan khusus mengadopsi dari panduan-panduan pengukuran keluarga edukatif yang dikembangkan oleh Sudiapermana. Deskripsi data hasil tabulasi tentang latar belakang keluarga siswa berkebutuhan khusus yang masuk di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dapat ditampilkan pada Gambar 4.1

Berdasarkan Gambar 4.1, terlihat bahwa data yang diperoleh di SDN Banua Anyar 8, prosentase penghasilan rata-rata orang tua 3-5 juta rupiah mendapat perolehan tertinggi sebesar 51-85%, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa peserta didik sekolah inklusi SDN Banua Anyar 8 berasal dari keluarga mapan. Pernyataan ini didukung dengan pekerjaan ayah dan ibu yang prosentase jenis pekerjaannya sangat variatif, dari PNS, Karyawan BUMN hingga TNI-Polri memperlihatkan porsi seimbang. PNS 14,81%, Karyawan BUMN 11,11%, TNI-Polri 7,41% Kondisi sosial-ekonomi keluarga yang seperti ini harusnya membuat dukungan terhadap efektifitas proses pendidikan yang ditempuh buah hati dapat maksimal.

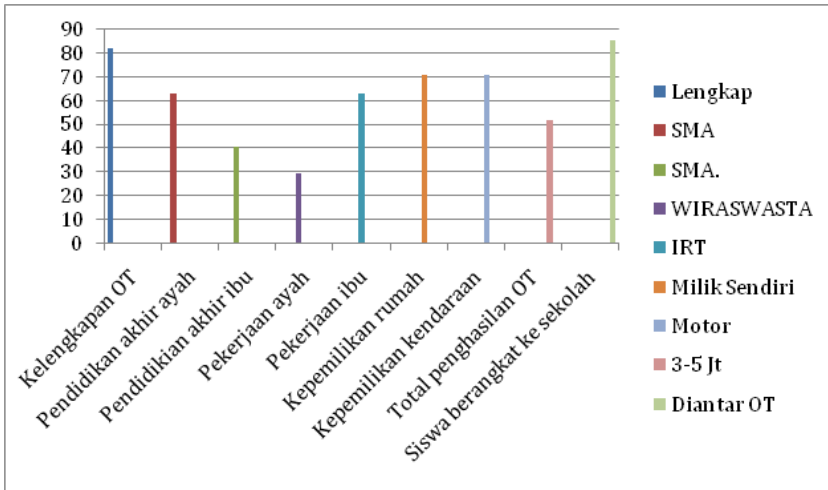


Diagram 4.1 Deskripsi data kondisi Sosial Ekonomi orangtua

Siswa berkebutuhan khusus di SDN Banua Anyar 8

Latar belakang pendidikan orang tua di SDN Banua Anyar 8 inipun menarik untuk dianalisis. Sebesar 3,70% dari 27 orang tua siswa yang didata menempuh pendidikan hingga pasca sarjana. Keberadaan orang tua yang berlatar pendidikan tinggi harusnya dapat membawa pengaruh positif untuk efektifitas layanan pendidikan di sekolah lewat partisipasi aktif mereka. Sekolah ini merupakan satu-satunya diantara tiga sekolah yang diteliti, memiliki peserta didik yang orang tuanya menempuh pendidikan hingga pasca sarjana.

Data di atas didukung melalui data hasil wawancara yang dilakukan kepada beberapa orang tua siswa di SDN Banua Anyar 8 sebagai respondennya. Salah satu responden

memaparkan kondisi sosial ekonomi orang tua peserta didik sekolah inklusi pada umumnya berasal dari keluarga mapan. Responden A berkata, "Pandangan saya terhadap biaya pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus masih standar-standar saja, ya.. sesuai dengan apa yang di dapatkan. Apalagi anak saya juga melakukan terapi diterapis diluar lingkungan sekolah , jadi saya mengeluarkan biaya yang lebih untuk pendidikan anak saya. Apalagi kadang saya merasa bahwa guru-guru ataupun terapis yang mengajar dan menerapi anak saya sangat ikhlas dan berbesar hati mengajarkan dan memberikan pendidikan kepada anak saya. Jadi untuk sementara ini saya merasa tidak terbebani dengan biaya pendidikan anak saya".

Reponden B berkata, "Menurut saya sebanding lah dengan apa yang di dapatkan anak saya, biarpun biayanya tidak seperti anak lain atau anak pada umumnya tetapi yang anak saya mendapatkan cukup apa yang dia butuhkan, ada saja timbal baliknya antara biaya yang saya keluarkan dengan apa yang anak saya dapatkan. Karena anak yang mempunyai hambatan ini kan harus penuh kesabaran, telaten dan harus bisa mengambil hati anak supaya bisa dekat dan percaya dengan gurunya. Jadi guru tersebut juga berusaha keras supaya si anak ini setidaknya bisa memfungsikan sisa kemampuan yang ada di dirinya, paling tidak bisa sedikit lebih mandiri lah. Jadi menurut saya sebanding saja biaya dan apa yang anak saya dapatkan."

Reponden lainnya juga memaparkan hal yang serupa, responden C berkata, "Menurut saya biaya pendidikan ABK sangat sesuai dengan apa yang diberikan oleh pihak

sekolah tetapi ini bagi kami yang ekonominya termasuk rata-rata, kami juga tidak tau menurut para orang tua yang ekonomiya di bawah rata-rata”.

### 1) SDN Banua Anyar 4

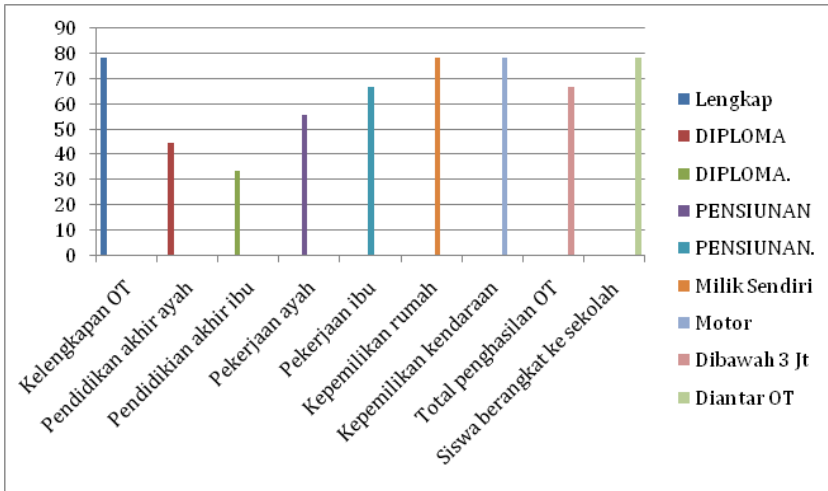


Diagram 4.2 Deskripsi data kondisi Sosial Ekonomi orangtua

Siswa berkebutuhan khusus di SDN Banua Anyar 4

Dari sajian data di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kondisi sosial ekonomi orang tua peserta didik sekolah inklusi SDN Banua Anyar 4 pada umumnya berasal dari keluarga menengah ke bawah, dibuktikan dengan penghasilan dibawah tiga juta rupiah dengan prosentasi sebesar 66,67%. Pernyataan ini didukung dengan pekerjaan ayah dan ibu yang prosentase tertingginya ada pada jenis

pekerjaan bukan PNS maupun karyawan masing-masing mendapat prosentase 55,56% serta 66,67%, kemudian dilihat dari bagaimana peserta didik menempuh jarak ke sekolah sebagian besar diantar orang tua naik sepeda motor yakni 77,78% juga kepemilikan rumah tidak bertingkat sebesar 66,67%.

Data di atas dikuatkan melalui data hasil wawancara yang dilakukan kepada beberapa orang tua siswa di SDN Banua Anyar 4 sebagai respondennya. Salah satu responden memaparkan kondisi sosial ekonomi orang tua peserta didik sekolah inklusi SDN Banua Anyar 4 pada umumnya yang berasal dari keluarga menengah ke bawah. Responden A berkata "Untuk biaya pendidikan yang bagus menurut saya memang memerlukan biaya yang tidak sedikit, saya menyekolahkan anak disini karena biaya sekolah disini tergolong murah, karena dibantu oleh pemerintah, kami hanya dibebankan iuran sukarela dari sekolah untuk membantu penambahan gaji bagi guru pendampingnya".

Data di atas juga sesuai dengan pendapat reponden lainnya. Reponden B berkata "Biaya pendidikan tidak memberatkan kami, bahkan saya memberi lebih agar harapan anak saya dapat dilayani dengan semaksimal mungkin, dalam pembiayaan orang tua memberi secara suka rela sesuai dengan kemampuan masing-masing. Anak saya pun saya berikan les tambahan disekolah" Kondisi sosial-ekonomi keluarga akan mempengaruhi daya dukung keluarga untuk pendidikan buah hati mereka, semakin baik kondisi tersebut akan semakin baik pula dukungan keluarga agar proses pendidikan yang anak-anak mereka

tempuh efektif. Latar belakang pendidikan keluarga yang didominasi oleh lulusan SD-SMA (22,22%) akan turut mempengaruhi partisipasi keluarga dalam memperhatikan kualitas pendidikan anak-anak mereka.

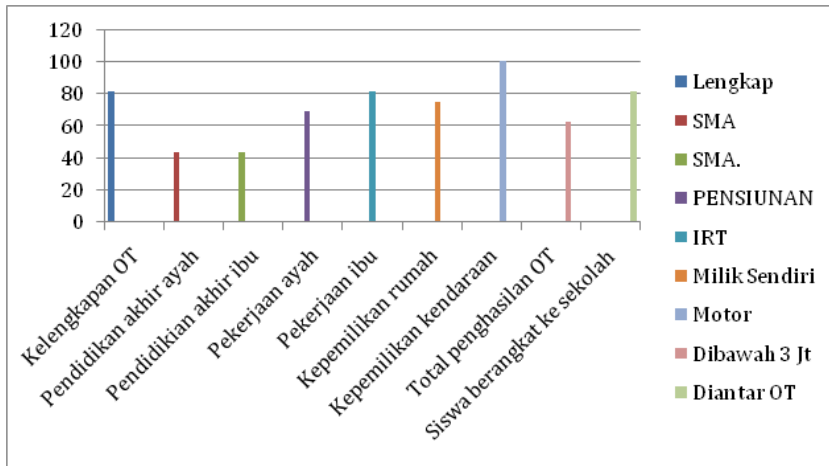


Diagram 4.3 Deskripsi data kondisi Sosial Ekonomi orangtua

### Siswa berkebutuhan khusus di SDN Kuin Selatan 3

Data di atas menggambarkan bahwa latar belakang pendidikan keluarga yang didominasi oleh lulusan SD-SMA. Kondisi sosial ekonomi orang tua peserta didik sekolah inklusi sdn kuin selatan 3 pada umumnya juga berasal dari keluarga menengah ke bawah, pernyataan ini diperkuat oleh data penghasilan dibawah tiga juta rupiah dengan prosentasi sebesar 62,50%, pekerjaan ayah lain-lain dan ibu yang tidak bekerja masing-masing mendapat prosentase 68,75%, serta 81,25%, kemudian dilihat dari bagaimana peserta didik menempuh jarak ke sekolah sebagian besar

diantar orang tua naik sepeda motor yakni 81,25% juga kepemilikan rumah tidak bertingkat sebesar 100%. Dua data terakhir menunjukkan prosentase yang lebih tinggi dari pada SDN Banua Anyar 4, sehingga kondisi sosial-ekonomi anak-anak di SDN Kuin Selatan 3 berkemungkinan tidak lebih baik dari pada SDN Banua Anyar 4.

Data di atas dikuatkan melalui data hasil wawancara yang dilakukan kepada beberapa orang tua siswa di SDN Kuin Selatan 3 sebagai respondennya. Salah satu responden memaparkan kondisi sosial ekonomi orang tua peserta didik sekolah inklusi pada umumnya berasal dari keluarga menengah ke bawah. Reponden A berkata, "Saya sedikit merasa terbebani dengan biaya pendidikan untuk ABK yang sekarang. Selain memerlukan biaya dalam hal kebutuhan alat tulis untuk sekolah saya juga harus membayar GPK sebesar Rp. 150.000,- per bulannya. Walaupun SPP untuk pendidikan Amin tidak di pungut saya tetap sedikit merasa terbebani dengan membayar GPK ini dikarenakan penghasilan yang pas-pasan dan juga yang saya biaya'i bukan Amin saja tetapi juga ada kakaknya Amin yang sekarang sudah duduk di perguruan tinggi. Tapi, alhamdulillah dari pemerintah ada sedikit bantuan yang diberikan satu kali dalam setahun. Walaupun hanya Rp. 500.000,- dalam satu tahun setidaknya itu bisa membantu saya dalam memenuhi kebutuhan Amin baik itu digunakan untuk alat tulis, pakaian, ataupun kebutuhan lainnya, yang pasti uang itu saya gunakan untuk membeli dan memnuhi kebutuhan Amin yang memang mendesak dan harus diberikan saat itu".



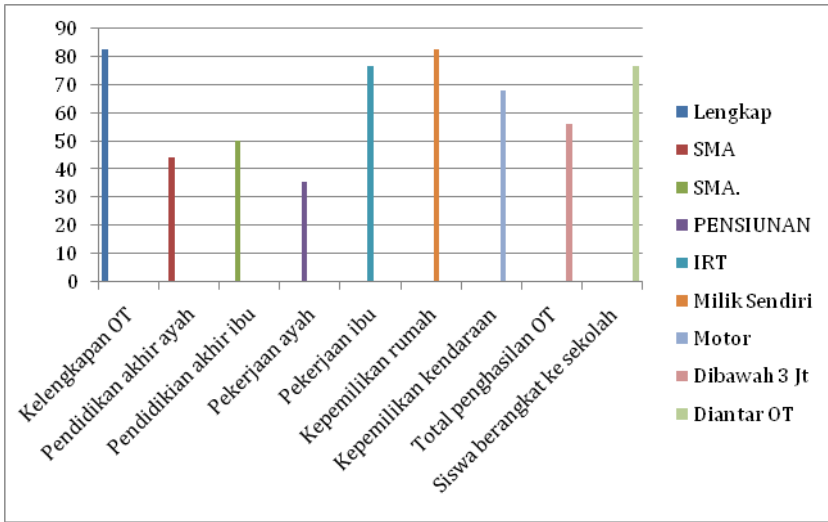


Diagram 4.4 Deskripsi data kondisi Sosial Ekonomi orangtua

### Siswa berkebutuhan khusus di SDN Gadang 2

Dapat disimpulkan berdasar pada data di atas bahwa kondisi sosial ekonomi orang tua peserta didik sekolah inklusi SDN Gadang 2 pada umumnya berasal dari keluarga menengah ke bawah, dibuktikan dengan penghasilan dibawah tiga juta rupiah dengan prosentasi sebesar 55,88%. Pernyataan ini didukung dengan pekerjaan ayah dan ibu yang prosentase tertingginya ada pada jenis pekerjaan bukan PNS maupun Karyawan masing-masing mendapat prosentase 35,29% serta 76,47%, kemudian dilihat dari bagaimana peserta didik menempuh jarak ke sekolah sebagian besar diantar orang tua naik sepeda motor yakni 76,47% juga kepemilikan rumah tidak bertingkat sebesar

88,24%.

Data di atas dikuatkan melalui data hasil wawancara yang dilakukan kepada beberapa orang tua siswa di sekolah inklusi SDN Gadang 2 sebagai respondennya. Salah satu responden memaparkan kondisi sosial ekonomi orang tua peserta didik sekolah inklusi pada umumnya berasal dari keluarga menengah ke bawah. Responden A berkata, "Maunya gratis seperti sekolah negeri pada umumnya akan tetapi kami dari pihak orang tua sadar bahwasanya mengasuh anak ABK sangat sulit. Bagi kami berapa pun biayanya kalau sebanding dengan hasilnya tidak jadi masalah."

Kondisi sosial-ekonomi keluarga akan mempengaruhi daya dukung keluarga untuk pendidikan buah hati mereka, semakin baik kondisi tersebut akan semakin baik pula dukungan keluarga agar proses pendidikan yang anak-anak mereka tempuh efektif. Latar belakang pendidikan keluarga yang didominasi oleh lulusan SD-SMA akan turut mempengaruhi partisipasi keluarga dalam memperhatikan kualitas pendidikan anak-anak mereka.

### **3. Persyaratan Administratif Guru Inklusif**

Guru yang mengajar di kelas inklusif idealnya adalah terdiri dari guru mata pelajaran atau guru kelas dan guru pembimbing khusus (GPK) lulusan PLB yang bertugas membantu kelancaran anak berkebutuhan khusus mengikuti pembelajaran di kelas. Namun kondisi ideal tersebut, sulit dicapai di lapangan apabila diberlakukan persyaratan-persyaratan ideal. Dengan demikian secara operasional

teknis di lapangan diperlakukan persyaratan minimal.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, rekrutmen guru cenderung menggunakan informasi-informasi subjektif dengan asumsi bahwa guru tertentu dapat mengajar di kelas inklusif. Tidak ada proses seleksi guru inklusif secara khusus. Pada sisi lain, bagi guru mengajar di kelas inklusif merupakan beban tersendiri karena materi ajar yang berbeda dengan kelas reguler secara paralel. Hal itu berarti guru perlu membuat rencana pembelajaran dan persiapan mengajar ganda. Tidak ada insentif yang diterima oleh guru karena mengajar di kelas inklusif. Berdasarkan hasil wawancara di lapangan, guru mengajar di kelas inklusif karena tuntutan tugas yang diberikan oleh bidang kurikulum atas persetujuan kepala sekolah. Berdasarkan hasil survei angket yang disebarakan kepada guru yang mengajar di kelas inklusif pada semua tingkatan kelas yang berkaitan dengan persyaratan-persyaratan administrasi guru, yaitu: tingkat pendidikan, latar belakang pendidikan, pengalaman mengajar, pembekalan tentang siswa berkebutuhan khusus, dan kewajiban mengajar.

Hasil jawaban angket dari responden siswa tentang persyaratan administrasi guru yang dipersyaratkan untuk mengajar di kelas inklusif dapat divisualisasikan pada tabel dan gambar sebagai berikut:

Syarat tingkat pendidikan sekurang-kurangnya S-1 PLB terpenuhi yakni sebesar 78, 95%, begitupun untuk ketentuan pengajar harus mengajar sesuai latar belakang pendidikannya telah terpenuhi juga dibuktikan dengan

perolehan 63,16% guru di SDN Banua Anyar 8 Banjarmasin mengajar sesuai ijazah yang dimiliki. Informasi yang tidak kalah baiknya adalah pengajar disana mayoritas memiliki pengalaman mengajar lebih dari 3 tahun. Pertanyaan keempat menggambarkan bahwa pengajar di SDN Banua Anyar 8 Banjarmasin, mayoritas memang telah dipersiapkan sebelum terjun mengajar di kelas inklusi. Butir instrumen kelima adalah tentang keikutsertaan guru dalam seminar maupun workshop terkait dengan penanganan anak berkebutuhan khusus, dari jumlah guru yang dijadikan responden hanya 15,79% yang pernah mengikuti pelatihan maupun seminar, selebihnya 84,21% belum. Diakui oleh banyak guru pelaksanaan workshop maupun seminar belum merata dirasakan oleh sebagian besar guru. Butir instrumen keenam yang membuktikan bahwa pengajar di SDN Banua Anyar 8 juga umumnya diketahui mengajar di kelas reguler.

Data-data di atas menjadi pendukung jika SDN Banua Anyar 8 termasuk sekolah pionir penyelenggara pendidikan inklusi di kota Banjarmasin yang mengupayakan pelayanan maksimal kepada anak berkebutuhan khusus agar dapat menjadi contoh bagi sekolah lainnya.

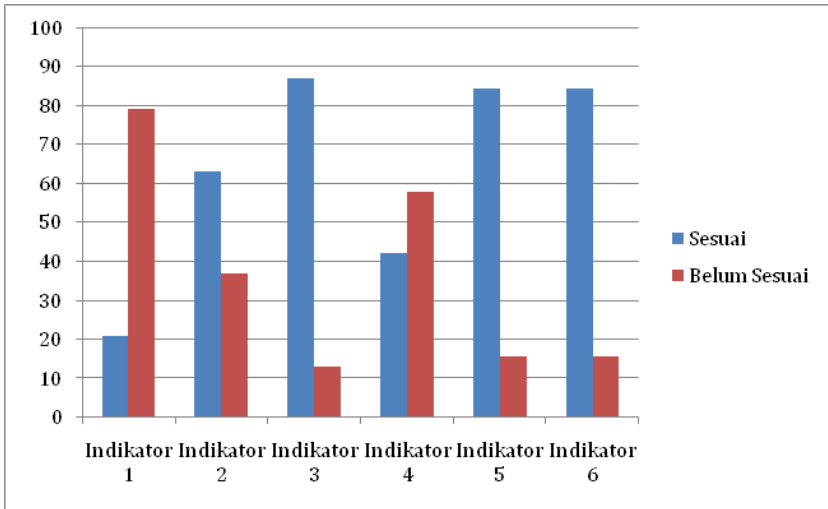


Diagram 4.5 Persyaratan Administrasi Guru di SDN Banua Anyar 8

Berdasarkan data di atas, dapat ditarik kesimpulan 63,93% guru di SDN Banua Anyar 8 telah sesuai dengan persyaratan administrasi guru, sedangkan 34,40% guru belum sesuai.

Hasil wawancara pada beberapa responden yang merupakan pengajar di SDN Banua Anyar 8 menyatakan bahwa memang pada dasarnya mereka belum menguasai sepenuhnya layanan pembelajaran untuk siswa berkebutuhan khusus sebab masih dalam masa pendidikan menempuh S1 PLB atau Pendidikan Khusus, tetapi hampir semua pengajar telah memahami apa yang menjadi prinsip kebutuhan belajar untuk siswa. Hal ini tersirat dalam pernyataan responden A berikut, "Belum menguasai sepenuhnya karena masih kuliah PLB semester 6, dan awalnya itu hanya karena terkejut

bertemu dan diajak bergabung di tim terapi, yaitu okupasi terapi dan terapi wicara. Tapi konsep pembelajaran sendiri masih tergantung pada jenis hambatan anak, kemampuan anak dan pengetahuan orang tuanya. Ada orang tua yang anti ABA karena konsep ABA sendiri, anak seolah-olah dibentak dan orang tua tidak suka, bagi orang tua yang anti Okupasi Terapi bingung kenapa anak saya disuruh loncat-loncat saja kata beliau. Jadi semuanya kembali lagi pada pengetahuan dan keputusan orang tua, kami sebagai guru hanya menyarankan saja.”

Responden B turut menguatkan pernyataan di atas, “Tidak seperti itu, karena tugas perkembangan anak tidak hanya orangtua saja yang berperan aktif, tetapi itu juga tugas guru sebagai pengganti orangtua dirumah, harus seimbang dengan apa yang diajarkan orangtua dirumah dengan yang ada disekolah. Walaupun waktu anak lebih banyak dengan orangtua, orangtua setidaknya harus berkomunikasi dengan wali kelas atau gpk anak bagaimana perkembangan anak disekolah. Agar orangtua juga dapat melihat perkembangan anak saat berada disekolah. Seperti yang sudah saya sampaikan, kenapa tugas perkembangan anak tidak hanya orangtua saja tetapi guru juga berperan aktif dalam tugas perkembangan anak sebagai pengganti orangtua anak dirumah. Karena waktu anak lebih banyak dengan orangtua, orangtua setidaknya harus berkomunikasi dengan wali kelas atau gpk anak bagaimana perkembangan anak disekolah. Agar orangtua juga dapat mengamati perkembangan anak. Tetapi pada kenyataannya, masih ada orangtua yang tidak mengecek perkembangan anak pada

saat disekolah, biarpun sudah ada buku khusus tentang bagaimana perkembangan anak disekolah. Data hasil wawancara menyebutkan bahwa sebagian besar pengajar di SDN Banua Anyar 8 memiliki latar belakang pendidikan luar biasa, baik yang telah selesai menempuh masa pendidikannya maupun yang masih kuliah di program studi pendidikan luar biasa.

Syarat tingkat pendidikan sekurang-kurangnya S-1 PLB belum terpenuhi yakni hanya sebesar 22, 22% jumlah guru yang menjadi responden memiliki ijazah S1 PLB, begitupun untuk ketentuan pengajar harus mengajar sesuai latar belakang.

Perolehan data pendidikan 22,22% guru di SDN Gadang 2 Banjarmasin mengajar sesuai ijazah yang dimiliki. Informasi yang tidak kalah baiknya adalah pengajar disana mayoritas memiliki pengalaman mengajar lebih dari 3 tahun. Pertanyaan keempat menggambarkan bahwa pengajar di SDN Gadang 2 Banjarmasin, kurang dipersiapkan sebelum terjun mengajar di kelas inklusi. Pengalaman mengajar sebesar 85,19% kurang dari tiga tahun. Rata-rata 70% pengajar mengatakan tidak mendapat pembekalan untuk persiapan mengajar di kelas inklusi, seperti seminar, workshop atau sejenisnya. Butir instrumen kelima adalah tentang keikutsertaan guru dalam seminar maupun workshop terkait dengan penanganan anak berkebutuhan khusus, dari jumlah guru yang dijadikan responden hanya 33,33% yang pernah mengikuti pelatihan maupun seminar, selebihnya belum. Diakui oleh banyak guru pelaksanaan workshop maupun seminar belum merata dirasakan

oleh sebagian besar guru. Butir instrumen keenam yang membuktikan bahwa pengajar di SDN Gadang 2 juga umumnya mengajar di kelas reguler.

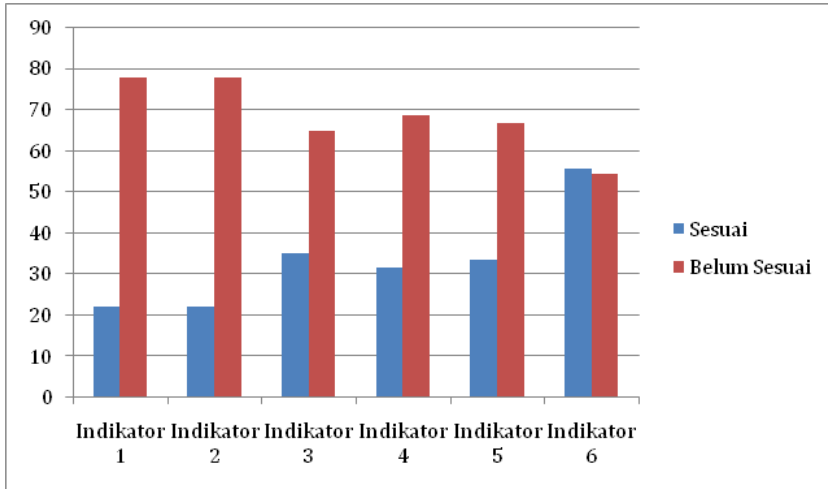


Diagram 4.6 Persyaratan Administrasi Guru SD Gadang 2

Berdasarkan data di atas, dapat ditarik kesimpulan 33,33% guru di SDN Gadang 2 telah sesuai dengan persyaratan administrasi guru, sedangkan ,68,50 % guru belum sesuai.

Hasil rerata di atas semakin jelas menunjukkan bahwa sekolah memiliki persyaratan profil guru yang belum sesuai. Data kuantitatif ini didukung pula oleh data kualitatif hasil wawancara dengan pengajar di SDN Gadang 2. Responden A di SDN Gadang 2 menyatakan, “Saya tidak menolak. Jika orang lain ada menolak, mungkin dikarenakan tidak paham tentang pendidikan inklusif, mungkin mereka tidak ingin ambil pusing karena memang tidak mudah mendidik



abk” melalui pemaparan singkat ini tersirat jika masih ada sebagian warga sekolah yang menolak keberadaan siswa berkebutuhan khusus di sekolah mereka sebab sebagian dari mereka tidak memiliki latar pendidikan yang relevan dengan aplikasi pendidikan inklusi di sekoalah. Data kuantitatif dan kualitatif yang kembali bersesuaian ini semakin menguatkan jika memang pesyaratan profil guru sekolah inklusif di SDN Gadang 2 masih belum sesuai.

Syarat tingkat pendidikan sekurang-kurangnya S-1 PLB belum terpenuhi yakni sebesar 75%, namun ketentuan pengajar harus mengajar sesuai latar belakang pendidikannya tida terpenuhi dibuktikan dengan perolehan 75% guru di SDN Banua Anyar 4 Banjarmasin mengajar tidak sesuai ijazah yang dimiliki. Informasi yang tidak kalah baiknya adalah pengajar disana mayoritas memiliki pengalaman mengajar lebih dari 3 tahun.

Butir instrumen berikutnya yakni pertanyaan keempat menggambarkan bahwa memang pengajar di SDN Banua Anyar 4 Banjarmasin, mayoritas tidak dipersiapkan sebelum terjun mengajar di kelas inklusi. Hal kurang positif ini tertutupi dengan pernyataan di butir instrumen kelima dan keenam yang membuktikan bahwa pengajar di SDN Banua Anyar 4 mengikuti temu ilmiah tentang pendidikan inklusif sebagai *booster* agar dalam prakteknya mereka tetap bisa luwes meski kebanyakan memiliki latar belakang keilmuan diluar pendidikan khusus. Sebanyak 75% pengajar sudah pernah mengikuti seminar atau workshop terkait pendidikan inklusi. Pengajar yang bersangkutan juga umumnya diketahui mengajar di kelas reguler.

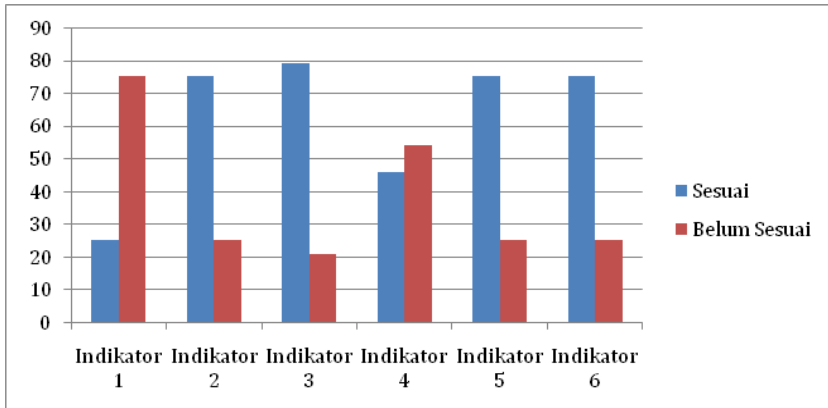


Diagram 4.7 Rangkuman persyaratan administrasi guru di SDN Banua Anyar 4

Berdasarkan data di atas, dapat ditarik kesimpulan 62,50% guru di SDN Banua Anyar 4 telah sesuai dengan persyaratan administrasi guru, sedangkan 37,50 % guru belum sesuai.

Hasil rerata di atas semakin jelas menunjukkan bahwa sekolah memiliki persyaratan profil guru yang sesuai dengan prosentase tertinggi sebesar 56,25%. Data kualitatif yang mendukung data kuantitatif di atas tergambar melalui pemaparan salah satu tenaga pendidik yang menjadi responden di sekolah ini. Berikut pemaparannya "Sangat setuju, yang pertama membantu masyarakat yang mempunyai anak berkebutuhan khusus, kemudian sekolah SDN Banua Anyar 4 ini lebih dikenal dimasyarakat, jadi dari pemerintah ada perhatian khusus untuk menunjuk sekolah ini sebagai sekolah inklusi di kota banjarmasin, tetapi ada kelemahannya juga karena kurangnya guru GPK untuk saat

ini, jadi saya berharap adanya penambahan guru GPK untuk membantu keberlangsungan pembelajaran di sekolah SDN Banua Anyar 4 ini.” Berdasarkan apa yang disampaikan oleh responden ini maka dapat kita pahami bahwa tenaga pendidik disana sudah memiliki persepsi yang baik terhadap pendidikan inklusi, meskipun kekurangan tenaga pendidik yang berlatar belakang PLB mereka tetap berusaha tampil seperti layaknya guru berprofil serta berlatar belakang pendidikan yang relevan dengan pendidikan inklusi agar peserta didik terlayani dengan baik di sekolah. Maka dengan ini tidak salah jika SDN Banua Anyar 4 mendapat kategori sesuai untuk persyaratan profil guru, sebab profil dapat kita artikan lebih fleksibel sebagai sosok yang bersedia memberikan pelayanan optimal tanpa harus selalu terikat dengan gelar akademik.

Syarat pengajar harus menempuh pendidikan sekurang-kurangnya S-1 PLB belum terpenuhi, 100% pengajar yang menjadi responden tidak menempuh prasyarat administrasi pertama. Ditambah dengan mayoritas pengajar disana tidak mengajar sesuai ijazah yang dimiliki. Kemungkinan besar pengajar di SDN Kuin Selatan 3 ini adalah guru-guru senior yang pengalaman mengajarnya mayoritas lebih dari tiga tahun. Rata-rata 92,31% pengajar mengatakan tidak mendapat pembekalan untuk persiapan mengajar di kelas inklusi, seperti seminar, workshop atau sejenisnya. Guru pembimbing khusus di sekolah ini berasal dari guru umum di sekolah itu, dan 100% guru yang menjadi responden belum pernah mengikuti pelatihan maupun seminar terkait pengembangan pendidikan anak berkebutuhan khusus.

Kondisi seperti ini cukup memprihatinkan, sebab kriteria optimalisasi implementasi pendidikan inklusi ditentukan oleh faktor-faktor yang malah sebagian besar mendapat prosentase negatif seperti yang dipaparkan oleh data di atas. Kedepannya data ini akan membantu untuk tindak lanjut di SDN Kuin Selatan 3 Banjarmasin agar para pengajarnya diberikan pembekalan dan persiapan yang lebih matang dalam praktik pendidikan inklusi.

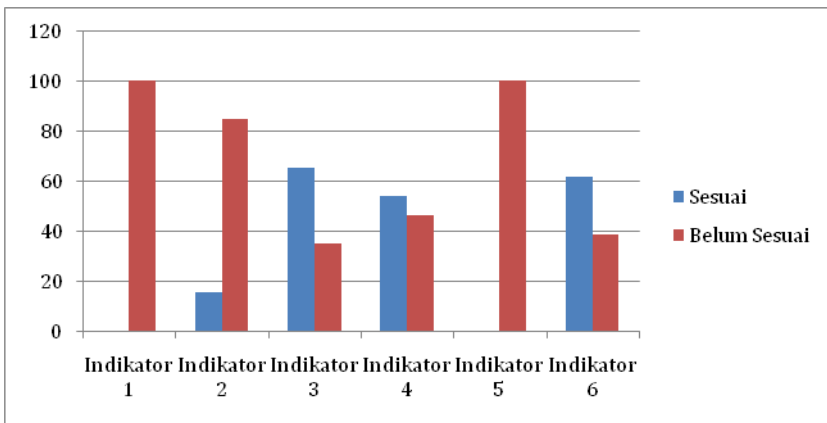


Diagram 4.8 Rangkuman Persyaratan administrasi guru SD Kuin Selatan 3

Berdasarkan data di atas, dapat ditarik kesimpulan 32,67% guru di SDN Kuin Selatan 3 telah sesuai dengan persyaratan administrasi guru, sedangkan 67,30% guru belum sesuai.

Pernyataan di atas lebih dikuatkan lagi oleh data kualitatif, responden A mengatakan “Dalam penguasaan konsep pembelajaran terhadap Anak Berkebutuhan Khusus

sampai saat ini masih dalam tahap belajar, karna juga baru mengajar dilapangan, tetapi untuk konsep pembelajaran dikelas disesuaikan dengan kemampuan anak masing-masing, seperti yang saya ketahui atau pelajari dibangku kuliah.” Umumnya pengajar di Sekolah ini tidak memiliki latar belakang keilmuan yang menaungi pendidikan inklusi, sebagian lagi masih dalam masa pendidikan saat dimintai keterangan.

Seluruh data yang dihasilkan baik melalui teknik pengumpulan data kuantitatif maupun kualitatif memiliki sinkronisasi yang ajeg, sehingga kesimpulannya adalah sekolah pionir penyelenggara pendidikan inklusi memiliki sumber daya tenaga pendidik yang memang lebih relevan latarbelakang keilmuannya dengan pendidikan inklusi seperti SDN Banua Anyar 8 yang sudah sejak lama mengirimkan guru-gurunya untuk belajar tentang pendidikan luar biasa yang didalamnya terdapat kajian terkait pendidikan inklusi.

#### **4. Kurikulum Pendidikan Inklusif**

Pada prinsipnya kurikulum pendidikan inklusif sama dengan kurikulum reguler. Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum sekolah reguler penyelenggara pendidikan inklusif. Kurikulum dimodifikasi sesuai dengan kemampuan peserta didik. Tidak ada kurikulum khusus, untuk sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.

Angket isian tentang kurikulum sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di SDN Banua Anyar 8 menggambarkan data yang berisi empat indikator yang menggambarkan

pelaksanaan kurikulum inklusif. Indikator pertama adalah kurikulum yang berdeferensiasi atau sering disebut kurikulum berbasis pada perbedaan individu yang terurai pada instrumen 1,2,3,4, indikator kedua adalah kurikulum yang berorientasi pada peserta didik, terurai pada instrumen nomor 6, 9, 10, dan 11. Indikator ketiga adalah kurikulum yang menggamit sikap sosial terurai pada instrumen nomor 12,13, 14 dan 15. Indikator keempat adalah kurikulum yang fleksibel, artinya cukup ruang gerak dan tidak kaku, untuk menyesuaikan dengan kondisi anak, yang terurai pada instrumen nomor 5,7,8,16,19 dan 20. Kreteria angket kurikulum di SDN Banua Anyar 8 adalah rendah, sedang dan tinggi. Indikator pertama tentang diferensiasi kurikulum diperoleh data, dari lima responden semua (100%) menyatakan kurikulum berdeferensiasi relevan dilakukan di SDN Banua anyar 8, hal ini terbukti dari rangkuman tabel sebagai berikut:

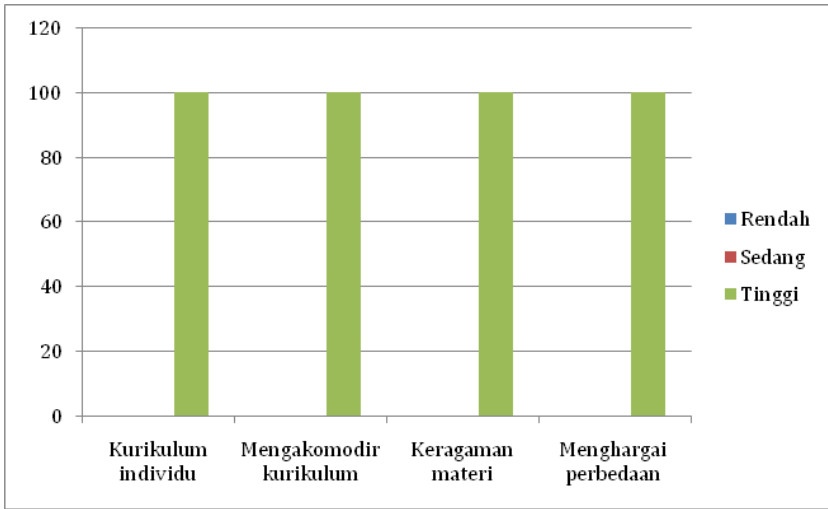
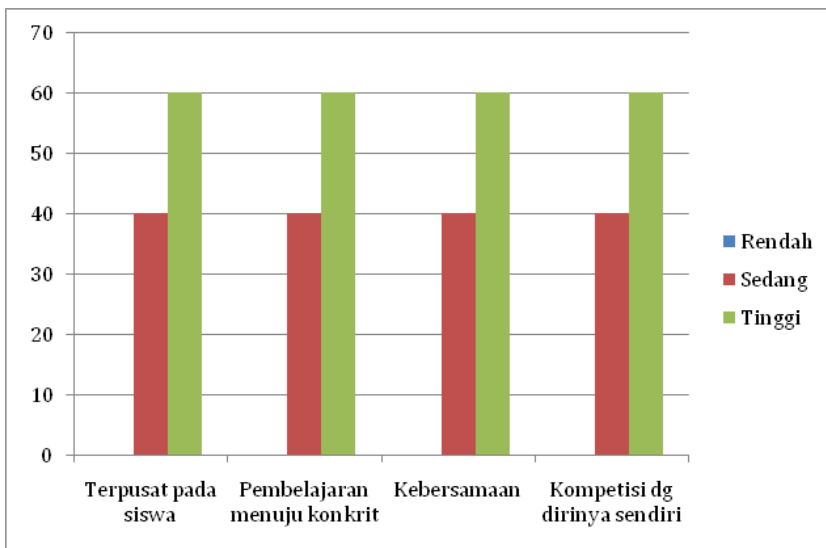


Diagram 4.9 Kurikulum Berdiferensiasi di SDN Banua Anyar

8

Indikator kedua, tentang kurikulum berorientasi kepada peserta didik, terangkum pada Tabel berikut:



Dagram 4.10 Kurikulum beroreantasi peserta didik di SDN Banua Anyar 8

Data di atas menunjukkan, dari lima responden 40% menyatakan sedang dan 60% tinggi, bahwa kurikulum yang dilaksanakan di SDN Banua Anyar 8 telah beroreantasi kepada siswa, yang menyatakan sedang kebanyakan menilai masih diberlakukan kurikulum klasikal, belum sepenuhnya berpihak kepada kebutuhan siswa. Namun sebagian besar dari mereka yaitu sebanyak 60 % kurikulum dinyatakan beroreantasi kepada kebutuhan siswa. Indikator ketiga: Kurikulum menggamit aspek sikap sosial. Pada indikator ini di SDN Banua Anyar 8 diperoleh data 10% responden menyatakan sedang dan 90% responden menyatakan tinggi,



bahwa kurikulum yang dikembangkan dalam pendidikan inklusif telah menggamit aspek sikap sosial. Terbukti dari rangkuman data sebagai berikut

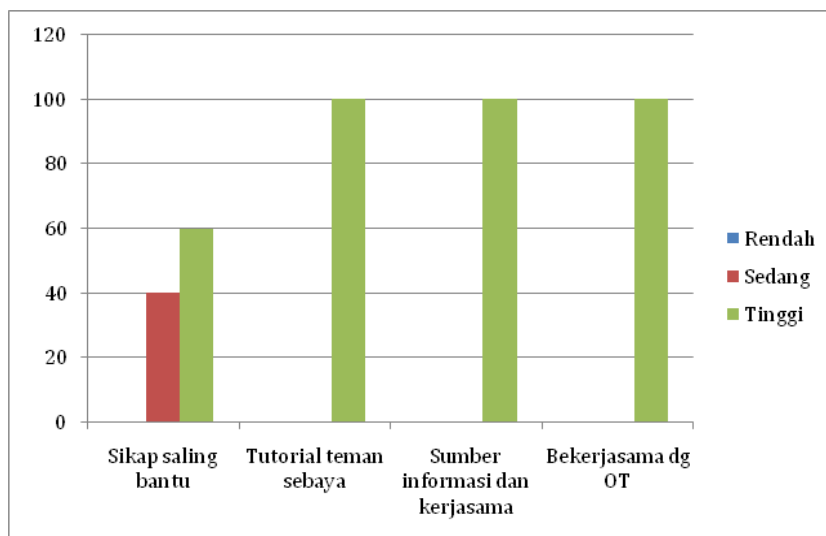


Diagram 4.11 Kurikulum menggamit aspek sosial di SD Banua Anyar 8

Indikator keempat: tentang fleksibilitas kurikulum. Data diperoleh sebanyak 20% responden menyatakan sedang dengan fleksibilitas kurikulum dan 80% responden menyatakan kurikulum fleksibel relevan diterapkan pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Fleksibilitas kurikulum dibuktikan dengan cara memodifikasi materi ajar sesuai dengan kemampuan setiap siswa, asesmen yang hanya pada aspek pembelajaran kini dirubah menjadi asesmen seluruh perkembangan anak, bahkan semua responden menyatakan manfaat kurikulum individual untuk

membantu pemecahan masalah anak secara individu. Hal ini terbukti dari rangkuman data sebagai berikut:

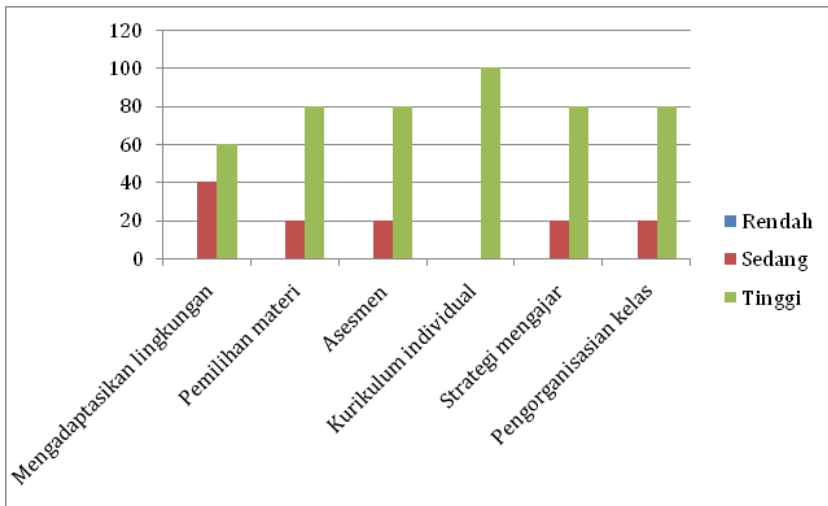


Diagram 4.12 Kurikulum fleksibel di SDN Banua Anyar 8

Berdasarkan data-data di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kurikulum berdiferensiasi, berorientasi kepada peserta didik, mengembangkan sikap sosial serta kurikulum yang fleksibel di SDN Banua Anyar 8 dapat digambarkan pada Tabel berikut:

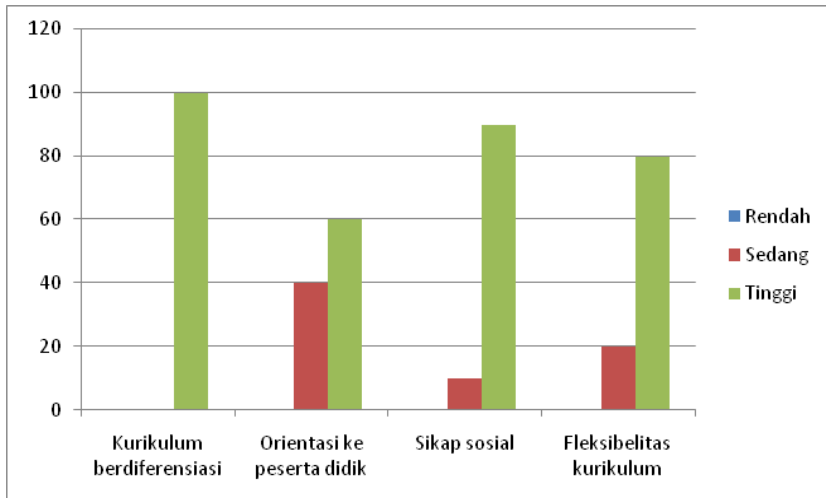


Diagram 4.13 Rangkuman kurikulum di SDN Banua Anyar 8

Berdasarkan data di atas, terdapat 82,5% responden menyatakan bahwa kurikulum berdiferensiasi, berorientasi kepada peserta didik, mengembangkan nilai-nilai sosial, fleksibel sesuai dengan kebutuhan siswa, relevan dilakukan terhadap sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Artinya SDN Banua Anyar 8 tergolong **tinggi** aspek cakupan kurikulum.

Angket isian tentang kurikulum sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di SDN Gadang 2 menggambarkan data yang berisi empat indikator yang menggambarkan pelaksanaan kurikulum inklusif. Indikator pertama adalah kurikulum yang berdeferensiasi atau sering disebut kurikulum berbasis pada perbedaan individu yang terurai pada instrumen 1,2,3,4, indikator kedua adalah kurikulum

yang berorientasi pada peserta didik, terurai pada instrumen nomor 6, 9, 10, dan 11. Indikator ketiga adalah kurikulum yang menggamit sikap sosial terurai pada instrumen nomor 12,13, 14 dan 15. Indikator keempat adalah kurikulum yang fleksibel, artinya cukup ruang gerak dan tidak kaku, untuk menyesuaikan dengan kondisi anak, yang terurai pada instrumen nomor 5,7,8,16,19 dan 20. Kreteria angket kurikulum di SD Gadang 2 adalah rendah, sedang dan tinggi. Indikator pertama tentang diferensiasi kurikulum diperoleh data, dari dari lima responden 56,25% menyatakan sedang dan 43,75% tinggi, bahwa kurikulum berdeferensiasi relevan dilakukan di SDN Gadang 2.

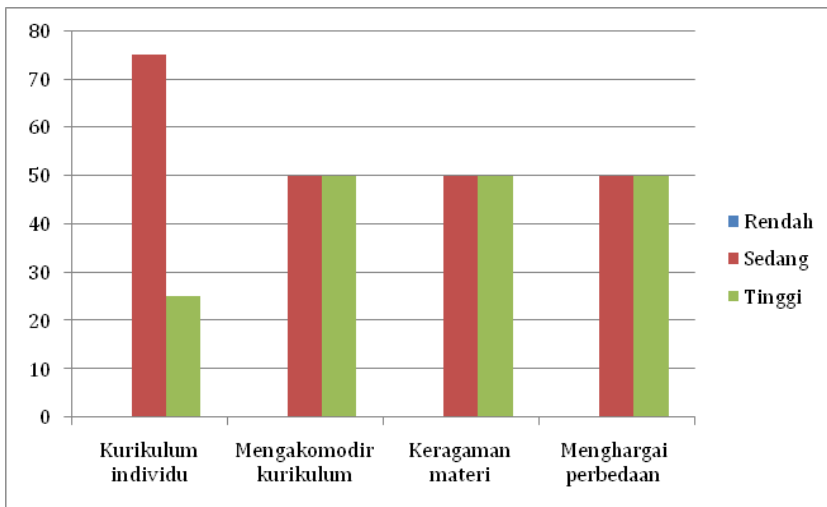


Diagram 4.14 Kurikulum berdiferensiasi di SDN Gadang 2

Indikator kedua, tentang kurikulum berorientasi kepada peserta didik, terangkum pada Tabel berikut:

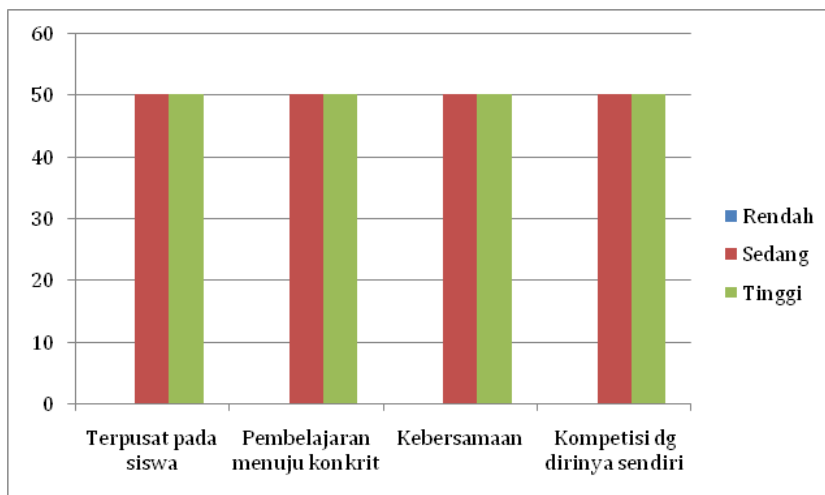


Diagram 4.15 Kurikulum beroreantasi peserta didik di SD Gadang 2

Data di atas menunjukkan, dari lima responden 50% menyatakan sedang dan 50% tinggi, bahwa kurikulum yang dilaksanakan di SDN Gadang 2 telah beroreantasi kepada siswa, yang menyatakan sedang kebanyakan menilai masih diberlakukan kurikulum klasikal, belum sepenuhnya berpihak kepada kebutuhan siswa. Namun sebagian dari mereka yaitu sebanyak 50 % kurikulum dinyatakan beroreantasi kepada kebutuhan siswa. Indikator ketiga: Kurikulum menggamit aspek sikap sosial. Pada indikator ini di SDN Gadang 2 diperoleh data 56,25% responden sedang dan 43,75% responden tinggi, bahwa kurikulum yang dikembangkan dalam pendidikan inklusif telah menggamit

aspek sikap sosial. Terbukti dari rangkuman data sebagai berikut:

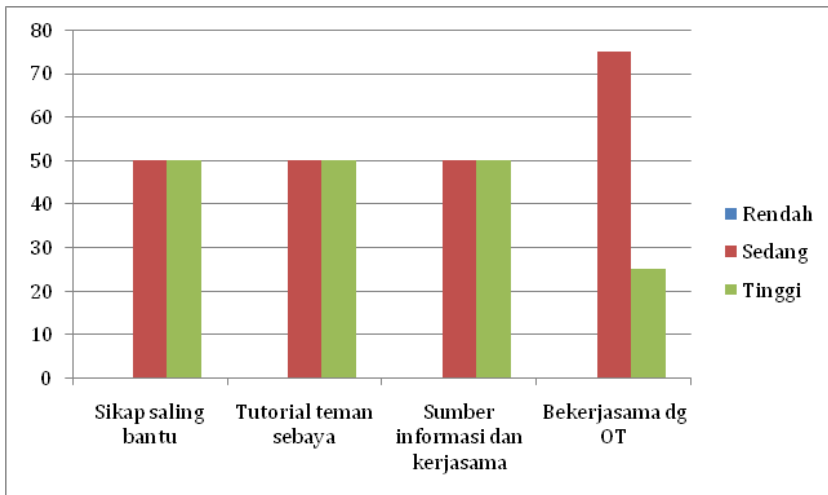


Diagram 4.16 Kurikulum menggamit sikap sosial di SDN Gadang 2

Indikator keempat: tentang fleksibilitas kurikulum. Data diperoleh sebanyak 70,83% responden menyatakan sedang dengan fleksibilitas kurikulum dan 29,17% responden menyatakan kurikulum fleksibel relevan diterapkan pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Fleksibilitas kurikulum dibuktikan dengan cara memodifikasi materi ajar sesuai dengan kemampuan setiap siswa, asesmen yang hanya pada aspek pembelajaran kini dirubah menjadi asesmen seluruh perkembangan anak, bahkan semua responden menyatakan manfaat kurikulum individual untuk membantu pemecahan masalah anak secara individu. Hal ini terbukti dari rangkuman data sebagai berikut:

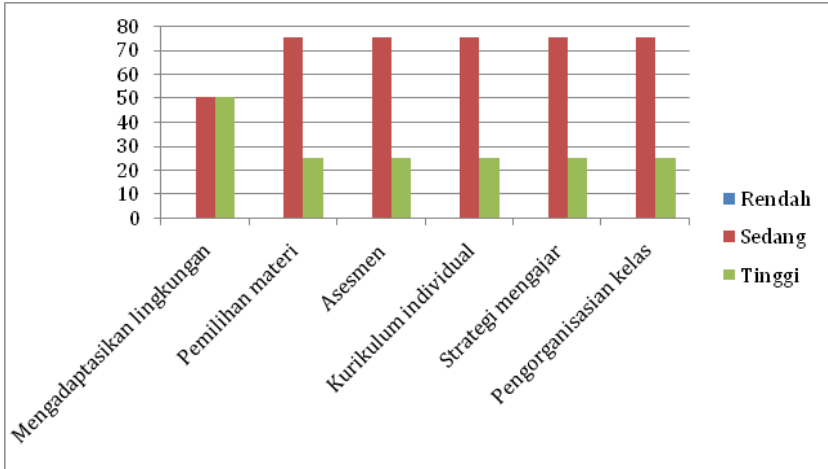


Diagram 4.17 Fleksibilitas kurikulum di SDN Gadang 2

Berdasarkan data-data di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kurikulum di SDN Gadang 2 dapat digambarkan pada Tabel berikut:

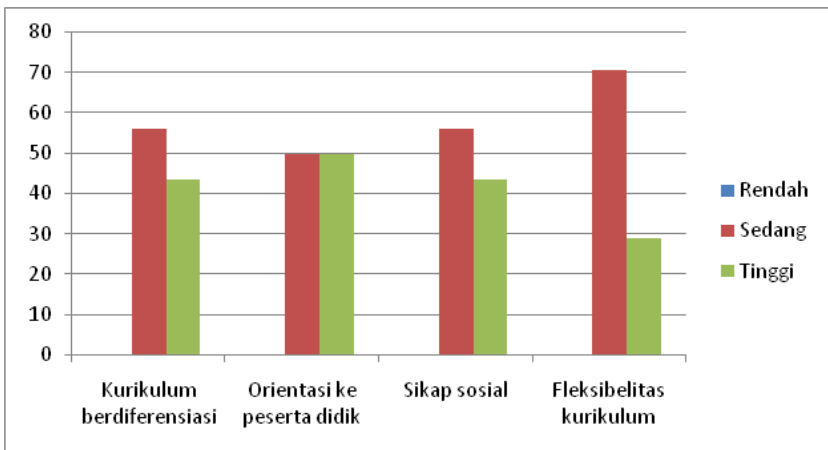


Diagram 4.18 Kesimpulan kurikulum di SDN Gadang 2

Berdasarkan data di atas, terdapat 31,67% responden menyatakan bahwa kurikulum berdiferensiasi, berorientasi kepada peserta didik, mengembangkan nilai-nilai sosial, fleksibel sesuai dengan kebutuhan siswa. relevan dilakukan terhadap sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Artinya SD Gadang 2 tergolong “sedang” aspek cakupan kurikulum.

Angket isian tentang kurikulum sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di SDN Banua Anyar 4 menggambarkan data yang berisi empat indikator yang menggambarkan pelaksanaan kurikulum inklusif. Indikator pertama adalah kurikulum yang berdiferensiasi atau sering disebut kurikulum berbasis pada perbedaan individu yang terurai pada instrumen 1,2,3,4, indikator kedua adalah kurikulum yang berorientasi pada peserta didik, terurai pada instrumen nomor 6, 9, 10, dan 11. Indikator ketiga adalah kurikulum yang menggamit sikap sosial terurai pada instrumen nomor 12,13, 14 dan 15. Indikator keempat adalah kurikulum yang fleksibel, artinya cukup ruang gerak dan tidak kaku, untuk menyesuaikan dengan kondisi anak, yang terurai pada instrumen nomor 5,7,8,16,19 dan 20. Kreteria angket kurikulum di SDN Banua Anyar 4 adalah rendah, sedang dan tinggi. Indikator pertama tentang diferensiasi kurikulum diperoleh data, dari lima responden 55% menyatakan sedang dan 45% tinggi, bahwa kurikulum berdiferensiasi relevan dilakukan di SDN Banua Anyar 4, hal ini terbukti dari rangkuman tabel sebagai berikut:



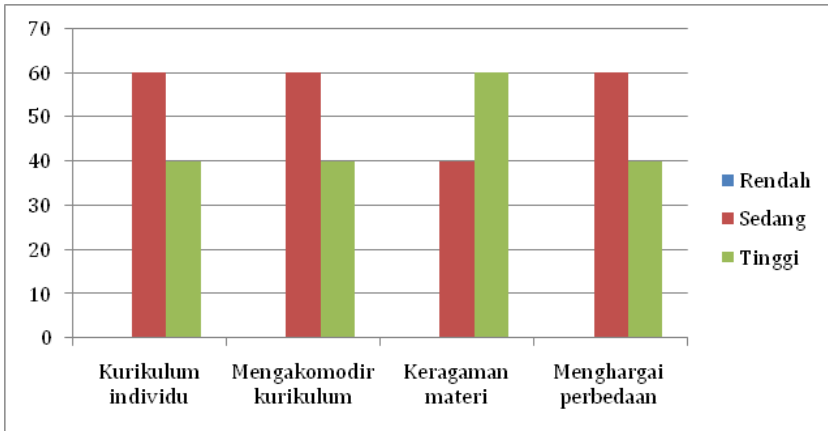


Diagram 4.19 Kurikulum berdiferensiasi di SDN Banua Anyar 4

Indikator kedua, tentang kurikulum berorientasi kepada peserta didik, terangkum pada gambar berikut:

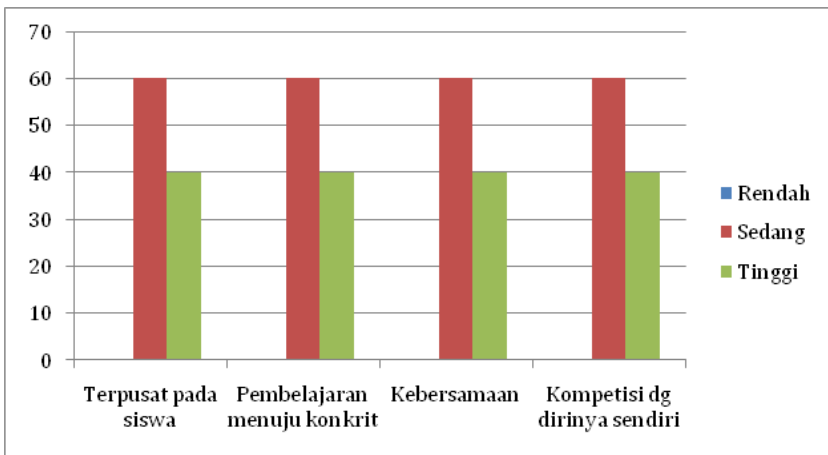


Diagram 4.20 Kurikulum berorientasi pada siswa di SD Banua Anyar 4

Data di atas menunjukkan, dari lima responden 60% menyatakan sedang dan 40% tinggi, bahwa kurikulum yang dilaksanakan di SDN Banua Anyar 4 telah berorientasi kepada siswa, yang menyatakan sedang kebanyakan menilai masih diberlakukan kurikulum klasikal, belum sepenuhnya berpihak kepada kebutuhan siswa. Namun sebagian besar dari mereka yaitu sebanyak 40 % kurikulum dinyatakan berorientasi kepada kebutuhan siswa.

Indikator ketiga: Kurikulum menggamit aspek sikap sosial. Pada indikator ini di SDN Banua Anyar 4 diperoleh data 60% responden menyatakan sedang dan 40% responden menyatakan tinggi, bahwa kurikulum yang dikembangkan dalam pendidikan inklusif telah menggamit aspek sikap sosial. Terbukti dari rangkuman data sebagai berikut:

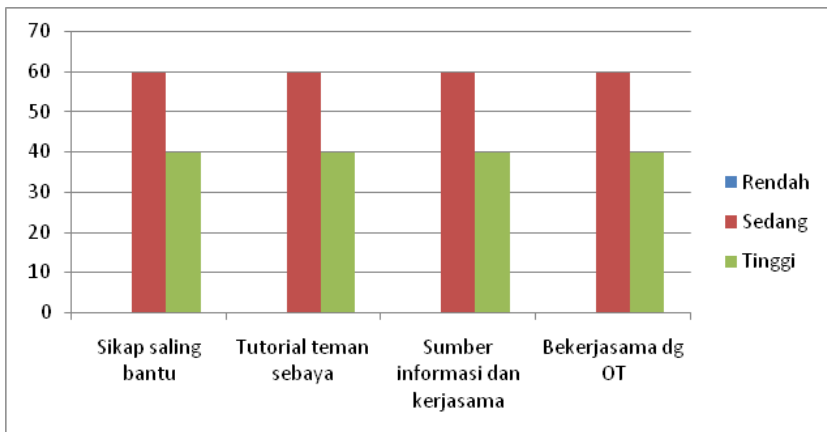


Diagram 4.21 Kurikulum menggamit aspek sosial di SD Banua Anyar 4

Indikator keempat: tentang fleksibilitas kurikulum. Data diperoleh sebanyak 53,33% responden menyatakan sedang dengan fleksibilitas kurikulum dan 46,67% responden menyatakan kurikulum fleksibel relevan diterapkan pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Fleksibilitas kurikulum dibuktikan dengan cara memodifikasi materi ajar sesuai dengan kemampuan setiap siswa, asesmen yang hanya pada aspek pembelajaran kini dirubah menjadi asesmen seluruh perkembangan anak, bahkan semua responden menyatakan manfaat kurikulum individual untuk membantu pemecahan masalah anak secara individu. Hal ini terbukti dari rangkuman data sebagai berikut:

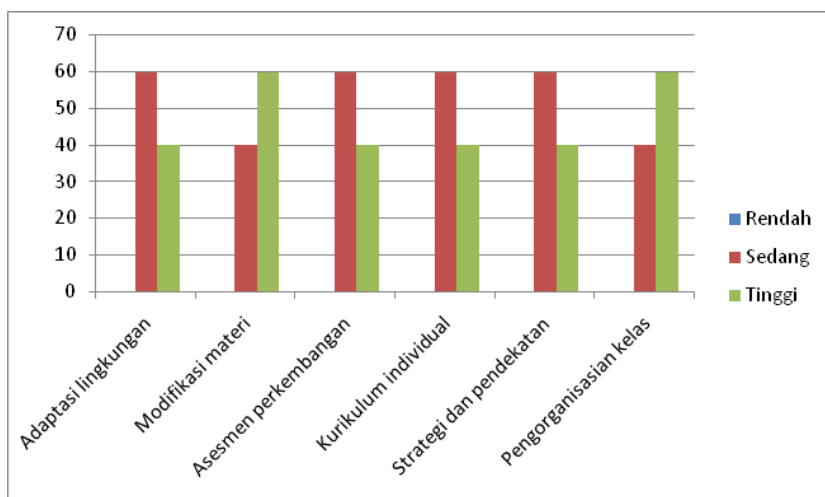


Diagram 4.22 Fleksibilitas kurikulum di SDN Banua Anyar 4

Berdasarkan data-data di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kurikulum di SDN Banua Anyar 4 dapat digambarkan pada Tabel berikut:

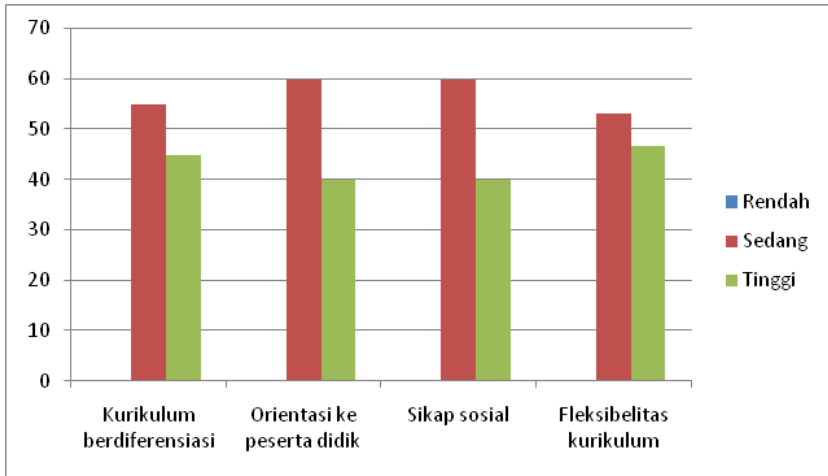


Diagram 4.23 Kesimpulan kurikulum di SDN Banua Anyar 4

Berdasarkan data di atas, terdapat 42,92% responden menyatakan tinggi dan 57,08 % responden menyatakan sedang, bahwa kurikulum berdiferensiasi, berorientasi kepada peserta didik, mengembangkan nilai-nilai sosial, fleksibel sesuai dengan kebutuhan siswa, relevan dilakukan terhadap sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Artinya SDN Banua Anyar 4 tergolong **sedang** aspek cakupan kurikulum.

Angket isian tentang kurikulum sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di SDN Kuin Selatan 3 menggambarkan data yang berisi empat indikator yang menggambarkan pelaksanaan kurikulum inklusif. Indikator pertama adalah kurikulum yang berdeferensiasi atau sering disebut kurikulum berbasis pada perbedaan individu yang terurai pada instrumen 1,2,3,4, indikator kedua adalah kurikulum

yang berorientasi pada peserta didik, terurai pada instrumen nomor 6, 9, 10, dan 11. Indikator ketiga adalah kurikulum yang menggamit sikap sosial terurai pada instrumen nomor 12,13, 14 dan 15. Indikator keempat adalah kurikulum yang fleksibel, artinya cukup ruang gerak dan tidak kaku, untuk menyesuaikan dengan kondisi anak, yang terurai pada instrumen nomor 5,7,8,16,19 dan 20. Kreteria angket kurikulum di SDN Kuin Selatan 3 adalah rendah, sedang dan tinggi.

Indikator pertama tentang diferensiasi kurikulum diperoleh data, dari lima responden semua (100%) menyatakan kurikulum berdeferensiasi relevan dilakukan di SDN Kuin Selatan 3, hal ini terbukti dari rangkuman tabell sebagai berikut:

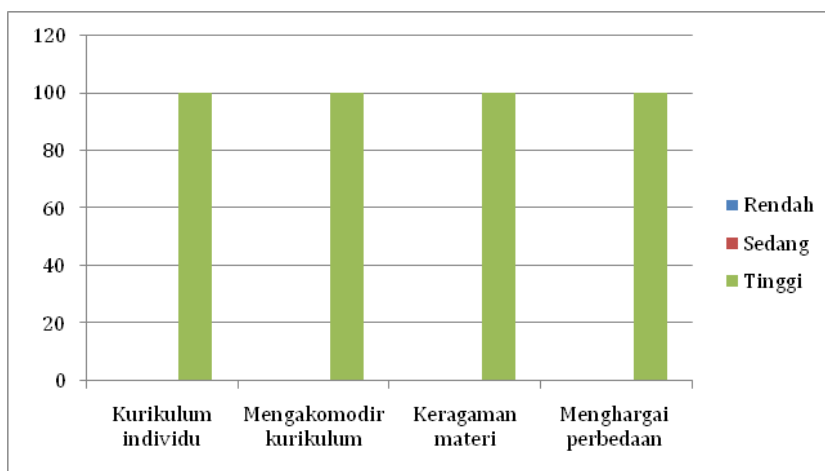


Diagram 4.24 Kurikulum berdeferensiasi di SDN Kuin Selatan 3

Indikator kedua, tentang kurikulum berorientasi kepada peserta didik, terangkum pada Tabel berikut:

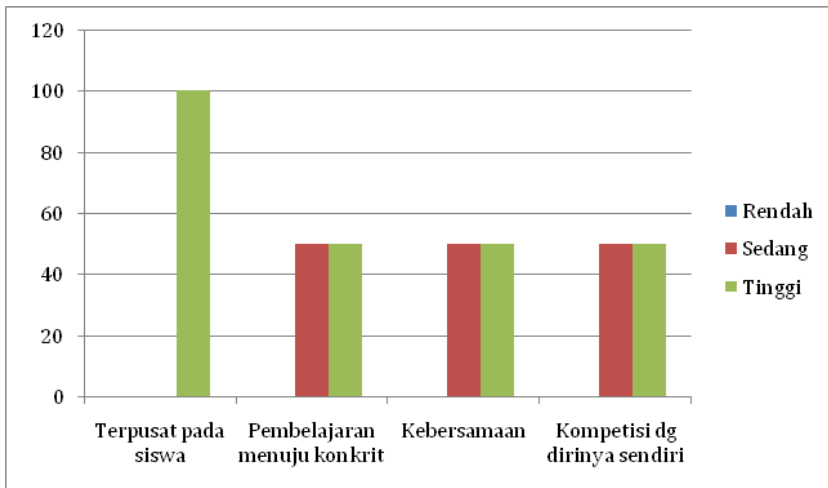


Diagram 4.25 Kurikulum berorientasi kepada siswa di SDN Kuin Selatan 3

Data di atas menunjukkan, dari lima responden 37,5% menyatakan sedang dan 62,5% tinggi, bahwa kurikulum yang dilaksanakan di SDN Kuin Selatan 3 telah berorientasi kepada siswa, yang menyatakan sedang kebanyakan menilai masih diberlakukan kurikulum klasikal, belum sepenuhnya berpihak kepada kebutuhan siswa. Namun sebagian besar dari mereka yaitu sebanyak 62,5 % kurikulum dinyatakan berorientasi kepada kebutuhan siswa.

Indikator ketiga: Kurikulum menggamit aspek sikap sosial. Pada indikator ini di SDN Kuin Selatan 3 diperoleh data 10% responden menyatakan sedang dan 90% responden menyatakan tinggi, menggamit aspek sikap sosial. Terbukti

dari rangkuman data berikut:

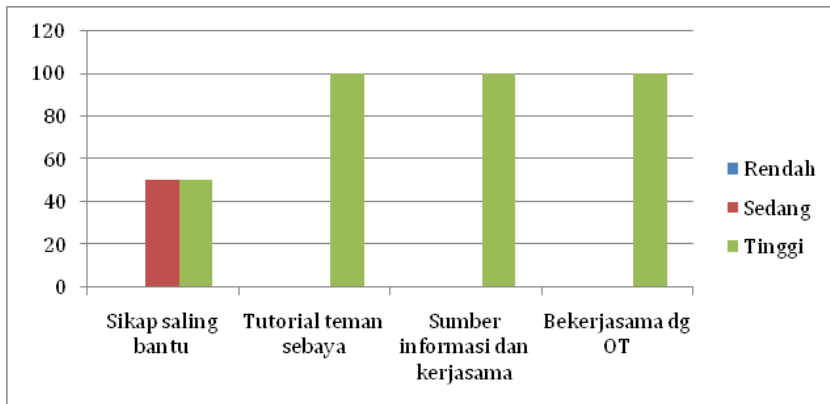


Diagram 4. 26 Kurikulum menggamit sikap sosial di SD Kuin Selatan 3

Indikator keempat: tentang fleksibilitas kurikulum. Data diperoleh sebanyak 21,5% responden menyatakan rendah dengan fleksibilitas kurikulum dan 87,5% responden menyatakan kurikulum fleksibel relevan diterapkan pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Fleksibilitas kurikulum dibuktikan dengan cara memodifikasi materi ajar sesuai dengan kemampuan setiap siswa, asesmen yang hanya pada aspek pembelajaran kini dirubah menjadi asesmen seluruh perkembangan anak, bahkan semua responden menyatakan manfaat kurikulum individual untuk membantu pemecahan masalah anak secara individu. Hal ini terbukti dari rangkuman data berikut:

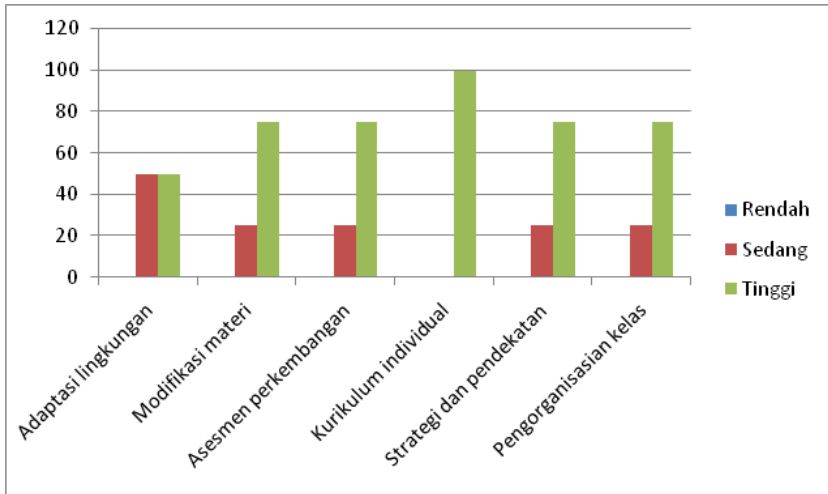


Diagram 4.27 Fleksibilitas kurikulum di SDN Kuin Selatan 3

Berdasarkan data-data di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kurikulum di SDN Kuin Selatan 3 digambarkan pada Tabel berikut:

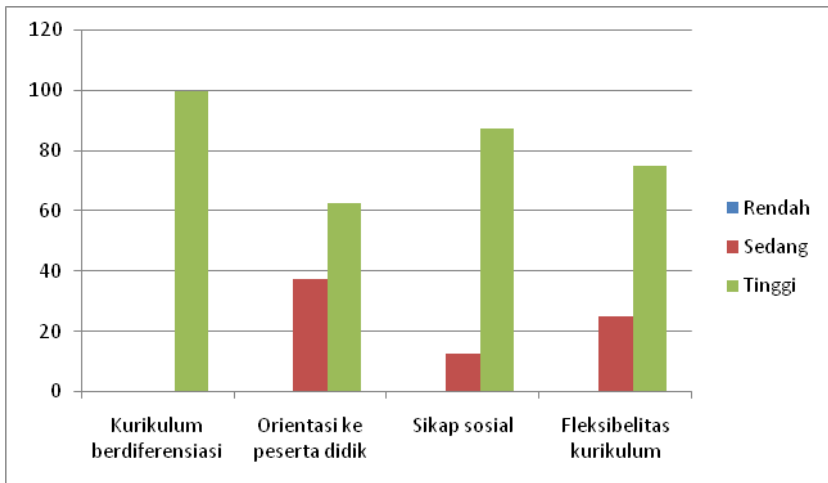


Diagram 4.28 Kesimpulan kurikulum di SDN Kuin Selatan 3

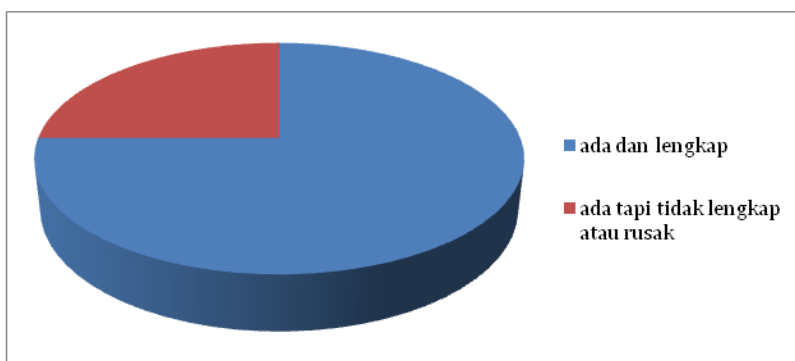


Berdasarkan data di atas, terdapat 81,75% responden menyatakan bahwa kurikulum berdiferensiasi, berorientasi kepada peserta didik, mengembangkan nilai-nilai Sosial, fleksibel sesuai dengan kebutuhan siswa. relevan dilakukan terhadap sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Artinya SDN Kuin Selatan 3 tergolong "tinggi" aspek cakupan kurikulum.

## 5. Sarana dan Prasarana Belajar Program Inklusif

Informasi sarana dan prasarana belajar program akselerasi berpedoman pada hasil penilaian dengan *inventory checklist* pada 20 jenis sarana dan prasarana belajar kelas inklusif. Hasil observasi terhadap 4 sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di Kota Banjarmasin sebagai berikut:

### a. Sarana dan prasarana di SDN Banua Anyar 8



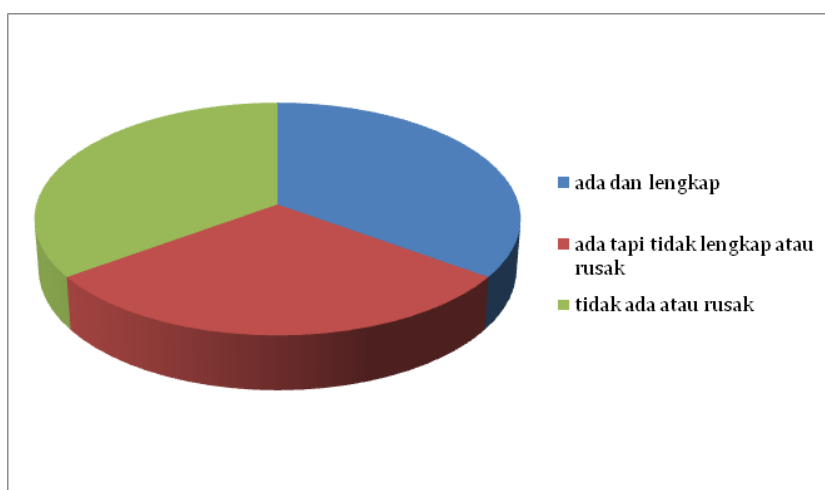
Informasi ketersediaan sarana dan prasarana belajar di sekolah penyelenggara pendidikan inklusi SDN Banua Anyar 8 dapat kita amati dari rincian di atas. Terdapat 20

jenis sarana dan prasarana yang dinilai. Hasil menunjukkan kriteria sarana dan prasarana yang sangat baik dari sekolah ini, 75% atau 15 jenis sarana prasarana dari 20 jenis yang ada, bisa difungsikan dengan baik dan lengkap. Hanya 25% sarana dan prasarana yang tidak tersedia. Jenis sarana dan prasarana tersebut diantaranya adalah poliklinik, laboratorium bahasa inggris, OHP serta kelas berpendingin ruangan. Catatan untuk guru adalah agar optimalisasi sarana dan prasarana yang lengkap ini dapat dicapai maka mereka harus sering membawa peserta didiknya memanfaatkan berbagai sarana prasarana yang tersedia.

Data kualitatif yang mendukung paparan data kuantitatif di atas khususnya dalam penyimpulan bahwa SDN Banua Anyar 8 sudah menunjukkan kriteria sarana dan prasarana yang sangat baik adalah pernyataan salah satu responden berikut, Responden A berkata, "Sarana pembelajaran yang masih diperlukan dalam pembelajaran inklusif di SDN Banua Anyar 8 adalah buku-buku yang masih kurang tentang anak berkebutuhan khusus, buku-buku ini diperlukan agar guru lebih mengenal dan mengetahui bagaimana karakteristik anak berkebutuhan khusus dan pembelajaran seperti apa yang tepat sesuai dengan karakteristik anak berkebutuhan khusus. Sarana-sarana yang menunjang untuk anak berkebutuhan khusus yang sudah tersedia seperti anak tunadaksa yang memerlukan kursi roda atau tongkat, anak tunanetra yang memerlukan sarana orientasi mobilitas, atau alat bantu dengar untuk anak tunarungu, serta media-media pembelajaran menarik yang cocok untuk anak lamban belajar atau tunagrahita. Semua sarana yang

seharusnya dioptimalkan untuk anak berkebutuhan khusus yang sesuai dengan karakteristiknya masing-masing sangat diperlukan dalam pembelajaran inklusif, sehingga anak tidak mengalami kesulitan dalam pembelajaran, sarana juga akan menunjang kemajuan pembelajaran anak berkebutuhan khusus.”

### **b. Sarana prasarana di SDN Banua Anyar 4**

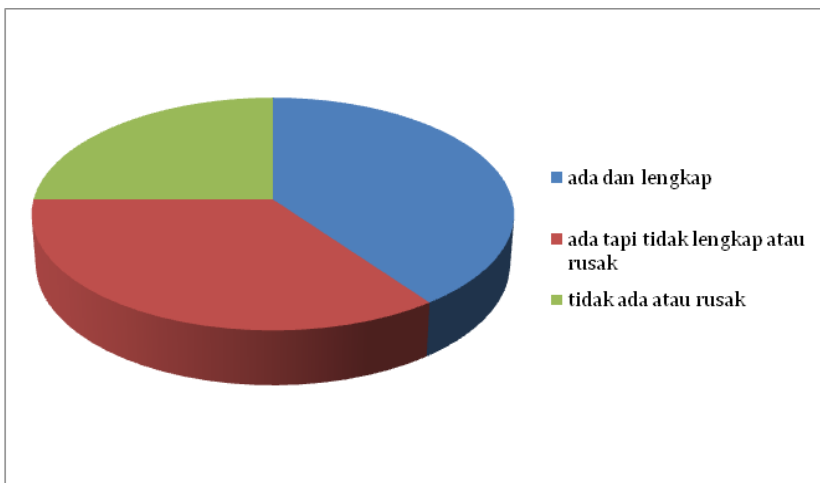


Informasi ketersediaan sarana dan prasarana belajar di sekolah penyelenggara pendidikan inklusi SDN Banua Anyar 4 dapat kita amati dari rincian di atas. Terdapat 20 jenis sarana dan prasarana yang dinilai. 35% atau 7 jenis sarana yang ada dan lengkap, 30% atau 6 jenis sarana yang ada namun dalam kondisi yang tidak layak digunakan, serta sekitar 35% sarana prasarana belum tersedia.

Pernyataan sebelumnya diperkuat oleh data hasil wawancara yang menunjukkan masih kurangnya

ketersediaan sarana dan prasarana di SDN Banua Anyar 4. Responden A berkata, "Sarana pembelajaran yang masih diperlukan dalam pembelajaran di sekolah ini, yang pasti dalam hal guru dan GPK yang berpengalaman dalam hal anak berkebutuhan khusus atau yang berlatar belakangan pendidikan khusus yang sudah memahami bagaimana anak berkebutuhan khusus, pembelajaran seperti apa yang cocok untuk anak berkebutuhan khusus yang pasti akan berbeda dengan guru atau pengajar yang tidak mempunyai ilmu atau pengetahuan tentang anak berkebutuhan khusus. Itu dalam hal pengajar. sarana pembelajaran pada saat pembelajaran seperti buku penunjang, alat yang bisa membantu anak, media pembelajaran yang bisa mempermudah anak untuk memahami pembelajaran yang diberikan oleh guru. Karena anak pada umumnya juga pasti memerlukan sebuah media pendukung apalagi untuk anak berkebutuhan khusus mereka lebih memerlukan perhatian dan bantuan.

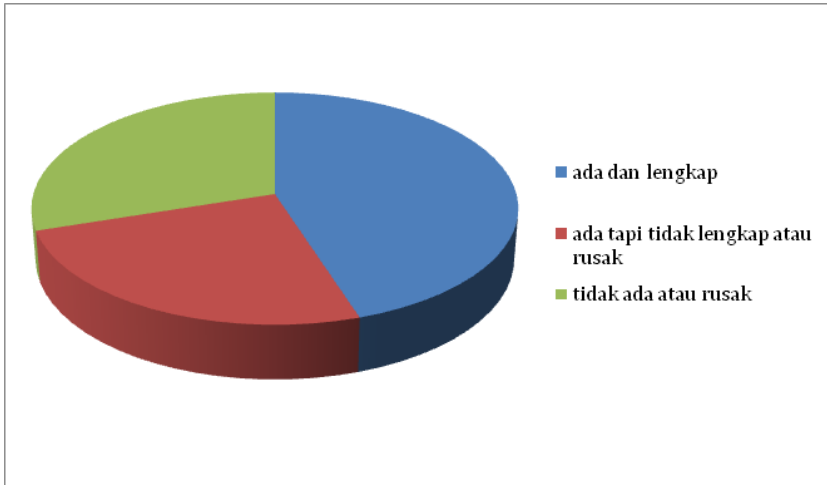
### c. Sarana prasarana di SDN Gadang 2



Informasi ketersediaan sarana dan prasarana belajar di sekolah penyelenggara pendidikan inklusi SDN Gadang 2 dapat kita amati dari rincian di atas. Terdapat 20 jenis sarana dan prasarana yang dinilai. 40% atau 8 jenis sarana yang ada dan lengkap, 35% atau 7 jenis sarana yang ada namun dalam kondisi yang tidak layak digunakan, serta sekitar 25% atau 5 jenis sarana prasarana belum tersedia. dapat Kesimpulannya adalah sarana dan prasarana pembelajaran di sekolah ini berada pada kategorimasih perlu banyak pembenahan. Catatan temuan belum semua guru memanfaatkan sarana dan prasarana dalam proses pembelajaran.

Data kualitatif yang dihasilkan dari hasil wawancara mendukung kesimpulan data kuantitatif di atas adalah belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana serta penggunaannya. Responden A yang mengatakan, "Sarana pembelajarannya yang diperlukan yaitu kurangnya Ruang dan Alat-alat penunjang untuk melatih motorik anak. Contohnya saja ketika ada yang tantrum maka kami larikan ke perpustakaan saja dan akibatnya perpustakaannya jadi berantakan. "Responden lainnya juga memastikan bahwa sarana dan prasarana masih minim, "Sarana pembelajaran mungkin yang lebih kata yang kekurangan ruang yang ada ruang kelas untuk anak tantrum dilarikan ke perpustakaan tempatnya tidak kondusif"

#### d. Sarana prasarana di SDN Kuin Selatan 3



Informasi ketersediaan sarana dan prasarana belajar di sekolah penyelenggara pendidikan inklusi SDN Kuin Selatan 3 dapat kita amati dari rincian di atas. Terdapat 20 jenis sarana dan prasarana yang dinilai. 45% atau 9 jenis sarana yang ada dan lengkap, 25% atau 5 jenis sarana yang ada namun dalam kondisi yang tidak layak digunakan, serta sekitar 30% atau 6 jenis sarana prasarana belum tersedia. Sarana yang belum tersedia meliputi kantin, ruang pertemuan, tempat untuk identifikasi serta laboratorium ABK. Mengingat pentingnya dua sarana terakhir untuk kelangsungan pelaksanaan pendidikan bagi ABK, maka sangat diharapkan agar pihak terkait bersedia memberikan bantuan demi pengadaan sarana ini agar pelaksanaan program inklusi di SDN Kuin Selatan 3 dapat berjalan optimal.

Hasil penilaian diperoleh persentase kelayakan yaitu SDN Banua Anyar sebesar 80% sarana yang lengkap dan bisa dipakai dapat ditarik kesimpulan bahwa sarana dan

prasarana pembelajaran kelas inklusif berada pada kategori sedang, SDN Banua Anyar 4 sarana yang lengkap dan bisa dipakai sebesar 30% atau tergolong rendah. DI SDN Gadang 2 sebesar 40 % atau tergolong rendah, dan SDN Kuin selatan sebesar 45% atau tergolong rendah. Berdasarkan data-data tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwa ketersediaan sarana prasarana di sekolah inklusif di Kota Banjarmasin masih tergolong rendah. Catatan temuan belum semua guru memanfaatkan sarana dan prasarana dalam proses pembelajaran.

Pernyataan sebelumnya diperkuat oleh data hasil wawancara. Responden A berkata, "Sarana pembelajaran yang masih diperlukan seperti alat peraga tentang pelajaran, IPA, IPS dan lain-lain, karena yang seperti kita ketahui anak-anak yang lambat dalam proses belajarnya lebih membutuhkan pembelajaran yang lebih detail atau konkrit agar dalam proses pembelajarannya menjadi bermakna dan harapannya juga agar dengan alat peraga tersebut jangka waktu anak mengingatnya menjadi lebih panjang dan lebih baik lagi."

Responden lainnya juga memastikan bahwa sarana dan prasarana masih sangat terbatas, "Untuk sarana saya sangat mengharapkan adanya ruang khusus untuk melaksanakan assesmen pada anak yang terindikasi sebagai Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), selain ruang untuk melakukan assesmen saya juga mengharapkan sarana sekolah yang ramah bagi ABK, karena walau saat ini didominasi oleh anak tunagrahita dan anak slow learner tidak menutup kemungkinan dimasa yang akan datang juga akan ada anak

dengan ketunaan lainnya seperti anak tunadaksa atau anak tunanetra yang tentunya harus ditunjang dengan sarana aksesibilitas yang baik disekitar lingkungan sekolah maupun di ruang belajar anak, selain dua sarana di atas saya juga mengharapkan adanya media konkrit untuk mendukung pembelajaran berbasis pendidikan inklusif serta buku-buku pembelajaran yang layak untuk ABK.

Tidak hanya pada Pemerintah kota dan SKPD terkait dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, saya juga berharap pada pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang notabene meraih penghargaan Inklusif Award serta penghargaan sebagai Provinsi yang mempelopori Pendidikan Inklusif dan juga SKPD dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan yang mendapatkan nilai A dari pemerintah pusat maka sudah sewajarnya sekolah inklusif di berbagai kota/kabupaten di Kalimantan Selatan sudah memiliki sarana yang layak untuk melaksanakan pendidikan inklusif.”

## **6. Pembiayaan Program**

Data tentang pembiayaan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif tingkat sekolah dasar di Banjarmasin diperoleh melalui hasil wawancara dengan kepala sekolah. Berdasarkan hasil wawancara diperoleh informasi bahwa pembiayaan program ditanggung oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan sumbangan dari orang tua. Berikut petikan wawancara dengan beberapa informan mengenai pembiayaan program inklusif:



Pada tahun 2009 mendapatkan dana operasional dari Direktorat Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK) Jakarta sebesar 30 juta rupiah, tahun 2010 juga mendapatkan dana dari pusat sebesar 30 juta, namun dana-dana tersebut mulai tahun 2012 telah dihentikan. Pada saat itu juga siswa yang mengalami kebutuhan khusus mendapatkan beasiswa dari Direktorat sebesar 1.150.000 per siswa, ya lumayan saat itu bisa dipakai untuk meningkatkan sarana prasarana, menggaji guru pendamping khusus dan lain sebagainya. Tetapi dana-dana tersebut telah dihentikan sejak tahun 2013.

Guru pendamping khusus dibebankan kepada komite sekolah, dengan cara sukarela, sesuai kemampuan orang tua, ada yang membayar 800 ribu perbulan ada juga yang 500 ribu, ada yang 400 ribu, ada juga orang tua yang tidak mampu tidak ditarik biaya” Lalu GPK dihonor berapa? Ya ada yang 250 ribu perbulan ada juga yang 300 ribu perbulan, “habis dananya tidak cukup mau apa lagi...” (Sumber dari Kepala sekolah SD Banua Anyar 8)

Dana yang terkumpul, seluruhnya habis terpakai untuk melengkapi sarana dan prasarana, pengeluaran rutin seperti ATK dan sebagian untuk memberikan honor guru pendamping khusus, yang jumlahnya mencapai 12 orang. Sumber masukan pembiayaan di SDN Banua Anyar 8, berasal dari pusat, daerah, maupun bantuan dari orang tua anak yang mengalami kebutuhan khusus. Bantuan

dari pusat berbentuk *blockgrant*, namun bantuan tersebut berakhir pada tahun 2013, dan sekarang digantikan dengan BOS bantuan operasional sekolah, Bos yang bersumber pada APBN sebesar 800.0000 persiswa, sedangkan BOS yang berasal dari APBD sebesar 200.000 persiswa. Kondisi pendanaan ini dirasakan sekolah sangat minim, karena harus menganggarkan honor guru GPK yang secara rutin harus dikeluarkan. Upaya sekolah untuk memecahkan pembiayaan BOS yang tidak mencukupi, maka sekolah meminta bantuan komite sekolah untuk memikirkan honor guru pendamping khusus.

Berpijak pada analisis dan estimasi pembiayaan di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pembiayaan program inklusif di SDN Banua Anyar 8 belum mencukupi pembiayaan dalam arti sebenarnya. Dengan demikian aktualitas kesimpulan berada pada kategori "rendah".

Pembiayaan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di SDN Banua Anyar 4, seperti tergambar dari hasil wawancara dengan wakil kepala sekolah sebagai berikut:

Bantuan yang diperoleh sekolah banyak berupa sarana dan prasarana seperti, mebelair dan buku pelajaran. Pernah mendapatkan bantuan operasional dari propinsi Kalimantan Selatan sebesar 500.000 per siswa, itupun baru sekali saja. Saat ini pembiayaan sekolah dibebankan pada bantuan operasional sekolah (BOS) baik yang diperoleh melalui APBN sebesar 800.000 per siswa, dan APBD sebesar 200.000 persiswa. Dana BOS ternyata tidak mencukupi, kalau di gunakan untuk

memberikan honor guru pendamping khusus. Di sekolah saya terdapat 4 guru pendamping khusus, honor GPK ini sebesar 300.000 per bulan, sumber dana yang diperuntukkan honor GPK diambil dari orang tua anak yang mengalami kebutuhan khusus.

Berdasarkan rekaman wawancara di atas, maka dapat dideskripsikan pembiayaan penyelenggara pendidikan inklusif di SDN Banua Anyar 4 masih mengandalkan bantuan operasional pusat maupun daerah. BOS yang berasal dari APBN sebesar 800 ribu persiswa setahun, sedangkan BOS yang berasal dari APBD sebesar 200 ribu persiswa pertahun. Dana BOS ini digunakan untuk semua urusan sekolah selama satu tahun. Dana BOS masih dirasakan sangat minim, sehingga sekolah harus meminta bantuan orang tua murid yang berkebutuhan khusus untuk memberikan honor guru pembimbing khusus (GPK)

Berpijak pada analisis dan estimasi pembiayaan di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pembiayaan program inklusif di SDN Banua Anyar 4 belum mencukupi pembiayaan dalam arti sebenarnya. Dengan demikian aktualitas kesimpulan berada pada kategori rendah.

Hasil wawancara dengan kepala sekolah SDN Gadang 2 Banjarmasin, tentang pembiayaan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif sebagai berikut:

SD Gadang 2 pernah mendapatkan satu kali bantuan operasional dari Direktorat PKLK jakarta sebesar 14 juta rupiah. Dana digunakan untuk pengadaan ruang

asesmen. Pada tahun 2012 mendapatkan bantuan biasiswa dari Direktorat PKLB sebesar 1.050.000 per siswa pertahun, dana selain diberikan langsung ke siswa yang mengalami kebutuhan khusus, digunakan juga untuk membantu memberikan honor guru pendamping khusus. Namun dana-dana dari pusat itu pada tahun 2013 telah dihentikan. Dengan semakin banyaknya jumlah ABK di sekolah saya, maka konsekwensinya juga menambah guru pendamping khusus, dengan dana BOS yang jumlahnya sangat minim maka sekolah sangat sulit memberikan honor GPK dari dana BOS.

Berdasarkan rekaman wawancara di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembiayaan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di SDN Gadang 2 Banjarmasin, berasal dari pusat, daerah dan bantuan dari orang tua murid yang tergabung pada komite sekolah. Dana bantuan berupa blockgrant dari pusat telah dihentikan pada tahun 2013. Dan sekarang tinggal mengandalkan dana bantuan operasional sekolah yang bersumber dari APBN sebesar 800 ribu rupiah peranak, pertahun. Dan BOS APBD sebesar 200 ribu per siswa pertahun. Dana BOS diperuntukkan untuk membiayai semua kegiatan sekolah. Sehingga ketika ada anak berkebutuhan khusus ada di sekolah sangat berat mengandalkan dana BOS, karena anak berkebutuhan khusus memerlukan guru pendamping, sedangkan mereka semua masih honor. Solusi sekolah, dengan cara melibatkan komite sekolah untuk menanggung honor guru pendamping khusus. Sekolah tidak memiliki sumber pembiayaan lain kecuali dana BOS.

Berpijak pada analisis dan estimasi pembiayaan di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pembiayaan program inklusif di SDN Gadang 2 belum mencukupi pembiayaan dalam arti sebenarnya. Dengan demikian aktualitas kesimpulan berada pada kategori “rendah”.

Data pembiayaan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif SDN Kuin Selatan 3 diambil dari hasil wawancara dengan kepala sekolah, adapun rekaman wawancara sebagai berikut:

Dari pusat itu pada tahun 2012 mendapatkan blockgrant sebesar 25 juta. Dana tersebut digunakan untuk menambah ruang kelas baru. Ada juga bantuan dari direktorat PKLK Jakarta untuk biasiswa, sebesar 1.050.000 per siswa pertahun. Dana ini kami gunakan untuk memberikan honor GPK dan ada juga diberikan kepada anak berkebutuhan khusus. Dana dari pusat hanya berlangsung hingga tahun 2013, dan sekarang tidak ada lagi. Apakah dana BOS telah mencukupi untuk operasional penyelenggaraan pendidikan inklusif? Informan menjawab.... sebenarnya jauh dari mencukupi, menyelenggarakan pendidikan inklusif itu besar dananya.

Apa upaya sekolah untuk mengatasi hal tersebut? Informan menjawab...ya dengan sangat terpaksa minta bantuan komite sekolah...terutama kepada orang tua yang anaknya berkebutuhan khusus. Mereka mau nggak mau harus menanggung honor guru GPK, kalau anaknya mau sekolah di sini. Habis gimana lagi...

memang sekolah harus gratis, tetapi mengandalkan Pemerintah ya... tidak cukup juga. Dengan terpaksa kami menarik dana dari orang tua.

Berdasarkan rekaman wawancara di atas, maka dapat dideskripsikan pembiayaan penyelenggara pendidikan inklusif di SDN Kuin Selatan 3 masih mengandalkan bantuan operasional pusat maupun daerah. BOS yang berasal dari APBN sebesar 800 ribu persiswa setahun, sedangkan BOS yang berasal dari APBD sebesar 200 ribu persiswa pertahun. Dana BOS ini digunakan untuk semua urusan sekolah selama satu tahun. Dana BOS masih dirasakan sangat minim, sehingga sekolah harus meminta bantuan orang tua murid yang berkebutuhan khusus untuk memberikan honor guru pembimbing khusus (GPK)

Berpijak pada analisis dan estimasi pembiayaan di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pembiayaan program inklusif di SDN Kuin Selatan 3 belum mencukupi. Dengan demikian aktualitas kesimpulan berada pada kategori "rendah".

## BAGIAN 5

### PROSES (PROCESS) PENDIDIKAN INKLUSIF

Evaluasi proses merupakan evaluasi yang dirancang dan diaplikasikan dalam penerapan atau praktis (process) suatu kegiatan program. Aktivitas melakukan rekaman implementasi program dan mengidentifikasi kerusakan implementasi serta hal-hal yang perlu dipertahankan. Pada sub evaluasi proses pelaksanaan pendidikan inklusif, kegiatan evaluasi mencakup: kompetensi guru, profil guru yang dipersyaratkan, kegiatan pembelajaran di kelas, kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan diri siswa dan struktur sosial hubungan antar siswa di kelas. Berikut dipaparkan hasil pengukuran masing-masing fokus.

#### **1. Kompetensi Guru Inklusif**

Kelompok guru yang mengajar di kelas inklusi diberi angket. Angket isian proses mengajar di kelas inklusi menggambarkan data yang berisi tujuh indikator kompetensi guru dalam memberikan pembelajaran dalam kelas inklusif. Indikator pertama adalah deferensiasi kurikulum atau sering disebut pembelajaran berbasis pada perbedaan individu yang terurai pada instrumen 1,2,3,4,5,6 dan 9, indikator kedua adalah modifikasi kurikulum terurai pada instrumen nomor 11,12. Indikator ketiga adalah pembelajaran individual terurai pada instrumen nomor 9,10, 13. Indikator keempat adalah pembelajaran kooperatif dan kolaboratif,

yang terurai pada instrumen nomor 7,8,14,15,21,22 dan 23. Indikator kelima adalah mengembangkan budaya inklusif atau sering disebut dengan sikap sosial, yang terurai pada instrumen nomor 18,19,20,24 dan 25. Indikator keenam adalah motivasi belajar terurai pada instrumen nomor 16,17 dan 18. Indikator ketujuh adalah penilaian yang fleksibel tercantum pada instrumen nomor 26. Perolehan prosentase kompetensi guru SD Banua Anyar 8 dapat dirangkum dalam diagram pada Gambar 4.29. Hasil rerata di atas semakin jelas menunjukkan bahwa SDN Banua Anyar 8 memiliki kompetensi tenaga pendidik yang baik. Prosentase rerata tertinggi ketujuh indikator kompetensi guru yang mendominasi berada pada skala penilaian tinggi yaitu 77,64%. Indikator ketujuh yang menilai kemampuan tenaga pendidik melakukan penilaian fleksibel mendapat perolehan prosentase tertinggi yaitu 100% baik.

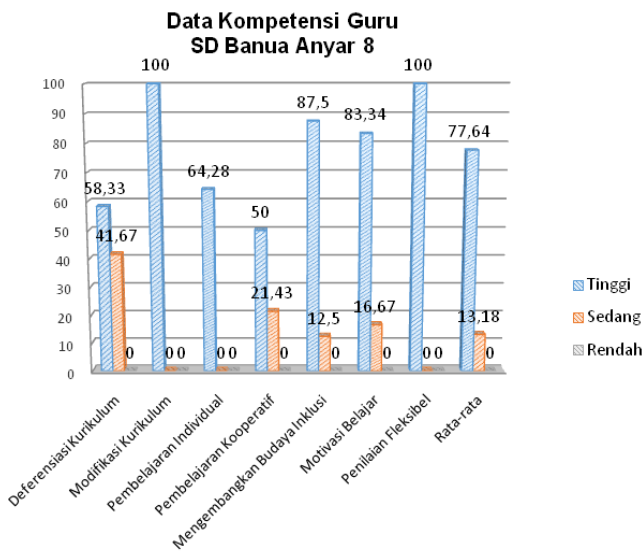


Diagram 4.29 Kompetensi Guru SD Banua Anyar 8



Salah satu responden memaparkan bahwa dia merasa tidak ada kesulitan yang cukup berarti dalam mengaplikasikan pembelajaran hingga evaluasi atau penilaian fleksibel sebagai bagian penting dari proses pelaksanaan sistem pembelajaran di kelas inklusi. Responden A berkata "Sementara ini saya merasa belum mendapat kesulitan yang cukup berarti dalam evaluasi terhadap ABK. Dikarenakan system penilaian yang dilakukan begitu fleksibel. Penilaian disesuaikan dengan kompetensi yang dimiliki masing-masing anak. Dengan adanya evaluasi ini, kelak guru akan memiliki acuan atau pandangan untuk pelaksanaan pendidikan selanjutnya. Tetapi yang jadi sedikit kendala adalah pada saat kami menyampaikan hasil evaluasi anak kepada orang tua, ada sebagian orang tua yang kurang terima sehingga orang tua menuntut guru untuk melakukan hal-hal pembelajaran yang sebenarnya kurang sesuai dengan kemampuan anak itu sendiri.

Angket isian proses mengajar di kelas inklusi menggambarkan data yang berisi tujuh indikator. pertama adalah diferensiasi kurikulum atau sering disebut pembelajaran berbasis pada perbedaan individu yang terurai pada instrumen 1,2,3,4,5,6 dan 9, indikator kedua adalah modifikasi kurikulum terurai pada instrumen nomor 11,12. Indikator ketiga adalah pembelajaran individual terurai pada instrumen nomor 9,10, 13. Indikator keempat adalah pembelajaran kooperatif dan kolaboratif, yang terurai pada instrumen nomor 7,8,14,15,21,22 dan 23. Indikator kelima adalah mengembangkan budaya inklusif nomor 18,19,20,24 dan 25. Indikator keenam adalah motivasi belajar

(16,17 dan 18). Indikator ketujuh adalah penilaian yang fleksibel tercantum pada instrumen nomor 26. Rangkuman data sebagai berikut

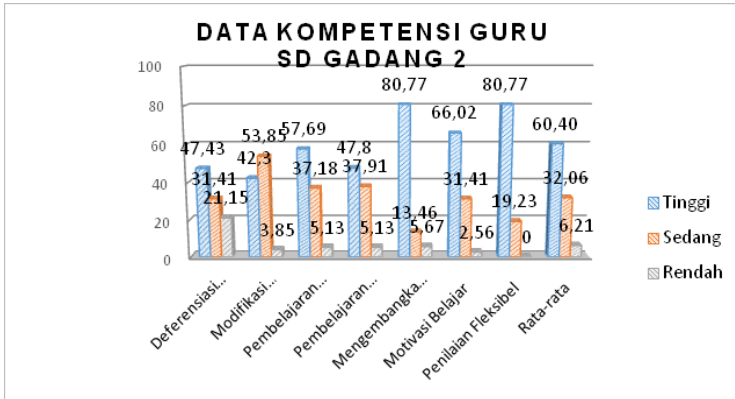


Diagram 4.30 Kompetensi Guru SD Gadang 2

Hasil rerata di atas menunjukkan bahwa SDN Gadang 2 memiliki kompetensi tenaga pendidik yang baik. Prosentase rerata tertinggi ketujuh indikator kompetensi guru yang mendominasi berada pada skala penilaian tinggi yaitu 60,40%. Deskripsi sebaran kuantitatif di atas bersesuaian dengan data yang didapat melalui wawancara, terlebih pada indikator keempat. Pembelajaran kooperatif melalui tutorial teman sebaya di SDN Gadang 2 yang meskipun tidak sepenuhnya dilakukan namun pengajar disana merasa tidak ada kesulitan dalam pelaksanaan tutorial sebaya. Berikut salah satu pernyataan dari responden A "Selama ini tidak ada kesulitan untuk pembelajaran tutorial sebaya. Contohnya saja apabila ada anak yang sudah selesai dalam menyelesaikan tugas dan temennya yang lain belum selesai

maka dia disuruh membantu, tetapi bukan memberikan jawaban hanya membantu cara menyelesaikan saja. Dan para siswanya pun kalau disuruh membantu teman yang lain mereka mau-mau saja, tidak ada yang membantah. Karena sudah tertanam pada diri individu masing-masing untuk saling bekerja sama dan tolong menolong”

Data kuantitatif dan kualitatif untuk indikator keenam yaitu mengembangkan budaya inklusif atau sikap sosial yang tercermin dalam perilaku saling tolong menolong. Kesimpulan data kuantitatif untuk indikator ini menyatakan bahwa di SDN Gadang 2 sudah mulai mengembangkan budaya inklusif yang menghargai sikap sosial yang diimpikan masyarakat, diuatkan dengan data kualitatif yang didapat dari hasil wawancara. Salah satu responden memaparkan jika pembelajaran untuk saling menghargai, kerja sama dan tolong-menolong tidak lagi menjadi hal yang sulit disana, “Sebenarnya tidak sulit, karena itu sudah tertanam pada diri anak dalam mensyukuri apa yang ada saling bekerja sama dan tolong menolong. Apalagi semenjak adanya anak berkebutuhan khusus mereka jadi lebih mengharagai (toleransinya kuat) antar sesama”.

Angket isian proses mengajar di kelas inklusi SD Kuin Selatan 3 ini menggambarkan data yang berisi tujuh indikator kompetensi guru dalam memberikan pembelajaran dalam kelas inklusif. Indikator pertama adalah diferensiasi kurikulum atau sering disebut pembelajaran berbasis pada perbedaan individu yang terurai pada instrumen 1,2,3,4,5,6 dan 9, indikator kedua adalah modifikasi kurikulum terurai pada instrumen nomor 11,12. Indikator ketiga adalah pembelajaran

individual terurai pada instrumen nomor 9,10, 13. Indikator keempat adalah pembelajaran kooperatif dan kolaboratif, yang terurai pada instrumen nomor 7,8,14,15,21,22 dan 23. Indikator kelima adalah mengembangkan budaya inklusif atau sering disebut dengan sikap sosial, yang terurai pada instrumen nomor 18,19,20,24 dan 25. Indikator keenam adalah motivasi belajar terurai pada instrumen nomor 16,17 dan 18. Indikator ketujuh adalah penilaian yang fleksibel tercantum pada instrumen nomor 26.

Perolehan prosentase kompetensi guru di SD Kuin Selatan 3 dapat dirangkum dalam diagram sebagai berikut

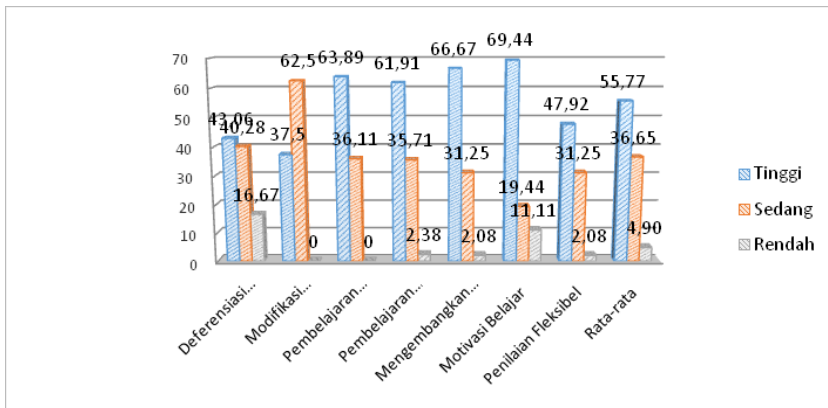


Diagram 4.31 Kompetensi Guru SD Kuin Selatan 3

Hasil rerata di atas menunjukkan bahwa SDN Kuin Selatan 3 memiliki kompetensi tenaga pendidik yang sedang. Prosentase rerata tertinggi ketujuh indikator kompetensi guru yang mendominasi berada pada skala penilaian tinggi yaitu 55,77%.

Beragam data yang terpapar baik melalui pengumpulan secara kuantitatif maupun kualitatif menggambarkan sinkronisasi. Data kuantitatif yang umumnya menyimpulkan bahwa banyak indikator terukur rendah hingga hanya sedang-sedang saja, diiyakan oleh data hasil wawancara. Responden A di SDN Kuin Selatan 3 mengatakan masih terdapat kesulitan dalam pelaksanaan evaluasi hasil belajar berbasis individu, "Kesulitan dalam evaluasi terhadap anak berkebutuhan khusus yaitu kurang kerja sama antara guru kelas atau guru mata pelajaran karena yang berhak menilai mereka. Kadang ada guru yang paham terhadap kemampuan anak sehingga nilainya disesuaikan juga. Untuk KKM sama tidak ada perbedaan yaitu 60."

Responden B berujar tentang kesulitan dalam aplikasi pembelajaran yang berbasis individu, "Kesulitan nya adalah karena siswa yang saya didik adalah anak berkebutuhan khusus yaitu anak tunagrahita maka untuk hal aktif dan mandiri itu agak sulit diterapkan. Karena pada umumnya pembelajaran yang berpusat pada siswa mengacu pada keaktifan dan kemandirian dari siswa itu sendiri.

Angket isian proses mengajar di kelas inklusi SD Banua Anyar 4 ini menggambarkan data yang berisi tujuh indikator kompetensi guru dalam memberikan pembelajaran dalam kelas inklusif. Indikator pertama adalah diferensiasi kurikulum atau sering disebut pembelajaran berbasis pada perbedaan individu yang terurai pada instrumen 1,2,3,4,5,6 dan 9, indikator kedua adalah modifikasi kurikulum terurai pada instrumen nomor 11,12. Indikator ketiga adalah pembelajaran individual terurai pada instrumen nomor 9,10, 13. Indikator

keempat adalah pembelajaran kooperatif dan kolaboratif, yang terurai pada instrumen nomor 7,8,14,15,21,22 dan 23. Indikator kelima adalah mengembangkan budaya inklusif atau sering disebut dengan sikap sosial, yang terurai pada instrumen nomor 18,19,20,24 dan 25. Indikator keenam adalah motivasi belajar terurai pada instrumen nomor 16,17 dan 18. Indikator ketujuh adalah penilaian yang fleksibel tercantum pada instrumen nomor 26.

Perolehan prosentase kompetensi guru di SD Banua Anyar 4 dapat dirangkum dalam diagram sebagai berikut:

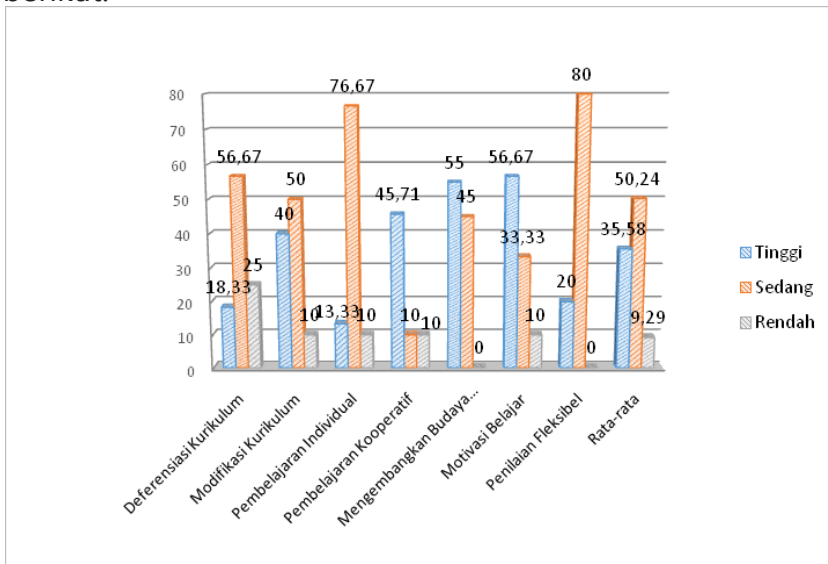


Diagram 4.32 Kompetensi Guru SD Banua Anyar 4

Hasil rerata di atas menunjukkan bahwa SDN Banua Anyar 4 memiliki kompetensi tenaga pendidik yang sedang. Prosentase rerata tertinggi ketujuh indikator kompetensi

guru yang mendominasi berada pada skala penilaian sedang yaitu 50,24%.

Data kualitatif yang mendukung paparan data kuantitatif di atas khususnya dalam penyimpulan bahwa SDN Banua Anyar 4 masih belum mengaplikasikan penilaian fleksibel secara lentur dan luwes adalah pernyataan salah satu responden berikut, sebut saja Responden A, "Nah kalau untuk evaluasi, dalam pembelajarannya terasa lebih sulit. Disini kan memakai kurikulum KTSP, KTSP sendiri sekarang itu pembelajarannya lebih tinggi. Kelas 1 saja yang biasanya baca tulis hitung, sekarang hampir ada perkalian pembagian. Jadi memberi pemahaman kepada anak berkebutuhan khusus itu untuk mengevaluasinya sulit karena masih belum mengerti. Biasanya kami membuat soal sendiri yang sesuai dengan kebutuhan anak."

Responden lainnya mengatakan bahwa, "Meskipun evaluasi ataupun materi yang diberikan sudah disederhanakan, tapi kesulitan masih ada dirasakan, contohnya anak yang cepat lupa terhadap materi yang sudah diberikan, jadi guru harus menjelaskan kembali, mengulang kembali, agar anak ingat kembali dan bahkan ada anak yang lupa sama sekali dengan materi yang telah diberikan" Data-data kuantitatif dan kualitatif untuk proses pembelajaran di kelas inklusif SDN Banua Anyar 4 dan SDN Kuin Selatan 3 menunjukkan sinkronisasi yang cukup bagus. Hampir ketujuh indikator aplikasi proses pembelajaran yang inklusif baik menurut data kuantitatif maupun data kualitatif menunjukkan intensitas rendah sampai sedang, sebab benar saja karena kedua sekolah ini merupakan

sekolah yang baru berkecimpung di pendidikan inklusi. Berbeda dengan dua sekolah sebelumnya yakni SDN Banua Anyar 8 dan SDN Gadang 2 yang tergolong pionir dalam pendidikan inklusi, intensitas penerapan unsur-unsur inklusi ramah pembelajaran dalam proses belajar mengajar di kelas sudah cukup baik.

## **2. Minat Guru mengajar di kelas Inklusif**

Minat guru mengajar dikelas inklusif pada terdiri dari lima indikator, yaitu tingkat kesenangan dalam mengajar, penerimaan keberadaan anak berkebutuhan khusus, keiklasan bekerja tanpa pamrih, kebanggaan dalam mengajar, dan keterlibatan dalam pembelajaran. Hasil jawaban responden menunjukkan perolehan prosentase tingkat kesenangan mengajar dikelas inklusi, mendapat perolehan prosentase hampir sempurna, 94,74% guru menyatakan senang. Sedangkan yang ragu-ragu hanya 5,26%. Sebagian besar dari guru yaitu 89,47% menyatakan menerima dengan baik keberadaan anak berkebutuhan khusus, dengan memberikan perhatian yang dibutuhkan. Mengajar dikelas inklusif merupakan panggilan jiwa, dan pengabdian yang tulus, tidak hanya semata-mata imbalan secara materi. Hal ini terbukti ada 78,95% guru yang menjadi responden, tidak mepedulikan kompensasi honor atau angka kredit yang mereka dapatkan. Ada 89,47% guru yang menyatakan mengajar dikelas inklusif merupakan sebuah kebanggaan. Sebagian besar dari mereka terlibat penuh dalam pembelajaran siswa di kelas inklusi, ini



terbukti ada 89,47% guru yang mengaku terlibat penuh dalam pembelajaran dikategorikan tinggi, dengan rata-rata sebagai berikut:

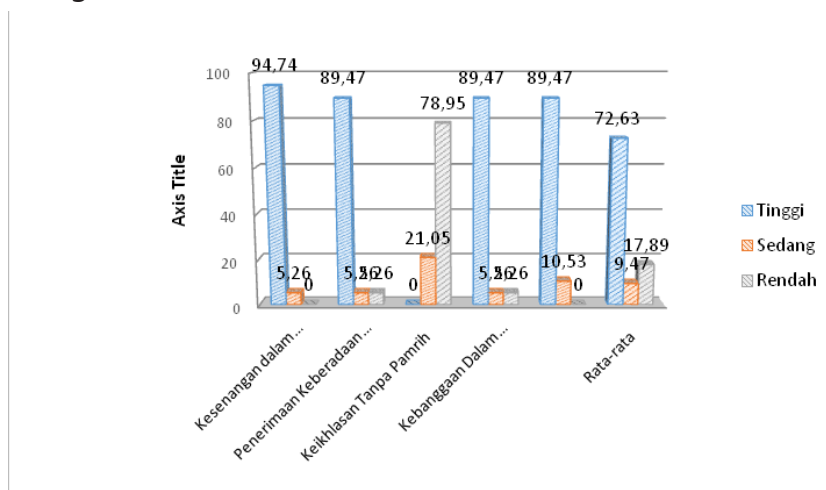


Diagram 4.33 Minat Mengajar Guru SD Banua Anyar 8

Hasil rerata di atas semakin jelas menunjukkan bahwa sekolah memiliki minat guru mengajar yang baik. Prosentase rerata tertinggi kelima indikator yang mendominasi berada pada skala penilaian tinggi yaitu 72,63%. Pernyataan sebelumnya diperkuat oleh data hasil wawancara. Responden A mengatakan tidak menolak untuk menyelenggarakan pendidikan inklusi, "Saya tidak menolak dengan adanya pendidikan inklusif, saya sangat mendukung pendidikan inklusif. Saya berharap pendidikan inklusif di kalimantan selatan akan terus maju agar anak berkebutuhan khusus dapat terlayani dengan baik dalam pembelajaran maupun mengakses segala hal".

Responden lainnya memastikan bahwa melalui pendidikan inklusi, dia merasa telah menjadi pribadi yang senang bekerja keras penuh harapan dan peluang, "Tentu saya sangat senang jika bekerja dengan kerja keras dan penuh harapan dan peluang. Karena pada dasarnya itulah yang dapat membuat kita semakin bertambah semangat dalam mengajar. Apalagi jika kerja keras tersebut menampilkan hasil yang baik untuk kemajuan pendidikan, maka rasa puas dan bangga ada pada diri sendiri dan memacu diri untuk terus menerus memberikan yang terbaik"

Minat guru mengajar dikelas inklusif terdiri dari lima indikator, yaitu tingkat kesenangan dalam mengajar, penerimaan keberadaan anak berkebutuhan khusus, keiklasan bekerja tanpa pamrih, kebanggaan dalam mengajar, dan keterlibatan dalam pembelajaran.

Hasil jawaban responden menunjukkan perolehan mendapat perolehan prosentase hampir sempurna, 100% guru menyatakan senang. Sedangkan yang ragu-ragu hanya 0%. Separuh dari guru yaitu 50 % menyatakan menerima dengan baik keberadaan anak berkebutuhan khusus, dengan memberikan perhatian yang dibutuhkan. Separuh guru mengajar dikelas inklusif merupakan panggilan jiwa, dan pengabdian yang tulus, tidak hanya semata-mata imbalan secara materi. Hal ini terbukti ada 50% guru yang menjadi responden, tidak mepedulikan kompensasi honor atau angka kredit yang mereka dapatkan. Ada 100% guru yang menyatakan mengajar dikelas inklusif merupakan

sebuah kebanggaan, bisa menolong anak berkebutuhan khusus, dan terus belajar tentang ilmu perkembangan anak. Sebagian besar dari mereka terlibat penuh dalam pembelajaran siswa di kelas inklusi, ini terbukti ada 41,67,% guru yang mengaku terlibat penuh dalam pembelajaran di kelas inklusif. Data-data tersebut mengindikasikan bahwa minat guru untuk mengajar dikelas inklusif dikategorikan tinggi.

Rata-rata dari perolehan prosentase data kuantitatif minat mengajar di SDN Banua Anyar 4 adalah sebagai berikut :

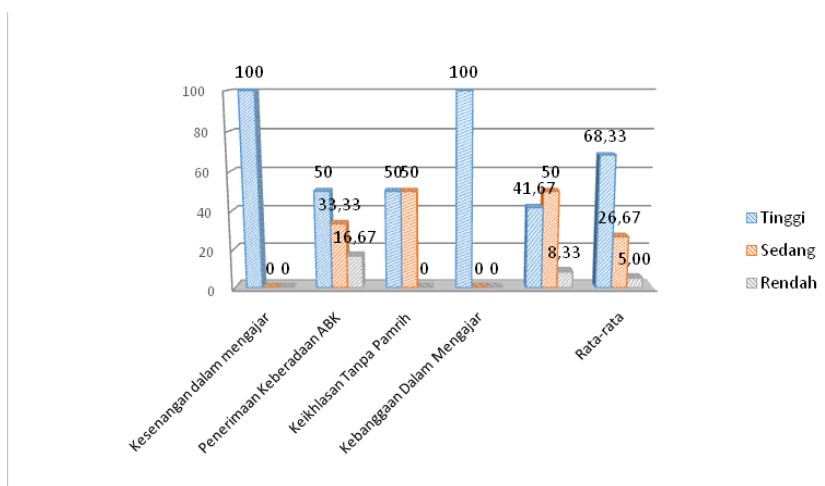


Diagram 4.34. Minat mengajar di SD Banua Anyar 4

Data kualitatif yang dihasilkan dari hasil wawancara mendukung kesimpulan data kuantitatif di atas yang rerata kelima indikator berada pada kategori tinggi sebesar 68,33 %. Responden A sebagai salah satu narasumber mengakui

jika sekolah mereka bersedia menjadi penyelenggara sebab ditunjuk oleh pemerintah, "Karna sekolah kami di tunjuk oleh pemerintah sebagai sekolah yang menerapkan pendidikan inklusif maka mau tidak mau kami harus menerima keberadaan pendidikan inklusif di sekolah ini."

Masih mengutip pernyataan Responden A, sekolah akan membatasi jumlah siswa berkebutuhan khusus yang masuk ke sekolah, mereka menyesuaikan kesanggupan tenaga pendidik dengan kondisi siswa. "Karna merasa di luar kemampuan kami sehingga menolak keberadaan pendidikan inklusif. Minat guru mengajar dikelas inklusif pada terdiri dari lima indikator, yaitu tingkat kesenangan dalam mengajar, penerimaan keberadaan anak berkebutuhan khusus, keiklasan bekerja tanpa pamrih, kebanggaan dalam mengajar, dan keterlibatan dalam pembelajaran. Hasil jawaban responden menunjukkan prosentase tingkat kesenangan mengajar dikelas inklusi, mendapat perolehan prosentase hampir sempurna, 96,30% guru menyatakan senang. Sedangkan yang ragu-ragu hanya 3,70%. Sebagian besar dari guru yaitu 92,59% menyatakan menerima dengan baik keberadaan anak berkebutuhan khusus. Ada 88,89% guru yang menyatakan mengajar merupakan sebuah kebanggaan.

Rata-rata dari perolehan prosentase data kuantitatif minat mengajar guru digambarkan dengan diagram adalah sebagai berikut:

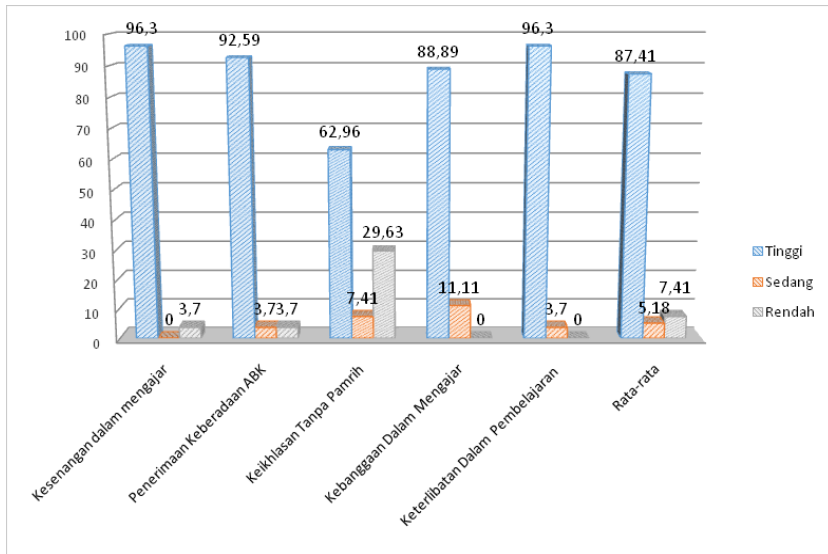


Diagram 4.35. Minat mengajar di SD Gadang 2

Hasil rerata di atas semakin jelas menunjukkan bahwa sekolah memiliki minat guru mengajar yang baik. Prosentase rerata tertinggi kelima indikator yang mendominasi berada pada skala penilaian tinggi yaitu 87,41%.

Berdasarkan data-data tersebut serta didukung oleh data hasil wawancara minat guru mengajar dikelas inklusif di SD Gadang 2 dikategorikan tinggi. Berikut pemaparan dari salah satu responden “Yang jelas kita sebagai manusia memiliki kelebihan dan kekurangan. Dengan adanya pendidikan inklusif ini kita tidak melihat kekurangan anak, kita cukup mengetahui anak ini memiliki hambatan dan

potensi apa yang dapat kita kembangkan. Sehingga kita dapat membuat anak berdiri sejajar dengan anak-anak lain” Kutipan hasil wawancara Responden A ini menunjukkan bahwa SDN Gadang 2 sudah memaknai unsur penting dari pendidikan inklusi yaitu *welcoming school*. Sekolah sudah bersedia terbuka menerima anak tanpa harus fokus kepada kekurangan maupun hambatannya, tetapi lebih kepada menyiapkan diri menggali potensi anak.

Minat guru mengajar dikelas inklusif terdiri dari lima indikator, yaitu tingkat kesenangan dalam mengajar, penerimaan keberadaan anak berkebutuhan khusus, keiklasan bekerja tanpa pamrih, kebanggaan dalam mengajar, dan keterlibatan dalam pembelajaran.

Hasil jawaban responden menunjukkan perolehan prosentase hampir sempurna, 92,31% guru menyatakan senang. Sedangkan yang ragu-ragu hanya 7,69%. Seluruh dari guru yaitu 100 % menyatakan menerima dengan baik keberadaan anak berkebutuhan khusus, dengan memberikan perhatian yang dibutuhkan. Separuh guru mengajar dikelas inklusif merupakan panggilan jiwa, dan pengabdian yang tulus, tidak hanya semata-mata imbalan secara materi. Hal ini terbukti ada 100% guru yang menjadi responden, tidak mementingkan kompensasi honor atau angka kredit yang mereka dapatkan. Ada 100% guru yang menyatakan mengajar dikelas inklusif merupakan sebuah kebanggaan, bisa menolong anak berkebutuhan khusus, dan terus belajar tentang ilmu perkembangan anak. Sebagian besar dari mereka terlibat penuh dalam pembelajaran siswa di kelas inklusi, ini terbukti ada 46,15 % guru yang mengaku

terlibat penuh dalam pembelajaran di kelas inklusif. Data-data tersebut mengindikasikan bahwa minat guru untuk mengajar di kelas inklusif dikatakan tinggi.

Rata-rata dari perolehan prosentase data kuantitatif minat mengajar di SDN Kuin Selatan 3 adalah sebagai berikut :

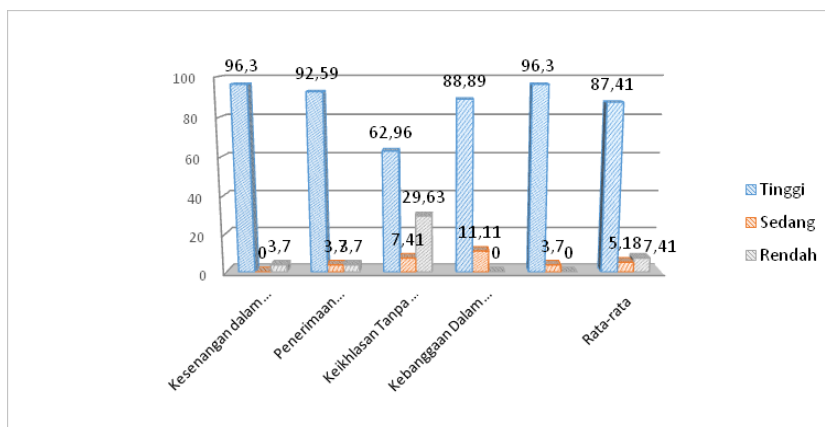


Diagram 4.36 Minat Mengajar Guru SD Kuin Selatan 3

Sejalan dengan apa yang didapatkan pada data kuantitatif yang prosentase rerata tertinggi kelima indikator yang mendominasi berada pada skala penilaian baik yaitu 72,63%. Hasil wawancara pada Responden A di sekolah ini menunjukkan hal yang positif. Meski pernyataan pada kalimat pertama masih terlihat ragu sebab Responden mengakui jika awalnya sekolah bersedia menjadi penyelenggara pendidikan inklusif karena ditunjuk oleh pemerintah, namun dalam prakteknya mereka berusaha maksimal agar siswa-siswa berkebutuhan khusus terlayani kebutuhan pendidikannya. Berikut pernyataan Responden

A, "Yang pertama dari atasan kita dinas pendidikan, dari pemko supaya ada diantara sekolah-sekolah dikecamatan yang ditunjuk untuk mencanangkan pendidikan inklusi, karena banyak dari anak-anak berkebutuhan khusus ini tidak tertampung, jadi itu harapan dari masyarakat agar ada sekolah inklusi didaerah sini, jadi kita sebagai kepala sekolah dan guru memikirkan bagaimana anak abk biar bisa bersekolah seperti anak pada umumnya."

Pernyataan di atas lebih dikuatkan lagi oleh keterangan Responden B, "Ya, sangat setuju karena lebih membantu orangtua yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Selain itu, ABK tidak harus bersekolah di SLB tetapi bisa di inklusif dengan persyaratan tertentu. Dengan adanya inklusif dapat menarik minat, memberi masukan pada orangtua anak pada umumnya bahwa ABK juga memerlukan pendidikan, jadi harus diperlakukan sama dengan anak pada umumnya, meski mereka memiliki kekurangan. Artinya bahwa ABK juga perlu pendidikan, perlu di hormati dan diperlakukan sama".

Responden C meyakinkan, "Dulunya memang merasa kurang yakin dengan adanya sekolah inklusi disekolah ini, karena pandangan kita kesulitannya pada tenaga pengajarnya yang kurang memadai lagi, dan juga ada keagetan dari anak didik yang normal terhadap keberadaan anak abk, dan kurangnya tenaga pengajar yang kurang mempunyai keterampilan untuk memdidik anak abk dan juga banyak yang belum paham bagaimana menghadapi anak yang berkebutuhan khusus dan juga cara memberikan pembelajaran kepada anak abk. Ini lah



membuat kami dulu belum siap dengan adanya pendidikan inklusi disekolah kami, tetapi alhamdulillah sekarang kami lebih yakin bisa memberikan pendampingan khusus kepada anak abk, karena sudah ada beberapa orang guru yang berlatar belakang pendidikan luar bisa walaupun masih belum mencukupi juga sumber daya tenaga pengajarnya disekolah ini” Jadi kesimpulannya, semua stakeholder di SDN Banua Anyar 4 memiliki minat yang baik terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusi.

Data kuantitatif dan kualitatif yang hampir di semua sekolah yang menjadi objek penelitian menunjukkan sinkronisasi dalam mengukur minat sekolah terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusi, menghasilkan kesimpulan bahwa lamanya sekolah menjadi penyelenggara akan mempengaruhi minat mereka, mungkin diawal akan ditemukan sekolah yang kesulitan dalam aplikasi layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus, akan tetapi seiring berjalannya waktu minat akan semakin positif sebab pengalaman memperkuat persepsi mengapa siswa berkebutuhan khusus juga memiliki hak untuk sekolah bersama pada anak pada umumnya.

### **3. Proses Pembelajaran di kelas Inklusif**

Proses pembelajaran di kelas inklusif di SDN Banua Anyar Banjarmasin diperoleh melalui pengamatan terhadap guru yang mengajar di kelas inklusif, dan wawancara tentang kegiatan belajar mengajar (KBM) di kelas. Terdapat lima kisi-kisi instrumen yang dipecah ke dalam dua puluh

butir instrumen pada angket pembelajaran di kelas inklusif di atas: Indikator pertama yaitu pengkondisian belajar terdapat pada butir instrumen satu hingga empat, Indikator kedua strategi pembelajaran yang digunakan dalam kegiatan belajar. Indikator ketiga adalah keterlibatan siswa, Indikator keempat penguasaan bahan ajar, indikator kelima intensitas pemberian tugas.

Terdapat lima kisi-kisi instrumen yang dipecah ke dalam dua puluh butir instrumen pada angket pembelajaran di kelas inklusif di atas: Indikator pertama yaitu pengkondisian belajar terdapat pada butir instrumen satu hingga empat, data menunjukkan rata-rata 60-80% pengkondisian belajar masih kurang sesuai. Indikator kedua strategi pembelajaran yang digunakan dalam kegiatan belajar terpaparkan melalui butir instrumen kelima hingga kesepuluh, jika dirata-rata maka prosentase yang dominan ada ditengah-tengah (kriteria ketiga) jadi pengajar di sekolah ini untuk penggunaan strategi pembelajaran juga masih tidak bisa dikatakan maksimal. Indikator ketiga adalah keterlibatan siswa terdapat pada butir instrumen sebelas sampai dengan lima belas, prosentase dominan 50-70% ada pada kriteria ketiga atau moderat, jadi keterlibatan siswa di SDN Banua Anyar 8 juga bisa dikatakan masih berkembang, belum sesuai betul dengan apa yang diharapkan. Kemungkinan besar masih banyak siswa yang pasif, urung terlibat aktif dalam proses pembelajaran.

Indikator ke empat penguasaan bahan ajar, dapat kita amati melalui butir instrumen ke lima belas, tujuh belas, delapan belas sampai dua puluh. Benang merah yang dapat

kita ambil adalah rata-rata prosentase yang mendominasi yaitu 50-80% ada pada kriteria moderat, sehingga sebagian besar guru di SDN Banua Anyar 8 ini dapat dikatakan sudah bagus dalam penguasaan bahan ajar. Indikator kelima intensitas pemberian tugas bahan ajar oleh guru ada pada butir instrumen enam belas. Sebagai contoh kita ambil butir keenam belas yang memang bunyi pernyataannya pas sekali mewakili indikator ini. Data dominan di butir ke enambelas adalah 40% di kreteria kedua, jadi dari sepuluh guru yang menjadi responden hampir sebagian besar mengatakan intensitas pemberian tugas dalam kegiatan belajar mengajar telah sesuai.

Rerata data kuantitatif di atas dapat kita lihat pada tabel berikut :

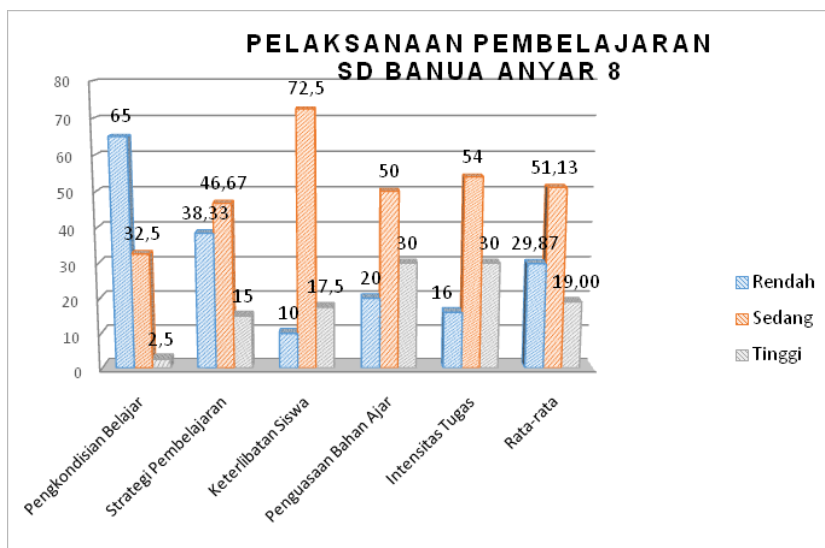


Diagram 4.37 Pelaksanaan Pembelajaran SD Banua Anyar 8

Hasil rerata di atas semakin jelas menunjukkan bahwa SDN Banua Anyar 8 menjalankan proses pembelajaran yang cukup baik. Prosentase rerata tertinggi kelima indikator yang mendominasi berada pada skala penilaian sedang yaitu 51,13%. Data kuantitatif di atas didukung oleh data kualitatif yang dikumpulkan melalui wawancara langsung kepada pengajar yang ada di sekolah. Responden A mengatakan “Kesulitan yang saya alami dalam mengevaluasi ABK pasti ada, apalagi dalam hal pembelajaran. Dalam mengajar anak pada umumnya saja terkadang kita sudah sulit, apalagi ABK. Karena kita sekolah inklusi, sistem kurikulum yang berlaku harus mengikuti kebutuhan anak, bukan anak yang mengikuti kurikulum. Dalam pembuatan soal untuk evaluasi kita samakan dengan anak yang lain, namun dalam artian soal itu kita turunkan (dipermudah), jadi untuk anak berkebutuhan khusus kita arahkan dan kita jelaskan satu persatu soal dan jawaban apabila anak tidak dapat menjawabnya dan akan kita berikan opsi terakhir untuk memilih jawaban yang benar.” Pernyataan tersebut menyiratkan bahwa meskipun memang sulitnya proses pembelajaran klasikal yang mempersyaratkan siswa reguler belajar bersama siswa berkebutuhan khusus benar adanya, akan tetapi guru telah memahami bahwa terdapat strategi pembelajaran yang mampu mengakomodasi keberadaan mereka, misal dengan menyusun kurikulum yang berdasar kepada kebutuhan anak.

Pernyataan di atas dikuatkan lagi dengan apa yang selanjutnya disampaikan oleh responden sebagai berikut, “Setiap pembelajaran pastilah mempunyai banyak

kesulitan , karena yang kita hadapi adalah anak-anak yang luar biasa dan mereka pun beragam adanya, kesulitannya adalah tidak bisa hanya sekali saja dalam memberikan pembelajaran pada anak, harus lah berulang-ulang kali dan terus menerus sampai anak paham betul dan mampu mengaplikasikannya dalam kegiatan sehari-hari dirumah maupun disekolah dan dimana saja.” Pengajar umumnya sudah memahami pengkondisian belajar serta bagaimana merancang strategi pembelajaran yang relevan untuk kelas inklusi, meskipun tetap meyampaikan kadang-kadang masih merasa kesulitan karena setiap siswa, terlebih siswa berkebutuhan khusus memiliki karakteristik belajar yang berbeda-beda.

SDN Banua Anyar 8 yang menurut data kuantitatif dan didukung oleh data kualitatif mendapat kategori yang cukup baik dalam proses pembelajaran di kelas inklusi memang tercermin dari bagaimana implementasi proses belajar disana, satu dekade menjalankan pendidikan ramah tanpa diskriminasi, proses pembelajaran yang tentunya akan berefek kepada siswa berkebutuhan khusus maupun siswa reguler sudah cukup baik.

Indikator pertama yaitu pengkondisian belajar terdapat pada butir instrumen satu hingga empat, data menunjukkan rata-rata 50-75% pengkondisian belajar ada pada kondisi moderat. Indikator kedua strategi pembelajaran yang digunakan dalam kegiatan belajar terpaparkan melalui butir instrumen kelima hingga kesepuluh, jika dirata-rata maka prosentase yang dominan ada ditengah-tengah (kriteria ketiga) sebesar 40-100%. Indikator ketiga adalah keterlibatan

siswa terdapat pada butir instrumen sebelas sampai dengan lima belas, prosentase dominan 60-80% ada pada kriteria ketiga atau moderat, jadi keterlibatan siswa di SDN Banua Anyar 4 juga bisa dikatakan masih berkembang, belum sesuai betul dengan apa yang diharapkan. Kemungkinan besar masih banyak siswa yang pasif, urung terlibat aktif dalam proses pembelajaran.

Hasil analisis data menyimpulkan bahwa baik untuk indikator ke empat penguasaan bahan ajar dan indikator kelima yaitu intensitas pemberian tugas maupun tiga indikator sebelumnya menunjukkan prosentase dominan selalu berada pada kriteria ketiga atau moderat dengan rata-rata nilai prosentase sebesar 40% hingga 100%. Hal ini memberikan informasi jika SDN Banua Anyar 4 memang perlu pembinaan agar efektifitas proses belajar mengajar dapat ditingkatkan. Mengingat data diambil langsung dari panelis yang turun ke lapangan untuk mengobservasi, maka tak salah jika data yang meski hanya berupa jабaran kuantitatif akan menjadi patokan.

Rerata data kuantitatif di atas dapat kita lihat pada diagram berikut :

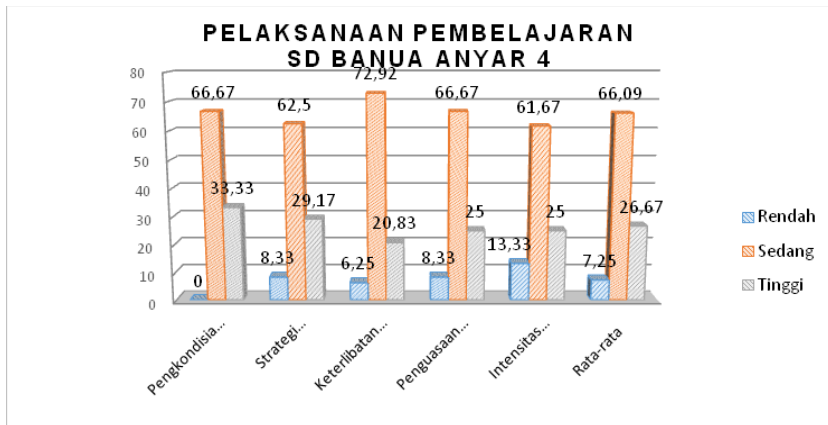


Diagram 4.38 Pelaksanaan Pembelajaran SD Banua Anyar 4

Rerata di atas menunjukkan keadaan proses pembelajaran yang cukup baik. Prosentase tertinggi berada pada kategori sedang, sebesar 66,09% "Penguasaan terhadap pembelajaran ABK ada beberapa yang masih perlu dipelajari, kadang harus membuka beberapa referensi-referensi buku atau bacaan kembali untuk lebih meyakinkan dan mendapatkan pemahaman tentang bagaimana pembelajaran anak berkebutuhan khusus, bagaimana cara menghadapinya kadang seorang guru juga bisa lupa atau tidak mengngat kembali apa yang perlu dilakukan untuk anak-anak tertentu.

Sebagai seorang guru juga harus terus belajar jangan pernah merasa puas dengan pelajaran yang telah ditempuh semasa duduk dibangku kuliah, harus selalu merasa tidak puas dan lebih baik lagi kalau lebih sering lagi sosialisasi

mengenai anak berkebutuhan khusus untuk menambah pemahaman para guru yang pada akhirnya juga untuk membantu meningkatkan pelayanan moto pendidikan itu sendiri.”

Pernyataan di atas merupakan jawaban dari salah seorang pengajar yang sekaligus menjadi responden di SDN Banua Anyar 4. Berdasarkan data kuantitatif, sekolah ini mendapat kategori moderat dalam proses pembelajaran, hal tersebut kembali dikuatkan oleh data kualitatif yang tersirat lewat pemaparan responden di atas. SDN Banua Anyar 4 tergolong baru dalam menjalankan pendidikan inklusi, namun ternyata mereka sudah cukup baik melaksanakan proses pembelajaran yang menggabungkan siswa berkebutuhan khusus dengan siswa reguler. Mereka cukup baik dalam memahami kebutuhan belajar siswa yang berbeda khususnya bagi siswa yang memiliki hambatan tertentu. Berikut pernyataan responden B, “Tentu, ada perhatian kepada siswa abk tetapi siswa umum perlu juga perhatian yang khusus, karena setiap sifat anak didik kita inikan beda-beda jadi harus ada perhatian khusus. Untuk anak umum dulu, ada anak yang cerdas intelegensinya pada saat proses pebelajaran guru mengulang lagi pembelajaran yang sudah dia pahami, maka anak mudah bosan dengan pelajaran itu. Untuk anak abk, ada anak yang intelegensinya dibawah rata-rata otomatis anak tidak bisa kalau pelajarannya tidak diulang-ulang, untuk mencapai ketuntasan KKM, jadi harus ada perhatian khusus kepada anak abk lebih dipentingkan karena ada anak berkebutuhan khusus kalau tidak diperhatikan anak menangis.”



Data pelaksanaan pembelajaran di SD Kuin Selatan 3, indikator pertama dan kedua bervariasi sehingga cukup sulit untuk merata-rata prosentase dominan seperti dua sekolah sebetulnya. Pengkondisian belajar sebagai indikator pertama terdapat pada butir instrumen satu hingga empat. Dibutir instrumen pertama dan keempat yang masing-masing menyatakan ketepatan waktu guru di kelas serta kemampuan awal siswa, prosentasi dominan berada pada kriteria keempat atau sesuai. Menurut data di atas kesiapan siswa untuk belajar dan bagaimana guru mengkondisikan siswa untuk belajar sudah sangat sesuai. Dikuatkan oleh perolehan prosentasi tertinggi di butir instrumen kedua juga ketiga yang ada pada kisaran 60-80%.

Indikator kedua strategi pembelajaran yang digunakan dalam kegiatan belajar terpaparkan melalui butir instrumen kelima hingga kesepuluh, data di atas menunjukkan jika prosentase dominan berada pada skala satu hingga lima yang terjemahnya menyatakan pilihan sesuai juga sangat sesuai. Bahkan pada butir instrumen ketujuh yang menggambarkan penggunaan metode harus bersesuaian dengan tujuan, responden mengatakan 100% sudah sangat sesuai. Sungguh ini hasil yang menggembirakan.

Indikator ketiga adalah keterlibatan siswa terdapat pada butir instrumen sebelas sampai dengan lima belas, prosentase dominan 60-80% ada pada skala penilaian kelima yang artinya sudah sangat sesuai. Serupa dengan indikator sebelumnya, indikator ke empat penguasaan bahan ajar yang dapat kita amati melalui butir instrumen ke lima belas, tujuh belas, delapan belas sampai dua puluh ini juga

memperoleh hasil maksimal pada prosentase dominannya. Sangat sesuai untuk indikator ini menduduki posisi pertama yaitu sebesar 60-100%. Indikator kelima intensitas pemberian tugas bahan ajar oleh guru ada pada butir instrumen enam belas yang memang bunyi pernyataannya pas sekali mewakili indikator ini. Data dominan di butir ke enambelas adalah 100% di kreteria kelima, seluruh guru yang menjadi responden mengatakan intensitas pemberian tugas telah sangat sesuai.

Rerata data kuantitatif di atas dapat kita lihat pada diagram berikut:

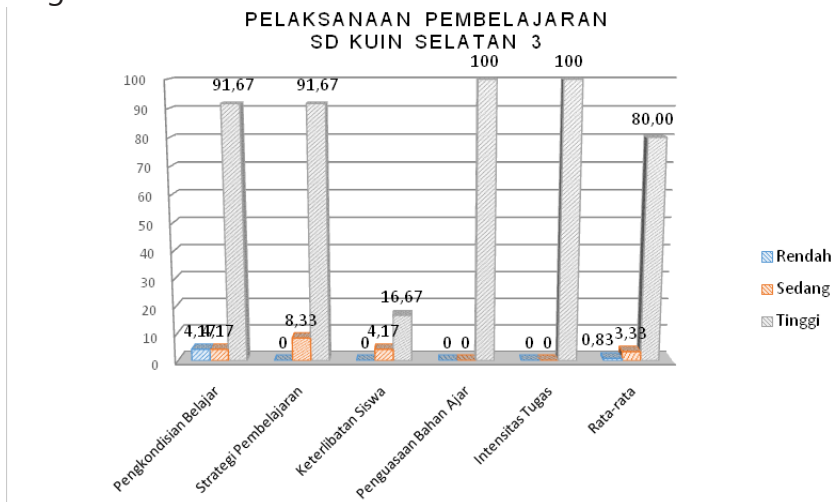


Diagram 4.39 Pelaksanaan Pembelajaran SD Kuin Selatan 3

Rerata di atas menggambarkan kondisi proses pembelajaran yang sangat sesuai, prosentasenya sebesar 80,00%. Berikut pemaparan salah satu responden pada data kualitatif yang mendukung data kuantitatif di atas, "Selalu

diterapkan, berkompetisi sekaligus bersosialisasi baik itu pada saat istirahat ataupun ada kerja kelompok anak saya berikan kesempatan untuk bersosialisasi sekaligus berkompetisi bersosialisasi dengan tujuan agar timbul rasa saling menghargai, anak umum atau normal mau dan dapat menerima keadaan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) tidak minder berinteraksi atau bersosialisasi dengan anak umum atau anak normal. Sementara berkompetisi juga selalu saya berikan kesempatan dengan tujuan agar semua siswa terpacu untuk berprestasi tanpa terkecuali bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) mereka juga mampu berkompetisi tentu saja dengan level atau tingkat pembelajaran yang disesuaikan dengan kemampuannya.”

SDN Kuin Selatan 3 mendapat kategori yang sangat sesuai pada proses pembelajaran di kelas inklusi, meskipun juga tergolong baru dalam pelaksanaan pendidikan inklusi sekolah ini memiliki pengajar yang optimis dan bersedia meluangkan waktu lebih untuk memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik bagi semua peserta didiknya. Pengajar bisa menumbuhkan budaya inklusi di kelas dengan memberdayakan siswa reguler untuk membantu siswa berkebutuhan khusus belajar. Hal tersebut tercermin dalam pernyataan responden berikut “Pembelajaran tutorial teman sebaya alhamdulillah tidak mengalami kesulitan, karena siswa pada umumnya dikelas dua dapat menerima adanya anak-anak berkebutuhan khusus, sehingga anak siap untuk mengajarkankan pembelajaran dikelas kepada temannya yang lain yang masih kurang mengerti, seperti membaca,

anak pada umumnya dikelas mengajarkan bagaimana cara mengeja suku kata terhadap salah satu anak berkebutuhan khusus yang masih belum bisa membaca.” Maka hasil triangulasi data di atas cukup mewakili sebagai bukti jika SDN Kuin Selatan 3 sudah bisa dikatakan sangat sesuai dalam proses pembelajaran di kelas inklusi.

Sama dengan sekolah-sekolah sebelumnya terdapat lima kisi-kisi instrumen yang dipecah ke dalam dua puluh butir instrumen pada angket pembelajaran di kelas inklusif di atas. Indikator pertama yaitu pengkondisian belajar terdapat pada butir instrumen satu hingga empat, data menunjukkan rata-rata 50% pengkondisian belajar sangat sesuai. Indikator kedua strategi pembelajaran yang digunakan dalam kegiatan belajar terpaparkan melalui butir instrumen kelima hingga kesepuluh, dirata-rata maka prosentase yang dominan ada di skala sesuai. Indikator ketiga adalah keterlibatan siswa terdapat pada butir instrumen sebelas sampai dengan lima belas, prosentase dominan 40-60% ada pada kriteria kelima, jadi keterlibatan siswa di sekolah ini sangat baik.

Indikator ke empat penguasaan bahan ajar, dapat kita amati melalui butir instrumen ke lima belas, tujuh belas, delapan belas sampai dua puluh. Benang merah yang dapat kita ambil adalah rata-rata prosentase yang mendominasi yaitu 50% ada pada kriteria keempat, sehingga sebagian besar guru di dapat dikatakan sudah bagus dalam penguasaan bahan ajar. Indikator kelima intensitas pemberian tugas bahan ajar oleh guru ada pada butir instrumen enam belas yang memang bunyi pernyataannya

pas sekali mewakili indikator ini. Data dominan di butir ke enam belas adalah 58% di kreteria keempat, jadi dari sepuluh guru yang menjadi responden hampir sebagian besar mengatakan intensitas pemberian tugas telah sesuai. Rerata data kuantitatif di atas dapat kita lihat pada diagram berikut

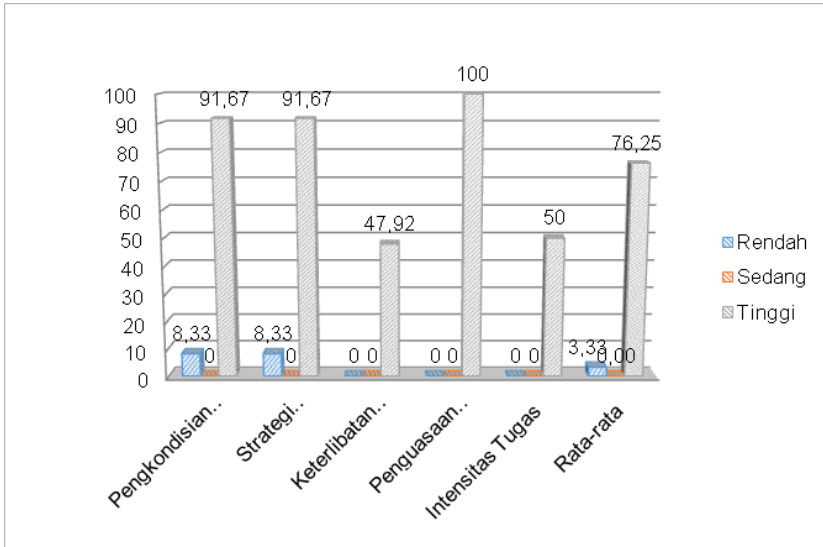


Diagram 4.40 Pelaksanaan Pembelajaran SD Gadang 2

Rerata di atas menggambarkan kondisi proses pembelajaran yang sesuai, prosentasenya sebesar 76,25%. Data kuantitatif di atas didukung pula oleh data kualitatif hasil wawancara. Salah satu responden mengatakan, “Sebenarnya aktifitasnya ngalir gitu aja, di bantu juga oleh guru kelas, karena guru kelaskan lebih tau. Kalau saya Cuma sekali-kali tanya, mengamati, itu kan tidak seintens guru kelas dan guru pendamingnya, jadi itu memang perlu

kerjasama, kita dengan orang tuanya juga harus kerjasama bahkan dengan terapisnya pun harus kerjasama. Biasanya ada yang datang ke Sekolah kita konsultasi di situ kita bikin programnya harus di selaraskan dengan yang di Sekolah dan di tempat terapisnya anak sebenarnya fleksibel aja.” Berdasarkan pemaparan ini, tergambar jika pengajar di SDN Gadang 2 sudah memahami alur menuju proses pembelajaran, yaitu perlu diadakannya asesmen bagi siswa berkebutuhan khusus sebagai dasar penyusunan program belajar. Telah dipahami juga oleh pengajar disana jika harus diadakan kerja sama antara guru kelas dengan guru pendamping dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif di kelas inklusi.

Responden lainnya menyampaikan, “Sebenarnya ngga sulit apalagi semenjak ada ABK, alhamdulillah kalo dulu ego anak- anak memang besar semenjak ada ABK mereka berbaur dengan temannya membuat mereka bak karena, kami menanamkan rasa syukur kerjasama dalam hal apapun saya rasa tidak ada kesulitan” Tersirat dari pemaparan ini jika SDN Gadang 2 juga berhasil menumbuhkan kondisi belajar yang berbudaya inklusi, menyusun strategi pembelajaran yang melibatkan secara aktif siswa berkebutuhan khusus dan siswa reguler. Setelah ditriangulasikan, maka kategori baik dalam proses pembelajaran yang didapat oleh SDN Gadang 2 sudah benar saja didapat.

## BAGIAN 6

### PRODUK (PRODUCT) PENDIDIKAN INKLUSIF

Evaluasi produk adalah evaluasi yang dilakukan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan program. Cakupan evaluasi pada tahapan produk meliputi: analisis rerata dokumen hasil ujian nasional, rerata skor kecerdasan emosional, dan serapan ke sekolah menengah pertama (SMP).

#### **1. Hasil Ujian Nasional**

Untuk mendapatkan gambaran efektivitas produk secara akademis dilakukan analisis perbandingan skor hasil ujian nasional pada pelajaran IPA, yang diambil dari ranking 10 besar lulusan. Data nilai UAN IPA diambil dari tahun sebelum menyelenggarakan inklusif, satu tahun setelah inklusif dan nilai ujian nasional tahun terakhir. Masing-masing nilai diambil rata-rata kemudian dibandingkan.

Perbandingan hasil ujian nasional dapat dirangkum pada diagram sebagai berikut:

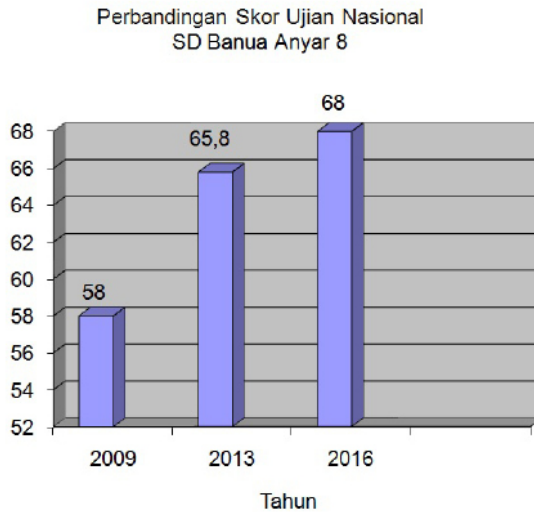
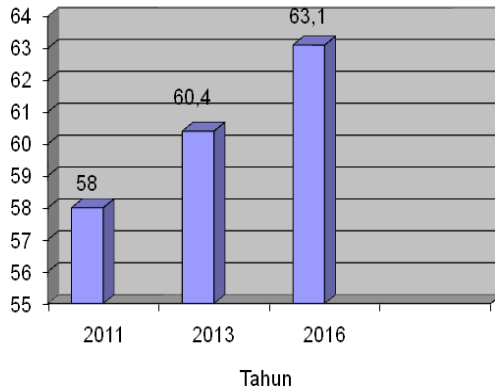


Diagram 4.41 Perbandingan Skor Ujian Nasional SD Banua Anyar 8

Berdasarkan diagram di atas, terlihat bahwa nilai ujian nasional pada mata pelajaran IPA di SD Banua Anyar 8 mengalami peningkatan. Hal tersebut terlihat pada rata-rata nilai ujian nasional 58,0 pada tahun 2009 sebelum menyelenggarakan inklusi, dan setahun setelah menyelenggarakan inklusi yaitu pada tahun 2013 nilai rata-rata ujian nasional mengalami peningkatan dari tahun 2009 sebesar 7,9 yaitu menjadi 65,8. Pada ujian nasional tahun 2016 juga mengalami peningkatan mejadi 68,0.



**Perbandingan Skor Ujian Nasional  
SD Gadang 2**



**Diagram 4.42 Perbandingan Skor Ujian Nasional SD  
Gadang 2**

Berdasarkan diagram di atas, terlihat bahwa nilai ujian nasional pada mata pelajaran IPA di SD Gadang 2 mengalami peningkatan. Hal tersebut terlihat pada rata-rata nilai ujian nasional 58,1 pada tahun 2011 sebelum menyelenggarakan inklusi, dan setahun setelah menyelenggarakan inklusi yaitu pada tahun 2013 nilai rata-rata ujian nasional mengalami peningkatan dari tahun 2011 sebesar 2,3 yaitu menjadi 60,4. Pada ujian nasional tahun 2016 juga mengalami peningkatan dari tahun 2013 yakni sebesar 2,7 mejadi 63,1.

### Perbandingan Skor Ujian Nasional SD Banua Anyar 4

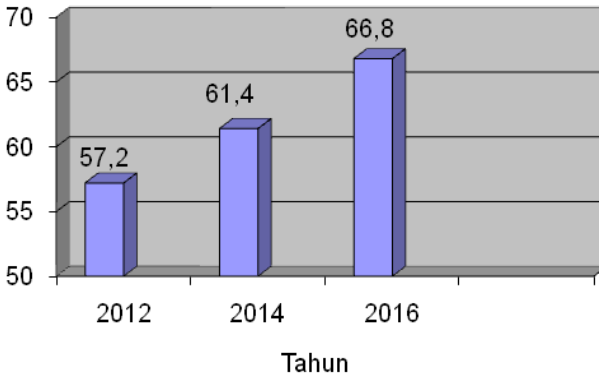


Diagram 4.43 Perbandingan Skor Ujian Nasional SD Banua Anyar 4

Berdasarkan diagram di atas, terlihat bahwa nilai ujian nasional pada mata pelajaran IPA di SD Banua Anyar 4 mengalami peningkatan. Hal tersebut terlihat pada rata-rata nilai ujian nasional 57,2 pada tahun 2012 sebelum menyelenggarakan inklusi, dan setahun setelah menyelenggarakan inklusi yaitu pada tahun 2014 nilai rata-rata ujian nasional mengalami peningkatan dari tahun 2012 sebesar 4,2 yaitu menjadi 61,4. Pada ujian nasional tahun 2016 juga mengalami peningkatan dari tahun 2014 yakni sebesar 5,4 menjadi 66,8

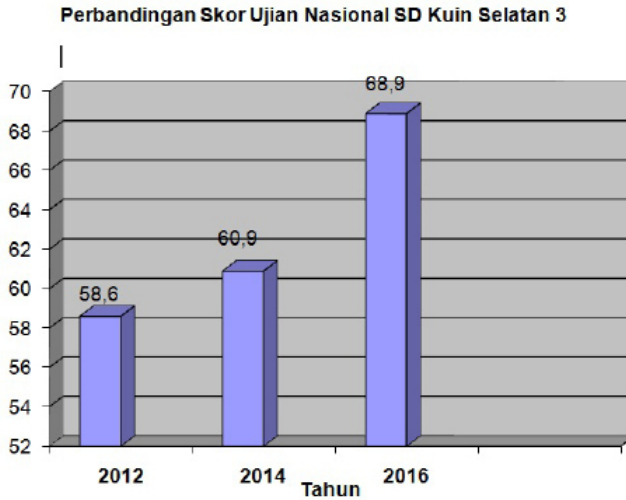


Diagram 4.44 Perbandingan Skor Ujian Nasional SD Kuin Selatan 3

Berdasarkan tabel di diagram, terlihat bahwa nilai ujian nasional pada mata pelajaran IPA di SD Kuin Selatan 3 mengalami peningkatan. Hal tersebut terlihat pada rata-rata nilai ujian nasional 58,6 pada tahun 2012 sebelum menyelenggarakan inklusi, dan setahun setelah menyelenggarakan inklusi yaitu pada tahun 2014 nilai rata-rata ujian nasional mengalami peningkatan dari tahun 2012 sebesar 2,3 yaitu menjadi 60,9. Pada ujian nasional tahun 2016 juga mengalami peningkatan dari tahun 2014 yakni sebesar 8,0 mejadi 68,9.

## 2. Sikap Sosial

Sikap sosial di sekolah penyelenggara inklusif dapat diketahui melalui hasil pengisian angket siswa, wawancara guru dan wawancara orang tua. Angket sikap sosial dikembangkan berdasarkan 6 indikator sikap sosial sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, yang dikembangkan oleh Skjorten meliputi (1) berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain, (2) membantu satu sama lain untuk belajar dan berfungsi, (3) saling tenggang rasa satu sama lain, (4) menerima kenyataan bahwa sebagian anak mempunyai kebutuhan yang berbeda dari mayoritas, (5) cenderung bekerjasama daripada bersaing dan (6) semua anak mempunyai rasa memiliki dan bermitra. Adapun pelaksanaan wawancara dilakukan secara terbuka kepada guru dan orangtua untuk mengetahui gambaran sikap sosial di sekolah penyelenggara inklusif.

Angket sikap sosial dan pedoman wawancara yang sudah dikembangkan ditujukan ke empat sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di Banjarmasin, yaitu di SD Banua Anyar 8, SD Gadang 2, SD Kuin selatan 3 dan SD Banua Anyar 4. Angket diberikan kepada siswa berkebutuhan khusus maupun siswa reguler di kelas inklusif, yang diambil secara acak sedangkan wawancara dilakukan pada guru dan orang tua siswa berkebutuhan khusus.

Berdasarkan data angket yang telah diisi responden, sikap sosial SD Banua Hanyar 8 dapat dideskripsikan antara lain sebagai berikut:

- 1) Indikator pertama terkait *kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain*, tercermin pada instrumen nomor 1,2,3,4,5. Hasil angket menunjukkan 74,57% responden yang sering melakukan interaksi dan berkomunikasi satu sama lain, 15,79% jarang melakukan interaksi dan berkomunikasi satu sama lain, 9,65% tidak pernah melakukan interaksi dan berkomunikasi satu sama lain. Dengan demikian, sikap sosial siswa di SDN Banua Anyar 8 pada indikator pertama menunjukkan prosentase yakni 74,57% dengan kriteria **tinggi** yang artinya, siswa dapat berinteraksi dengan teman, guru, maupun kepala sekolah, siswa tidak membedakan teman bermain termasuk dengan anak siswa berkebutuhan khusus, serta menghormati orang lain. Kemampuan siswa yang sangat baik dalam berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain tersebut tidak hanya ditunjukkan di sekolah, tetapi juga di lingkungan masyarakat tempat tinggalnya. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui hasil wawancara dengan orang tua siswa sebagai berikut: Menurut saya sikap masyarakat baik tidak ada yang mencela atau menghindar. Bahkan daffa sering ikut ngumpul dengan orang tua yang ada di ekitar rumahnya, dia suka mendengarkan pembicaraan bapak-bapak atau ibu-ibu yang biasanya berkumpul di sekitar rumahnya.
- 2) Indikator kedua terkait *kemampuan membantu satu sama lain untuk belajar dan berfungsi*, tercermin pada instrumen nomor 7-20. Hasil angket menunjukkan 53,00% responden yang sering membantu satu sama lain untuk belajar dan berfungsi, 30,83% jarang membantu

satu sama lain untuk belajar dan berfungsi, 16,17% tidak pernah membantu satu sama lain untuk belajar dan berfungsi. Dengan demikian, sikap sosial siswa di SDN Banua Anyar 8 pada indikator kedua menunjukkan prosentase yakni 30,83% dengan kriteria "tinggi" dalam membantu teman yang membutuhkan, menjenguk teman yang sakit.

Hasil angket tersebut berbading lurus dengan pernyataan guru yang diperoleh melalui hasil wawancara sebagai berikut:

Pendidikan inklusif ini, selain membantu dalam bidang pendidikan dengan memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan kemampuan dan pendidikan anak mengembangkan aspek sosialnya. Anak berteman dengan baik dengan anak pada umumnya. Mereka punya rasa saling tolong menolong dan tidak meremehkan anak berkebutuhan khusus

- 3) Indikator ketiga terkait *saling tenggang rasa satu sama lain*, tercermin pada instrumen nomor 21-30. Hasil angket menunjukkan 38,95% responden yang sering tenggang rasa satu sama lain, 24,21% jarang tenggang rasa satu sama lain, 36,84% tidak pernah tenggang rasa satu sama lain. Dengan demikian, sikap sosial siswa di SDN Banua Anyar 8 pada indikator ketiga menunjukkan prosentase yakni 36,84% dengan kriteria **rendah** dalam tenggang rasa satu sama lain. Adapun hasil wawancara pada guru terkait sikap sosial sebagai berikut:

Kesulitan untuk saling menghargai, kerja sama, dan tolong menolong adalah ketika ada siswa yang tidak mampu mengontrol emosinya. Misalnya, ketika guru meminta anak untuk membantu teman yang sedang kesulitan dalam menyelesaikan tugas di kelas, tetapi teman yang dibantu kadang tidak mau, sehingga siswa yang membantu marah dan tidak mau menolong temannya. Tetapi dalam kondisi seperti ini beliau mengarahkan untuk berbuat baik dan saling tolong menolong adalah hal yang disukai Tuhan, dan akan mendapatkan pahala

- 4) Indikator keempat terkait *menerima kenyataan bahwa sebagian anak mempunyai kebutuhan yang berbeda dari mayoritas*, tercermin pada instrumen nomor 31-39. Hasil angket menunjukkan 44,74% responden yang sering menerima kenyataan bahwa sebagian anak mempunyai kebutuhan yang berbeda dari mayoritas, 31,05% jarang menerima kenyataan bahwa sebagian anak mempunyai kebutuhan yang berbeda dari mayoritas, 14,21% tidak pernah menerima kenyataan bahwa sebagian anak mempunyai kebutuhan yang berbeda dari mayoritas. Dengan demikian, sikap sosial siswa di SDN Banua Anyar 8 pada indikator keempat menunjukkan prosentase yakni 44,74% dengan kriteria **tinggi** dalam hal menyadari semua orang memiliki kemampuan yang berbeda. Adapun hasil wawancara pada orang tua terkait sikap sosial kaitannya dengan indikator ketiga sebagai berikut:

Untuk dulu ketika berada di rumah sebelum pindah, anak saya dengan tetangga seperti dikucilkan, anak saya dianggap seperti orang yang kesurupan, keluarga saya juga mengatakan seperti itu, anak saya pernah dibawa oleh keluarga saya ke orang-orang pintar. Dan ketika saya pindah kesini anak saya diterima dengan baik dan anak saya pun juga sering bermain-main diluar rumah tapi saya jarang membolehkan karena anak saya itu sering pergi ke luar rumah yang jauh

- 5) Indikator kelima terkait *cenderung bekerja sama daripada bersaing*, tercermin pada instrumen nomor 40-45. Hasil angket menunjukkan 35,67% responden yang sering bekerja sama daripada bersaing, 19,30% pernah bekerja sama daripada bersaing, 22,81% tidak pernah bekerja sama daripada bersaing. Dengan demikian, sikap sosial siswa di SDN Banua Anyar 8 pada indikator kelima menunjukkan prosentase yakni 35,67% dengan kriteria "tinggi" dalam hal sering bekerja sama daripada bersaing. Adapun hasil wawancara pada guru terkait sikap sosial kaitannya dengan indikator kelima sebagai berikut:

Memang untuk mengajarkan sikap dan sosial itu lebih sulit dibanding kognitif karena pengetahuan itu sudah terdapat materinya dan tinggal bagaimana cara kita mengaplikasikannya kepada anak agar anak dengan mudah untuk memahami pengetahuan itu, sedangkan untuk mengajarkan sikap dan sosial itu



kita harus tegas dan ada kerjasama dengan orang tua anak itu sendiri bagaimana agar sikap dan sosial yang kita ajarkan tidak hanya diaplikasikan anak disekolah namun juga diaplikasikan dikegiatan sehari-hari anak dirumah. Tetapi setiap hari saya selalu menyelipkan pelajaran tentang sikap dan sosial yang baik kepada anak

- 6) Indikator keenam terkait *semua anak memiliki rasa memiliki dan bermitra*, tercermin pada instrumen nomor 46-50. Hasil angket menunjukkan 54,73% responden yang sering menunjukkan rasa memiliki dan bermitra, 21,37% jarang menunjukkan rasa memiliki dan bermitra, 17,89% tidak pernah menunjukkan rasa memiliki dan bermitra. Dengan demikian, sikap sosial siswa di SDN Banua Anyar 8 pada indikator kelima menunjukkan prosentase yakni 33,68% dengan kriteria **tinggi** dalam hal menunjukkan rasa memiliki dan bermitra. Adapun hasil wawancara pada orang tua terkait sikap sosial kaitannya dengan indikator keenam sebagai berikut:

Menurut saya sikap masyarakat baik tidak ada yang mencela atau menghindar. Bahkan daffa sering ikut ngumpul dengan orang tua yang ada di sekitar rumahnya, dia suka mendengarkan pembicaraan bapak-bapak atau ibu-ibu yang biasanya berkumpul di sekitar rumahnya

Berdasarkan deskripsi di atas, dapat disimpulkan bahwa sikap sosial siswa di SDN Banua Anyar 8 tergolong tinggi. Untuk lebih jelasnya, sikap sosial siswa di SDN Banua Anyar 8 divisualisasikan ke dalam tabel berikut:

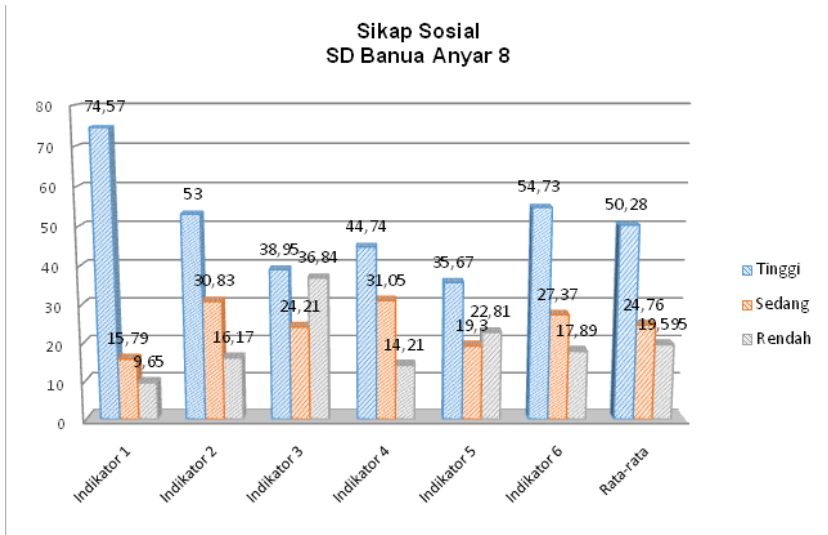


Diagram 4.45 Sikap Sosial SD Banua Anyar 8

Berdasarkan data angket yang telah diisi responden, sikap sosial SD Gadang 2 dapat dideskripsikan antara lain sebagai berikut:

- 1) Indikator pertama terkait *kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain*, tercermin pada instrumen nomor 1,2,3,4,5. Hasil angket menunjukkan 46,42% responden yang sering melakukan interaksi dan berkomunikasi satu sama lain, 48,02 jarang melakukan interaksi dan berkomunikasi satu sama lain, 5,56% tidak pernah melakukan interaksi dan berkomunikasi satu sama

lain. Dengan demikian, sikap sosial siswa di SD Gadang 2 pada indikator pertama menunjukkan prosentase yakni 46,42% dengan kriteria **tinggi** yang artinya, siswa cukup dapat berinteraksi dengan teman, guru, maupun kepala sekolah, siswa tidak membedakan teman bermain termasuk dengan anak siswa berkebutuhan khusus, serta menghormati orang lain. Adapun hasil wawancara pada orang tua terkait sikap sosial kaitannya dengan indikator pertama sebagai berikut:

Alhamdulillah keluarga di rumah sangat menerima keberadaan anak saya, perlakuan kepada anak saya sama memperlakukan anak normal lainnya dan tidak ada perbedaan antara keluarga kami, kami pun mendukung semua perkembangan anak saya contohnya keluarga mengajarkan anak saya bersosialisasi.

- 2) Indikator kedua terkait *kemampuan membantu satu sama lain untuk belajar dan berfungsi*, tercermin pada instrumen nomor 7-20. Hasil angket menunjukkan 37,39 % responden yang sering membantu satu sama lain untuk belajar dan berfungsi, 48,5% jarang membantu satu sama lain untuk belajar dan berfungsi, 14,1% tidak pernah membantu satu sama lain untuk belajar dan berfungsi. Dengan demikian, sikap sosial siswa di SD Gadang 2 pada indikator kedua menunjukkan prosentase yakni 48,5% dengan kriteria “sedang” dalam membantu teman yang membutuhkan, menjenguk teman yang

sakit. Berdasarkan hasil wawancara kepada guru terkait indikator kedua sebagai berikut:

Siswa reguler cukup peka dalam membantu siswa berkebutuhan khusus yang mengalami masalah. Misalnya ketika siswa berkebutuhan khusus kesulitan dalam menyelesaikan suatu tugas yang diberikan guru, maka beberapa siswa reguler menunjukkan sikap kepedulian untuk membantu

- 3) Indikator ketiga terkait *saling tenggang rasa satu sama lain*, tercermin pada instrumen nomor 21-30. Hasil angket menunjukkan 30,56% responden yang sering tenggang rasa satu sama lain, 48,33% jarang tenggang rasa satu sama lain, 21,11% tidak pernah tenggang rasa satu sama lain. Dengan demikian, sikap sosial siswa di SD Gadang 2 pada indikator ketiga menunjukkan prosentase yakni 48,33% dengan kriteria “sedang” dalam tenggang rasa satu sama lain. Adapun hasil wawancara pada guru terkait sikap sosial indikator ketiga sebagai berikut:

Sikap tenggang rasa ditunjukkan siswa saat salah seorang teman kehilangan alat tulis, maka teman yang memiliki alat tulis lebih dari satu dengan senang meminjamkannya

- 4) Indikator keempat terkait *menerima kenyataan bahwa sebagian anak mempunyai kebutuhan yang berbeda dari mayoritas*, tercermin pada instrumen nomor 31-39. Hasil

angket menunjukkan 32,41% responden yang sering menerima kenyataan bahwa sebagian anak mempunyai kebutuhan yang berbeda dari mayoritas, 50% jarang menerima kenyataan bahwa sebagian anak mempunyai kebutuhan yang berbeda dari mayoritas, 6,48% tidak pernah menerima kenyataan bahwa sebagian anak mempunyai kebutuhan yang berbeda dari mayoritas. Dengan demikian, sikap sosial siswa di SD Gadang 2 pada indikator keempat menunjukkan prosentase yakni 50% dengan kriteria **sedang** dalam hal menyadari semua orang memiliki kemampuan yang berbeda. Adapun sikap menerima kenyataan bahwa sebagian anak mempunyai kebutuhan yang berbeda dari mayoritas juga ditunjukkan oleh masyarakat tempat tinggal anak. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara pada orang tua sebagai berikut:

Masyarakat sangat mendukung untuk Perkembangan Anak Berkebutuhan Khusus, walaupun masih ada beberapa orang yang menganggap Anak Berkebutuhan Khusus itu aneh atau sejenisnya, tetapi masih banyak orang yang sangat mendukung perkembangan Anak Berkebutuhan Khusus

- 5) Indikator kelima terkait *cenderung bekerja sama daripada bersaing*, tercermin pada instrumen nomor 40-45. Hasil angket menunjukkan 24,65% responden yang sering bekerja sama daripada bersaing, 34,38% jarang bekerja sama daripada bersaing, 15,97% tidak pernah bekerja

sama daripada bersaing. Dengan demikian, sikap sosial siswa di SD Gadang 2 pada indikator kelima menunjukkan prosentase yakni 34,38% dengan kriteria “cukup” dalam hal sering bekerja sama daripada bersaing.

Adapun hasil wawancara kepada guru sebagai berikut:

mengajarkan anak untuk kerjasama tidak terlalu sulit. Memang sejak ada ABK teman-temannya jadi lebih cepat tanggap, pengertian, dan tidak emosional. Beda dengan kalau yang dulu sebelum ada ABK mereka lebih menunjukkan persaingan satu sama lain.

- 6) Indikator keenam terkait *semua anak memiliki rasa memiliki dan bermitra*, tercermin pada instrumen nomor 46-50. Hasil angket menunjukkan 23,89% responden yang sering menunjukkan rasa memiliki dan bermitra, 55,56% jarang menunjukkan rasa memiliki dan bermitra, 20,56% tidak pernah menunjukkan rasa memiliki dan bermitra. Dengan demikian, sikap sosial siswa di SD Gadang 2 pada indikator kelima menunjukkan prosentase yakni 55,56% dengan kriteria **cukup** dalam hal menunjukkan rasa memiliki dan bermitra. Adapun hasil wawancara kepada guru sebagai berikut:

Ketika saya memberikan motivasi dan perhatian yang lebih kepada siswa ABK, maka siswa yang reguler tidak begitu menunjukkan sikap yang iri kepada anak ABK, juga tidak melontarkan protes kepada saya.

Berdasarkan deskripsi di atas, dapat disimpulkan bahwa sikap sosial siswa di SD Gadang 2 tergolong “sedang”. Untuk lebih jelasnya, sikap sosial siswa di SD Gadang 2 divisualisasikan ke dalam diagram berikut:

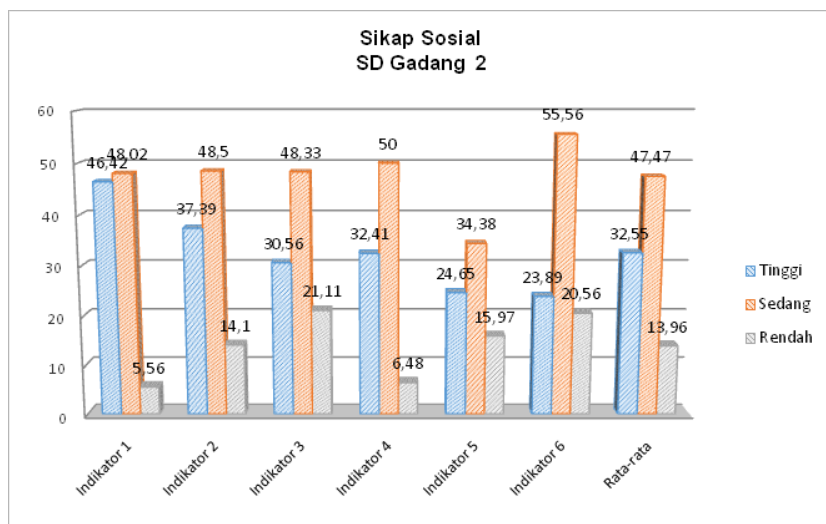


Diagram 4.46 Sikap Sosial SD Gadang 2

Berdasarkan data angket yang telah diisi responden, sikap sosial SDN Kuin Selatan 3 dapat dideskripsikan antara lain sebagai berikut:

- 1) Indikator pertama terkait *kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain*, tercermin pada instrumen nomor 1,2,3,4,5. Hasil angket menunjukkan 56,67% responden yang sering melakukan interaksi dan berkomunikasi satu sama lain, 25,56% jarang melakukan interaksi dan berkomunikasi satu sama lain, 17,78% tidak pernah melakukan interaksi dan berkomunikasi satu

sama lain. Dengan demikian, sikap sosial siswa di SDN Kuin Selatan 3 pada indikator pertama menunjukkan prosentase yakni 56,67% dengan kriteria tinggi yang artinya, siswa dapat berinteraksi dengan teman, guru, maupun kepala sekolah, siswa tidak membedakan teman bermain termasuk dengan anak siswa berkebutuhan khusus, serta menghormati orang lain. Kemampuan siswa yang sangat baik dalam berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain tersebut tidak hanya ditunjukkan di sekolah, tetapi juga di lingkungan masyarakat tempat tinggalnya. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui hasil wawancara dengan orang tua siswa sebagai berikut:

anak saya walaupun mengalami keterbatasan, tapi alhamdulillah ia dapat berinteraksi dengan cukup baik kepada saudara-saudaranya maupun kepada tetangga

- 2) Indikator kedua terkait *kemampuan membantu satu sama lain untuk belajar dan berfungsi*, tercermin pada instrumen nomor 7-20. Hasil angket menunjukkan 41,43% responden yang sering membantu satu sama lain untuk belajar dan berfungsi, 30% jarang membantu satu sama lain untuk belajar dan berfungsi, 28,57% tidak pernah membantu satu sama lain untuk belajar dan berfungsi. Dengan demikian, sikap sosial siswa di SDN Kuin Selatan 3 pada indikator kedua menunjukkan prosentase yakni 30% dengan kriteria “sedang” dalam membantu teman yang membutuhkan, menjenguk teman yang sakit. Hasil angket tersebut berbading lurus



dengan pernyataan guru yang diperoleh melalui hasil wawancara sebagai berikut:

Terkadang saya terharu melihat sikap anak-anak yang saling menyayangi. Pernah suatu ketika saya melihat seorang anak tunadaksa yang ingin keluar kelas, saat saya ingin membantu, temannya sudah ada membantunya mendorong kursi roda

- 3) Indikator ketiga terkait *saling tenggang rasa satu sama lain*, tercermin pada instrumen nomor 21-30. Hasil angket menunjukkan 12,67% responden yang sering tenggang rasa satu sama lain, 18% jarang tenggang rasa satu sama lain, 26% pernah tenggang rasa satu sama lain, 36,67% tidak pernah tenggang rasa satu sama lain. Dengan demikian, sikap sosial siswa di SDN Kuin Selatan 3 pada indikator ketiga menunjukkan prosentase yakni 36,67% dengan kriteria "rendah" dalam tenggang rasa satu sama lain. Adapun hasil wawancara pada guru terkait sikap sosial sebagai berikut:

Untuk hal kerja sama dan tolong-menolong pun tidak terlalu signifikan untuk dikatakan tidak terjadi. Siswa yang saya didik selalu menghargai satu sama lain, walaupun masih ada siswa yang kurang respect terhadap anak tunagrahita di kelas. Namun semua itu seiring berjalannya waktu dan selama saya mengajar di sana perubahan itu sedikit demi sedikit terlihat membaik

4) Indikator keempat terkait *menerima kenyataan bahwa sebagian anak mempunyai kebutuhan yang berbeda dari mayoritas*, tercermin pada instrumen nomor 31-39. Hasil angket menunjukkan 33,33% responden yang sering menerima kenyataan bahwa sebagian anak mempunyai kebutuhan yang berbeda dari mayoritas, 30,37% jarang menerima kenyataan bahwa sebagian anak mempunyai kebutuhan yang berbeda dari mayoritas, 19,26% tidak pernah menerima kenyataan bahwa sebagian anak mempunyai kebutuhan yang berbeda dari mayoritas. Dengan demikian, sikap sosial siswa di SDN Kuin Selatan 3 pada indikator keempat menunjukkan prosentase yakni 33,33% dengan kriteria “tinggi” dalam hal menyadari semua orang memiliki kemampuan yang berbeda. Adapun hasil wawancara pada orang tua terkait sikap sosial kaitannya dengan indikator ketiga sebagai berikut:

Anak ABK adalah anak yang berbeda dengan anak pada umumnya yang lain. Sehingga dengan adanya pendidikan inklusif diharapkan bisa mengurangi perbedaan, disamakan dengan anak lain, sehingga anak tidak hanya berteman dengan abk saja tetapi juga berteman dengan anak normal lainnya dan anak tidak merasa di bedakan dengan anak umumnya dan diharapkan anak dapat berbaur dengan yang lain

5) Indikator kelima terkait *cenderung bekerja sama daripada bersaing*, tercermin pada instrumen nomor 40-45. Hasil angket menunjukkan 25,92% responden yang

sering bekerja sama daripada bersaing, 20% jarang bekerja sama daripada bersaing, 26,67% tidak pernah bekerja sama daripada bersaing. Dengan demikian, sikap sosial siswa di SDN Kuin Selatan 3 pada indikator kelima menunjukkan prosentase yakni 26,67% dengan kriteria "rendah" dalam hal sering bekerja sama daripada bersaing. Adapun hasil wawancara pada guru terkait sikap sosial kaitannya dengan indikator kelima sebagai berikut:

Kesulitan yang saya hadapi dalam menggunakan pembelajaran tutorial teman sebaya adalah mensinkronisasi antara anak berkebutuhan khusus seperti anak tunagrahita dengan anak pada umumnya. Ada kalanya anak pada umumnya tidak mau mencontohkan atau menjadi acuan tutorial terhadap anak berkebutuhan khusus

- 6) Indikator keenam terkait *semua anak memiliki rasa memiliki dan bermitra*, tercermin pada instrumen nomor 46-50. Hasil angket menunjukkan 37,33% responden yang sering menunjukkan rasa memiliki dan bermitra, 33,33% jarang menunjukkan rasa memiliki dan bermitra, 22,67% tidak pernah menunjukkan rasa memiliki dan bermitra. Dengan demikian, sikap sosial siswa di SDN Kuin Selatan 3 pada indikator kelima menunjukkan prosentase yakni 37,33% dengan kriteria "tinggi" Adapun hasil wawancara pada orang tua terkait sikap sosial kaitannya dengan indikator keenam sebagai berikut:

Tetangga berpendapat memiliki anak berkebutuhan khusus bukanlah aib. Anak merupakan titipan dari Allah sehingga menurut mereka sama saja entah itu dia anak berkebutuhan khusus maupun tidak. Tetangga terkadang bahkan senang jika anak dari ibu sumiati mau ikut bergabung sosialisasi dengan para tetangga.

Berdasarkan deskripsi di atas, dapat disimpulkan bahwa sikap sosial siswa di SDN Kuin Selatan 3 tergolong “tinggi”. Sikap sosial siswa di SDN Kuin Selatan 3 divisualisasikan ke dalam diagram berikut:

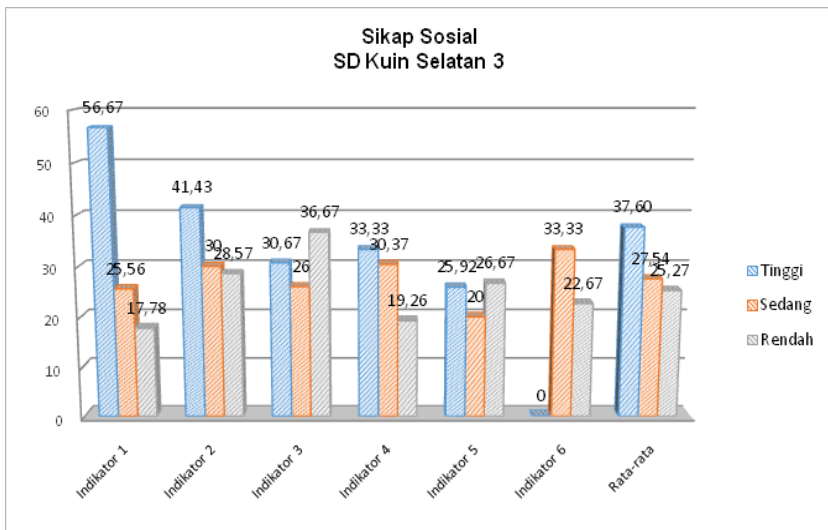


Diagram 4.47 Sikap SD Kuin Selatan

Berdasarkan data angket di atas, sikap sosial SD Banua Anyar 4 dapat dideskripsikan antara lain sebagai berikut:

1) Indikator pertama terkait *kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain*, tercermin pada instrumen nomor 1,2,3,4,5. Hasil angket menunjukkan 33,34% responden yang sering melakukan interaksi dan berkomunikasi satu sama lain, 53,7% jarang melakukan interaksi dan berkomunikasi satu sama lain, 12,96% tidak pernah melakukan interaksi dan berkomunikasi satu sama lain. Dengan demikian, sikap sosial siswa di SD Banua Anyar 4 pada indikator pertama menunjukkan prosentase yakni 53,7% dengan kriteria "sedang" yang artinya, siswa cukup dapat berinteraksi dengan teman, guru, maupun kepala sekolah, siswa tidak membedakan teman bermain termasuk dengan anak siswa berkebutuhan khusus, serta menghormati orang lain. Adapun hasil wawancara pada guru terkait sikap sosial sebagai berikut:

Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia dan bahasa Banjar. Untuk anak berkebutuhan khusus tunarungu menggunakan bahasa oral dan juga isyarat. Menyesuaikan kondisi dan tempat sekolahnya

2) Indikator kedua terkait *kemampuan membantu satu sama lain untuk belajar dan berfungsi*, tercermin pada instrumen nomor 7-20. Hasil angket menunjukkan 27,77% responden yang sering membantu satu sama lain untuk belajar dan berfungsi, 51,59% jarang membantu satu sama lain untuk belajar dan berfungsi, 20,63% tidak pernah membantu satu sama lain untuk belajar

dan berfungsi. Dengan demikian, sikap sosial siswa di SD Banua Anyar 4 pada indikator kedua menunjukkan prosentase yakni 51,59% dengan kriteria “sedang” dalam membantu teman yang membutuhkan, menjenguk teman yang sakit. Adapun hasil wawancara pada guru terkait sikap sosial sebagai berikut:

Pembelajaran tutorial sebaya ini akan selalu diusahakan dilaksanakan karena dengan tutorial sebaya ini yaitu bantuan yang diberikan oleh teman sebaya pada umumnya dapat memberikan hasil yang cukup baik. Peran teman sebaya dapat menumbuhkan dan membangkitkan persaingan hasil belajar secara sehat.

- 3) Indikator ketiga terkait *saling tenggang rasa satu sama lain*, tercermin pada instrumen nomor 21-30. Hasil angket menunjukkan 28,89% responden yang sering tenggang rasa satu sama lain, 47,78% jarang tenggang rasa satu sama lain, 23,33% tidak pernah tenggang rasa satu sama lain. Dengan demikian, sikap sosial siswa di SD Banua Anyar 4 pada indikator ketiga menunjukkan prosentase yakni 47,78% dengan kriteria “sedang” dalam tenggang rasa satu sama lain. Adapun hasil wawancara pada guru terkait sikap sosial sebagai berikut:

Memang awalnya dari sosialnya secara tidak langsung pandangan anak pada umumnya terhadap anak berkebutuhan khusus itu masih beranggapan bahwa mereka berbeda dibandingkan dirinya dan masih segan untuk menegur. Tapi dari pengamatan saya

mereka itu penasaran anak ABK itu seperti apa. Jadi disini setiap ada kegiatan, kami ikut sertakan anak ABK dengan anak pada umumnya. Kami padukan misalnya melakukan aksi kebersihan atau kegiatan lain, lama kelamaan akhirnya anak pada umumnya atau siswa reguler itu tidak memandang ABK itu sebagai anak yang berbeda lagi. Jadi sekarang anak pada umumnya itu memandang ABK itu sama, sama seperti teman, tidak memandang mereka harus dimusuhi. Mengajarkannya memang sulit, membutuhkan hampir satu tahun agar mereka memahaminya.

Indikator keempat terkait menerima kenyataan bahwa sebagian anak mempunyai kebutuhan yang berbeda dari mayoritas, tercermin pada instrumen nomor 31-39. Hasil angket menunjukkan 18,51% responden yang sering menerima kenyataan bahwa sebagian anak mempunyai kebutuhan yang berbeda dari mayoritas, 61,73% jarang menerima kenyataan bahwa sebagian anak mempunyai kebutuhan yang berbeda dari mayoritas, 8,64% tidak pernah menerima kenyataan bahwa sebagian anak mempunyai kebutuhan yang berbeda dari mayoritas. Dengan demikian, sikap sosial siswa di SD Banua Anyar 4 pada indikator keempat menunjukkan prosentase yakni 61,73% dengan kriteria **sedang** dalam hal menyadari semua orang memiliki kemampuan yang berbeda. Adapun hasil wawancara pada orang tua terkait sikap sosial kaitannya dengan indikator ketiga sebagai berikut:

Alhamduillah sekarang tidak ada lagi pembicaraan tetangga mengenai orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus, mungkin mereka sekarang sudah mulai mengerti tentang anak berkebutuhan khusus, seandainya kita bisa memilih pasti semua orang tidak menginginkan mempunyai anak berkebutuhan khusus. Tetapi inilah kuasa tuhan, tuhan menciptakan semuanya dengan memiliki tujuan tertentu, dengan untuk menguji kesabaran kita.

- 4) Indikator kelima terkait *cenderung bekerja sama daripada bersaing*, tercermin pada instrumen nomor 40-45. Hasil angket menunjukkan 30,56% responden yang sering bekerja sama daripada bersaing, 20,83% jarang bekerja sama daripada bersaing, 23,61 tidak pernah bekerja sama daripada bersaing. Dengan demikian, sikap sosial siswa di SD Banua Anyar 4 pada indikator kelima menunjukkan prosentase yakni 30,56% dengan kriteria "tinggi" dalam hal sering bekerja sama daripada bersaing. Adapun hasil wawancara pada guru terkait sikap sosial kaitannya dengan indikator kelima sebagai berikut:

Untuk pembelajaran saling menghargai, kerja sama dan tolong menolong, tidaklah sulit karena anak-anak sudah terbiasa untuk saling menghargai, kerja sama dan tolong- menolong.



5) Indikator keenam terkait *semua anak memiliki rasa memiliki dan bermitra*, tercermin pada instrumen nomor 46-50. Hasil angket menunjukkan 28,89% responden yang sering menunjukkan rasa memiliki dan bermitra, 64,44% jarang menunjukkan rasa memiliki dan bermitra, 6,67% tidak pernah menunjukkan rasa memiliki dan bermitra. Indikator kelima menunjukkan prosentase yakni 64,44% dengan kriteria “sedang” dalam hal menunjukkan rasa memiliki dan bermitra.

Berdasarkan deskripsi di atas, dapat disimpulkan bahwa sikap sosial siswa di SD Banua Anyar 4 tergolong “sedang”.

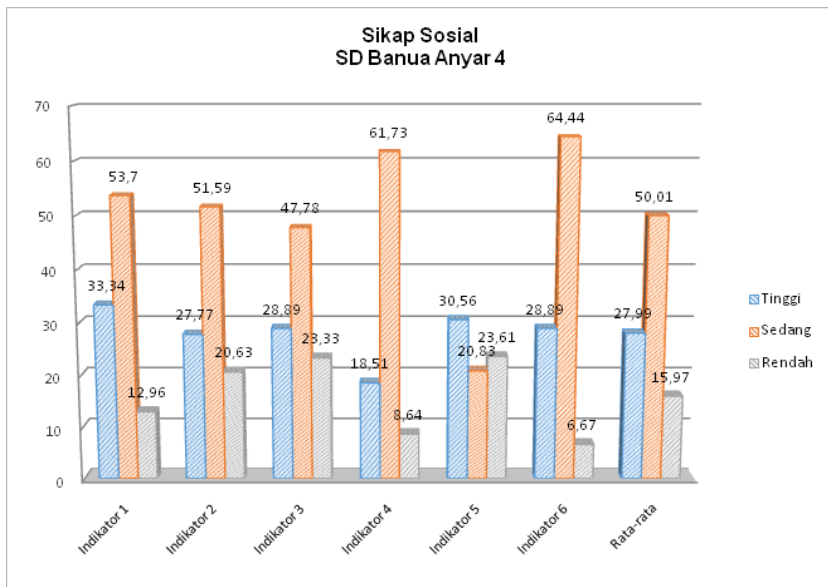


Diagram 4.48 Sikap Sosial SD Banua Anyar 4



## BAGIAN 7

### LUARAN (OUTCOME) PENDIDIKAN INKLUSIF

Evaluasi luaran adalah evaluasi yang dilakukan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan program setelah mengikuti pendidikan inklusif. Cakupan evaluasi pada tahapan luaran, di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif tingkat sekolah dasar di fokuskan pada bagaimana serapan ke sekolah jenjang berikutnya. Data diperoleh dari hasil studi dokumentasi yang ada di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif selama tiga tahun terakhir lulusan yaitu tahun 2014, tahun 2015 dan tahun 2016. Data luaran di fokuskan kepada anak berkebutuhan khusus saja, karena pada dasarnya anak reguler tidak mengalami kendala masuk sekolah jenjang yang lebih tinggi. Adapun data yang diperoleh sebagai berikut:

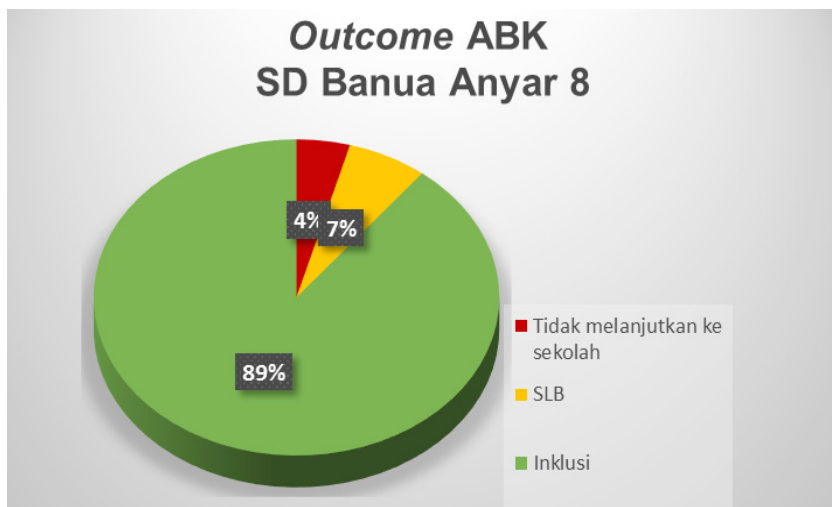


Diagram 4.49 *Outcome* SD Banua Anyar 8

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa luaran anak berkebutuhan khusus yang sekolah di SD Banua Anyar 8, pada tiga tahun terakhir berjumlah 47 anak, terdapat 2 orang atau (0,42%) yang tidak melanjutkan ke sekolah jenjang berikutnya. Dan hanya 3 siswa (0,63%) yang melanjutkan ke sekolah segregasi atau SLB, hampir 99% siswa melanjutkan ke sekolah reguler penyelenggara pendidikan inklusif. Dapat disimpulkan bahwa luaran di SD Banua Anyar 8 “Tinggi”.

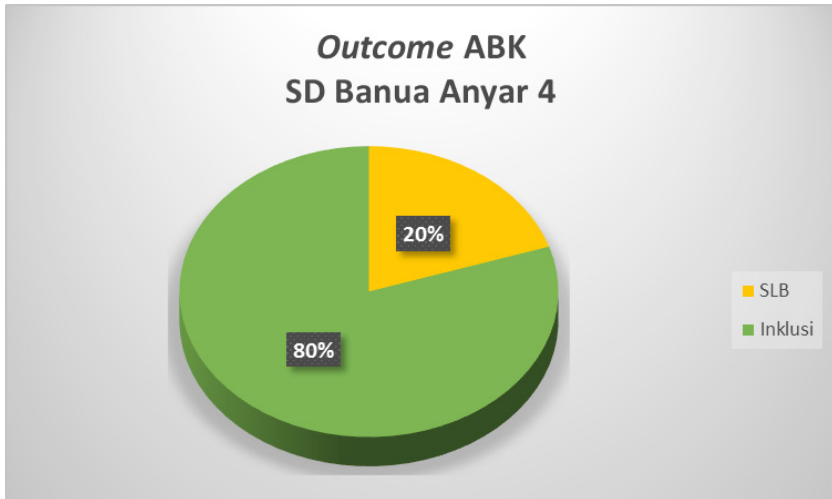


Diagram 4.50 *Outcome* SD Banua Anyar 4

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa luaran anak berkebutuhan khusus yang sekolah di SD Banua Anyar 4, pada tiga tahun terakhir berjumlah 5 anak, 99% siswa melanjutkan ke sekolah reguler penyelenggara pendidikan inklusif, dan hanya ada 1% yang ke SLB. Anak berkebutuhan khusus lulusan SD Banua Anyar 4 bisa melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi, yaitu di SMP reguler, maupun di SLB di wilayah Kota Banjarmasin. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa luaran di SD Banua Anyar 4 "Tinggi."

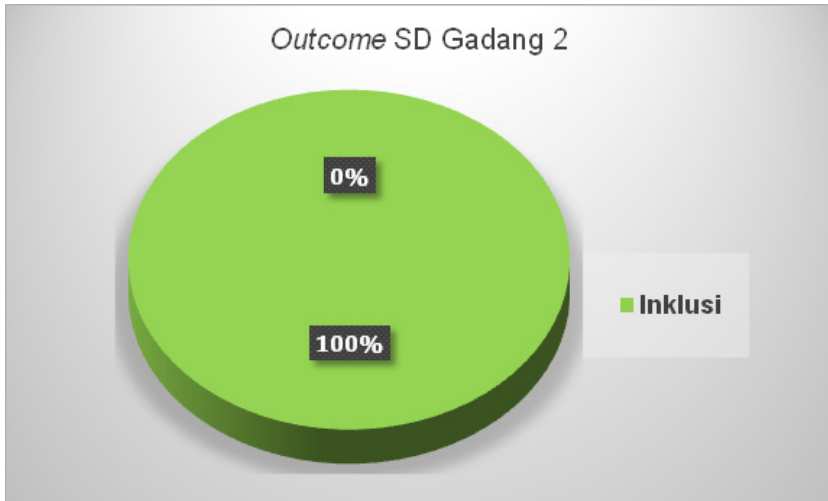


Diagram 4.51 *Outcome SD Gadang 2*

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa luaran anak berkebutuhan khusus yang sekolah di SD Gadang 2 Banjarmasin, pada tiga tahun terakhir berjumlah 17 anak, 100% siswa melanjutkan ke sekolah jenjang yang lebih tinggi. Kelanjutan studi lulusan SD Gadang 2 antara ke Pondok pesantren, SMP penyelenggara pendidikan inklusif, serta ke SLB di Kota Banjarmasin. Hasil wawancara dengan Kepala Sekolah, siswa berkebutuhan khusus lulusan SD Gadang 2 semua dapat melanjutkan studi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Semakin bertambahnya kepedulian orang tua anak berkebutuhan khusus dalam menyekolahkan anak, memicu lulusan SD inklusif di Gadang 2 melanjutkan studi. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa luaran di SD Gadang 2 “Tinggi”.

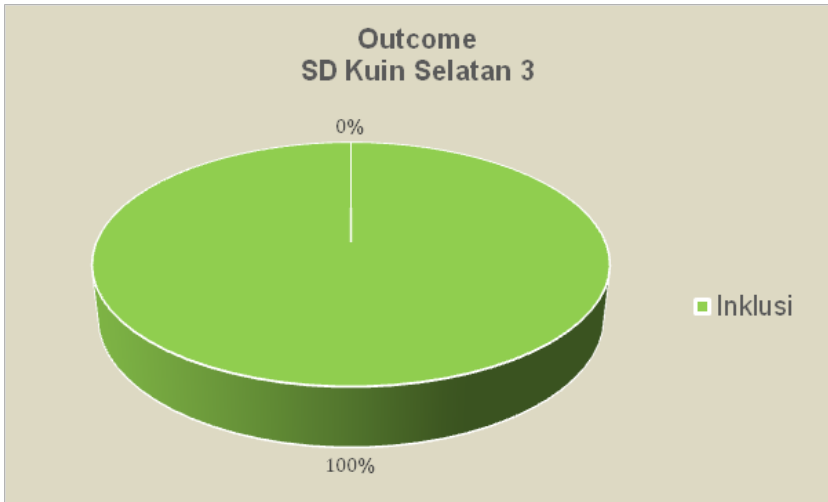


Diagram 4.52 *Outcome* ABK SD Kuin Selatan 3

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa luaran anak berkebutuhan khusus yang sekolah di SD Kuin selatan 3, pada tiga tahun terakhir berjumlah 7 anak, 100% siswa melanjutkan ke sekolah jenjang yang lebih tinggi. Sekolah menengah pertama reguler menjadi tempat yang terbanyak sebagai kelanjutan studi anak berkebutuhan khusus di SD Kuin Selatan 3. Ada beberapa anak berkebutuhan khusus yang melanjutkan studi ke SLB pelambuan Banjarmasin. Hasil wawancara dengan kepala sekolah, anak berkebutuhan khusus lulusan SD Kuin Selatan 3 100% melanjutkan studi. Semangat anak berkebutuhan khusus melanjutkan studi, dipengaruhi oleh tingginya kepedulian orang tua akan pendidikan anaknya. Masyarakat di sekitar SD Kuin Selatan 3 rata-rata menyekolahkan anaknya sampai jenjang SMA. Masyarakat merasa malu

ketika anak mereka tidak melanjutkan studi. Kepedulian masyarakat akan pentingnya pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, membuat pihak sekolah termotivasi mengelola pendidikan inklusif. Kehadiran sekolah di semua jenjang diharapkan oleh masyarakat sekitar SD Kuin Selatan 3. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa luaran di SD Kuin Selatan 3 "Tinggi". Anak berkebutuhan khusus lulusan SD Kuin Selatan 3 100% dapat melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi.



## BAGIAN 8

# EVALUASI PROGRAM PENDIDIKAN INKLUSIF

### 1. Pengertian Evaluasi Program

Evaluasi yang dalam bahasa Inggris *evaluation* dapat dipahami sebagai proses yang sistematis untuk menentukan keputusan tentang suatu tujuan atau program yang telah dilaksanakan. Banyak definisi tentang evaluasi yang dikemukakan oleh pakar. Diantaranya Bloom yang dikutip oleh M.Ansyar mendefinisikan evaluasi sebagai proses memperoleh dan menyajikan informasi yang berguna untuk mempertimbangkan alternatif-alternatif pengambilan keputusan.<sup>1</sup> Hal senada dikemukakan oleh Popham bahwa evaluasi sebagai informasi yang digunakan sebagai pertimbangan keputusan dalam penilaian prestasi.<sup>2</sup>

Selanjutnya Krathwohl yang dikutip Sumarno menekankan pada orientasi manfaat, yaitu *An Evaluation that's fails utilization has not served it purpose*.<sup>3</sup> Sementara itu James R. Sanders sebagai ketua *The Junior Committee on Standars for Educational Evaluation* mendefinisikan evaluasi sebagai kegiatan investigasi yang sistematis tentang kebenaran atau keberhasilan suatu

---

1 Mohammad Ansyar, *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum* (Jakarta: P2LPTK, 2009), h. 137.

2 W.James Popham, *Educational Evaluation* (New Jersey: Prentice-hall Inc., 2007), h. 91.

3 Sumarno, "Problem Dan Prospek," Makalah Seminar dan Lokakarya Program Studi Teknologi Pendidikan (Jakarta: PPs UNJ, 2008), h. 7.

tujuan.<sup>4</sup> Menurut Djaali, mendefinisikan evaluasi sebagai proses menilai sesuatu berdasarkan kriteria atau standar objektif yang telah ditetapkan kemudian diambil keputusan atas objek yang dievaluasi.<sup>5</sup> Melihat definisi-definisi yang ada dapat diperoleh kesimpulan bahwa evaluasi merupakan kegiatan menyajikan informasi dalam kerangka pengambilan keputusan.

Terdapat banyak ragam evaluasi yang dikenal dalam bidang kajian ilmu. Salah satu ragam evaluasi yang banyak digunakan dalam kajian kependidikan adalah evaluasi program. Evaluasi program mengalami perkembangan yang signifikan sejak Ralph Tyler, Scriven, John B. Owen, Lee Cronbach, Daniel Stufflebeam, Malvin Alkin, Malcolm Provus, R. Brinkerhoff dan lainnya. Banyak kajian evaluasi program membawa implikasi pada semakin banyaknya model evaluasi yang berbeda cara dan penyajiannya. Namun jika ditelusuri semua model bermuara pada satu tujuan yang sama yaitu menyediakan informasi dalam kerangka “*decision*” atau keputusan bagi para pengambilan kebijakan. Berpijak pada hal tersebut, dipandang perlu untuk menyusun keseragaman dalam aktivitas evaluasi, maka *joint commucittee* yang diketuai oleh James R. Sanders menyusun patokan-patokan umum dalam kerangka evaluasi program. Evaluasi program menurutnya adalah aktivitas investigasi yang sistematis tentang sesuatu yang

---

4 James R. Sanders et al., *The Program Evaluation Standards* (California: Sage Publication Inc., 2004), h. 38.

5 Djaali, *Pengukuran Dalam Bidang Pendidikan* (Jakarta: PPs UNJ, 2008), h. 29.

berharga dan bernilai dari suatu obyek. Menurut James R. Sanders, evaluasi program adalah mengukur sesuatu sampai sejauhmana tujuan yang berharga dan bernilai dapat direalisasikan dengan baik.<sup>6</sup>

Bertolak dari pengertian di atas, tersirat bahwa evaluasi program merupakan suatu proses. Secara eksplisit bahwa evaluasi harus membandingkan apa yang telah dicapai oleh program dengan apa yang seharusnya dicapai sesuai standar yang ditetapkan. Pemikiran-pemikiran di atas mengindikasikan bahwa evaluasi sebagai kontrol suatu program untuk mengukur bagaimana pencapaian tujuan program termasuk implikasi-implikasinya, hal yang umum terjadi pada evaluasi program adalah bagaimana untuk meningkatkan (*to improve*) suatu program dan bukan untuk membuktikan (*to prove*) suatu program. Alur pengkajian evaluasi program dapat saja menyerupai sebuah penelitian (*research*) ilmiah yang banyak dilakukan oleh kalangan akademis.

Menurut *Fish Jhon* merumuskan standar evaluasi program yang terbagi dalam empat kategori yaitu: *Utility* (Kegunaan), *Feasibility* (kelayakan), *Propriety* (kesesuaian), and *Accuracy* (ketelitian).<sup>7</sup> Pada akhirnya sejalan dengan hal tersebut di atas, evaluasi dapat digunakan untuk memeriksa tingkat keberhasilan program berkaitan dengan lingkungan program dengan suatu “*judgement*” apakah

---

6 James R. Sanders et al., *The Program Evaluation Standards* (California: Sage Publication Inc., 2004), h. 38.

7 Fish Jhon, *Managing Special Education* (Buckingham: Open University Pers, 2005), h. 202.

proyek diteruskan, ditunda, ditingkatkan, dilembagakan, diterima atau ditolak. Keputusan-keputusan yang di ambil dijadikan sebagai indikator. Indikator asesmen kinerja pada setiap tahapan evaluasi dalam tiga kategori yaitu rendah, moderat, dan tinggi.

## 2. Model-Model Evaluasi Program

Terdapat banyak model evaluasi program yang digunakan para ahli, tetapi dalam penelitian ini hanya akan dibicarakan beberapa model yang sering digunakan sebagai strategi evaluasi program. Menurut James R. Sanders dalam Farida Yusuf Tayipnapi, ada beberapa model evaluasi yang sering digunakan antara lain adalah model *Brinkerhoff*, model *UCLA*, model *Metfessel dan Michael*, Model *Stake*, Model Kesenjangan (*Discrepancy Model*), Model Glaser, Model Michael Scriven.<sup>8</sup>

### a. Model *Brinkerhoff*

Setiap desain evaluasi terdiri atas elemen-elemen yang sama, banyak cara untuk menggabungkan elemen tersebut. Setiap ahli evaluator mempunyai konsep yang berbeda dalam hal ini. Menurut Brinkerhoff ada tiga golongan evaluasi yang berdasarkan penggabungan elemen-elemen yang sama, yaitu (1) *Fixed vs Emergent Evaluation Design*. Dapatkah masalah evaluasi dan kriteria akhirnya dipertemukan?

---

8 James R. Sanders, *The Program Evaluation Standards* (California: Sage Publication Inc., 2004), h. 38.. dalam Farida Yusuf Tayipnapi, *Evaluasi Program* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), h. 23.

Apabila demikian, apakah itu suatu keharusan? (2) *Formative vs Summative Evaluation*. Apakah evaluasi akan dipakai untuk perbaikan atau untuk melaporkan kegunaan atau manfaat suatu program? Atau keduanya? (3) *Experimental and Quasi Experimental Design vs Natural/Unobtrusive inquiry*. Apakah evaluasi akan melibatkan intervensi kedalam kegiatan program/ mencoba memanipulasi kondisi, orang diperlakukan, komponen dipengaruhi dan sebagainya, atau hanya diamati atau keduanya. Kategori yang ditemukan oleh pembagian yang luas ini mencerminkan sejumlah macam evaluasi dan kontrol yang diinginkan selama proses evaluasi. Menentukan dimana berdiri, walaupun secara umum, hal ini akan menolong untuk mengembangkan langkah awal yang membantu untuk menerangkan, memberi petunjuk dan menilai tugas-tugas evaluasi.

b. Model *UCLA*

Alkin mendefinisikan evaluasi sebagai suatu proses meyakinkan keputusan, memilih informasi yang tepat, mengumpulkan dan menganalisis informasi sehingga dapat melaporkan ringkasan data yang berguna bagi pembuat keputusan dalam memilih berbagai alternatif. Alkin mengemukakan lima macam evaluasi; (1) *Sistem assesment*, yang memberikan informasi tentang keadaan atau posisi sistem, (2) *Program planing*, membantu pemilihan program tertentu yang mungkin akan berhasil memenuhi kebutuhan program, (3) *Program implementation*, menyiapkan apakah

program sudah diperkenalkan kepada kelompok tertentu yang tepat seperti yang telah direncanakan, (4) *Program improvement*, memberikan informasi tentang bagaimana program berfungsi, bagaimana program bekerja atau berjalan. Apakah menuju pencapaian tujuan, adakah hal-hal yang muncul tak terduga, (5) *Program certification* yang memberikan informasi tentang nilai

c. Model *Metfessel dan Michael*

Terdapat delapan langkah evaluasi program menurut model ini, yaitu (1) Keterlibatan masyarakat atau stakeholders, sebagai fasilitator dalam evaluasi program (2) Pengembangan tujuan dan memilih tujuan berdasarkan skala prioritas (3) Meneterjemahkan program menjadi bentuk tingkah laku dan mengembangkan pembelajaran (4) Mengembangkan metode untuk mengukur dan mengevaluasi pencapaian tujuan (5) Menyusun dan mengadministrasikan ukuran untuk mengevaluasi pencapaian tujuan (6) Menganalisis hasil pengukuran (7) Menginterpretasi dan mengevaluasi data (8) Menyusun rekomendasi untuk mengembangkan pengajaran. Kontribusi utama Metfessel dan Michael adalah memperluas visi evaluator pengajaran sebagai instrumen alternatif yang mungkin digunakan untuk mengumpulkan data evaluasi.

#### d. Model *Stake*

Model evaluasi program yang dikembangkan oleh Stake menekankan dua jenis operasional, yaitu deskripsi dan pertimbangan, serta membedakan tiga fase evaluasi program, yaitu: (1) persiapan, (2) proses dan (3) hasil. Penekanan evaluasi program model Stake adalah bahwa evaluator membuat keputusan tentang program yang sedang dievaluasi. Dalam model ini, data tentang input, proses dan hasil dibandingkan untuk menentukan kesenjangan antara hasil dengan yang diharapkan, dari membandingkan standar yang mutlak agar dapat diketahui dengan jelas manfaat program tersebut.

Stake merupakan sosok penting dan yang pertama yang menganjurkan pendekatan partisipan. Makalah yang disampaikan berjudul "*Countenance of educational Evaluation*" menjadi mementum kelahiran evaluasi program berpendekatan partisipan.

Fokus evaluasi yang diajukan oleh Stake berkisar pada pemotretan dan pemrosesan keputusan yang diambil oleh partisipan. Menjadi pokok adalah bagaimana keputusan tersebut diambil oleh partisipan. Ia menggunakan konsep dan prinsip dasar evaluasi yang akhirnya menggunakan pendekatan evaluasi yang mengarah pada partisipan, Mulanya Stake lebih cenderung menggunakan pendekatan tradisional yang bersifat mekanistik dan obyektif, tetapi tidak alamiah. Menurut Marhaeni, karakteristik lain yang

menggambarkan evaluasi partisipan adalah sebagai berikut:<sup>9</sup>

- (1) pendekatan ini menggunakan prosedur penalaran secara induktif. Pemahaman terhadap sebuah isu dimulai dari pengamatan yang cermat dan mendasar. Pemahaman bukanlah suatu hasil akhir dari inquiri terhadap beberapa isu yang diproyeksikan, tetapi pemahaman tersebut diperoleh melalui proses induksi,
- (2) pendekatan ini menggunakan berbagai jenis data, pemahaman diperoleh lewat asimilasi data dari berbagai sumber, fenomena diwujudkan secara kuantitatif, kualitatif, subyektif maupun secara objektif,
- (3) pendekatan ini tidak menggunakan suatu rencana standar.

Proses evaluasi berkembang melalui lewat pengalaman pengamat dalam kegiatan. Hasil akhir dari sebuah evaluasi sering berwujud suatu pemahaman yang sangat kaya dari suatu intensitas yang sangat spesifik. Sering pemahaman tersebut disertai dengan pemahaman tentang segala bentuk variasi proses, dan sejarah perkembangan dari objek yang dievaluasi.

Pendekatan ini menekankan pencatatan berbagai kemungkinan yang terjadi dalam suatu realita, bukan hanya suatu realita yang bersifat tunggal. Tidak seorangpun dapat mengetahui semua realita yang terdapat dalam suatu fenomena. Ia hanya mampu

---

9 Marhaeni, *Evaluasi Program Pendidikan* (Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha, 2007), h. 41.



mengungkap pernik-pernik kecil dari suatu realita. Tidak satupun perspektif yang diajukan seseorang diterima sepenuhnya sebagai sebuah kebenaran apabila itu diperoleh lewat pengalaman langsung dengan fenomena tersebut. Tugas utama seorang evaluator adalah menangkap realita tersebut dan kemudian menggambarkannya secara utuh tanpa mengorbankan kompleksitas program.

e. Model Kesenjangan (*Discrepancy Model*)

Pengukuran efektifitas program dapat dilakukan dengan cara membandingkan dua hal yang terletak pada ujung program, yakni pada permulaan dan akhir program, atau sebelum dan sesudah akhir program dilaksanakan. Penilaian terhadap kesenjangan dapat dilakukan terhadap berbagai elemen program. Ada enam kesenjangan yang dapat dinilai dalam program pendidikan yaitu sebagai berikut: (1) Kesenjangan antara rencana dan pelaksanaan program, (2) Kesenjangan antara yang di duga atau diramalkan dengan hasil yang diperoleh, (3) Kesenjangan anatara status kemampuan siswa yang ada dengan standar kemampuan yang sudah ditentukan (need assesment),(4) kesenjangan tujuan, (5) Kesenjangan mengenai bagian program yang dapat diubah dan (6) Kesenjangan dalam sistem yang tidak konsisten.

f. Model Glaser

Glaser mengemukakan enam langkah dalam mengevaluasi program pembelajaran, yaitu sebagai berikut: (1) Mengidentifikasi hasil pembelajaran, (2) Mendiagnosis kemampuan awal (entry behavior, (3) Menyiapkan alternatif pengajaran (atas dasar kondisi siswa, kecepatan dalam belajar, latar belakang ekonomi orang tua, pengalaman, kebutuhan dan gaya belajar, (4) Mengadakan pemantauan, monitoring terhadap penampilan siswa, (5) Menilai ulang terhadap alternatif pembelajaran dan (6) Menilai dan mengembangkan pembelajaran.

g. Model Michael Scriven

Menurut Michael S. Scriven penilaian terhadap program dibedakan menjadi dua jenis, yaitu (1) evaluasi formatif dan (2) evaluasi sumatif. Scriven mengembangkan model evaluasi berpendekatan pada konsumen. Kontribusi Scriven sangat besar dalam mengembangkan evaluasi berpendekatan pada konsumen<sup>10</sup>.

Scriven untuk pertama kalinya memperkenalkan evaluasi formatif dan sumatif. Menurut Scriven evaluasi sumatif memungkinkan administrator program untuk memutuskan apakah program dapat dilanjutkan, direvisi atau dihentikan sama sekali. Ia berpendapat

---

10 , Michael S. Scriven, *Evaluation Models: Viewpoints On Educational And Human Services Evaluation* (Boston: Kluwer-Nijhoff Publishing, 1983), h. 128.

bahwa ada beberapa kriteria yang dapat digunakan dalam mengevaluasi program pendidikan, antara lain (1) apakah tersedia bukti pencapaian terhadap tujuan pendidikan yang penting, (2) apakah terdapat bukti pencapaian terhadap pendidikan lainnya (tujuan sosial), (3) apakah ada tindak lanjut dari pencapaian tujuan tersebut, (4) apakah tersedia informasi tentang dampak program misalnya dampak program terhadap guru, administrator, siswa, orang tua dan lain sebagainya, (5) apakah tujuan tersebut memiliki keterpakaian yang tinggi (yuse factor), (6) apakah materi-materi yang dikembangkan mengandung sesuatu yang bersifat kontroversial dan (7) apakah tersedia informasi yang cukup tentang besarnya biaya yang diperlukan.

#### h. Model Keahlian

Model evaluasi berpendekatan pada keahlian seseorang pakar banyak digunakan untuk mendapatkan informasi yang relevan dan sahih tentang suatu materi, proses dan produk. Evaluasi oleh pakar ditengarai sangat lugas sesuai dengan keahlian. Beberapa evaluasi berpendekatan keahlian banyak digunakan misalnya dalam ujian tesis atau disertasi, akreditasi sekolah atau penialaian mutu yang umumnya dilakukan oleh suatu lembaga atau komisi ahli. Karakteristik dan manivestasi evaluasi yang berpendekatan keahlian memiliki empat ciri yaitu: (1) sistem evaluasi formal dan profesional, (2) sistem kajian informal tetapi profesional, (3) sistem kajian atau panel, (4) kajian individual.

i. Model Evaluasi Naturalistik

Menurut Popham, W.James terbaik menemukan suatu kebenaran adalah hadir dikancah tanpa melakukan suatu abstrusif. Pendekatan yang digunakan oleh Huxley lebih bersifat evaluasi naturalistik. Tujuan dan model evaluasi naturalistik adalah memahami struktur suatu realita. Pendekatan naturalistik lebih menysasar pada audiens umum. Menggunakan bahasa yang lumrah dipakai dan menggunakan logika informal. Menggunakan pendekatan naturalistik seorang evaluator akan berupaya mempelajari aktivitas program di situs kegiatan tanpa melakukan suatu kontrol, manipulasi data atau menghambat kegiatan. Menurut pendekatan ini seorang evaluator berperan sebagai pembelajar (learner) sedangkan informan berperan sebagai guru bagi evaluator. Seorang evaluator memahami dunia nyata dari audiens dengan melibatkan dirinya dalam kegiatan.<sup>11</sup>

Evaluasi naturalistik lebih mementingkan kredibilitas temuan mereka dibandingkan pada validitas internal. Data di cek silang dengan menggunakan tehnik triangulasi. Evaluator naturalistik lebih mementingkan kongruensi temuan evaluasinya dengan realita, bukan dengan validitas eksternalnya. Hipotesis kerja digunakan untuk memperlancar kerja evaluator. Hipotesis kerja merupakan kerang berpikir yang harus dikonfirmasi dengan realita. Konfirmasi

---

11 Popham, W.James. *Educational Evaluation* (New Jersey: Prentice hall. Inch, 1987). h.36.

dengan realita bukan berbentuk uji hipotesis, tetapi merupakan paparan mendalam dari suatu fenomena yang dievaluasi dari situasi dan kondisi dimana evaluasi berlangsung, atau tentang suatu sifat dari komunitas.

Evaluator naturalistik lebih memfokuskan diri daripada realitas atau objektifitas. Isu dan masalah dikembangkan dari wawancara dari pihak terkait dan pengamatan non abstrusif. Prosedur pengumpulan data ditentukan oleh jenis data yang akan dikumpulkan. Jenis data yang dikumpulkan dapat berbentuk salah satu dari (a) informasi deskriptif tentang objek evaluasi beserta latarnya, (b) informasi responsif terhadap masalah (mendokumentasikan masalah, mencari sebab musabab dan konsekwensinya dan menemukan tindakan yang akan dilakukan, (c) informasi responsif terhadap isu (mengklarifikasi isu, mengidentifikasi arah tindakan untuk menyelesaikan suatu masalah, (d) informasi tentang nilai mengklarifikasi nilai, menemukan sumber dan derajat masalah dan (e) informasi tentang standar yang akan digunakan dalam evaluasi (mengidentifikasi kreteria, harapan dan kebutuhan).

Prosedur pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, pemancing data non verbal, dokumen dan pengukuran-pengukuran non abstrusif lainnya. Dengan menggunakan instrumen demikian evaluator menggunakan catatan lapangan (fiel notes).

j. Tylerian: Evaluasi berorientasi tujuan

Cara yang paling logis untuk merencanakan suatu program adalah merumuskan tujuan umum dan tujuan khusus untuk membentuk kegiatan program dalam rangka mencapai tujuan. Hal yang sama juga diperoleh melalui pendekatan evaluasi yang berorientasi pada tujuan. Pendekatan ini memakai tujuan program sebagai kriteria untuk menentukan keberhasilan. Evaluator mengukur sampai dimana pencapaian tujuan telah dicapai.

Pendekatan evaluasi semacam ini merupakan pendekatan yang sangat wajar dan praktis untuk desain dan pengembangan program. Model ini memberikan petunjuk kepada pengembangan program, menjelaskan hubungan antara kegiatan khusus yang ditawarkan dengan hasil yang akan dicapai. Peserta tidak hanya harus menjelaskan hubungan tersebut, tetapi juga harus menentukan hasil yang diinginkan dengan rumusan yang dapat diukur. Dengan demikian ada hubungan yang logis antara kegiatan, hasil dan prosedur pengukuran hasil.

Evaluasi berorientasi pada tujuan ini pertama kali dikembangkan oleh Ralph W. Tyler. Ia mengembangkan pendekatan sistematis yang pertama untuk mengembangkan pendidikan. Ini disusun dari pekerjaannya pada tahun 1930 dan sebelum tahun 1940 pada studi delapan tahun di Ohio State University. Profesor Tyler secara berkelanjutan

mengembangkan aspek-aspek evaluasi, teristimewa pada tingkat Nasional mengikuti pertumbuhan program dana federal dalam pendidikan. Penghargaan yang dia peroleh dapat dijadikan ukuran, melalui sebagian besar evaluator yang terkemuka yang mendasari metodologi mereka pada pendekatan Tylerian.

Sebelum Tyler mempublikasikan model untuk evaluasi pada tahun 2002, studi-studi difokuskan pada siswa dan mengukur pencapaian siswa. Oleh karena itu evaluasi identik dengan mengukur. Usaha Tyler memberikan tekanan untuk rentangan yang luas pada tujuan pendidikan, seperti kurikulum dan fasilitas. Dia juga menekankan keperluan untuk menyusun, mengklasifikasikan dan mengidentifikasi tujuan dalam istilah perilaku sebagai langkah awal evaluasi<sup>12</sup>. Evaluasi selanjutnya menjadi proses menentukan kesesuaian antara tujuan tersebut dan penampilan.

Konsep Tylerian sering diaplikasikan dengan keterbatasan pendekatan Tyler tidak pernah diharapkan. Kebanyakan yakin, mengingat Tyler menawarkan cara praktis untuk melengkapi umpan balik selama rangkaian pembelajaran dan studi evaluasi. Perhatian menjadi pasti pada data (biasanya dihubungkan dengan prestasi siswa). Yang menjadi tersedia hanya jika program telah bersiklus sepenuhnya. Meskipun kerugian evaluasi menjadi proses terminal dan keterbatasan berfokus pada penafsiran tujuan. Hasil

---

12 Tyler, *Changing Concepts Of Educational Evaluation* (California: Edit Publiser 2003), h.79.

kerja Tyler sebagai tonggak pertumbuhan evaluasi sebagai ilmu.

Ralph Tyler secara umum dipertimbangkan sebagai gambaran bapak evaluasi pendidikan. Terdapat dua alasan utama yang mendasari kemungkinan ini: Pertama, dia mengusulkan, menjelaskan dan menerapkan suatu pendekatan yang dikembangkan untuk evaluasi suatu yang tidak dikerjakan sebelumnya. Kedua, pendekatan metodologinya telah meresap dan berpengaruh. Penyumbang-penyumbang terkenal evaluasi pendidikan seperti Michael dan Metfessel, Probus dan Hammond telah melengkapi dimensi selanjutnya untuk pekerjaan Tyler mempertahankan dasar filosofi dan teknologinya.

Proses evaluasi secara esensial merupakan proses menentukan apa tingkatan tujuan pendidikan yang secara nyata terealisasikan melalui program kurikulum dan pembelajaran. Walaupun sejak tujuan pendidikan secara esensial berubah dalam keberadaan manusia, yaitu tujuan bermaksud untuk menghasilkan perubahan-perubahan tertentu yang diinginkan pada pola-pola perilaku siswa, selanjutnya evaluasi merupakan proses untuk menentukan derajat perubahan perilaku tersebut secara nyata mengambil tempat.

Bilamana seorang evaluator pendidikan ingin mengadopsi pendekatan Tyler dalam pekerjaannya sebagai guru di SD maupun di sekolah menengah



hendaknya mengetahui tahapan evaluasi berorientasi tujuan. Menurut Tyler prosedur untuk mengevaluasi program adalah sebagai berikut: (1) menetapkan sasaran dan tujuan, (2) menempatkan tujuan sebagai klasifikasi yang luas, (3) mengidentifikasi tujuan dalam istilah perilaku, (4) menetapkan situasi dan kondisi yang mana tujuan tersebut dapat didemonstrasikan, (5) menjelaskan tujuan strategi untuk pribadi yang relevan dalam situasi yang dipilih, (6) memilih atau mengembangkan teknik-teknik pengukuran yang sesuai, (7) mengumpulkan data tampilan (dalam kasus program pendidikan berupa tampilan siswa dan (8) membandingkan data dengan tujuan perilaku.<sup>13</sup>

Meskipun terdapat perbedaan antara model-model tersebut, secara umum memiliki persamaan, yaitu mengumpulkan data atau informasi objek yang dievaluasi sebagai dasar pertimbangan bagi pengambil kebijakan.

k. Model evaluasi CIPP

Salah satu model evaluasi program pendidikan adalah model CIPP (*context–input–process–product*). Model ini dikembangkan oleh Stufflebeam dan kawan-kawan di Ohio State University. Keempat unsur model evaluasi ini merupakan satu rangkaian yang utuh, tetapi seperti yang dikatakan Aiken, Lewis dalam pelaksanaannya seorang evaluator dapat saja hanya melakukan satu jenis atau kombinasi dua atau tiga

---

13 Tyler, *op.cit.* h.82.

jenis evaluasi tersebut.<sup>14</sup>Keunikan model ini adalah pada setiap tipe evaluasi terikat pada perangkat pengambilan keputusan yang menyangkut perencanaan dan operasi sebuah program. Keunggulan model *CIPP* memberikan suatu format evaluasi yang komperhensif pada setiap tahapan evaluasi yaitu tahapan konteks, masukan, proses, dan produk. *Model CIPP merupakan model evaluasi yang berorientasi kepada keputusan (decision oriented evaluation). Relevansi model CIPP dengan pembuatan keputusan dan akuntabilitas divisualisasikan seperti pada tabel 2.1 berikut:*

*Tabel 2.1 Hubungan Model CIPP Pada Pembuatan Keputusan dan Akuntabilitas Tipe-Tipe Evaluasi*

	<b>Konteks</b>	<b>Input</b>	<b>Proses</b>	<b>Produk</b>
Pembuatan Keputusan	Obyektif	Solusi strategi disain prosedur	Implementasi	Dihentikan Dilanjutkan Dimodifikasi Program ulang
Akuntabilitas	Rekaman Obyektif	Rekaman pilihan strategi dan disain	Rekaman Proses Aktual	Rekaman Pencapaian dan keputusan ulang

Evaluasi konteks (*context*) mencakup analisis masalah yang berkaitan dengan lingkungan program atau kondisi obyektif yang akan dilaksanakan. Berisi tentang analisis kekuatan dan kelemahan obyek tertentu. Stufflebeam menyatakan evaluasi konteks

14 Aiken, Lewis, *Rating Skales And Checklist Evaluation Behavior Personality And Attitude* (Newyork: John wiley, 1966), h. 207.

sebagai fokus institusi yaitu mengidentifikasi peluang dan menilai kebutuhan.<sup>15</sup> Suatu kebutuhan dirumuskan sebagai suatu kesenjangan (*discrepancy view*) kondisi nyata (*reality*) dengan kondisi yang diharapkan (*ideality*) atau perkiraan kerja. Dengan kata lain evaluasi konteks berhubungan dengan analisis masalah kekuatan dan kelemahan dari obyek yang akan atau sedang berjalan.

Evaluasi konteks memberikan informasi bagi pengambil keputusan dalam perencanaan atau program yang akan *on-going*. Selain itu, konteks juga bermaksud bagaimana rasionalnya suatu program. Analisis ini akan membantu dalam merencanakan keputusan, menetapkan kebutuhan dan merumuskan tujuan program secara lebih terarah dan demokratis. Evaluasi konteks juga melakukan diagnostik tentang sesuatu yang tidak ada (*absence*) dari suatu kebutuhan yang selayaknya tersedia sehingga tidak menimbulkan kerugian pada jangka panjang.

Evaluasi masukan (*input*) meliputi analisis persoalan yang berhubungan dengan bagaimana penggunaan sumber-sumber yang tersedia, alternatif-alternatif strategi yang harus dikembangkan untuk mencapai suatu program. Mengidentifikasi dan menilai kapabilitas sistem, alternatif strategi program, desain prosedur untuk strategi implementasi, pembiayaan dan penjualan. Evaluasi masukan bermanfaat untuk

---

15 George F.Madaus, Michael S.Scriven, dan Daniel L.Stufflebeam, *Evaluation Models: Viewpoints On Educational And Human Services Evaluation* (Boston: Kluwer-Nijhoff Publishing, 1983), h. 128.

membimbing pemilihan strategi program dalam menspesifikasikan rancangan prosedural. Informasi dan data yang terkumpul dapat digunakan untuk menentukan sumber dan strategi dalam keterbatasan yang ada.<sup>16</sup>Pertanyaan yang mendasar adalah bagaimana rencana penggunaan sumber-sumber yang ada, yang diambil sebagai upaya memperoleh rencana program yang efektif dan efisien.

Evaluasi proses (*process*), merupakan evaluasi yang dirancang dan diaplikasikan dalam praktik (*process*) atau membimbing dalam implementasi kegiatan. Termasuk mengidentifikasi kerusakan prosedur implementasi baik tatalaksana kejadian dan aktivitas. Setiap aktivitas dimonitor dan dicatat perubahan-perubahan yang terjadi secara jujur dan cermat. Pencatatan aktivitas harian demikian penting karena berguna bagi pengambilan keputusan untuk menentukan tindak lanjut program bagi penyempurnaan. Disamping itu catatan akan berguna untuk menentukan kekuatan dan kelemahan atau faktor pendukung dan penghambat program ketika dikaitkan dengan keluaran yang ditemukan. Tujuan utama evaluasi proses seperti yang dikemukakan oleh Worthen and Sanders mencakup tiga hal yaitu: (1) mengetahui kelemahan selama pelaksanaan termasuk hal-hal yang baik untuk dipertahankan, (2) memperoleh informasi mengenai keputusan-keputusan yang ditetapkan, dan (3) memelihara catatan-catatan

---

16 Stufflebeam and Shinkfiled, *op. cit.*, h. 173.

lapangan mengenai hal-hal yang penting pada saat implementasi dilaksanakan.<sup>17</sup>

Evaluasi produk merupakan kumpulan deskripsi dan *'judgement'* dari *outcomes* dalam hubungannya dengan konteks, input dan proses kemudian diinterpretasikan harga dan jasa yang diberikan. Evaluasi produk adalah evaluasi mengukur keberhasilan pencapaian tujuan. Evaluasi ini merupakan catatan pencapaian hasil dan keputusan-keputusan untuk perbaikan. Pelaksanaan atau aktualisasi. Aktivitas evaluasi produk adalah upaya mengukur dan menafsirkan hasil yang telah dicapai. Pengukuran dikembangkan dan diadministrasikan secara cermat dan teliti. Keakuratan analisis akan menjadi bahan penarikan kesimpulan dan pengajuan saran sejauhmana produk dapat dicapai sesuai dengan standar kelayakan. Secara garis besar, kegiatan evaluasi produk meliputi kegiatan penetapan tujuan operasional program, kriteria-kriteria pengukuran yang telah dicapai yang dihubungkan dengan tujuan program, membandingkannya antara kenyataan lapangan dengan rumusan tujuan, dan menyusun penafsiran secara rasional mengenai hasil program dari hasil evaluasi konteks, input dan proses.

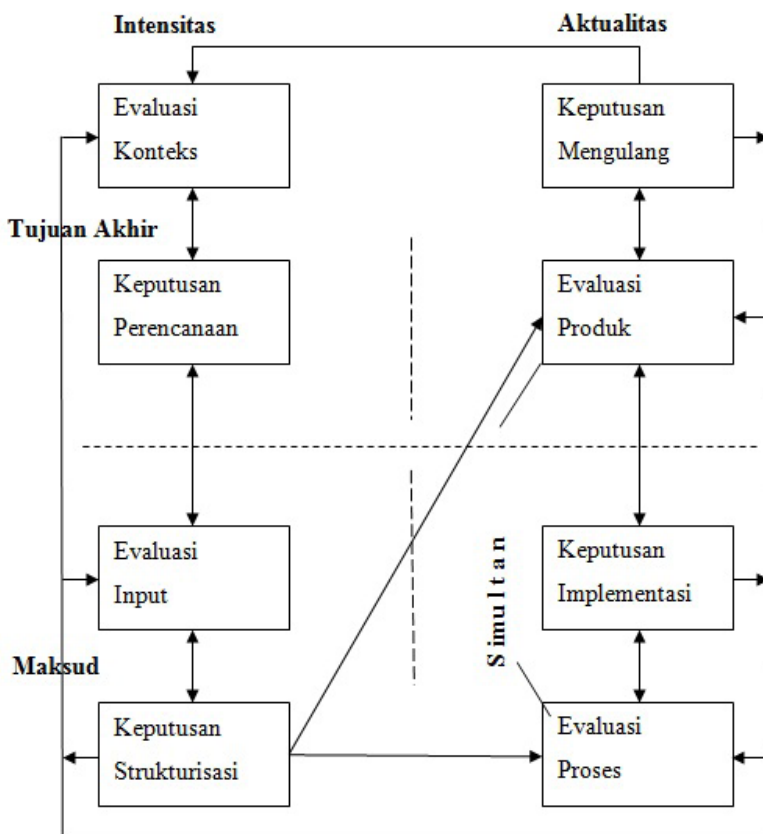
Analisis hasil atau produk ini diperlukan pembandingan antara tujuan yang ditetapkan dalam rancangan dengan hasil program yang dicapai. Hasil yang dinilai dapat berupa skor tes, persentase, data

---

17 Worthen dan James R. Sanders, *Educational Evaluation Theory and Practice* (Belmont: Wadsworth Publishing Company, Inc., 2003), h. 36.

observasi, diagram data, sosiometri dan sebagainya yang dapat ditelusuri kaitannya dengan tujuan-tujuan yang lebih rinci. Selanjutnya dilakukan analisis kualitatif tentang ke-mengapaan-nya.

Model *CIPP* merupakan model yang berorientasi kepada pemegang keputusan yaitu membantu administrator pendidikan membuat keputusan. Model ini membagi evaluasi dalam empat macam, yaitu: (1) evaluasi konteks untuk melayani keputusan perencanaan yaitu membantu untuk merencanakan pilihan keputusan, menentukan kebutuhan yang akan dicapai program dan merumuskan tujuan program, (2) evaluasi masukan untuk keputusan strukturisasi yaitu menolong untuk mengatur keputusan bagaimana menentukan sumber-sumber yang tersedia, alternatif-alternatif yang diambil, rencana dan strategi untuk mencapai kebutuhan yang ditetapkan, serta bagaimana prosedur kerjanya untuk mencapai tujuan dimaksud, (3) evaluasi proses untuk melayani keputusan implementasi, yaitu membantu mengimplementasikan keputusan sampai sejauhmana rencana program telah dilaksanakan. Hal yang perlu direvisi, terkait di dalamnya pelaksanaan dan perbaikan desain serta strategi yang dipilih, (4) evaluasi produk untuk menilai daur ulang keputusan. Evaluasi ini untuk menolong keputusan selanjutnya. Apa hasil yang telah dicapai. Apa yang dilakukan setelah program berjalan. Keunggulan model *CIPP* merupakan sistem kerja yang dinamis. Hal ini dapat digambarkan pada gambar 2.1 berikut ini:



Gambar 2.1 Model Evaluasi CIPP <sup>18</sup>

## I. Model Evaluasi yang Dipilih

Studi evaluasi implementasi program pendidikan inklusif di Kodya Banjarmasin harus memilih model evaluasi yang tepat sesuai dengan tujuan evaluasi. Menurut Stufflebeam memilih model evaluasi mana yang tepat hendaknya mempertimbangkan hal seperti:

18 Issac and Michael, *Handbook in Research and Evaluation* (San Diego California: Edits Publisher, 2008), h. 12.

pertanyaan evaluasi, masalah yang harus diatasi dan ketersediaan sumber daya.<sup>19</sup> Beberapa model yang diuraikan di atas bahwa tidak ada satupun model yang terbaik. Penerapan sebuah model perlu disesuaikan dengan tujuan evaluasi dan aspek program yang akan dievaluasi. Berdasarkan beberapa pendekatan di atas, program pendidikan inklusif yang dilaksanakan di Kodya Banjarmasin mengandung komponen konteks, input, proses dan produk, dan outcome, maka model yang cocok untuk digunakan dalam penelitian ini adalah model CIPP dengan memperhatikan outcome dari program, sehingga menjadi model CIPPO. Berbagai pertimbangan dipilihnya model evaluasi CIPP yang dikembangkan oleh Stufflebeam di Ohio state university adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi terhadap implementasi program pendidikan inklusif di sekolah reguler bertujuan untuk membantu pengambil keputusan dalam hal perencanaan sebuah program yang tepat sesuai kebutuhan di lapangan. Untuk kepentingan ini perlu melakukan evaluasi konteks (*context evaluation*) yang merupakan cara untuk menggali informasi untuk menentukan tujuan dan sasaran, merinci lingkungan yang relevan dan mengidentifikasi kebutuhan yang belum terpenuhi.

Melalui evaluasi konteks ini pengambil kebijakan pendidikan khususnya di wilayah Kalimantan Selatan akan memperoleh masukan tentang tujuan, landasan

---

19 Stufflebeam, *Evaluation Models. New Directions For Evaluation* (Sanfrancisco: Jossey-Bass, 2001), h. 205.



yang tepat tentang penyelenggaraan program pendidikan inklusif dimasa mendatang berdasarkan kebutuhan masyarakat dan kelayakan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.

2. Evaluasi terhadap implementasi program pendidikan inklusif bertujuan untuk membantu pengambil kebijakan dalam hal strukturisasi, dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, strategi alternatif yang akan digunakan dan rencana apa yang tersedia untuk mencapai tujuan serta dapat membantu pengembangan program.

Guna mendapatkan informasi tersebut perlu melakukan evaluasi masukan (*input evaluation*) terhadap pelaksanaan pendidikan inklusif yang telah dilakukan oleh beberapa sekolah reguler di Banjarmasin. Evaluasi input yang dilakukan dalam penelitian ini mencakup keberadaan siswa berkebutuhan khusus yang mengikuti pembelajaran di sekolah reguler, persyaratan administrasi guru pembimbing khusus yang ada di sekoalh reguler, kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa, sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah untuk mendukung pelayanan pendidikan, sumber pembiayaan dan kalender akademik.

3. Evaluasi dalam penelitian ini bertujuan untuk membantu pelaksana program pendidikan inklusif, dalam hal ini lembaga sekolah reguler pada tingkat SD, SMP, dan SMA/SMK penyelenggara pendidikan inklusif di Kodya

Banjarmasin dalam hal memahami hambatan dan kendala apa yang ditemui selama menyelenggarakan pendidikan inklusif, kemudian revisi apa yang diperlukan, sehingga prosedur lebih lanjut dapat dimonitor, dikontrol dan diminimalisir.

Guna mendapatkan informasi ini perlu dilakukan evaluasi terhadap proses (*process evaluation*) diantaranya akan digali data informasi tentang bagaimana kompetensi, minat dan profil guru yang mengajar di kelas inklusif, bagaimana proses belajar mengajar yang dilakukan apa kendala yang ditemui ketika anak berkebutuhan khusus belajar di kelas yang sama dengan anak reguler, bagaimana pelaksanaan ekstra kurikuler, kendala apa yang ditemui ketika melakukan identifikasi dan asesmen terhadap anak berkebutuhan khusus, kendala apa yang ditemui dalam pembuatan dan pelaksanaan program pembelajaran individual, bagaimana struktur sosial dan sosialisasi anak berkebutuhan khusus dengan anak reguler pada umumnya.

4. Evaluasi dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat hasil yang diperoleh, dan apa yang perlu dilakukan lebih lanjut berkaitan dengan implementasi program pendidikan inklusif yang telah dilakukan! Hasil apa yang dipetik oleh siswa dengan adanya pendidikan inklusif disekolah reguler.

Guna menjawab pertanyaan tersebut perlu dilakukan evaluasi produk (*product evaluation*). Pada

penelitian ini akan diungkap bagaimana perkembangan kognitif dan emosi siswa baik yang reguler maupun siswa berkebutuhan khusus, bagaimana life skill dan vocational skill siswa, sikap sosial dan sikap spiritual siswa setelah mengikuti program pendidikan inklusif.

5. Evaluasi dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan akibat program pendidikan inklusif. Evaluasi ini bertujuan membantu daur ulang dalam mengambil sebuah keputusan. Evaluasi terhadap dampak (outcome evaluation) merupakan tahap akhir dari rangkaian evaluasi. Dalam penelitian ini dampak pelaksanaan program pendidikan inklusif terhadap anak berkebutuhan khusus dilihat pada dua hal yaitu: (a) bagaimana kelanjutan studi ke jenjang pendidikan berikutnya (b) bagaimana anak berkebutuhan khusus dapat diterima di dunia kerja.

#### m. Kriteria Evaluasi Program

Bertolak dari deskripsi teoritis dan program sebagaimana yang telah dipaparkan, maka fokus penelitian ini mendalami empat komponen model *CIPPO* yaitu komponen konteks (*context*), komponen masukan (*input*), komponen proses (*process*), komponen produk (*product*) dan luaran (*outcome*). Pada kajian teoritis telah diuraikan tentang program pendidikan inklusif sebagai manifestasi pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, perlu dievaluasi sejauhmana efektivitasnya.

Efektivitas dipahami sebagai rangkaian proses

dan produk untuk melakukan hal-hal yang tepat atau menyelesaikan sesuatu dengan pas. Secara operasional, efektivitas dipahami sebagai suatu kondisi yang menampilkan tingkatan keberhasilan suatu program sesuai standar yang telah ditetapkan. Efektivitas dapat terjadi pada tiap tingkatan atau level organisasi yaitu tergantung pada sisi mana yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini efektivitas dipandang dari sudut level kelas inklusif di Kodya Banjarmasin. Cara untuk mengetahui tingkatan efektivitas dilakukan dengan mengukur komponen konteks, input, proses dan produk kemudian dibandingkan dengan standar-standar objektif yang telah ditetapkan baik secara kuantitas maupun kualitas. Efektivitas dikategorikan pada tingkat rendah, moderat, dan tinggi.

Atas dasar permasalahan penelitian dan landasan teori serta deskripsi program, maka dibangun suatu kerangka acuan yang melibatkan lima komponen evaluasi *CIPPO*. Kelima komponen evaluasi tersebut memiliki cakupan konseptual evaluasi yang merupakan sumber rujukan pengembangan ke arah indikator penelitian.

Bertolak dari deskripsi program dan sintesis kerangka pemikiran, maka ditetapkan kriteria-kriteria standar yang digunakan dalam mengkaji efektivitas program pendidikan inklusif di Kodya Banjarmasin. Kriteria-kriteria standar objektif ini akan dijadikan sebagai patokan standar untuk mengukur tingkat pencapaian program inklusif di sekolah. Adapun

kriteria-kriteria standar yang dijadikan sebagai acuan penilaian adalah seperti yang tercantum dalam tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Kriteria-Kriteria Standar Program Pendidikan Inklusif

KOMPONEN	INDIKATOR	KRITERIA
<b>KONTEKS</b> <i>(Context)</i>	Tujuan dan landasan program	Adanya dokumen yang menunjukkan tujuan yang jelas tentang pendidikan inklusif
		Adanya dokumen yang menunjukkan program yang jelas tentang pendidikan inklusif
	Tujuan program pendidikan inklusif dirumuskan secara tepat	Tujuan dirumuskan sesuai syarat perumusan yaitu: Jelas, terukur dan dapat diamati
	Pendidikan inklusif merupakan kebutuhan masyarakat	Adanya dokumen yang merupakan dukungan masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif
	Kelayakan sekolah menyelenggarakan pendidikan inklusif	Adanya dokumen ijin operasional penyelenggaraan pendidikan inklusif
		Adanya sistem sekolah menyesuaikan dengan kondisi peserta didik
		Adanya dokumen tentang dukungan warga sekolah menerima pendidikan inklusif

<b>MASUKAN</b> (Input)	1. Siswa	Adanya siswa berkebutuhan khusus
		Adanya rumah siswa berkebutuhan khusus dekat dengan wilayah sekolah
		Adanya dokumen yang menunjukkan komitmen orang tua ABK bersekolah di reguler
		Adanya dokumen nominasi diri siswa
		Adanaya dokumen nominasi teman sebaya
		Adananya dokumen nominasi guru
		Adanya dokumen nominasi orang tua ABK
	2. Persyaratan Administrasi GPK	Guru memiliki ijazah S1 PLB
		Guru mengajar sesuai dengan ijazah
		Pengalaman guru mengajar minimal 2 th
		Guru telah dipersiapkan untuk mengajar anak berkebutuhan khusus
		Guru minimal 3 kali telah dilatih menangani anak berkebutuhan khusus
		Guru memiliki kompetensi melakukan identifikasi dan asesmen terhadap anak berkebutuhan khusus
		Guru memiliki kompetensi melakukan pembelajaran kompensatoris kepada ABK
	3. Kurikulum	Adanya kurikulum berdeferensiasi
		Adanya dokumen modifikasi kurikulum
		Adanya pelaksanaan sistem penilaian yang flksibel
		Kurikulum dikembangkan berdasarkan kebutuhan individual si
		Adanya modifikasi bahan ajar

<b>MASUKAN</b> (Input)	4. Sarana dan prasarana	Tersedia sarana dan prasarana belajar minimal 60 % memadai
		Tersedianya sarana dan prasarana yang aksesibel
		Tersedia alat peraga ABK minimal 60 %
	5. Pembiayaan	Pembiayaan mencukupi untuk rutin dan pengembangan
	6. Kalender akademik	Kalender akademik memiliki fleksibilitas tinggi
<b>PROSES</b> (Process)	1. Kompetensi guru	Kopetensi guru tergolong tinggi
	2. Minat guru	Minat guru mengajar kategori tinggi
	3. Profil	Profil guru yang dipersyaratkan kategori tinggi
	4. Proses belajar	Proses pembelajaran di kelas berada pada kategori tinggi
	5. Ekstra kurikuler	Kegiatan ekstra kurikuler dalam kategori tinggi
	6. Identifikasi dan asesmen	Pelaksanaan identifikasi dan asesmen dalam kategori tinggi
	7. PPI	Adanya program pembelajaran yang di individualkan
	8. Struktur sosial	Struktur sosial kelas tergolong tinggi
	9. Sosialisasi ABK	Pengakuan teman sebaya terhadap ABK tinggi
Pengakuan guru terhadap ABK tinggi		

<b>PRODUK</b> (Product)	1. Kognitif	ABK yang tidak memiliki hambatan kognitif setara dengan siswa reguler
	2. Kecerdasan emosi	Siswa memiliki kecerdasan emosi sesuai dengan usia perkembangan
	3. Sikap sosial	
	Berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain	Semua warga sekolah berinteraksi dan berkomunikasi dengan baik
	Membantu satu sama lain untuk belajar dan berfungsi	Semua warga sekolah saling bantu untuk belajar dan berfungsi
	Saling tenggang rasa satu sama lain	Semua warga sekolah mengembangkan sikap saling tenggang rasa
	Menghargai perbedaan individu	Sistem sekolah menghargai perbedaan individu
	Cenderung kerjasama daripada bersaing	Semua warga sekolah cenderung kerjasama bukan bersaing
<b>Luaran</b> (outcome)	1. Penerimaan di jenjang yang lebih tinggi	Siswa lulusan SD inklusif diterima di SMP
		Siswa lulusan SMP inklusif diterima di SMA/SMK
		Siswa lulusan SMA/SMK inklusif diterima di perguruan tinggi
	2. Penerimaan pada dunia kerja	Lulusan sekolah SMA/SMK yang diterima di dunia kerja (perusahaan, kantor, intansi, usaha mandiri)



Kriteria-kriteria standar tersebut merupakan ukuran atau patokan standar objektif. Kemudian hasil evaluasi atau intensitas objektif dari lapangan dibandingkan dengan standar objektif yang telah ditetapkan. Teknik pengambilan keputusan aktualitas pada setiap tahapan evaluasi atau aspek dilakukan dengan cara melakukan pengukuran pada setiap fokus evaluasi yang dirangkum dalam matrik yang diadaptasikan dalam *case-order effect matrix*.<sup>1</sup> Model matrik kasus order ini memiliki karakteristik yang khas yaitu menampilkan adanya efek-efek perbandingan antara standar objektif berupa kriteria-kriteria standar normatif yang telah ditetapkan sebelumnya dibandingkan dengan intensitas objektif yaitu berupa hasil rekaman nyata di lapangan. Selanjutnya perbandingan tersebut akan menghasilkan efek kesimpulan yaitu berupa aktualitas keputusan pada setiap kasus yang diambil.

Aktualitas keputusan perkasus yang dievaluasi ditetapkan dengan menggunakan tiga pilihan kategori yaitu: tinggi (*high*), moderat (*moderate*), dan rendah (*low*).<sup>2</sup> Keputusan pada setiap tahapan evaluasi akan menghasilkan sejumlah rekomendasi akhir yang diajukan untuk perbaikan program inklusif ke depan.

---

1 Boy S. Sabarguna, *Analisis Data Pada Penelitian Kualitatif* (Jakarta: UI Pers, 2008), h. 27.

2 Stephen Issac dan William B Michael, *Handbook in research and evaluation* (San Diego California: Edits Publisier, 2003), h. 22.



## BAGIAN 9

### ANALISIS HASIL PENELITIAN EVALUASI PROGRAM PENDIDIKAN INKLUSIF DI SD BANUA ANYAR 8

Hasil evaluasi pelaksanaan program pendidikan inklusif SD di Kota Banjarmasin dengan model CIPPO untuk keempat SD dengan kriteria evaluasi yang telah ditentukan sebagai berikut: Evaluasi pada komponen konteks menemukan hal-hal sebagai berikut: Evaluasi terhadap indikator tujuan tidak sesuai dengan kriteria evaluasi yang ditetapkan. Pada prinsipnya tujuan pendidikan inklusif yang telah ditetapkan berdasarkan Permendiknas nomor 70 tahun 2009 sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan inklusif, sudah tidak sesuai dengan realita sekolah saat ini. Hasil wawancara dengan berbagai pihak baik dari pengambil kebijakan, unsur masyarakat dan sekolah menyatakan bahwa tujuan pendidikan inklusif tidak sekedar memasukkan anak berkebutuhan khusus di sekolah reguler. Akan tetapi pendidikan inklusif bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang ramah bagi semua peserta didik.

Hasil evaluasi terhadap landasan formal, sesuai dengan kriteria evaluasi. Sekolah memiliki dokumen landasan formal penyelenggaraan pendidikan inklusif, yaitu Permendiknas nomor 70 tahun 2009, dari hasil wawancara sebagian besar komponen sekolah telah memahami peraturan tersebut.

Indikator pembinaan belum sesuai dengan kriteria evaluasi. Pendidikan inklusif di sekolah ini belum terjadi alur pembinaan yang jelas baik dari pusat, propinsi, kota,

sampai ke alur pembinaan di sekolah. Hasil evaluasi terhadap analisis kebutuhan dan kelayakan sekolah telah sesuai dengan kriteria evaluasi. Berdasarkan rekomendasi para pakar melalui simposium, seminar dan kesepakatan bersama perlu mendukung terlaksananya pendidikan inklusif. Berdasarkan hasil analisis SWOT sekolah memiliki peluang besar menjadi penyelenggara pendidikan inklusif. Dari hasil wawancara baik dengan unsur sekolah, dan masyarakat merekomendasikan pentingnya kehadiran pendidikan inklusif, untuk menghindarkan deskriminasi pendidikan. Kesimpulan analisis data hasil evaluasi pada komponen konteks, ada dua indikator yang tidak sesuai dengan kriteria evaluasi, sedangkan dua indikator sesuai dengan kriteria evaluasi yang ditetapkan atau efektif.

Evaluasi yang dilakukan pada komponen input menghasilkan data sebagai berikut: Pada indikator rekrutmen siswa, telah sesuai dengan kriteria evaluasi. Sekolah sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, sekolah memiliki tim/ panitia penerimaan siswa baru, sekolah melibatkan beberapa ahli seperti dokter dan psikologi untuk keperluan rekrutmen siswa. Ada dua tehnik yang ditempuh sekolah dalam rekrutmen siswa berkebutuhan khusus, yaitu dengan melihat nilai raport dan melalui pendaftaran siswa baru. Komponen rekrutmen siswa, telah sesuai dengan kriteria evaluasi.

Hasil evaluasi terhadap indikator kondisi sosial ekonomi orang tua, belum sesuai dengan kriteria evaluasi. Evaluasi menemukan informasi bahwa sebagian besar anak masih

memiliki orang tua yang lengkap (ayah dan ibu), sebagian besar ayah anak lulusan SMA sederajat, sebagian besar ibu siswa bekerja sebagai ibu rumah tangga, terbanyak ayah bekerja sebagai wiraswasta, berpenghasilan dibawah 3 juta, sebagian besar siswa memiliki rumah sendiri, dan sebagian besar siswa memiliki kendaraan yang dipergunakan untuk mengantar ke sekolah. Hasil wawancara dengan kondisi sosial ekonomi orang tua yang kelas menengah kebawah, akan sulit mendukung sepenuhnya pembiayaan sekolah. Upaya sekolah mengatasi kendala tersebut, dengan terus memperbanyak sosialisasi kepada masyarakat agar tetap memperhatikan pendidikan anak, dan menerapkan kado silang, bagi masyarakat yang mampu menolong yang tidak mampu.

Hasil evaluasi terhadap indikator persyaratan administrasi guru, sesuai dengan kriteria evaluasi. Guru pembimbing khusus memiliki ijazah S1 PLB, guru yang mengajar di kelas inklusif sesuai dengan keahliannya, guru yang mengajar lebih 4 kali mengikuti pelatihan terkait pengembangan pendidikan inklusif, sebagian besar guru berpengalaman mengajar lebih dari 3 tahun dan memang oleh sekolah telah dipersiapkan sebelumnya baik mengikuti peningkatan kualifikasi pendidikan maupun mengikuti berbagai pelatihan. Kesimpulan indikator persyaratan administrasi guru, telah sesuai dengan kriteria evaluasi yang ditentukan.

Hasil evaluasi terhadap komponen kurikulum, menemukan informasi bahwa komponen ini telah sesuai dengan kriteria evaluasi, hal ini dicerminkan dari hasil

angket ditemukan data pemilihan konten kurikulum mempertimbangkan perbedaan individu (berdiferensiasi), kurikulum terpusat pada kebutuhan peserta didik, isi kurikulum banyak menggamit pengembangan sikap sosial, kurikulum yang disusun mengutamakan fleksibilitas/kesesuaian dengan kemampuan siswa.

Hasil evaluasi terhadap indikator sarana dan prasarana, menemukan informasi bahwa kesesuaian komponen sarana prasarana dengan kriteria evaluasi yang ditetapkan. Sekolah memiliki 75% sarana prasarana dan bisa difungsikan dengan baik. Sarana penunjang yang memang belum dimiliki sekolah seperti poliklinik kesehatan dan terdianya buku-buku penunjang berkaitan dengan pembelajaran anak berkebutuhan khusus tidak cukup berpengaruh terhadap pengembangan pendidikan inklusif.

Hasil evaluasi terhadap indikator pembiayaan, menemukan informasi bahwa pembiayaan di SD banua Anyar 8 belum sesuai dengan kriteria evaluasi yang ditetapkan. Hasil wawancara dengan kepala sekolah didapatkan informasi bahwa sekolah belum memenuhi standar besaran biaya pendidikan inklusif, belum mengetahui berapa besaran biaya setiap peserta didik. Namun demikian sekolah memiliki RKAS yang mencantumkan pengeluaran dan pemasukan anggaran secara keseluruhan. Unsur pembiayaan yang paling dikeluhkan oleh sekolah adalah penghonoran guru pembimbing khusus. Upaya sekolah untuk memecahkan masalah ini adalah melibatkan orang tua murid yang memiliki anak berkebutuhan khusus, untuk membayarkan honor guru pendamping khusus.

Hasil evaluasi terhadap komponen konteks, yang meliputi kompetensi guru, minat mengajar dan proses pembelajaran dikelas inklusif. Data kompetensi guru di SD Banua Anyar 8 telah sesuai dengan kriteria evaluasi yang ditetapkan. Keenam indikator kompetensi guru menunjukkan data yang efektif/ sesuai dengan kriteria evaluasi. Guru mampu melakukan diferensiasi kurikulum dengan baik, guru mampu melakukan modifikasi kurikulum berdasarkan kemampuan peserta didik, guru mampu melakukan pembelajaran individual terhadap siswa berkebutuhan khusus, yang membutuhkannya. Guru mampu melakukan pembelajaran kooperatif, memotivasi belajar siswa secara keseluruhan. Selain itu guru mampu melaksanakan penilaian yang fleksibel sesuai dengan kemampuan peserta didik. Berdasarkan hasil wawancara guru tidak mengalami kesulitan yang berarti dalam melakukan pelayanan kepada siswa-siswa kelas inklusif.

Indikator minat mengajar guru di SD Banua Anyar 8, telah memenuhi kriteria evaluasi yang ditetapkan. Berdasarkan hasil angket maupun wawancara guru merasa senang dalam melakukan pembelajaran, mereka bekerja penuh keiklasan dan tanpa pamrih, Para guru bangga bisa memberikan pelayanan bagi anak berkebutuhan khusus. Bekerja dengan hati itulah yang membuat anak berkebutuhan khusus merasa diperhatikan oleh guru di kelas inklusif. Hasil wawancara dengan guru menemukan informasi bahwa guru merasa bangga mengajar di kelas inklusif penuh tantangan yang menarik, membuat semangat untuk bekerja keras untuk mencapai hasil yang maksimal.

Indikator proses pembelajaran di SD Banua Anyar 8 masih kurang efektif (tidak sesuai dengan kriteria evaluasi). Para guru masih kesulitan dalam mengkondisikan siswa dalam belajar. Sekolah ini memiliki siswa berkebutuhan khusus yang melebihi kapasitas pendidikan inklusif pada umumnya. Idialnya paling banyak ada 3 anak berkebutuhan khusus di kelas reguler. Namun yang terjadi di SD ini, di suatu kelas ada yang memiliki tujuh anak berkebutuhan khusus, inilah yang membuat guru sulit mengkondisikan siswa dalam proses pembelajaran.

Hasil evaluasi terhadap komponen produk, yang meliputi aspek kognitif dan sikap sosial. Data kemampuan kognitif yang diperoleh di SD Banua Anyar 8 menunjukkan kesesuaian dengan kriteria evaluasi. Hasil ujian nasional selama tiga tahun setelah menjadi sekolah inklusif terus mengalami peningkatan. Artinya walaupun ada anak berkebutuhan khusus masuk ke sekolah reguler, tidak akan mempengaruhi rata-rata nilai ujian nasional. Anak berkebutuhan khusus yang mengalami hambatan kognitif tidak mengikuti ujian nasional, mereka mengikuti ujian sekolah saja. Data indikator sikap sosial, di SD Banua Anyar 8 menunjukkan kesesuaian dengan kriteria evaluasi, siswa saling berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain, siswa saling bantu satu sama lain untuk belajar dan berfungsi, siswa saling tenggang rasa satu sama lain, siswa menerima kenyataan bahwa sebagian anak mempunyai kebutuhan yang berbeda, siswa cenderung bekerjasama daripada bersaing. Budaya sikap sosial yang baik ini akan terbentuk ketika ada anak berkebutuhan khusus di sekolah reguler.



Mereka terus menerus berlatih dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran untuk mengembangkan sikap sosial tersebut. Semakin lama sekolah itu menyelenggarakan pendidikan inklusif, akan semakin baik sikap sosial para siswa.

Hasil evaluasi terhadap komponen *outcome*, menemukan informasi bahwa *outcome* di SD banua Anyar 8 sesuai dengan kriteria evaluasi. Anak berkebutuhan khusus lulusan SD Banua Anyar 99% bisa melanjutkan studi ke jenjang sekolah yang lebih tinggi. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah, sekolah inklusif ini perlu dikembangkan seoptimal mungkin di masa yang akan datang. Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif menjadi, kebanggaan para orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus.



## BAGIAN 10

### ANALISIS HASIL PENELITIAN EVALUASI PROGRAM PENDIDIKAN INKLUSIF DI SD GADANG 2

Evaluasi pada komponen konteks menemukan hal-hal sebagai berikut: Indikator tujuan belum sesuai kriteria evaluasi. Bahwa pada prinsipnya tujuan pendidikan inklusif yang telah ditetapkan berdasarkan Permendiknas nomor 70 tahun 2009 sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan inklusif, sudah tidak sesuai dengan realita sekolah saat ini. Hasil wawancara dengan berbagai pihak baik dari pengambil kebijakan, unsur masyarakat dan sekolah menyatakan bahwa tujuan pendidikan inklusif tidak sekedar memasukkan anak berkebutuhan khusus di sekolah reguler. Akan tetapi pendidikan inklusif bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang ramah bagi semua peserta didik.

Hasil evaluasi terhadap landasan formal, menemukan informasi sesuai dengan kriteria evaluasi. Sekolah memiliki dokumen landasan formal penyelenggaraan pendidikan inklusif, yaitu Permendiknas nomor 70 tahun 2009, dari hasil wawancara sebagian besar komponen sekolah telah memahami peraturan tersebut. Hasil evaluasi terhadap pembinaan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, menghasilkan informasi bahwa belum terjadi alur pembinaan yang jelas baik dari pusat, propinsi, kota, sampai ke alur pembinaan di sekolah.

Hasil evaluasi terhadap analisis kebutuhan dan kelayakan sekolah menghasilkan informasi sesuai kriteria evaluasi. Berdasarkan rekomendasi para pakar melalui simposium, seminar dan kesepakatan bersama perlu mendukung terlaksananya pendidikan inklusif. Berdasarkan hasil analisis SWOT sekolah memiliki peluang besar menjadi penyelenggara pendidikan inklusif. Dari hasil wawancara baik dengan unsur sekolah, dan masyarakat merekomendasikan pentingnya kehadiran pendidikan inklusif, untuk menghindari deskriminasi pendidikan.

Hasil evaluasi input di SD gadang 2 menemukan informasi sebagai berikut: Rekrutmen siswa berkebutuhan khusus di SD ini belum memenuhi kriteria evaluasi yang ditentukan. Anak berkebutuhan khusus di sekolah ini tidak sebanyak di SD Banua Anyar 8. Sekolah kurang banyak melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu sekolah belum memiliki panitia khusus dalam rekrutmen anak berkebutuhan khusus. Kendala yang dialami sekolah, guru-guru reguler belum memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi anak berkebutuhan khusus.

Kondisi sosial ekonomi orang tua di sekolah ini tergolong menengah kebawah. Indikator ini belum mencapai kriteria evaluasi yang ditetapkan. Hasil evaluasi terhadap indikator kondisi sosial ekonomi orang tua, menemukan informasi bahwa sebagian besar anak masih memiliki orang tua yang lengkap (ayah dan ibu), sebagian besar ayah anak lulusan SMA sederajat, sebagian besar ibu siswa bekerja sebagai ibu rumah tangga, terbanyak ayah bekerja sebagai wiraswasta, berpenghasilan dibawah 3 juta, sebagian besar

siswa memiliki rumah sendiri, dan sebagian besar siswa memiliki kendaraan yang dipergunakan untuk mengantar ke sekolah. Hasil wawancara dengan kondisi sosial ekonomi orang tua yang kelas menengah kebawah, akan sulit mendukung sepenuhnya pembiayaan sekolah. Data ini diperkuat dengan hasil wawancara bahwa kondisi sosial ekonomi orang tua di SD gadang 2 pada umumnya berasal dari keluarga menengah ke bawah. Namun komitmen untuk menyekolahkan anak tinggi.

Indikator persyaratan administrasi guru di sekolah ini tergolong sedang atau kurang efektif, artinya belum sesuai dengan kriteria evaluasi. Ada sebagian guru pembimbing khusus telah memiliki ijazah S1 PLB, namun sebagian besar tidak memiliki. Sebagian besar guru mengajar tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan, hal ini disebabkan kekurangan tenaga guru. Upaya yang dilakukan sekolah dengan rekrutmen guru honor, khususnya guru pembimbing khusus. Guru kelas reguler masih minim dalam mengikuti pelatihan terkait dengan pendidikan inklusif. Sekolah berupaya mengatasi masalah ini dengan meningkatkan kualifikasi pendidikan ke prodi pendidikan luar biasa Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

Hasil evaluasi terhadap indikator kurikulum di SD Gadang 2 kurikulum belum memenuhi kriteria evaluasi. Kurikulum yang disusun belum memperhatikan unsur diferensiasi kurikulum, atau menghargai perbedaan individu siswa. Kandungan kurikulum belum banyak yang menggamit aspek sikap sosial. Sekolah masih dominan mengembangkan aspek kognitif secara klasikal. Kondisi ini

banyak dialami sekolah yang baru saja menyelenggarakan pendidikan inklusif. Perubahan sistem sekolah menyesuaikan kondisi siswa, belum dilakukan secara baik. Sekolah masih terpengaruh dengan kebijakan pemerintah dalam pendidikan.

Hasil evaluasi terhadap sarana prasarana di SD Gadang 2, menemukan informasi sarana dan prasarana belum sesuai dengan kriteria evaluasi. Dari 20 jenis sarana prasarana SD ini memiliki 40% sarana yang dapat digunakan dengan baik. Dari hasil wawancara sekolah masih memerlukan sarana seperti ruang asesmen, aula pertemuan dan ruang kelas juga masih sangat diperlukan tambahan. Poliklinik anak berkebutuhan khusus, dan laboratorium menjadi prioritas yang harus dipenuhi oleh sekolah.

Hasil evaluasi terhadap indikator pembiayaan, menemukan informasi bahwa pembiayaan di SD Gadang 2 belum sesuai dengan kriteria evaluasi yang ditetapkan. Hasil wawancara dengan kepala sekolah didapatkan informasi bahwa sekolah belum memenuhi standar besaran biaya pendidikan inklusif, belum mengetahui berapa besaran biaya setiap peserta didik. Sekolah memiliki RKAS yang mencantumkan pengeluaran dan pemasukan anggaran secara keseluruhan. Berdasarkan hasil wawancara pembiayaan di sekolah ini masih tergolong rendah. Setiap bulan sekolah harus membayarkan honor guru pembimbing khusus yang ditanggung oleh komite sekolah yang bersumber dari orang tua murid yang memiliki anak berkebutuhan khusus.

Hasil evaluasi komponen proses di SD Gadang 2, menemukan hal sebagai berikut: Kompetensi guru memenuhi kriteria evaluasi. Guru telah memiliki kemampuan terkait dengan kompetensi guru inklusif, diantaranya adalah memodifikasi kurikulum, menyesuaikan kurikulum dengan perbedaan individu, melakukan pembelajaran individual, mampu merancang dan melaksanakan penilaian yang fleksibel. Kemampuan ini berkat upaya sekolah untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan dan mengikuti berbagai pelatihan terkait masalah di atas.

Minat mengajar guru di SD Gadang 2 memenuhi kriteria evaluasi. Berdasarkan hasil angket maupun wawancara di SD ini guru merasa senang dalam melakukan pembelajaran, mereka bekerja penuh keiklasan dan tanpa pamrih, para guru bangga bisa memberikan pelayanan bagi anak berkebutuhan khusus. Bekerja dengan hati itulah yang membuat anak berkebutuhan khusus merasa diperhatikan oleh guru di kelas inklusif. Tingginya minat mengajar guru di kelas inklusif, karena tumbuhnya kesadaran bahwa setiap manusia itu memiliki kemampuan yang berbeda dari manusia lain. Maka sangatlah wajar ketika anak didik kita itu berbeda-beda kemampuannya. Hasil wawancara dengan guru menemukan informasi bahwa dengan adanya pendidikan inklusif, guru tidak melihat kekurangan anak, guru cukup mengetahui anak ini memiliki hambatan dan potensi apa yang dapat dikembangkan. Sehingga kita dapat membuat anak berdiri sejajar dengan anak-anak lain.

Hasil evaluasi terhadap proses pembelajaran di SD Gadang 2 telah sesuai dengan kriteria evaluasi. Pembelajaran

berlangsung secara efektif. Guru mampu mengembangkan strategi pembelajaran yang tepat, melibatkan siswa dalam pembelajaran dan menguasai bahan ajar. Kerjasama, saling bantu satu sama lain, menghargai perbedaan individu merupakan pemicu proses pembelajaran yang lebih baik. Hasil belajar tidak senantiasa fokus pada kemampuan kognitif saja, tetapi bagaimana agar siswa bisa berkembang pada seluruh aspek perkembangannya.

Hasil evaluasi terhadap komponen produk, di SD Gadang 2 produk aspek kognitif sesuai dengan kriteria evaluasi. Hasil ujian nasional selama tiga tahun setelah menjadi sekolah inklusif terus mengalami peningkatan. Artinya walaupun ada anak berkebutuhan khusus masuk ke sekolah reguler, tidak akan mempengaruhi rata-rata nilai ujian nasional. Anak berkebutuhan khusus yang mengalami hambatan kognitif tidak mengikuti ujian nasional, mereka mengikuti ujian sekolah saja.

Hasil evaluasi indikator sikap sosial, di SD Gadang 2 menunjukkan kurang kesesuaian dengan kriteria evaluasi. Nilai-nilai positif yang mencerminkan sikap sosial seperti saling berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain, saling bantu satu sama lain untuk belajar dan berfungsi, saling tenggang rasa satu sama lain, menerima kenyataan bahwa sebagian anak mempunyai kebutuhan yang berbeda, cenderung bekerjasama daripada bersaing. Budaya sikap sosial yang baik ini belum menginternalisasi pada diri anak. Sekolah yang baru 4 tahun menyelenggarakan pendidikan inklusif memicu kondisi di atas. Sekolah hendaknya terus mendorong para guru untuk menggamit sikap sosial dalam



belajar di kelas maupun di luar kelas.

Hasil evaluasi terhadap komponen outcome, menemukan informasi bahwa outcome di SD Gadang 2 sesuai dengan kriteria evaluasi. Anak berkebutuhan khusus lulusan SD Banua Anyar 100% bisa melanjutkan studi ke jenjang sekolah yang lebih tinggi. Sebaran tempat studi lanjut, antara lain ke sekolah inklusif jenjang SMP, pesantren maupun ke SLB. Berdasarkan wawancara dengan unsur sekolah dan masyarakat, Pemerintah perlu mendorong pentingnya kehadiran sekolah inklusif yang bisa diakses oleh semua orang tanpa deskriminasi.



## BAGIAN 11

### ANALISIS HASIL PENELITIAN EVALUASI PROGRAM PENDIDIKAN INKLUSIF DI SD BANUA ANYAR 4

Evaluasi pada komponen konteks menemukan hal-hal sebagai berikut: Tujuan pendidikan inklusif di SD ini tidak sesuai kriteria evaluasi. Tujuan pendidikan inklusif yang telah ditetapkan berdasarkan Permendiknas nomor 70 tahun 2009 sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan inklusif, sudah tidak sesuai dengan realita sekolah saat ini. Hasil wawancara dengan berbagai pihak baik dari pengambil kebijakan, unsur masyarakat dan sekolah menyatakan bahwa tujuan pendidikan inklusif tidak sekedar memasukkan anak berkebutuhan khusus di sekolah reguler. Akan tetapi pendidikan inklusif bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang ramah bagi semua peserta didik. Hasil evaluasi terhadap landasan formal, menemukan informasi bahwa sekolah memiliki dokumen landasan formal penyelenggaraan pendidikan inklusif, yaitu Permendiknas nomor 70 tahun 2009, dari hasil wawancara sebagian besar komponen sekolah telah memahami peraturan tersebut.

Hasil evaluasi terhadap pembinaan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif belum sesuai dengan kriteria evaluasi. Belum terjadi alur pembinaan yang jelas baik dari pusat, propinsi, kota, sampai ke alur pembinaan di sekolah. Hasil evaluasi terhadap analisis kebutuhan dan kelayakan sekolah telah sesuai dengan kriteria evaluasi. Berdasarkan rekomendasi para pakar melalui symposium, seminar dan

kesepakatan bersama perlu mendukung terlaksananya pendidikan inklusif. Berdasarkan hasil analisis SWOT sekolah memiliki peluang besar menjadi penyelenggara pendidikan inklusif. Dari hasil wawancara baik dengan unsur sekolah, dan masyarakat merekomendasikan pentingnya kehadiran pendidikan inklusif, untuk menghindari deskriminasi pendidikan. Kesimpulan analisis data hasil evaluasi pada komponen konteks, dua indikator belum sesuai dengan kriteria evaluasi yang ditetapkan dan dua indikator sesuai.

Hasil evaluasi komponen Input, mendapatkan informasi sabagai berikut: Rekrutmen siswa berkebutuhan khusus di SD ini belum memenuhi kriteria evaluasi yang ditentukan. Anak berkebutuhan khusus yang ditemukan di sekolah ini sangat sedikit. Sekolah kurang banyak melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu sekolah belum memiliki panitia khusus serta tim ahli dalam rekrutmen anak berkebutuhan khusus. Rendahnya sosialisasi, rendahnya komitmen sekolah ternyata sangat mempengaruhi perhatian masyarakat sekitar sekolah.

Hasil evaluasi aspek kondisi sosial ekonomi orang tua di sekolah ini tergolong menengah kebawah. Indikator ini belum mencapai kriteria evaluasi yang ditetapkan. Hasil evaluasi terhadap indikator kondisi sosial ekonomi orang tua, menemukan informasi bahwa sebagian besar anak masih memiliki orang tua yang lengkap (ayah dan ibu), sebagian besar ayah anak lulusan SMA sederajat, sebagian besar ibu siswa bekerja sebagai ibu rumah tangga, terbanyak ayah bekerja sebagai wiraswasta, berpenghasilan dibawah 3 juta, sebagian besar siswa memiliki rumah sendiri, dan sebagian

besar siswa memiliki kendaraan yang dipergunakan untuk mengantar ke sekolah. Hasil wawancara dengan kondisi sosial ekonomi orang tua yang kelas menengah kebawah, akan sulit mendukung sepenuhnya pembiayaan sekolah. Data ini diperkuat dengan hasil wawancara bahwa kondisi sosial ekonomi orang tua di SD Banua Anyar 4 pada umumnya berasal dari keluarga menengah ke bawah. Namun komitmen untuk menyekolahkan anak tinggi.

Indikator persyaratan administrasi guru di sekolah ini tergolong sedang atau kurang efektif, artinya belum sesuai dengan kriteria evaluasi. Ada sebagian guru pembimbing khusus telah memiliki ijazah S1 PLB, namun sebagian besar tidak memiliki. Sebagian besar guru mengajar tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan, hal ini disebabkan kekurangan tenaga guru. Upaya yang dilakukan sekolah dengan rekrutmen guru honor, khususnya guru pembimbing khusus. Guru kelas reguler masih minim dalam mengikuti pelatihan terkait dengan pendidikan inklusif. Sekolah berupaya mengatasi masalah ini dengan meningkatkan kualifikasi pendidikan dan mengikutkan guru dalam berbagai pelatihan.

Hasil evaluasi terhadap indikator kurikulum di SD Banua Anyar 4 kurikulum belum memenuhi kriteria evaluasi. Kurikulum yang disusun belum memperhatikan unsur diferensiasi kurikulum, atau menghargai perbedaan individu siswa. Kandungan kurikulum belum banyak yang menggamit aspek sikap sosial. Sekolah masih dominan mengembangkan aspek kognitif secara klasikal. Kondisi ini dialami sekolah yang baru saja menyelenggarakan

pendidikan inklusif. Perubahan sistem sekolah menyesuaikan kondisi siswa, belum dilakukan secara radikal. Sekolah masih terpengaruh dengan kebijakan pemerintah dalam pendidikan.

Hasil evaluasi terhadap sarana prasarana di SD Banua Anyar 4, belum sesuai dengan kriteria evaluasi. Dari 20 jenis sarana prasarana SD ini memiliki 35% sarana yang dapat digunakan dengan baik. Dari hasil wawancara sekolah masih memerlukan banyak sekali sarana seperti ruang asesmen, aula pertemuan dan ruang kelas juga masih sangat diperlukan tambahan. Poliklinik anak berkebutuhan khusus, dan laboratorium anak berkebutuhan khusus, alat pembelajaran audiovisual menjadi perhatian yang harus dipenuhi oleh sekolah dan Pemerintah.

Hasil evaluasi terhadap indikator pembiayaan, menemukan informasi bahwa pembiayaan di SD Banua Anyar 4 belum sesuai dengan kriteria evaluasi yang ditetapkan. Hasil wawancara dengan kepala sekolah didapatkan informasi bahwa sekolah belum memenuhi standar besaran biaya pendidikan inklusif, belum mengetahui berapa besaran biaya setiap peserta didik. Sekolah memiliki RKAS yang mencantumkan pengeluaran dan pemasukan anggaran secara keseluruhan. Berdasarkan wawancara sumber utama masukan sekolah dari dana BOS pusat sebesar 800 ribu pertahun, persiswa dan dana BOS Daerah sebesar 200 ribu pertahun, setiap siswa.

Hasil evaluasi komponen proses, menemukan informasi sebagai berikut: Kompetensi guru belum sesuai

dengan kriteria evaluasi, minat mengajar guru tinggi atau sesuai dengan kriteria evaluasi. Proses pembelajaran tidak sesuai dengan kriteria evaluasi. Rendahnya potensi guru diakibatkan oleh sebagian besar guru bukan lulusan S1, banyak yang berstatus sebagai guru honorer, proses seleksi guru tidak dilakukan secara professional. Tingginya minat guru dipicu oleh semakin tingginya kesadaran guru menangani pembelajaran bagi siswa berkebutuhan khusus di sekolah reguler. Membantu mereka merupakan amal jariyah yang pahalanya cukup tinggi. Nilai relegius ini menyebabkan guru senang mengajar, ikhlas tanpa pamrih, juga bangga bisa menolong anak berkebutuhan khusus melalui pendidikan. Rendahnya proses pembelajaran akibat sekolah kurang memberikan kesempatan bagi guru untuk mengikuti berbagai pelatihan terkait pendidikan inklusif. Mental guru yang selalu merasa puas terhadap permasalahan pendidikan, membuat guru malas berusaha, dan tidak senang terhadap berbagai tantangan.

Hasil evaluasi terhadap komponen produk, yang meliputi aspek kognitif dan sikap sosial di Banua Anyar 4 menemukan informasi sebagai berikut: Indikator kognitif efektif (sesuai dengan kriteria evaluasi) Hasil ujian nasional selama tiga tahun setelah menjadi sekolah inklusif terus mengalami peningkatan. Artinya walaupun ada anak berkebutuhan khusus masuk kesekolah reguler, tidak akan mempengaruhi rata-rata nilai ujian nasional. Anak berkebutuhan khusus yang mengalami hambatan kognitif tidak mengikuti ujian nasional, mereka mengikuti ujian sekolah saja.

Hasil evaluasi indikator sikap sosial, di SD Banua Anyar 4 menunjukkan kurang kesesuaian dengan kriteria evaluasi (kurang efektif). Berdasarkan hasil angket nilai-nilai positif yang mencerminkan sikap sosial seperti menerima kenyataan bahwa sebagian anak mempunyai kebutuhan yang berbeda masih rendah. Selain itu hubungan pertemanan untuk saling bantu dan bermitra juga belum dilakukan dengan baik. Budaya sikap sosial yang baik ini belum menginternalisasi pada diri anak. Sekolah yang baru tahun 2012 menyelenggarakan pendidikan inklusif memicu kondisi di atas. Sekolah hendaknya terus mendorong para guru untuk menggamit sikap sosial dalam belajar di kelas maupun di luar kelas.

Hasil evaluasi terhadap komponen *outcome*, menemukan informasi bahwa *outcome* di SD Banua Anyar 4 sesuai dengan kriteria evaluasi. Anak berkebutuhan khusus lulusan SD Banua Anyar 80% bisa melanjutkan studi ke jenjang sekolah yang lebih tinggi. Sebaran tempat studi lanjut adalah ke sekolah inklusif dan ke SMPLB. Ditinjau dari sisi *outcome* program pendidikan inklusif di SD Banua Anyar 4 perlu dilanjutkan.



## BAGIAN 12

### ANALISIS HASIL PENELITIAN EVALUASI PROGRAM PENDIDIKAN INKLUSIF DI SD KUIN SELATAN 3

Evaluasi pada komponen konteks menemukan hal-hal sebagai berikut: tujuan pendidikan inklusif di sekolah ini belum sesuai kriteria evaluasi. Tujuan pendidikan inklusif yang telah ditetapkan berdasarkan Permendiknas nomor 70 tahun 2009 sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan inklusif, sudah tidak sesuai dengan realita sekolah saat ini. Hasil wawancara dengan berbagai pihak baik dari pengambil kebijakan, unsur masyarakat dan sekolah menyatakan bahwa tujuan pendidikan inklusif tidak sekedar memasukkan anak berkebutuhan khusus di sekolah reguler. Akan tetapi pendidikan inklusif bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang ramah bagi semua peserta didik. Hasil evaluasi terhadap landasan formal, menemukan informasi bahwa sekolah memiliki dokumen landasan formal penyelenggaraan pendidikan inklusif, yaitu Permendiknas nomor 70 tahun 2009, dari hasil wawancara sebagian besar komponen sekolah telah memahami peraturan tersebut.

Hasil evaluasi terhadap pembinaan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, belum sesuai dengan kriteria evaluasi. Alur pembinaan yang jelas baik dari pusat, propinsi, kota, sampai ke alur pembinaan di sekolah belum ada kejelasan. Hasil evaluasi terhadap analisis kebutuhan dan kelayakan sekolah telah sesuai dengan kriteria evaluasi. Berdasarkan rekomendasi para pakar

melalui simposium, seminar dan kesepakatan bersama perlu mendukung terlaksananya pendidikan inklusif. Berdasarkan hasil analisis SWOT sekolah memiliki peluang besar menjadi penyelenggara pendidikan inklusif. Dari hasil wawancara baik dengan unsur sekolah, dan masyarakat merekomendasikan pentingnya kehadiran pendidikan inklusif, untuk menghindarkan deskriminasi pendidikan.

Hasil evaluasi terhadap indikator input, menemukan informasi sebagai berikut: Rekrutmen siswa berkebutuhan khusus di SD Kuin Selatan 3 belum memenuhi kriteria evaluasi yang ditentukan. Anak berkebutuhan khusus yang ditemukan di sekolah ini sangat sedikit. Sekolah kurang banyak melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu sekolah belum memiliki panitia khusus serta tim ahli dalam rekrutmen anak berkebutuhan khusus. Rendahnya sosialisasi, rendahnya komitmen sekolah ternyata sangat mempengaruhi perhatian masyarakat sekitar sekolah untuk menyekolahkan anak.

Hasil evaluasi aspek kondisi sosial ekonomi orang tua di sekolah ini tergolong menengah kebawah. Indikator ini belum mencapai kriteria evaluasi yang ditetapkan. Hasil evaluasi terhadap indikator kondisi sosial ekonomi orang tua, menemukan informasi bahwa sebagian besar anak masih memiliki orang tua yang lengkap (ayah dan ibu), sebagian besar ayah anak lulusan SMA sederajat, sebagian besar ibu siswa bekerja sebagai ibu rumah tangga, terbanyak ayah bekerja sebagai wiraswasta, berpenghasilan dibawah 3 juta, sebagian besar siswa memiliki rumah sendiri, dan sebagian besar siswa memiliki kendaraan yang dipergunakan untuk

mengantar ke sekolah. Hasil wawancara dengan kondisi sosial ekonomi orang tua yang kelas menengah kebawah, akan sulit mendukung sepenuhnya pembiayaan sekolah. Data ini diperkuat dengan hasil wawancara bahwa kondisi sosial ekonomi orang tua di SD Kuin Selatan 3 pada umumnya berasal dari keluarga menengah ke bawah.

Hasil evaluasi terhadap persyaratan administrasi guru, di SD ini belum memenuhi kriteria evaluasi. Guru pendamping khusus sebagian besar belum S1 PLB, Sebagian besar guru mengajar tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan, hal ini disebabkan kekurangan tenaga guru. Upaya yang dilakukan sekolah dengan rekrutmen guru honor, khususnya guru pembimbing khusus. Guru kelas reguler belum banyak mengikuti pelatihan terkait dengan pendidikan inklusif. Sekolah berupaya mengatasi masalah ini dengan meningkatkan kualifikasi pendidikan khususnya guru pendamping khusus dan mengikutkan guru reguler dalam berbagai pelatihan terkait pengembangan pendidikan inklusif.

Hasil evaluasi terhadap indikator kurikulum, mendapatkan informasi bahwa aspek ini sesuai dengan kriteria evaluasi yang ditetapkan. Upaya sekolah untuk menyesuaikan kurikulum terlihat dari banyaknya pertemuan, baik yang dilakukan melalui forum kepala sekolah maupun forum guru dalam kegiatan KKG sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.

Sarana dan prasarana di SD ini belum sesuai dengan kriteria evaluasi. Sarana yang lengkap dan bisa digunakan

dengan baik hanya 45%, sarana yang ada tetapi tidak bisa digunakan sebesar 25%, sarana prasarana yang belum dimiliki sekolah sebesar 35%. Kekurangan sarana prasarana ini telah diupayakan penambahannya oleh pihak sekolah melalui pengajuan proposal kepada Pemerintah pusat maupun propinsi. Namun sampai saat ini belum pernah terealisasi. Rendahnya pemenuhan sarana prasarana tidak bisa hanya dibebankan sekolah. Pemerintah harus menjadi harapan sekolah dalam pemenuhan sarana dan prasarana sekolah inklusif.

Hasil evaluasi terhadap indikator pembiayaan, menemukan informasi bahwa pembiayaan di SD Kuin Selatan 3 belum sesuai dengan kriteria evaluasi yang ditetapkan. Hasil wawancara dengan kepala sekolah didapatkan informasi bahwa sekolah belum memenuhi standar besaran biaya pendidikan inklusif, belum mengetahui berapa besaran biaya setiap peserta didik. Sekolah memiliki RKAS yang mencantumkan pengeluaran dan pemasukan anggaran secara keseluruhan. Namun sekolah tidak merinci berapa besaran anggaran untuk masing-masing siswa. Khususnya biaya bagi anak berkebutuhan khusus. Perhatian Pemerintah Propinsi maupun kota juga masih rendah dalam hal pembiayaan. Seperti misalnya penggajian guru honor, masih dibebankan kepada orang tua anak berkebutuhan khusus.

Hasil evaluasi komponen proses, menemukan informasi sebagai berikut: Kompetensi guru di SD ini belum sesuai dengan kriteria evaluasi. Kemampuan guru dalam diferensiasi kurikulum dan pelaksanaan penilaian fleksibel

membuat komponen ini bernilai rendah. Kurangnya kegiatan guru dalam mengikuti pelatihan, latar belakang pendidikan menjadi faktor penyebab rendahnya kompetensi guru. Upaya yang terus dilakukan sekolah, memaksimalkan guru untuk sering mengikuti pelatihan baik di pusat maupun di tingkat daerah. Minat mengajar guru di SD Kuin selatan 3 memenuhi kriteria evaluasi. Berdasarkan hasil angket maupun wawancara di SD ini guru merasa senang dalam melakukan pembelajaran, mereka bekerja penuh keiklasan, para guru bangga bisa memberikan pelayanan bagi anak berkebutuhan khusus. Bekerja dengan hati itulah yang membuat anak berkebutuhan khusus merasa diperhatikan oleh guru di kelas inklusif. Tingginya minat mengajar guru di kelas inklusif, karena tumbuhnya kesadaran yang tinggi untuk menolong anak berkebutuhan khusus. Hasil wawancara dengan guru menemukan informasi bahwa para guru disekolah ini mengajar dengan rasa penuh keiklasan.

Hasil evaluasi terhadap komponen proses pembelajaran di sekolah ini telah sesuai dengan kriteria evaluasi. Pembelajaran dilakukan guru dengan baik. Strategi pembelajaran yang tepat, pengkondisian siswa dan penguasaan materi baik. Berdasarkan wawancara dengan guru sekolah ini sering melakukan KKG, disitulah para guru mengembangkan kemampuan mengajarnya.

Hasil evaluasi komponen produk, menemukan hal sebagai berikut: Kemampuan kognitif sesuai dengan kriteria evaluasi. Sedangkan aspek sosial belum sesuai dengan kriteria evaluasi. Hasil ujian nasional selama tiga tahun setelah menjadi sekolah inklusif terus mengalami

peningkatan. Kehadiran anak berkebutuhan khusus masuk ke sekolah reguler, tidak akan mempengaruhi rata-rata nilai ujian nasional. Anak berkebutuhan khusus yang mengalami hambatan kognitif tidak mengikuti ujian nasional, mereka mengikuti ujian sekolah saja.

Berdasarkan hasil angket indikator terkait cenderung bekerja sama daripada bersaing, menunjukkan 25,92% responden yang sering bekerja sama daripada bersaing, 20% jarang bekerja sama daripada bersaing, 26,67% tidak pernah bekerja sama daripada bersaing. Pola pikir warga sekolah persaingan secara klasikal masih sangat mendominasi. Dalam pendidikan inklusif persaingan lebih di fokuskan dengan dirinya sendiri bukan dengan orang lain. Hasil wawancara kesulitan guru dalam pembelajaran yang melibatkan tutorial teman sebaya. Banyak anak reguler, tidak mau membantu pemecahan konsep pembelajaran kepada anak berkebutuhan khusus. Takut mereka tersaingi. Budaya sikap sosial yang baik ini belum menginternalisasi pada diri anak. Sekolah yang tergolong belum lama menyelenggarakan pendidikan inklusif memicu kondisi di atas. Sekolah hendaknya terus mendorong para guru untuk menggamit sikap sosial dalam belajar di kelas maupun di luar kelas.

Hasil evaluasi terhadap komponen *outcome*, menemukan informasi bahwa *outcome* di SD Kuin Selatan 3 sesuai dengan kriteria evaluasi. Anak berkebutuhan khusus lulusan SD ini 100% bisa melanjutkan studi ke jenjang sekolah yang lebih tinggi. Ditinjau dari sisi *outcome* program pendidikan inklusif di SD Kuin Selatan perlu dilanjutkan.

## BAGIAN 13

### ANALISIS DATA HASIL EVALUASI PROGRAM PENDIDIKAN INKLUSIF DI EMPAT SEKOLAH (GABUNGAN) SEBAGAI UPAYA TRIANGULASI

Analisis data hasil evaluasi program pendidikan inklusif keempat SD di Kota Banjarmasin, diperoleh melalui observasi, angket, studi dokumentasi dan wawancara. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara paralel sebagai upaya konfirmasi dan triangulasi data. Hasil triangulasi dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Aspek konteks yang meliputi: Tujuan, landasan formal, pembinaan, analisis kebutuhan dan kelayakan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.

Hasil evaluasi pada indikator apakah tujuan yang ditetapkan sesuai dengan realita sekolah saat ini? Data yang terkumpul menunjukkan keempat sekolah menyatakan tujuan pendidikan inklusif seperti yang tercantum pada Permendiknas Nomor 70 tahun 2009 sebagai landasan operasional penyelenggaraan pendidikan inklusif tidak lagi relevan dengan kondisi sekolah saat ini. Artinya indikator tujuan rendah atau tidak sesuai dengan kriteria evaluasi yang ditetapkan. Hasil wawancara, baik dari pengambil kebijakan, sekolah maupun masyarakat menyatakan bahwa tujuan pendidikan inklusif tidak sekedar memasukkan anak berkebutuhan khusus di sekolah reguler. Tetapi lebih dari itu pendidikan inklusif bertujuan untuk menciptakan

pembelajaran yang ramah bagi semua peserta didik, baik yang berkebutuhan khusus, maupun yang reguler pada umumnya.

Hasil evaluasi terhadap indikator landasan formal penyelenggaraan program pendidikan inklusif. Keempat SD berada pada aktualitas tinggi, artinya sesuai dengan kriteria evaluasi yang ditetapkan. Semua sekolah memiliki dokumen Permendiknas Nomor 70 tahun 2009, sebagai landasan formal penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Banjarmasin. Terhadap pemenuhan pemahaman dan persepsi peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis pelaksanaan pendidikan inklusif dari indikator kriteria yang dievaluasi didapatkan data sebagai berikut: pada pemahaman terhadap Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Nomor 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusif, semua sekolah sudah memahami dan melaksanakan pengkajian terhadap Permen tersebut.

Hasil evaluasi terhadap indikator pembinaan SD penyelenggara pendidikan inklusif di Kota Banjarmasin, menunjukkan keempat SD tidak terdapat alur pembinaan yang jelas, baik tingkat pusat, propinsi, kota maupun tingkat sekolah. Artinya indikator pembinaan tidak sesuai dengan kriteria evaluasi yang ditetapkan. Alur pembinaan sekolah inklusif di tingkat sekolah dilakukan oleh pengawas SLB, bukan pengawas sekolah inklusif, pembinaan di tingkat Kabupaten/kota dirangkap oleh Kepala Bidang jenjang sekolah masing-masing, karena memang di Kota Banjarmasin tidak memiliki Kabit pendidikan inklusif tersendiri. Demikian juga di tingkat propinsi, pembinaan pendidikan inklusif



masih ditipkan di Kepala Bidang masing-masing jenjang sekolah. Pembinaan di tingkat pusat masih di kelola oleh Direktur pendidikan khusus dan layanan khusus, belum ada yang khusus menangani pendidikan inklusif.

Hasil evaluasi, terhadap indikator analisis kebutuhan masyarakat dan kelayakan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Berdasarkan kajian para pakar dan analisis SWOT, keempat sekolah SD penyelenggara pendidikan inklusif di Kota Banjarmasin, memiliki aktualitas tinggi. Artinya indikator kebutuhan sesuai dengan kriteria evaluasi yang ditetapkan. Pandangan para pakar yang dikaji melalui seminar, simposium maupun kesepakatan bersama, mengindikasikan perlunya pendidikan inklusif untuk mewujudkan pendidikan yang tidak deskriminatif. Anak berkebutuhan dapat mengakses pendidikan di sekolah reguler untuk mendapatkan kesamaan hak memperoleh pendidikan yang bermutu. Berdasarkan hasil analisis SWOT terhadap empat sekolah SD di Kota Banjarmasin, semua berpeluang besar menjadi penyelenggara pendidikan inklusif. Animo masyarakat terhadap hadirnya pendidikan inklusif sangat besar, tentu sekolah akan menjadi sasaran pilihan masyarakat khususnya orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Pendidikan inklusif ditunggu kehadirannya, karena banyak orang tua yang enggan menyekolahkan anaknya di SLB. Pendidikan inklusif menjadi harapan orang tua, agar anak-anak mereka mendapatkan akses pendidikan yang lebih baik. Dengan sekolah di dekat lingkungan rumah, maka dana yang dibutuhkan orang tua lebih murah dan mudah dijangkau.

2. Evaluasi terhadap komponen input meliputi: Rekrutmen siswa, kondisi sosial ekonomi orang tua, persyaratan administrasi guru, sarana prasarana dan pembiayaan.

Pada aspek rekrutmen siswa berkebutuhan khusus menunjukkan kesesuaian dengan kriteria evaluasi, terjadi di SDN Banua Anyar 8, sementara SDN Gadang 2 SD Banua Anyar 4 dan SD Kuin Selatan 3 belum memenuhi kriteria evaluasi. Di SD Banua Hanyar 8 yang memenuhi kriteria evaluasi dalam aspek rekrutmen siswa berkebutuhan khusus, sekolah terbukti telah melaksanakan standar rekrutmen seperti membentuk tim/panitia khusus rekrutmen, melakukan sosialisasi secara intensif terhadap masyarakat dan melibatkan tim ahli seperti psikolog maupun dokter. Sekolah menemukan anak berkebutuhan khusus melalui dua cara yaitu dengan melihat nilai raport dan informasi guru kelas, dan melalui pendaftaran siswa baru. Sekolah ini tidak banyak menemukan kendala dalam rekrutmen siswa berkebutuhan khusus. Hanya masih ada orang tua murid yang tidak mau menerima ketika anaknya terindikasi anak berkebutuhan khusus. Adapun tiga sekolah yang belum memenuhi kriteria evaluasi, tidak memiliki tim khusus/panitia khusus dan juga tidak melibatkan tim ahli. Sosialisasi masyarakat yang sangat kurang menyebabkan orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus tidak mendapatkan akses informasi. Kurangnya tenaga guru yang memiliki ijazah S1 PLB menyebabkan sekolah sulit melakukan identifikasi dan asesmen terhadap anak berkebutuhan khusus.

Indikator kondisi sosial ekonomi orang tua, keempat SD penyelenggara pendidikan inklusif di Kota Banjarmasin memiliki aktualitas sedang, artinya masih belum sesuai dengan kriteria evaluasi yang ditetapkan. Keempat SD di Kota Banjarmasin sebagian besar siswa masih memiliki ayah dan ibu, sebagian besar orang tua siswa lulusan SMA sederajat, terbanyak ayah siswa bekerja di swasta, pekerjaan ibu siswa didominasi sebagai ibu rumah tangga, sebagian besar orang tua memiliki penghasilan dibawah 3 juta, dan sebagian besar siswa diantar ke sekolah memakai sepeda motor. Kondisi sosial ekonomi orang tua pada tingkat menengah kebawah, memicu kurangnya perhatian masyarakat terhadap kebutuhan sekolah anak. Kondisi sosial ekonomi dibawah rata-rata tidak cukup berpengaruh bagi orang tua untuk terus memperhatikan pendidikan anaknya. Tentu dengan keterbatasan ekonomi, orang tua tidak cukup mampu membantu kelancaran pendidikan inklusif di sekolah.

Pada indikator persyaratan administrasi guru, keempat SD di Kota Banjarmasin belum sesuai dengan kriteria evaluasi. Semua sekolah masih mengeluhkan sulitnya mencari guru yang memiliki ijazah S1 PLB sebagai guru pembimbing khusus, masih terbatasnya jumlah guru di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif menyebabkan guru yang mengajar tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan. Guru di sekolah yang dievaluasi masih jarang mengikuti pelatihan/workshob atau seminar terkait dengan pendidikan inklusif. Upaya yang dilakukan kepala sekolah untuk mengatasi kendala persyaratan administrasi guru,

antara lain mengikutkan sebagian guru dalam peningkatan kualifikasi pendidikan, dan mengikutkan berbagai pelatihan terkait pendidikan inklusif baik yang diselenggarakan secara Nasional maupun lokal.

Hasil evaluasi pada indikator kurikulum, dapat diuraikan sebagai berikut: Dua sekolah yaitu SD Banua Anyar 8 dan SD Kuin selatan 3, aktualitas kurikulum tinggi, atau sesuai dengan kriteria evaluasi. Dua sekolah yaitu SD Gadang 2 dan Banua Anyar 4 sekolah menunjukkan pelaksanaan kurikulum di sekolah masih rendah, atau belum sesuai dengan kriteria evaluasi. Di SD Banua Anyar 8 kurikulum berdiferensiasi 100% telah dilakukan sekolah, kurikulum yang berorientasi peserta didik 60% dan menggamit sikap sosial sebanyak 84%, fleksibilitas kurikulum dilaksanakan sekolah sebesar 80%. Data ini hampir sama dengan di SD Kuin Selatan 3. Sedangkan di SD Gadang 2 dan di SD Banua Anyar 4 indikator kurikulum belum sesuai dengan kriteria evaluasi yang ditetapkan. Kedua SD ini perolehan rendah pada aspek kurikulum berdiferensiasi, dan fleksibilitas kurikulum. Sekolah masih kesulitan untuk melakukan penyesuaian kurikulum dengan perbedaan individu. Sekolah masih rendah dalam melakukan fleksibilitas kurikulum.

Indikator pemenuhan sarana dan prasarana: Hanya satu SD yaitu SD Banua Anyar 8 yang memiliki standar sarana prasarana sesuai kriteria evaluasi. Sedangkan tiga SD belum memenuhi standar sarana prasarana yang ditetapkan. SD yang memenuhi standar sarana prasarana sesuai kriteria evaluasi, memiliki 75% sarana yang bisa digunakan dengan baik. Dan hanya 25% sarana dan prasarana yang belum

terpenuhi seperti poliklinik dan buku penunjang berkaitan dengan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Ketiga SD yang belum memenuhi kriteria sarana dan prasarana, masih banyak mengalami kekurangan sarana seperti laboratorium, ruang asesmen, aula pertemuan dan alat peraga pembelajaran anak berkebutuhan khusus. Upaya sekolah untuk mengatasi kekurangan sarana prasarana, dengan cara meminta bantuan kepada Pemerintah Pusat maupun Propinsi. Namun selama ini bantuan tersebut juga belum terpenuhi.

Indikator terakhir pada aspek input adalah pembiayaan, keempat SD penyelenggara pendidikan inklusif di Kota Banjarmasin masih mengeluhkan rendahnya pembiayaan. Aspek pembiayaan belum memenuhi kriteria evaluasi yang ditetapkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah, sumber pendanaan mengandalkan bantuan operasional sekolah (BOS) pusat sebesar Rp.800.000 per-anak pertahun, dan BOS Daerah sebesar Rp.200.000 pertahun. Kendala yang paling berat dialami empat SD penyelenggara pendidikan inklusif adalah menanggung honor guru pendamping khusus, yang berstatus guru honorer. Sekolah meminta bantuan sukarela kepada orang tua murid, yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Orang tua menanggung honor guru pendamping khusus antara Rp. 200.000 sampai Rp.800.000 perbulan.

3. Komponen proses: meliputi kompetensi guru, minat guru mengajar dan proses pembelajaran di kelas inklusif

Indikator kompetensi guru inklusif mencakup, kemampuan guru dalam hal diferensiasi kurikulum, memodifikasi kurikulum, melakukan pembelajaran individual, melaksanakan pembelajaran kooperatif, memotivasi belajar, melakukan penilaian yang fleksibel. Hasil evaluasi pada indikator kompetensi guru di dua SD yaitu SD Banua Anyar 8 dan SD Gadang 2 terletak pada aktualitas baik atau telah memenuhi kriteria evaluasi yang ditetapkan. Namun belum sempurna, misalnya di SD Banua Anyar 8, guru masih perlu dilatih menyusun diferensiasi kurikulum/ menyesuaikan perbedaan individu. Guru masih perlu pelatihan dalam melakukan penilaian yang fleksibel. Kekurangan sarana prasarana di SD Banua Anyar 8 tidak memberikan pengaruh yang berarti bagi guru untuk menyampaikan pembelajaran di kelas. Demikian juga di SD Gadang 2, guru masih perlu dilatih memodifikasi kurikulum, dan cara memotivasi belajar siswa. Data kompetensi guru di SD Banua Anyar 4 dan di SD Kuin Selatan 3 masih rendah atau belum sesuai dengan kriteria evaluasi yang ditetapkan. Guru masih banyak mengalami kesulitan dalam melakukan diferensiasi kurikulum, memodifikasi kurikulum sesuai kebutuhan anak, melakukan pembelajaran individual dan penilaian yang fleksibel. Upaya sekolah untuk meningkatkan kompetensi guru, dilakukan dengan cara mengirimkan guru dalam kegiatan workshob yang dilakukan Dinas Pendidikan Propinsi maupun Kota Banjarmasin. Selain itu juga mengikutkan guru dalam peningkatan kualifikasi

pendidikan di PLB FKIP Universitas Lambung Mangkurat.

Hasil evaluasi pada indikator minat mengajar guru, yang ditinjau dari kesenangan dalam mengajar, menerima kehadiran anak berkebutuhan khusus untuk belajar bersama di kelas, mengajar dengan penuh keiklasan tanpa pamrih, kebanggaan mengajar di kelas inklusif dan keterlibatan guru dalam pembelajaran. Keempat SD penyelenggara pendidikan inklusif di Kota Banjarmasin menunjukkan minat mengajar yang baik, artinya sesuai dengan kriteria evaluasi yang ditetapkan. Pemenuhan kriteria evaluasi pada indikator minat guru dalam mengajar, mengindikasikan bahwa sebenarnya semua sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di Kota Banjarmasin memiliki komitmen yang tinggi dalam melaksanakan tugas mengajar. Mereka melakukan tugas ini tanpa pamrih dan dilandasi kesadaran dari dalam diri.

Hasil evaluasi pada indikator pelaksanaan proses pembelajaran di kelas inklusif, di dua SD yaitu SD Banua Anyar 8, dan SD Banua Anyar 4 masih rendah, atau belum sesuai dengan kriteria evaluasi yang ditetapkan. Di SD Banua Anyar 8 guru masih lemah dalam mengkondisikan siswa belajar, guru tidak melakukan asesmen awal untuk menentukan potensi awal dan kebutuhan siswa, akibatnya akan sulit menentukan strategi pembelajaran yang tepat. Di SD Banua Anyar 4 guru masih rendah dalam penguasaan bahan ajar dan cara pemberian tugas. Di SD Gadang 2 dan SD Kuin Selatan 3 guru melakukan kegiatan pembelajaran dengan baik, sesuai dengan kriteria evaluasi yang ditetapkan. Guru mampu mengkondisikan siswa dalam

belajar, menggunakan strategi dan metode mengajar sesuai dengan kebutuhan anak, menguasai bahan ajar dan intensitas pemberian tugas kepada siswa sudah baik, artinya sesuai dengan kriteria evaluasi yang ditetapkan.

4. Komponen produk meliputi kemampuan kognitif dan sikap sosial.

Data kemampuan kognitif keempat SD penyelenggara pendidikan inklusif di Kota Banjarmasin, diambil dari nilai ujian nasional mata pelajaran IPA pada tiga tahun yaitu tahun 2012, tahun 2014, dan tahun 2016, saat menjadi sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Keempat SD yang dievaluasi menunjukkan peningkatan nilai ujian nasional dari tahun ketahun. Artinya empat sekolah sesuai dengan kriteria evaluasi yang ditetapkan. Ternyata menyelenggarakan pendidikan inklusif tidak mempengaruhi peningkatan nilai ujian nasional. Anak berkebutuhan khusus yang mengalami hambatan kognitif tidak perlu mengikuti ujian nasional. Maka sebenarnya anak berkebutuhan khusus yang ada di sekolah reguler, tidak mempengaruhi keberhasilan ujian nasional bagi anak reguler pada umumnya.

Data sikap sosial, terurai dalam enam indikator, yaitu (1) berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain, (2) membantu satu sama lain untuk belajar dan berfungsi, (3) saling tenggang rasa, (4) menerima kenyataan bahwa sebagian anak mempunyai kebutuhan yang berbeda dari mayoritas, (5) cenderung bekerjasama daripada bersaing, (6) semua anak mempunyai rasa memiliki dan bermitra. Hasil evaluasi



terhadap empat SD penyelenggara pendidikan inklusif di Kota Banjarmasin menunjukkan, bahwa di SD Banua Hanyar 8 dan di SD Kuin Selatan 3 sikap sosial tergolong tinggi atau sesuai dengan kriteria evaluasi yang ditetapkan. Seringnya berinteraksi antara siswa berkebutuhan khusus dengan siswa reguler, ataupun dengan masyarakat di sekitar rumah, membuat mereka mengembangkan sikap sosial yang positif. Di SD Gadang 2 dan SD Banua Anyar 4 sikap sosial tergolong sedang atau belum sesuai dengan kriteria evaluasi yang ditetapkan. Di SD yang sikap sosialnya belum sesuai dengan kriteria evaluasi, Berdasarkan angket terlihat rendahnya siswa untuk saling membantu untuk belajar dan berfungsi, kurangnya sikap tenggang rasa, sebagian besar siswa tidak menyadari bahwa ada temannya yang berbeda dari siswa mayoritas dan masih cenderung bersaing daripada bekerjasama. Sekolah mengalami kesulitan dalam membiasakan sikap sosial yang baik kepada para peserta didik.

#### 5. Hasil Evaluasi *Outcome* (kelanjutan studi anak berkebutuhan khusus).

Data hasil evaluasi outcome pendidikan inklusif SD di Kota Banjarmasin, menunjukkan bahwa keempat sekolah, yaitu SD Banua Anyar 8, SD Gadang 2, SD Banua Anyar 4 dan SD Kuin Selatan 3, telah sesuai dengan kriteria evaluasi yang ditetapkan. Anak berkebutuhan khusus di SD Banua Anyar 8 yang melanjutkan studi sebesar 89%, di SD Gadang 2 sebesar 100%, di SD Banua Anyar 4 sebesar 80%, di SD

Kuin Selatan 3 sebesar 100%. Anak berkebutuhan khusus lulusan sekolah dasar penyelenggara pendidikan inklusif di Kota Banjarmasin dapat melanjutkan studi ke SMP inklusif, ke SLB, ataupun ke lembaga lain seperti pesantren. Berdasarkan tinjauan outcome maka program pendidikan inklusif di Kota Banjarmasin perlu dilanjutkan.

Evaluasi konteks memberikan informasi bagi pengambil keputusan dalam perencanaan atau program yang akan *on-going*. Selain itu, konteks juga bermaksud bagaimana rasionalnya suatu program. Analisis ini akan membantu dalam merencanakan keputusan, menetapkan kebutuhan dan merumuskan tujuan program secara lebih terarah dan demokratis. Evaluasi context program pendidikan inklusif mencakup lima indikator yaitu tujuan, landasan, pembinaan, analisis kebutuhan, kelayakan program inklusi.

Hasil penelitian terkait evaluasi context penyelenggaraan pendidikan inklusif di Banjarmasin, di visualisasikan kedalam tabel berikut:

<b>Indikator</b>	<b>Banua Anyar 8</b>	<b>Gadang 2</b>	<b>Banua Anyar 4</b>	<b>Kuin Selatan 3</b>
Tujuan	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah
Landasan	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
Pembinaan	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah
Analisis kebutuhan	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
Kelayakan program inklusif	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi

## a. Tujuan

Tujuan pendidikan inklusif masih mengacu pada permendiknas nomor 70 tahun 2009, yaitu: (1) memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya, (2) mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik. Berdasarkan kondisi riil di lapangan tujuan pendidikan pendidikan inklusif menurut Permendiknas No 70 tahun 2009, mulai tidak relevan. Tujuan pendidikan inklusif mulai bergeser tidak hanya sekedar memasukkan anak berkebutuhan khusus di sekolah reguler. Semua warga sekolah tumbuh sikap persahabatan yang saling menghargai. Hal ini sesuai dengan pendapat Skjorten tujuan pendidikan inklusif adalah mengurangi kekhawatiran dan membangun, menumbuhkan loyalitas dalam persahabatan serta membangun sikap memahami dan menghargai.<sup>1</sup> Hal ini seperti yang dikemukakan oleh informan pada kesempatan wawancara yaitu: tujuan pendidikan inklusif untuk mewujudkan pembelajaran yang ramah bagi semua peserta didik. Hasil wawancara terhadap informan di SD gadang 2, tentang apa menurut anda tujuan pendidikan inklusif adalah mewujudkan pembelajaran yang bermakna bagi semua peserta didik. Tujuan pendidikan inklusif

---

1 Skjorten, *Menuju Inklusi Pendidikan Kebutuhan Khusus Sebuah Pengantar* (Bandung: Program Pascasarjana UPI, 2003), h. 156.

ternyata bagaimana pembelajaran itu menjadi bermakna, semua orang bisa saling berpartisipasi dan berprestasi. Hal ini senada dengan pendapat bahwa tanggung jawab moral pendidikan inklusif adalah untuk memastikan bahwa kelompok-kelompok yang secara statistik paling “beresiko” dipantau secara hati-hati, dan jika perlu langkah-langkah yang diambil untuk memastikan kehadiran, partisipasi dan prestasi mereka dalam sistem pendidikan.<sup>2</sup> Informan di SD kuin selatan, mengatakan bahwa, tujuan pendidikan inklusif sebenarnya untuk mewujutkan pembelajaran yang ramah, dengan membentuk berbagai karakter yang terpuji.

Program pendidikan inklusif di Kalimantan Selatan, khususnya di wilayah Banjarmasin ini awalnya bertujuan untuk memberikan kesempatan pada anak berkebutuhan khusus, untuk bisa mengenyam pendidikan di lembaga pendidikan yang keberadaanya di dekat dengan rumah anak. Jadi anak berkebutuhan khusus tidak lagi harus di tampung di SLB yang berada di Kabupaten, yang memang jauh dari tempat tinggal anak berkebutuhan khusus yang berada di desa-desa. Untuk menaungi keberadaan pendidikan inklusif ini Gubernur Kalimantan Selatan telah mengeluarkan Perda No 065 tahun 2012. yang mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan Inklusif di Kalimantan Selatan.

---

2 Mel Ainscow, *Developing Inclusive Education Systems: What are the Levers for Change?* (Paper to be presented at conference ‘Inclusive Education: A Framework for Reform’ in Hong Kong: The University of Manchester, 2003), h. 10.

Tujuan pendidikan inklusif yang mengacu pada Permendiknas nomor 70 tahun 2009 belum teraktualisasi dengan baik. Hal tersebut terlihat pada tabel bahwa tingkat aktualisasi tujuan pendidikan inklusif masih rendah pada semua sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di Banjarmasin (SD Banua Anyar 8, SD Gadang 2, SD Banua Anyar 4, dan SD Kuin Selatan).

Tujuan ini, masih sangat dominan diarahkan untuk melindungi anak berkebutuhan khusus baik yang super dan yang under agar mereka memperoleh pendidikan di sekolah umum. Mereka mendapatkan perlakuan tanpa deskriminasi dalam hal pendidikan. Tujuan pendidikan inklusif yang tertera pada permendiknas No 70 tahun 2009 nampaknya sudah tidak cocok di era saat ini. Dengan kehadiran anak berkebutuhan khusus di sekolah reguler, ternyata juga akan mempengaruhi sikap dan mental peserta didik lain pada umumnya. Mereka lebih menghargai perbedaan, saling tolong menolong kerja sama dan saling membantu. Selain itu juga mempengaruhi sistem sekolah seperti kurikulum dan penilaian untuk menyesuaikan kondisi setiap peserta didik. Disinilah diperlukan pembelajaran yang ramah anak, sistem yang menghargai perbedaan individu.

Menurut Skjorten pendidikan inklusif adalah konsep pendidikan yang merangkul semua anak tanpa kecuali, Inklusi berasumsi bahwa hidup dan belajar bersama adalah suatu cara yang lebih baik, yang dapat memberikan keuntungan bagi setiap orang, bukan hanya anak-anak yang

diberi label sebagai yang memiliki suatu perbedaan.<sup>3</sup> Untuk itulah, guru memiliki tanggung jawab penuh terhadap proses pelaksanaan pembelajaran di kelas. Dengan demikian guru harus memiliki kemampuan dalam menghadapi banyaknya perbedaan peserta didik.

Berdasarkan pendapat dan realita dilapangan, dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan inklusif untuk memasukkan anak berkebutuhan khusus dan anak cerdas istimewa seperti yang tercantum dalam Permendiknas Nomor 70 tahun 2009, sudah tidak cocok lagi diterapkan di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di era sekarang. Pendidikan inklusif harus memiliki tujuan untuk menciptakan pembelajaran yang ramah bagi semua peserta didik, baik yang berkebutuhan khusus maupun yang reguler.

## **b. Landasan**

Landasan penyelenggaraan pendidikan Inklusif di Kota Banjarmasin adalah UU No.20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional pengganti UU no.2 tahun 1989, yang merupakan payung hukum hak dan kewajiban warga negara dalam memperoleh pendidikan semakin signifikan. Landasan tersebut dikaji melalui UU No. 20 tahun 2003 pada Bab IV bagian kesatu pasal 5 ayat 4 mengamanatkan bahwa "warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus" Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak

---

3 Skjorten, *Menuju Inklusi Pendidikan Kebutuhan Khusus Sebuah Pengantar* (Bandung: Program Pascasarjana UPI, 2003), h. 137.

mendapat layanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya. Penjabaran operasional UU Sisdiknas terutama yang mengatur tentang pendidikan inklusif di atur dalam peraturan menteri pendidikan nasional nomor 70 tahun 2009. Dalam pasal 3 yaitu, Setiap peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berhak mengikuti pendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Operasiional permendiknas nomor 70 tahun 2009 ini ditindak-lanjuti oleh Direktorat pendidikan khusus dan layanan khusus (PKLK) buku Pedoman Penyelenggaraan Program Pendidikan Inklusif. Hadirnya buku pedoman tersebut memberikan petunjuk pelaksanaan bagaimana praktik penyelenggaraan program inklusif di sekolah dilaksanakan dengan benar sesuai prosedur yang baku. Payung hukum penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kalimantan secara khusus diatur dalam peraturan Gubernur nomor. 065 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, pendidikan inklusif, pendidikan anak cerdas istimewa dan/atau bakat istimewa lembaga pendukung pendidikan.

Landasan pendidikan inklusif hendaknya mengayomi semua masyarakat tanpa deskriminasi. Hal ini senada dengan pendapat bahwa landasan yang memayungi pendidikan inklusif mampu memberikan manfaat untuk semua anak tanpa deskriminasi, membantu menciptakan masyarakat yang inklusif.<sup>4</sup> Landasan pendidikan inklusif

---

4 World Conference On Special Needs Education: *Access And Quality*

yang menjadi pedoman empat SD di Banjarmasin masih tetap aktual, dan dapat digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Hal ini terbukti empat sekolah menyatakan aktualisasi landasan pendidikan inklusif masih tinggi. Keempat SD penyelenggara program pendidikan inklusif di Kota Banjarmasin, menyelenggarakan program berdasarkan petunjuk langsung oleh Direktorat PKLK Dikdas. yang ditembuskan kepada Dinas Propinsi Kalimantan Selatan.

### **c. Pembinaan**

Mekanisme pembinaan di tingkat pusat oleh Direktorat PKLK Dikdas, tingkat propinsi oleh Kepala Dinas Pendidikan Propinsi cq. Kepala bidang bina SD, pada tingkat Kota/kabupaten ditangani oleh Subdin Dikdas Kota/Kabupaten seksi SD, dan pada tingkat sekolah dibina langsung oleh kepala sekolah yang dibantu oleh wakil kurikulum dan koordinator inklusif.

Secara struktural kelembagaan memang telah jelas mekanisme atau alur pembinaan program pembinaan pendidikan inklusif dari tingkat pusat, daerah hingga unit sekolah. Berdasarkan hasil temuan di lapangan terdapat indikasi adanya pembinaan yang longgar terutama pada aspek-aspek monitoring, supervisi, dan evaluasi terhadap sekolah penyelenggara program pendidikan inklusif. Secara

---

(1994). *The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education*. Salamanca: UNESCO & Ministry Of Education And Science, Spain.



berkala dan terprogram sekurangnya setahun sekali. Direktorat PKLK Dikdas, Dinas pendidikan Propinsi dan sub dinas pendidikan tingkat Kota/Kabupaten hanya menerima laporan tertulis yang dibuat oleh sekolah mengenai praktik penyelenggaraan program. Laporan yang dibuat dapat terjadi pembiasaan pada beberapa aspek seperti prosedur rekrutmen siswa dan guru. Adanya beberapa hal yang menyimpang secara prosedural ini. Hal ini diakui oleh informan dari Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan, terutama pada proses identifikasi dan asesmen.

Realitas lemahnya pembinaan oleh instansi vertikal, dibenarkan oleh beberapa informan ketika diwawancarai mengenai monitoring, supervisi dan evaluasi. Alasan yang dikemukakan adalah ketidak tersediaan anggaran untuk melakukan supervisi langsung ke lapangan. Dengan demikian laporan tahunan dari sekolah penyelenggara dianggap memadai oleh instansi vertikal.

Pembinaan terhadap empat sekolah penyelenggara pendidikan inklusif masih rendah, belum ada alur pembinaan baik dari tingkat pusat sampai tingkat propinsi masih belum jelas. Di dinas pendidikan propinsi Kalimantan Selatan pembinaan sekolah inklusif di serahkan ke masing-masing sub Dinas seperti Subdin Dikdas membina sekolah inklusif tingkat pendidikan dasar, Subdin Bina menengah membina sekolah inklusif tingkat menengah. Di Kota Banjarmasin sekolah inklusif dibina oleh pengawas sekolah luar biasa, belum ada struktur yang jelas siapa yang membina sekolah inklusif. Alur pembinaan keempat sekolah dasar inklusif di Banjarmasin rendah, perlu perubahan total alur pembinaan.

#### **d. Analisis Kebutuhan**

Pada bagian analisis kebutuhan ini, sudut pandang dibagi dalam dua klasifikasi yaitu pandangan para pakar pendidikan dan kebutuhan masyarakat (*stakeholder*). Pertama, pandangan pakar pendidikan dapat dikaji pada seminar, simposium dan kesepakatan bersama yang banyak membicarakan tentang pendidikan inklusif. Kedua, analisis kebutuhan pendidikan inklusif yang dilakukan melalui analisis SWOT terhadap empat sekolah dasar penyelenggara pendidikan inklusif di Banjarmasin.

Pandangan para pakar yang dikaji melalui seminar, simposium maupun kesepakatan, antara lain sebagai berikut: Konferensi Internasional yang dilaksanakan di Thailand tahun 1990 yang mempersoalkan tentang pendidikan dasar bagi semua anak. Puncak dari konferensi ini adalah lahirnya deklarasi tentang pendidikan untuk semua (*Education for All*). Konferensi ini menyimpulkan, antara lain di banyak negara (a) kesempatan untuk memperoleh pendidikan masih terbatas atau masih banyak orang yang belum mendapat akses pendidikan dan (b) kelompok tertentu yang terpinggirkan seperti penyandang disabilitas, etnic minoritas, suku terasing dan sebagainya masih terdiskriminasi dari pendidikan bersama.

Konferensi internasional di Spanyol, yang diselenggarakan pada tahun 1994, menghasilkan pernyataan Salamanca, misalnya pada butir kedua, yaitu (1) Setiap anak mempunyai hak dasar untuk memperoleh

pendidikan, dan harus diberi kesempatan untuk mencapai serta mempertahankan tingkat pengetahuan yang wajar, (2) Setiap anak mempunyai karakteristik, minat, kemampuan dan kebutuhan belajar yang berbeda-beda, (3) Sistem pendidikan seharusnya dirancang dan program pendidikan dilaksanakan dengan memperhatikan keanekaragaman karakteristik dan kebutuhan tersebut, (4) Mereka yang memiliki kebutuhan khusus harus memperoleh akses ke sekolah reguler yang mengakomodasi mereka dalam rangka pendidikan yang berpusat pada anak dan yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, (5) Sekolah reguler dengan orientasi tersebut merupakan alat yang paling efektif untuk memerangi sikap diskriminasi, menciptakan masyarakat yang ramah, membangun masyarakat yang inklusif dan mencapai pendidikan bagi semua. (6) Pendidikan inklusif harus memberikan pendidikan yang akan mencegah anak-anak mengembangkan harga diri yang buruk, serta konsekuensi yang dapat ditimbulkannya. Lebih jauh sekolah semacam ini akan memberikan pendidikan yang efektif kepada mayoritas anak dan meningkatkan efisiensi dan pada akhirnya akan menurunkan biaya seluruh sistem pendidikan.<sup>5</sup>

Seminar tentang pendidikan inklusif yang diselenggarakan di Agra India pada tahun 1998, yang disetujui oleh 55 partisipan dari 23 negara. Dari hasil seminar itu pendidikan inklusif didefinisikan sebagai berikut: (1) Lebih luas dari pada pendidikan formal, tetapi mencakup rumah, masyarakat, non-formal dan sistem informal (2) Menghargai

---

5 World Conference On Special Needs Education, *op. cit.*, h.14.

bahwa semua anak dapat belajar (3) Memungkinkan struktur, sistem dan metodologi memenuhi kebutuhan-kebutuhan semua anak (4) Mengakui dan menghargai bahwa setiap anak memiliki perbedaan-perbedaan dalam usia, jenis kelamin, etnik, bahasa, kecacatan, status sosial ekonomi, potensi dan kemampuan (5) Merupakan proses dinamis yang secara evolusi terus berkembang sejalan dengan konteks budaya (6) Merupakan strategi untuk memajukan dan mewujudkan masyarakat inklusif.<sup>6</sup> (*Seminar on Inclusive Education Agra India, 1998*).

Pendidikan inklusif yang dipaparkan di atas menggambarkan sebuah model pendidikan inklusif yang mendasarkan konsep-konsep tentang: anak, sistem pendidikan, keragaman dan diskriminasi, proses memajukan inklusi, Secara terperinci dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) Konsep tentang Anak: Hak semua anak untuk memperoleh pendidikan di dalam masyarakatnya sendiri, semua anak dapat belajar dan siapapun dapat mengalami kesulitan dalam belajar, semua anak membutuhkan dukungan dalam belajar, pembelajaran berpusat pada anak menguntungkan semua anak, keberagaman dan terima dan dihargai (2) Konsep tentang Sistem Pendidikan dan Sekolah (pendidikan lebih luas dari pada pendidikan formal di sekolah (*formal schooling*), fleksibel dan sistem pendidikan bersifat responsif, lingkungan pendidikan ramah terhadap anak, sistem mengakomodasi setiap anak yang beragam bukan anak menyesuaikan dengan sistem, kolaboratif antar mitra

---

6 Anon, *Makalah* disampaikan pada Seminar on Inclusive Education Agra India, 1998.

dan bukan kompetitif (3) Konsep tentang Keberagaman dan Diskriminasi (menghilangkan diskriminasi dan pengucilan (*exclusion*), memandang keragaman sebagai sumber daya, bukan sebagai masalah, pendidikan inklusif menyiapkan siswa menjadi toleran dan menghargai perbedaan-perbedaan.

Lokakarya Nasional tentang Pendidikan Inklusif yang diselenggarakan di Bandung, Indonesia, tanggal 8-14 Agustus 2004, dengan pertimbangan bahwasanya keberadaan anak berkelainan dan anak berkebutuhan khusus lainnya di Indonesia untuk mendapatkan kesamaan hak dalam berbicara, berpendapat, memperoleh pendidikan, kesejahteraan dan kesehatan, sebagaimana yang dijamin oleh UUD 1945.<sup>7</sup> mendapatkan hak dan kewajiban secara penuh sebagai warga negara, sebagaimana tertuang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948), diperjelas oleh Konvensi Hak Anak (1989), Deklarasi dunia tentang pendidikan untuk semua (1990), Peraturan Standar PBB tentang Persamaan Kesempatan bagi Para Penyandang Cacat (1993),<sup>8</sup> Pernyataan Salamanca dan Kerangka Aksi UNESCO (1994), Undang-undang Penyandang Cacat (1997), Kerangka Aksi Dakar (2000), Undang-undang RI Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional (2003), dan Deklarasi Kongres Anak Internasional (2004). Seluruh dokumen tersebut memberikan jaminan sepenuhnya kepada anak

---

7 Anon, *Makalah* disampaikan pada Lokakarya Nasional: Indonesia Menuju Pendidikan Inklusif. Bandung 8-14 Agustus 2004.

8 UNESCO, *The Journey to Inclusive Schools*, Published By Inclusion International, 1999.

berkelainan dan anak berkebutuhan khusus lainnya dalam memperoleh pendidikan yang bermutu dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat. Menyadari kondisi obyektif masyarakat Indonesia yang beragam, maka kami sepakat menuju Pendidikan Inklusif dan menghimbau kepada pemerintah, institusi pendidikan, institusi terkait, dunia usaha dan industri serta masyarakat untuk dapat: (1) Menjamin setiap anak berkelainan dan anak berkebutuhan khusus lainnya mendapatkan kesamaan akses dalam segala aspek kehidupan, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial, kesejahteraan, keamanan, maupun bidang lainnya, sehingga menjadi generasi penerus yang handal. (2) Menjamin setiap anak berkelainan dan anak berkebutuhan khusus lainnya, sebagai individu yang bermartabat, untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi, pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan potensi dan tuntutan masyarakat, tanpa perlakuan deskriminatif yang merugikan eksistensi kehidupannya baik secara fisik, psikologis, ekonomis, sosiologis, hukum, politis maupun kultural. (3) Menyelenggarakan dan mengembangkan pengelolaan pendidikan inklusif yang ditunjang kerja sama yang sinergis dan produktif di antara para *stakeholders*, terutama pemerintah, institusi pendidikan, institusi terkait, dunia usaha dan industri, orang tua serta masyarakat. (4) Menciptakan lingkungan yang mendukung bagi pemenuhan kebutuhan anak berkelainan dan anak berkebutuhan khusus lainnya, sehingga memungkinkan mereka dapat mengembangkan keunikan potensinya secara optimal. (5) Menjamin kebebasan anak berkelainan dan anak berkebutuhan khusus lainnya

untuk berinteraksi baik secara reaktif maupun proaktif dengan siapapun, kapanpun dan di lingkungan manapun, dengan meminimalkan hambatan. (6) Mempromosikan dan mensosialisasikan layanan pendidikan inklusif melalui media masa, forum ilmiah, pendidikan dan pelatihan, dan lainnya secara berkesinambungan. (7) Menyusun Rencana Aksi (Action Plan) dan pendanaannya untuk pemenuhan aksesibilitas fisik dan non-fisik, layanan pendidikan yang berkualitas, kesehatan, rekreasi, kesejahteraan bagi semua anak berkelainan dan anak berkebutuhan khusus lainnya.

Simposium internasional yang diselenggarakan di Bukit tinggi Indonesia pada tahun 2005, menghasilkan rekomendasi Bukit tinggi yang isinya antara lain menekankan perlunya terus dikembangkan program pendidikan inklusif sebagai salah satu cara menjamin bahwa semua anak benar-benar memperoleh pendidikan dan pemeliharaan yang berkualitas dan layak.<sup>9</sup>

Berdasarkan pandangan para pakar melalui seminar, simposium maupun lokakarya baik tingkat Internasional, Nasional dan lokal dapat disimpulkan bahwa semua negara yang tergabung sebagai peserta mendorong pelaksanaan pendidikan inklusif. Melalui program pendidikan inklusif anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus harus memperoleh akses ke sekolah reguler yang mengakomodasi mereka dalam rangka pendidikan yang berpusat pada anak dan yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan

---

9 Anon, *Makalah* disampaikan pada Simposium Internasional: *Inclusion and the Removal of Barriers to Learning, Participation and Development*, Bukit Tinggi: 26-29 September 2005.

tersebut. Hak semua anak untuk memperoleh pendidikan di dalam masyarakatnya sendiri, semua anak dapat belajar dan siapapun dapat mengalami kesulitan dalam belajar, semua anak membutuhkan dukungan dalam belajar, pembelajar berpusat pada anak menguntungkan semua anak, keberagaman dan diterima dan dihargai. Semua negara tergabung sebagai peserta dihimbau mempromosikan dan mensosialisasikan layanan pendidikan inklusif melalui media masa, forum ilmiah, pendidikan dan pelatihan, dan lainnya secara berkesinambungan.

Analisis kebutuhan pendidikan inklusif yang dilakukan melalui analisis SWOT terhadap empat sekolah dasar penyelenggara pendidikan inklusif di Banjarmasin diperoleh data sebagai berikut:

Kekuatan (Strength) sekolah penyelenggara pendidikan inklusif ditandai dengan memiliki tim layanan sekolah yaitu program inklusi yang kuat, sekolah yang diminati masyarakat sebagai penyelenggara inklusi baik dari kalangan masyarakat di bawah sampai keatas, sekolah menjadi kebanggaan dan harapan orang tua anak berkebutuhan khusus dan masyarakat. Banyaknya orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus yang memiliki komitmen kuat menyekolahkan anak di wilayah Banjarmasin, merupakan kekuatan yang sangat kuat yang mendorong sekolah inklusif ditunggu kehadirannya oleh banyak masyarakat.

Hasil analisis SWOT ditemukan beberapa kelemahan di empat sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di Kota Banjarmasin diantaranya adalah: sekolah lokasi di



pusat keramaian kota memungkinkan terjadinya tindakan-tindakan kriminal baik dari dalam maupun dari luar. Lokasi dekat dengan aliran sungai, sehingga beberapa guru kurang disiplin dengan waktu karena memanfaatkan sebagian waktu memancing dan kegiatan lain yang berada dibantaran sungai. Lingkungan kurang mendukung, karena di daerah pasang surut, sehingga kadang proses belajar mengajar terganggu dengan aroma sampah tersebut. Kurangnya tenaga pendidik yang berlatarbelakang PLB sehingga masih kurang pengetahuan mereka untuk menangani anak berkebutuhan khusus. Kurangnya diadakan worksop bagi tenaga pendidik yang ada di SD Kota Banjarmasin tentang penanganan anak berkebutuhan khusus. Masih terbatasnya dana yang diberikan oleh komite sekolah untuk menunjang pelayanan anak berkebutuhan khusus.

Empat sekolah dasar penyelenggara pendidikan inklusif memiliki peluang besar menjadi sekolah inklusif, hal ini dipicu oleh strata masyarakat yang menyekolahkan anaknya berasal dari status sosial ekonomi menengah ke bawah hingga ke atas, akan menjadi sangat besar tuntutan masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu dan dapat mengakomodir semua anak dalam layanan pendidikan. Masih terbatasnya SD yang menyelenggarakan pendidikan inklusif di Banjarmasin maka keempat sekolah memiliki peluang tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif dan menjadi pilihan banyak masyarakat. Sebagai sekolah negeri, SD Banua Anyar 8, SD Banua Anyar 4, SD Gadang 2 dan SD Kuin Selatan 3 sumber-sumber ancaman yang akan mengganggu kelancaran program relatif tidak ada.

Berdasarkan realita diatas dapat disimpulkan bahwa, kebutuhan masyarakat di Banjarmasin tentang kehadiran sekolah inklusif sangat tinggi, hal ini terbukti dari hasil analisis SWOT yang dilakukan keempat sekolah SD penyelenggara pendidikan inklusif pada skala tinggi. Pendidikan inklusif di tunggu banyak masyarakat di Banjarmasin, oleh karena setiap sekolah ada anak berkebutuhan khusus. Orang tua mereka menghendaki anaknya bisa sekolah di dekat tempat tinggalnya.

## **1. Masukan (*input*)**

Evaluasi masukan (*input*) meliputi analisis persoalan yang berhubungan dengan bagaimana penggunaan sumber-sumber yang tersedia. Alternatif-alternatif strategi yang harus dikembangkan untuk mencapai suatu program. Evaluasi masukan bermanfaat untuk membimbing pemilihan strategi program dalam menspesifikasikan rancangan prosedural. Evaluasi input program pendidikan inklusif mencakup lima indikator yaitu rekrutmen siswa, kondisi sosial ekonomi keluarga, persyaratan rekrutmen guru, kurikulum pendidikan inklusif, sarana dan prasarana belajar.

### **a. Rekrutmen Siswa**

Proses rekrutmen siswa di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif (SD Banua Anyar 8, SD gadang 2, SD Banua Anyar 4, dan SD Kuin Selatan 3) masih merasa sulit

karena beberapa faktor antara lain: (1) kurang sadarnya orang tua akan pentingnya melakukan identifikasi, sehingga pemeriksaan ke orang-orang ahli tidak dilakukan. Untuk mengidentifikasi seorang anak apakah tergolong anak dengan kebutuhan khusus atau bukan, dapat dilakukan oleh: Guru kelas; Orang tua anak; dan/atau Tenaga profesional terkait.<sup>10</sup> (2) kurangnya pengetahuan guru tentang anak berkebutuhan khusus juga menyulitkan guru untuk menemukan anak berkebutuhan khusus. Kemampuan identifikasi anak berkebutuhan khusus bagi seorang guru sekolah dasar merupakan hal yang sangat penting. Kemampuan identifikasi ini sifatnya masih sederhana, baru sebatas melihat gejala-gejala fisik yang nampak. Untuk mengidentifikasi apakah seorang anak tergolong anak dengan kebutuhan khusus atau bukan, perlu terlebih dahulu dirumuskan pengertian anak kebutuhan khusus, ciri-ciri atau karakteristik, kemudian dirumuskan kaitannya dengan identifikasi anak berkebutuhan khusus.

## **b. Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga**

Keadaan sosial ekonomi setiap orang itu berbeda-beda dan bertingkat, ada yang keadaan sosial ekonomi tinggi, sedang, dan rendah. menurut Soerjono Soekanto, sosial ekonomi adalah posisi seseorang dalam masyarakat berkaitan dengan orang lain dalam arti lingkungan pergaulan, prestasinya, dan hak-hak serta kewajibannya

---

10 Jane B. Schulz, *Mainstreaming Exceptional Students; A Guide for Classroom Teachers* (Boston: Allyn and Bacon, 1991), hh. 20-21.

dalam hubungannya dengan sumber daya.<sup>11</sup>

Keberhasilan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga (orang tua), anggota masyarakat dan pemerintah. Pemerintah dan masyarakat menyediakan tempat untuk belajar yaitu sekolah. Sekolah menampung siswa-siswinya dari berbagai macam latar belakang atau kondisi sosial ekonomi yang berbeda. Pada umumnya kondisi sosial ekonomi orang tua peserta didik di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif (SD Banua Anyar 8, SD gadang 2, SD Banua Anyar 4, dan SD Kuin Selatan 3) berasal dari keluarga menengah ke bawah. Bahar dalam Yerikho berpendapat bahwa: Pada umumnya anak yang berasal dari keluarga menengah keatas lebih banyak mendapat pengarahan dan bimbingan yang baik dari orang tua mereka. Anak-anak yang berlatar belakang ekonomi rendah, kurang dapat mendapat bimbingan dan pengarahan yang cukup dari orang tua mereka, karena orang tua lebih memusatkan perhatiannya pada bagaimana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.<sup>12</sup>

Kondisi sosial ekonomi keluarga dilihat dari: tingkat pendidikan, penghasilan, dan kepemilikan kekayaan. Tingkat pendidikan yang pernah ditempuh orang tua berpengaruh pada kelanjutan sekolah anak mereka. Orang tua yang memiliki pendidikan yang tinggi mempunyai dorongan atau motivasi yang besar untuk menyekolahkan anak

---

11 Soerjono Soekanto, *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 212.

12 Yerikho dan Joshua, "Hubungan Tingkat Pendapatan Keluarga dengan Pendidikan Anak (Hubungan Tingkat Pendapatan Keluarga dengan Pendidikan Anak," *Disertasi* diterbitkan di PPs UNJ Jakarta, 2007.

mereka. Menurut Sumardi (Yerikho) bahwa pendapatan yang diterima oleh penduduk akan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang dimilikinya. Pendidikan yang tinggi mereka akan dapat memperoleh kesempatan yang lebih luas untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik disertai pendapatan yang lebih besar. Sedangkan bagi penduduk yang berpendidikan rendah akan mendapat pekerjaan dengan pendapatan yang kecil. Anak dalam belajar kadang-kadang memerlukan sarana yang kadang-kadang mahal. Bila keadaan ekonomi keluarga tidak mencukupi, dapat menjadi penghambat anak dalam belajar mengajar di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.

### **c. Persyaratan Administrasi Guru Inklusif**

Guru yang mengajar di kelas inklusif idealnya adalah terdiri dari guru mata pelajaran, guru kelas, dan guru pembimbing khusus (GPK) lulusan PLB yang bertugas membantu kelancaran anak berkebutuhan khusus mengikuti pembelajaran di kelas. Persyaratan administrasi guru inklusif meliputi: tingkat pendidikan, latar belakang pendidikan, pengalaman mengajar, pembekalan tentang siswa berkebutuhan khusus, kewajiban mengajar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persyaratan administrasi guru di sekolah penyelenggara pendidikan inklusi di Banjarmasin (SD Banua anyar 8, SD Gadang 2, SD Banua Anyar 4, dan SD Kuin Selatan 3) masih belum sesuai. Hal tersebut terlihat bahwa tingkat pendidikan sebagian besar guru yang mengajar di sekolah inklusi bukan S1

PLB. Sardiman (2007: 126), menyebutkan salah satu syarat menjadi guru, yaitu persyaratan teknis yakni harus berijazah pendidikan guru. Hal ini mempunyai konotasi bahwa seseorang yang memiliki ijazah pendidikan guru itu dinilai sudah mampu mengajar.<sup>13</sup> Selain itu, sebagai besar guru di sekolah inklusi tidak mendapat pembekalan tentang siswa berkebutuhan khusus, sehingga proses pembelajaran anak berkebutuhan khusus tidak mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya. Pengertian pendidikan inklusif sebagai pendidikan yang menempatkan semua peserta didik berkebutuhan khusus dalam sekolah reguler sepanjang hari. Dalam pendidikan seperti ini, guru memiliki tanggung jawab penuh terhadap peserta didik berkebutuhan khusus tersebut.<sup>14</sup>

#### **d. Kurikulum Pendidikan Inklusif**

Pada prinsipnya kurikulum pendidikan inklusif sama dengan kurikulum reguler. Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum sekolah reguler penyelenggara pendidikan inklusif. Kurikulum di modifikasi sesuai kemampuan peserta didik. Tidak ada kurikulum khusus untuk sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Kurikulum pendidikan inklusif di SD Banua Anyar 8 dan SD Kuin Selatan termasuk dalam kategori yang relevan, artinya sekolah tersebut membuat kurikulum berdeferensiasi, berorientasi pada

---

13 Sardiman, *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar* (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), h. 126.

14 Daniel P. Hallahan, *Exceptional Learners: An Introduction to Special Education* (Boston: Pearson Education Inc., 2009), h. 53.

peserta didik, dan menyesuaikan kondisi anak. Peserta didik umum dan berkebutuhan khusus yang memiliki potensi kecerdasan rerata dan di atas rerata diberlakukan kurikulum standar nasional, peserta didik berkebutuhan khusus yang memiliki potensi kecerdasan di bawah rerata dikembangkan kurikulum adaptasi dan modifikasi, sedangkan bagi peserta didik yang tergolong cerdas istimewa maupun bakat istimewa digunakan kurikulum eskalasi.<sup>15</sup>

Kurikulum pendidikan inklusif di SD Banua Anyar 4 dan SD Gadang 2 termasuk dalam kategori ragu, menunjukkan bahwa guru dalam mengembangkan kurikulum belum berorientasi pada kondisi peserta didik berkebutuhan khusus. Program pendidikan inklusif menyebabkan adanya tuntutan yang besar terhadap guru reguler maupun pendidik khusus. Ini menuntut pergeseran besar dari tradisi mengajarkan materi yang sama kepada siswa dikelas, menjadi mengajar setiap anak sesuai dengan kebutuhan individualnya, tetapi dalam setting kelas. Siswa mempunyai bermacam-macam minat bidang dan tingkat penguasaan materi, dan strategi belajar yang berbeda-beda.<sup>16</sup>

#### **e. Sarana dan Prasarana Belajar**

Sarana prasarana pendidikan adalah salah satu penunjang dalam meningkatkan mutu pendidikan. Terutama dalam pelaksanaan proses 4 pembelajaran di sekolah

---

15 Direktorat PSLB. *Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif* (Jakarta: Direktorat PKLK, 2009), h. 78.

16 Skjorten, *Menuju Inklusi Pendidikan Kebutuhan Khusus Sebuah Pengantar* (Bandung: Program Pascasarjana UPI, 2003), h. 288.

sangat penting dalam mendukung kegiatan pembelajaran. Sebagai salah satu sumber daya yang penting dan utama dalam menunjang proses pembelajaran di sekolah, sarana dan prasarana pendidikan perlu dilakukan peningkatan dalam pendayagunaan dan pengelolaannya, agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang menyangkut standar sarana dan prasarana pendidikan secara nasional pada Bab VII Pasal 42 dengan tegas disebutkan bahwa Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.<sup>17</sup>

Sarana dan Prasarana Sekolah inklusif pada prinsipnya sama dengan sekolah pada umumnya, tetapi untuk menjadikan sekolah yang ramah bagi semua perlu dilengkapi aksesibilitas yang dapat membantu kemudahan mobilitas dan tidak membahayakan semua peserta didik berkebutuhan khusus. Ketersediaan sarana dan prasarana sekolah inklusi di Banjarmasin yaitu SD Banua Anyar 8 tergolong tinggi hal tersebut dibuktikan pada hasil penelitian yang menunjukkan bahwa 75% sarana dan prasarana di SD Banua Anyar 8 dalam kondisi yang baik dan lengkap sementara 25% belum tersedia. Adapun kondisi

---

17 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 *tentang* Standar Nasional Pendidikan yang menyangkut standar sarana dan prasarana pendidikan secara nasional, Bab VII, Pasal 42.



sarana dan prasarana di SD Gadang 2, SD Banua Anyar 4, dan SD Kuin selatan masih tergolong rendah, hasil penelitian menunjukkan bahwa di tiga sekolah tersebut ketersediaan sarana dan prasarananya hanya berkisar 35% dan tidak digunakan.

Sarana pendidikan yang lengkap tentukan menunjang tercapainya tujuan pembelajaran. Sarana pendidikan adalah alat langsung untuk mencapai tujuan pendidikan, misalnya: ruang, buku, perpustakaan, laboratorium, dan sebagainya.<sup>18</sup> Menurut E. Mulyasa sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar, seperti gedung, ruang kelas, meja, kursi, serta alat-alat dan media pengajaran.<sup>19</sup>

## **f. Pembiayaan**

Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan pada sekolah inklusif menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Masyarakat dan Orang tua. Sumber dana sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di Banjarmasin (SD Banua Anyar 8, SD Gadang 2, SD Banua Anyar 4, dan SD Kuin Selatan 3) pada umumnya mengandalkan BOS Pusat dan BOS Daerah. Adapun honor GPK bersumber dari komite sekolah dengan kisaran Rp100.000-Rp800.000/bulan.

---

18 Kasan Tholib, *Teori dan Aplikasi Administrasi Pendidikan* (Jakarta: Studia Pres, 2000), h. 91.

19 Mulyasa, E, *Manajemen Berbasis Sekolah* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003), h. 49.

Lembaga pendidikan yang sukses tidak lepas dari sokongan biaya pendidikan yang tinggi pula, karena pada hakikatnya mutu pendidikan akan berbanding lurus dengan biaya pendidikan yang dikeluarkan, semakin tinggi dan mahal biaya pendidikan yang digunakan dan dikeluarkan maka semakin baik pula layanan pendidikan tersebut dan mampu menghasilkan lulusan-lulusan yang bermutu dengan hasil belajar yang tinggi. Sepertinya akan sulit merealisasikan mutu pendidikan yang baik apabila tidak didukung oleh biaya pendidikan yang tinggi pula.

Biaya pendidikan merupakan salah satu unsur terpenting dalam sektor lembaga pendidikan seperti sekolah, baik sekolah yang dikelola oleh pemerintah (sekolah Negeri) dan juga sekolah yang dikelola oleh masyarakat sendiri (sekolah swasta) yang dikelola oleh yayasan atau badan penyelenggara pendidikan tertentu. Biaya-biaya pendidikan yang berputar dan dipergunakan harus terkelola dan tercatat dengan baik sehingga biaya pendidikan tersebut dapat mengefisienkan dan mengefektifkan proses pembelajaran di sekolah dan berbagai program-program sekolah. Pembiayaan pendidikan yang terorganisir dengan baik akan dapat mengoptimalkan layanan pendidikan kepada para konsumennya baik konsumen internal seperti guru, siswa, staf, dan para karyawan yang terlibat dan konsumen external seperti masyarakat, orang tua, dan pemerintah.<sup>20</sup>

---

20 Hariyanto, Rangkuti, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan* (Kompasiana, 2014).

## 2. Proses

Evaluasi proses merupakan evaluasi yang dirancang dan diaplikasikan dalam penerapan atau praktis suatu kegiatan program. evaluasi proses program pendidikan inklusif mencakup empat indikator yaitu kompetensi guru, minat guru mengajar, profil guru yang dipersyaratkan, dan proses pembelajaran di kelas. Untuk mengetahui proses program pendidikan inklusif di Banjarmasin, maka pengumpulan data dilakukan di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif antara lain: SD Banua Anyar 8, SD Gadang 2, SD Banua Anyar 4, dan SD Kuin Selatan 3, adapun hasilnya divisualisasikan dalam tabel berikut:

### a. Kompetensi Guru

<b>SD Banua Anyar 8</b>	<b>SD Gadang 2</b>	<b>Banua Anyar 4</b>	<b>Kuin Selatan</b>
Baik	baik	cukup	cukup

Guru adalah salah satu unsur penting yang harus ada sesudah siswa. Apabila seorang guru tidak punya sikap profesional maka murid yang di didik akan sulit untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Kunci yang harus dimiliki oleh setiap pengajar adalah kompetensi.

Kompetensi guru di SD Banua Anyar 8 dan SD Gadang 2 termasuk kategori baik yang artinya guru telah memiliki beberapa kompetensi antara lain diferensiasi kurikulum, modifikasi kurikulum, pembelajaran individual, pembelajaran kooperatif, memotivasi belajar dan melakukan penilaian fleksibel, namun demikian masih perlu ditingkatkan agar menjadi amat baik. Program pembelajaran individual (PPI)

adalah suatu program pembelajaran yang disusun untuk membantu peserta didik yang berkebutuhan khusus sesuai dengan kemampuannya. Asas motivasi menjadi salah satu bagian yang integral dari asas-asas mengajar. Penggunaan motivasi dalam mengajar tidak saja melengkapi prosedur mengajar, tetapi juga menjadi faktor yang menentukan pengajaran yang efektif.

Penggunaan asas motivasi sangat esensial dalam proses belajar mengajar.<sup>21</sup> Kompetensi guru di SD Banua Anyar 4 dan SD Kuin selatan masih dalam kategori cukup, karena guru masih kurang mampu melakukan deferensiasi kurikulum dan penilaian yang fleksibel, diharapkan kedepannya guru lebih aktif mengikuti berbagai ajang pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi yang dimiliki guru saat ini.

Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di dalamnya tidak hanya terdapat peserta didik pada umumnya tetapi juga terdapat peserta didik berkebutuhan khusus, oleh karena itu salah satu kompetensi guru yang perlu ditekankan adalah mampu melakukan modifikasi kurikulum dan penilaian yang fleksibel sesuai dengan tingkat kebutuhan setiap peserta didik. Seperti halnya yang dikatakan oleh Marilyn Friend dan William D. Bursuck bahwa untuk beberapa siswa dengan hambatan intelektual yang signifikan, integrasi pembelajaran berarti melakukan instruksi dalam kurikulum umum standar tapi harapan dapat menyesuaikan yaitu,

---

21 A. Tabrani R, *Pendekatan dalam Proses Belajar Mengajar* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994), h. 121.

membuat modifikasi.<sup>22</sup> Kurikulum pendidikan inklusif harus disusun secara fleksibel sesuai kebutuhan anak dan kondisi sekolah, dapat mendorong guru dan tenaga kependidikan melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, mendorong pengawas untuk membina secara rutin dan kebebasan untuk berinovasi.<sup>23</sup>

### **b. Minat Guru Mengajar**

<b>SD Banua Anyar 8</b>	<b>SD Gadang 2</b>	<b>Banua Anyar 4</b>	<b>SD Kuin Selatan</b>
Baik	baik	baik	baik

Minat adalah perhatian yang mengandung unsur-unsur perasaan. Minat merupakan dorongan atau keinginan dalam diri seseorang pada objek tertentu. Minat guru mengajar di SD Banua Anyar 8, SD Gadang 2, SD Banua Anyar 4, dan SD Kuin Selatan sebagai sekolah penyelenggara pendidikan Inklusif masuk dala kategori baik, hal ini menunjukkan bahwa guru merasa senang, bisa menerima ABK, ikhlas tanpa pamrih dan bangga dalam melaksanakan pembelajaran yang didalamnya terdapat anak berkebutuhan khusus. Minat guru mengajar yang baik tentu perlu dipertahankan karena hal tersebut merupakan modal utama menjadi seorang guru sekolah inklusi. Sebagaimana hasil penelitian Sapon Shevin, bahwa salah satu profil pembelajaran di kelas

22 Marilyn Friend dan William D. Bursuck, *Including Students with Special Needs: A Practical Guide for Classroom Teachers* (USA : Pearson Education, Inc., 2012), h. 6.

23 Mitchell, *Special Education Needs and Inclusive Education: Major Themes in Education*, (New York: Publisher's Note, 2006), h. 96.

inklusif yaitu menciptakan dan menjaga komunitas kelas yang hangat, menerima keanekaragaman dan menghargai perbedaan, dimana guru mempunyai tanggung jawab menciptakan suasana kelas dimana anak ditampung secara penuh dengan menekankan saling menghargai perbedaan<sup>24</sup>

### c. Profil Guru yang Diperkirakan

<b>Banua Anyar 8</b>	<b>Gadang 2</b>	<b>Banua Anyar 4</b>	<b>SD Kuin Selatan</b>
sesuai	sesuai	sesuai	Belum sesuai

Profil guru ialah gambaran riwayat singkat hidup seseorang yang pekerjaannya mengajar dan ikut berperan dalam suatu pembentukan sumber daya manusia yang potensial di bidang pembangunan. Adapun profil guru yang dipersyaratkan untuk menjadi tenaga pendidik di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif antara lain: tingkat pendidikan S1, mengajar sesuai dengan latar belakang keilmuan, pengalaman mengajar di kelas reguler minimal 2 tahun, dan telah mengikuti pertemuan ilmiah tentang inklusi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa profil guru yang dipersyaratkan sudah sesuai di tiga sekolah penyelenggara pendidikan inklusi yaitu SD Banua Anyar 8, SD Gadang 2, dan SD Banua Anyar 4. Profil yang dimaksud adalah tingkat pendidikan S1, mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikan dan telah mengikuti pertemuan ilmiah tentang

24 Shopan Shepin, *Managing Special Education* (Boston: Open University Pers, 2005), h. 47.

inklusi. Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif membutuhkan guru-guru terlatih. Guru reguler harus mendapatkan pelatihan agar mereka dapat meningkatkan kualitas pengajaran sehingga mampu mengakomodasi kemampuan dan kebutuhan anak berkebutuhan terkait pembelajaran. Guru pembimbing khusus (GPK) adalah guru yang berkualifikasi Sarjana (S1) Pendidikan Luar Biasa (ortopedagog) yang memiliki tugas mendampingi guru kelas/guru mata pelajaran dalam memberikan layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi.<sup>25</sup> Selain itu, guru di sekolah tersebut juga telah memiliki pengalaman mengajar di kelas reguler minimal dua tahun. Suwaluyo mengatakan bahwa pengalaman mengajar adalah masa kerja yang dapat dilihat dari banyaknya tahun mengajar, dan ditegaskan pula bahwa pengalaman mengajar merupakan penghayatan pada suatu objek tersebut.<sup>26</sup>

Profil guru yang dipersyaratkan di SD Kuin Selatan 3 masih belum sesuai, hal ini karena masih terdapat guru yang tingkat pendidikannya belum S1, di sisi lain guru mengajar tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Oleh karena itu sekolah perlu mendorong guru untuk meningkatkan kualifikasi pendidikannya, dan pembagian tugas mengajar sebaiknya menyesuaikan dengan latar pendidikan guru. Sudarwan Darwin mengatakan bahwa seorang guru dikatakan profesional atau tidak, dapat dilihat

---

25 Direktorat PKLK, *Pedoman Manajemen Sekolah Inklusi* (Jakarta Direktorat Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, 2001), h. 201.

26 Suwaluyo, *Pengalaman Mengajar Guru Profesional* (Jakarta: Bumi Aksara, 1988), h. 26.

dari dua perspektif. Pertama, latar belakang pendidikan dan kedua, penguasaan guru terhadap materi bahan ajar, mengelola pembelajaran, mengelola siswa, melakukan tugas bimbingan dan lain-lain.<sup>27</sup>

#### **d. Proses Pembelajaran di Kelas Inklusif**

<b>SD Banua Anyar 8</b>	<b>Gadang 2</b>	<b>Banua Anyar 4</b>	<b>SD Kuin Selatan</b>
Cukup	Baik	Cukup	Sangat baik

Proses pembelajaran adalah proses yang di dalamnya terdapat kegiatan interaksi antara guru-siswa dan komunikasi timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan belajar, dalam proses pembelajaran, guru dan siswa merupakan dua komponen yang tidak bisa dipisahkan. Antara dua komponen tersebut harus terjalin interaksi yang saling menunjang agar hasil belajar siswa dapat tercapai secara optimal. Evaluasi proses pembelajaran di kelas inklusif mencakup: pengkondisian belajar, strategi pembelajaran, keterlibatan siswa, penguasaan bahan ajar, dan intensitas tugas. Sudarwan Darwin mengatakan bahwa seorang guru dikatakan profesional atau tidak, dapat dilihat dari dua perspektif. Pertama, latar belakang pendidikan dan kedua, penguasaan guru terhadap materi bahan ajar, mengelola pembelajaran, mengelola siswa, melakukan

---

27 Sudarwan Darwin, *Inovasi Pendidikan dalam Upaya Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kependidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 34.



tugas bimbingan dan lain-lain.<sup>28</sup>

Proses pembelajaran di SD Gadang 2 dan SD Kuin selatan menunjukkan kategori baik dan sangat baik dan hal tersebut perlu untuk dipertahankan. Proses pembelajaran di sekolah tersebut melibatkan siswa dalam belajar. Keterlibatan siswa bisa diartikan sebagai siswa berperan aktif sebagai partisipan dalam proses belajar mengajar. Menurut Dimjati dan Mudjiono(1994:56-60), keaktifan siswa dapat didorong oleh peran guru. Guru berupaya untuk memberi kesempatan siswa untuk aktif, baik aktif mencari, memproses dan mengelola perolehan belajarnya.<sup>29</sup>

Proses pembelajaran di SD Banua Anyar 8 dan Banua Anyar 4 masih dalam kategori cukup karena guru masih lemah dalam pengkondisian siswa untuk belajar, kurang dalam penguasaan bahan ajar. Menyikapi hal tersebut, maka sekolah perlu melakukan asesmen awal untuk melihat kondisi dan awal potensi anak, dan perlu mengikuti berbagai pelatihan terkait penguasaan bahan ajar, dengan harapan proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai.

Pemahaman tentang kondisi dan kebutuhan anak berkebutuhan khusus diperlukan proses *skrining* atau *assesment* yang bertujuan agar pada saat pembelajaran di kelas, bentuk intervensi pembelajaran bagi

---

28 Sudarwan Darwin, *Inovasi Pendidikan dalam Upaya Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kependidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 34.

29 Mudjiono Dimyati, *Belajar dan Pembelajaran* (Jakarta: Proyek Pembinaan dan Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi), h. 34.

anak berkebutuhan khusus merupakan bentuk intervensi pembelajaran yang sesuai bagi mereka. *Assesment* yang dimaksud yaitu proses kegiatan untuk mengetahui kemampuan dan kelemahan setiap peserta didik dalam segi perkembangan kognitif dan perkembangan sosial melalui pengamatan yang sensitif.<sup>30</sup>

### 3. Produk

Evaluasi produk adalah evaluasi mengukur keberhasilan pencapaian tujuan. Evaluasi ini merupakan catatan pencapaian hasil dan keputusan-keputusan untuk perbaikan. Aktivitas evaluasi produk adalah upaya mengukur dan menafsirkan hasil yang telah dicapai. Dalam hal ini evaluasi produk memuat dua indikator yaitu kognitif dan sikap sosial.

#### a. Kognitif (Hasil Rata-Rata Nilai UAN)

SD Banua Anyar 8	SD Gadang 2	Banua Anyar 4	SD Kuin Selatan
Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat

Ujian Nasional yang telah diselenggarakan sekolah yang biasa disingkat UN / UNAS adalah sistem evaluasi standar pendidikan dasar dan menengah secara nasional dan persamaan mutu tingkat pendidikan antar daerah yang dilakukan oleh Pusat Penilaian Pendidikan, Depdiknas berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003, menyatakan bahwa dalam rangka

30 Jane B. Schulz, *Mainstreaming Exceptional Students; A Guide for Classroom Teachers* (Boston: Allyn and Bacon, 1991), hh. 20-21.

pengendalian mutu pendidikan secara nasional dilakukan evaluasi sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Evaluasi dilakukan oleh lembaga yang mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan serta sistematis untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan dan proses pemantauan evaluasi tersebut harus dilakukan secara berkesinambungan. Evaluasi merupakan proses menggambarkan, memperoleh dan menyajikan informasi yang berguna untuk menilai alternatif keputusan.

31

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan hasil rata-rata nilai UAN di semua sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di Kota Banjarmasin. Hal tersebut terlihat dari nilai UAN saat tahun awal, tahun pertengahan, dan tahun saat ini dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif mengalami peningkatan secara signifikan. Artinya bergabungnya anak berkebutuhan khusus dengan siswa umum di sekolah reguler dalam rangka pendidikan inklusif tidak memengaruhi hasil ujian Nasional siswa reguler. Dalam hal ini sekolah perlu mempertahankan bahkan meningkatkan nilai rata-rata ujian nasional yang sudah dicapai oleh masing-masing sekolah. Proses pemantauan evaluasi yang dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan pada akhirnya akan dapat membenahi mutu pendidikan.<sup>32</sup>

---

31 Sudjana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1989), h. 27.

32 Daryanto, *Evaluasi Pendidikan* (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2001), h. 56.

## b. Sikap Sosial

Sikap adalah kesadaran individu yang menentukan perbuatan yang nyata dalam kegiatan-kegiatan sosial. Maka sikap sosial adalah kesadaran individu yang menentukan perbuatan yang nyata, yang berulang-ulang terhadap objek sosial. Perilaku sosial seseorang itu tampak dalam pola respons antar orang yang dinyatakan dengan hubungan timbal balik antar pribadi.<sup>33</sup>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap sosial yang terjadi di SD Banua Anyar 8 termasuk dalam kriteria sangat baik, terlihat bahwa terjadi interaksi dan komunikasi yang baik, saling membantu satu sama lain, tenggang rasa, menerima kenyataan. Beberapa nilai dan sikap sosial yang hendaknya dikembangkan dalam kelas inklusif diantaranya adalah semua anak adalah anggota kelompok yang sama, berinteraksi satu sama lain, membantu dan belajar satu sama lain untuk berfungsi, saling mempertimbangkan satu sama lain, tenggang rasa, bekerjasama daripada bersaing, menerima kenyataan bahwa sebagian anak mempunyai kebutuhan yang berbeda dari mayoritas.<sup>34</sup>

Sikap sosial yang terlihat di SD Gadang 2, SD Banua Anyar 4, dan SD Kuin selatan masih dalam kategori cukup. Sekolah masih perlu mengembangkan sikap saling membantu satu sama lain dan sikap saling tenggang

---

33 Abin Syamsuddin Makmun, *Psikologi Pendidikan* (Bandung: PT Rosda Karya Remaja, 2003), h. 76.

34 Berit Johnsen, *Menuju Inklusi Pendidikan Kebutuhan Khusus Sebuah Pengantar* (Bandung: Program Pascasarjana UPI, 2003), h. 49.

rasa. Untuk mewujudkan hal tersebut lingkungan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif harus siap mengubah dan menyesuaikan sistem lingkungan dengan aktivitas yang berkaitan dengan semua orang dan mempertimbangkan kebutuhan semua warga sekolah tanpa deskriminasi. Bukan hanya warga pembelajar penyandang kebutuhan khusus saja yang harus menyesuaikan diri dengan setting yang ada. Untuk ini diperlukan fleksibilitas, kreativitas dan sensitivitas dalam mengelola nilai dan sikap sosial dalam kelas inklusif. Penting untuk mendorong dan mendukung anak yang berinisiatif, bertanya dan berbeda pendapat dengan orang lain dan membuat keputusan sendiri. Mengakui bahwa semua anak dapat belajar dan karenanya juga dapat mengambil manfaat dari pendidikan.<sup>35</sup>

#### **4. Luaran (*Outcome*)**

Evaluasi outcome dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa banyak lulusan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di Kota Banjarmasin yang melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktualisasi *outcome* di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di Banjarmasin yaitu SD Banua Anyar 8, SD Gadang 2, SD Banua Anyar 4, dan SD Kuin Selatan tingkat aktualisasinya termasuk dalam kategori tinggi. Dibuktikan melalui data yang diperoleh bahwa sebanyak 99% lulusan melanjutkan pendidikan ke sekolah penyelenggara

---

35 Skjorten, *Towards Inclusion, Education-Special Needs Education An Introduction* (Oslo: Unipub Forlag, 2001), h. 54.

pendidikan inklusif. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan anaknya menjadi pemicu tingginya *outcome* di Kota Banjarmasin. Selain itu terpicu dengan adanya program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, yang memang menjadi program unggulan Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan.

## BAGIAN 14

### PEMETAAN HASIL EVALUASI PROGRAM PENDIDIKAN INKLUSIF

Efektifitas implementasi program pendidikan inklusif, tingkat sekolah dasar di Kota Banjarmasin, terlihat pada pemetaan data yang diperoleh pada hasil analisis komponen *context*, *input*, *process*, *product* dan *outcome* sebagai berikut: SD Banua hanyar 8 pada komponen konteks bernilai (+,-,+,-) komponen input bernilai (+,+,+,+,+,+) komponen proses bernilai (+,+,+) komponen produk bernilai (+,+) komponen outcome bernilai (+).SD Gadang 2 pada komponen konteks bernilai (+,-,+,-) komponen input bernilai (-,+,+,+,-,-) komponen proses bernilai (+,+,+) komponen produk bernilai (+,-) komponen outcome bernilai (+).SD Banua Anyar 4 pada komponen konteks bernilai (+,-,+,-) komponen input bernilai (-,+,+,+,-,-) komponen proses bernilai (-,+,-) komponen produk bernilai (+,-) komponen outcome bernilai (+).SD Kuin Selatan 3 pada komponen konteks bernilai (+,-,+,-) komponen input bernilai (-,+,+,+,-,-) komponen proses bernilai (-,+,-) komponen produk bernilai (+,-) komponen outcome bernilai (+). Hasil evaluasi pelaksanaan pendidikan inklusif keempat SD di Kota Banjarmasin, mengacu kepada prototype kuadran Glikman, yang tertera pada gambar sebagai berikut:

Kuadran II					Kuadran I				
C	I	P	P	O	C	I	P	P	O
+	-	-	-	-	+	+	+	+	+
+	-	-	-	+					
+	-	-	+	+					
+	-	+	+	+					
-	+	+	+	+					
(Cukup Efektif)					(Sangat Efektif)				
Kuadran III					Kuadran IV				
C	I	P	P	O	C	I	P	P	O
-	-	-	-	-	+	+	+	-	-
					+	+	-	+	-
					+	+	-	-	+
					+	-	+	-	+
					+	-	-	+	+
					+	-	-	+	-
					+	+	+	-	-
					-	-	-	-	+
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
(Tidak Efektif)					(Kurang Efektif)				

Gambar 3.2. Pro

Gambar 4.7: Prototype Kuadran Glicman



Keterangan:

### **Kuadran I (sangat Efektif)**

Pada kuadran I (sangat efektif) menunjukkan semua komponen yang di evaluasi *kontekt, input, process, product, outcome* bernilai positif atau memenuhi kriteria evaluasi yang ditetapkan.

### **Kuadran II (Cukup Efektif)**

Pada kuadran I (cukup efektif) menunjukkan hampir semua komponen yang di evaluasi *kontekt, input, process, product, outcome* bernilai positif atau memenuhi kriteria evaluasi yang ditetapkan. Hanya salah satu dari kelima komponen tersebut bernilai negative (tidak sesuai dengan kriteria evaluasi)

### **Kuadran III (Tidak Efektif)**

Pada kuadran III (tidak efektif) menunjukkan semua komponen yang di evaluasi *kontekt, input, process, product, outcome* bernilai negative atau tidak memenuhi kriteria evaluasi yang ditetapkan. Kuadran II (Cukup Efektif)

### **Kuadran IV (kurang efektif)**

Pada kuadran IV (kurang efektif) menunjukkan kelima komponen yang di evaluasi *context, input, process, product, outcome* bterdapat lebih dari satu komponen yang bernilai negatif atau tidak memenuhi kriteria evaluasi yang ditetapkan dan komponen lainnya bernilai positif.

Berdasarkan hasil pemetaan seperti tampak pada gambar 4.7 di atas menunjukkan kriteria CIPPO (+ - + - -). Tanda “+” berarti sesuai dengan kriteria evaluasi atau efektif, dan tanda

“-“ berarti tidak sesuai dengan kriteria evaluasi atau tidak efektif. Jika dikonversikan kedalam kuadran prototype Glikman, maka efektivitas implementasi program pendidikan inklusif SD di Kota Banjarmasin terletak pada kuadran IV (keempat) atau kurang efektif atau kurang sesuai dengan kriteria evaluasi, artinya pada komponen *context* efektif (sesuai dengan kriteria evaluasi), pada komponen input tidak efektif (tidak sesuai dengan kriteria evaluasi), pada komponen proses efektif (sesuai dengan kriteria evaluasi), pada komponen product tidak efektif (tidak sesuai dengan kriteria evaluasi), dan pada komponen outcome efektif (sesuai dengan kriteria evaluasi). Dengan demikian, bahwa implementasi program pendidikan inklusif SD di Kota Banjarmasin tergolong kurang efektif atau kurang sesuai dengan kriteria evaluasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alimin, Zaenal. *Implementasi pendidikan inklusif di sekolah reguler* (Bandung: Rineka Cipta, 2006).
- Ansyar, Mohammad. *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum* (Jakarta: P2LPTK, 1989)
- BH, Johnsen. *Kurikulum untuk pluraritas kebutuhan belajar individu* (Bandung: Pasca Sarjana UPI Bandung, 2003).
- B.H, Johnsen. *Kurikulum untuk Pluralitas Kebutuhan Belajar Individual, Pendidikan Kebutuhan Khusus sebuah Pengantar*. (Bandung: Program Pasca Sarjana UPI, 2003).
- B.R. Worthen and James R. Sanders, *Educational Evaluation: Theory and Practice* (Belmont: Wadsworth Publishing Company, Inc, 1973).
- CRPD. *Convention on The Rights of People with Disability Konvensi Hak Penyandang Disabilitas Internasional*, 2004.
- Djaali, Puji Mulyono, dan Ramli, *Pengukuran Dalam Bidang Pendidikan* (Jakarta: PPs UNJ, 2000).
- D. Skorten, Marriam. *Menuju inklusi, Pendidikan Kebutuhan Khusus Sebuah Pengantar* (Bandung: Program Pasca Sarjana UPI Bandung, 2003).
- Fish jhon & Evan, *Managing Special Education* (Buckingham: USA Open University Pers, 1995).
- Fitzpatrick Jody, *Evaluation in action interviews With Expert Evaluators*( Losangeles: Sage Pubications,inc, 2005).

- George, F.Madaus, Michael S.Scriven, dan Daniel L.Stufflebeam. *Evaluation Models: Viewpoints on educational ang Human Services Evaluation* (Boston:Kluwer-Nijhoff Publishing, 1983).
- Lewis, Aiken. *Rating Skales and checklist Evaluation behavior personality and attitude* (Newyork: John wiley, 1966).
- Marhaeni, A.A.I.N. *Evaluasi Program Pendidikan* (Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha, 2007).
- Miles, Susie and Nidhi Singal. *The Education for All and inclusive education debate: conflict, contradiction or opportunity*. 1999.
- Mudjito : *Masyarakat Inklusif*: Jakarta: Direktorat PKLK , 2011.
- Popham, W.James. *Educational Evaluation* (New Jersey: Prentice-hall.Inch, 1987
- Sanders. James R. et all. *The program Evaluation Standards* (California: Sage Publication Inch, 1994).
- Sunardi. *Pendidikan Inklusif : Pra Kondisi dan Implikasi Managerialnya?*. Makalah pada Pertemuan Ilmiah Pendidikan Luar Biasa Tingkat Nasional (Bandung 6 – 8 Agustus, 2002).
- Sumarno, Studi Evaluasi: *Problem Dan Prospek*. Makalah seminar dan lokakarya Program studi teknologi pendidikan PPs UNJ, 2003
- Shepin, Shopan. *Managing Special Education* (USA: Open University Pers,1995).
- Sharmaa, Umesh. Chris Forlinb *Reforming Teacher Education for Inclusion in Developing Countries in the Asia-Pacific Region*, 2000.
- Sip J. Piji and Dorien Hamstra. *Assessing pupil development and*

*education in an inclusive setting*, 2006. Reference:

Stufflebeam.D.L. *The CIPP model for program evaluation*  
(Boston:Kluwer Nijhoff, 2003

Stufflebeam.D.L. *Evaluation model viewpoints on educational  
and human services evaluation* (Boston:Kluwer Academic  
Publishesr, 2001

Stufflebeam.D.L. *Evaluation theory, model & aplications*  
(Boston:Kluwer Academic Publishesr, 2001

Tayipnapis, Farida Yusuf. *Evaluasi Program* (Bandung: PT  
Remaja Rosdakarya, 2000.

## RIWAYAT HIDUP



Imam Yuwono, lahir di Pacitan 3 Agustus 1966, dari pasangan Giran dan Waiyem. Anak pertama dari empat bersaudara ini menempuh pendidikan di SD Negeri Gemaharjo I, SMP PGRI Gemaharjo, SPG Taman Siswa Pacitan. Tahun 1999 mengikuti tugas belajar pada Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Luar

Biasa (PGPLB) IKIP Yogyakarta.

Pada tahun 2004 menempuh pendidikan S2 pendidikan khusus di UPI Bandung bekerjasama dengan Universitas OSLO Norwegia. Pada tahun 2017 memperoleh gelar Doktor Penelitian dan Evaluasi Pendidikan dari Universitas Negeri Jakarta. Diangkat menjadi pegawai negeri tahun 1991 sebagai guru SD di Tapaling Kotabaru. Setelah lulus tugas belajar di IKIP Yogyakarta, pada tahun 2009 pindah menjadi guru SDLB Keraton Martapura. Pada tahun 2010 dimutasi menjadi guru SMPLB Keraton Martapura. Menjadi tim pengembang pendidikan inklusif Propinsi Kalimantan Selatan dan kota Palangkaraya dari tahun 2012 hingga sekarang. Pada tahun 2011 pindah menjadi dosen Pendidikan Luar Biasa di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dan masih aktif hingga sekarang.

Menikah dengan mojang priangan Een Marliani dan dikaruniai putri-putri tercinta, Naufal Imaulani, Fadhila Zahra Imaulani, Gaizani Adiva Imaulani.

Motto: Gunakan hidup ini untuk terus meningkatkan kebermanfaatan diri bagi sesama. Karena sebenarnya orang yang paling mulia disisi Allah adalah mereka yang paling banyak manfaatnya bagi sesama.